PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

1527–1977

KARYA JAYA

KENANG KENANGAN LIMA KEPALA DAERAH JAKARTA 1945 – 1966

KARYA JAYA

KENANG KENANGAN LIMA KEPALA DAERAH JAKARTA
1945 – 1966

PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

HAK CIPTA PADA PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 1977
DILARANG MENGUTIP DAN MEREPRODUKSI TANPA SEIJIN
PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

I S I

I S I III

Panitya Penyusun IV

KATA PENGANTAR
oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Let. Jen. TNI (Marinir) H. Ali Sadikin VI

IKHTISAR SEJARAH PEMERINTAHAN KOTA JAKARTA
oleh Sudiro 1

Riwayat Hidup Singkat Suwirjo 11

"MENGENANG SUWIRJO WALIKOTA PERTAMA JAKARTA"
oleh Mr. Supangkat dan Drs. Nurhadi S. 13

Riwayat Hidup Singkat Sjamsuridjal 51

"MENGENANG JASA SJAMSURIDJAL SEBAGAI WALIKOTA JAKARTA"
oleh Mr. Supangkat dan Drs. Idik Mutolib 52

Riwayat Hidup Singkat Mr. Supangkat 81

Riwayat Hidup Singkat Sudiro 83

"KALA ITU ....."
oleh Sudiro 85

Riwayat Hidup Singkat Henk Ngantung 149

"DIANTARA TEKANAN DAN KECURIGAAN"
oleh Henk Ngantung 151

Riwayat Hidup Singkat dr. H. Soemarno Sosroatmodjo 199

"MENGABDI DALAM KEADAAN YANG SUKAR"
oleh dr. H. Soemarno Sosroatmodjo 201

Kepustakaan 267

Sumber Foto 268

PANITIA PENYUSUN BUKU "KARYA JAYA"

Pengarah	:	R. Djoemadjitin SH, Hafiz Fatchurrahman, Ir. Piek Moeljadi, Drs. F. Hutasoit.
Kordinator	:	Ir. Piek Moeljadi.
Penyusun	:	Soedarmadji J.H. Damais.
Anggota	:	Mr. Supangkat, Drs. Idik Mutholib, Drs. Nurhadi S, Soewono Hadisoemarto, Harjoko Trisnadi, Abdurachman Surjomihardjo, Ir. W. Pragantha.
Dokumentasi	:	Soedarmadji J.H. Damais.
Perancang Grafis	:	S. Prinka, M. Dwitresno, H. Hudhoyo, Nur Asyikin. A
Dicetak oleh	:	PT. Pangeran Djajakarta Offset. 1977

KEPADA JAKARTA

Kukutuk kau dalam debu keringat kota
Karena dibalik keharuan paling dalam
Mengintip malaria

Kucintai kau kala senja
Mentari mengubur sinar menjirat bukit-bukit atap
Menari di kening-kening rumah, membelai perut sungai
Lalulintas bergegas, kelip lampu beca
Semua makin pudar, semua jadi samar
Lahir kembali dalam kecerlangan malam
Mengambang mobil-mobil hitam di aspal hitam

Kucinta kau dalam ketelanjangan malam
Penuh warna dalam keriangan gemilang
Sibuk dalam kelengangan arah
Menjauhi sudut jiwa paling sepi
Menyaruk menyaruk jalan menyusur kali
Becermin di permukaan air kemilau
Bulan rendah seolah terjangkau

Kucinta kau kalau dinihari
Redam batuk memecah sunyi
Dan nyanyian tukang beca
Mengadukan nasib pada langit
Dan bintang yang tak mau ngerti

Kucinta Jakarta
Karena kau kotakelahiran kedua

Ayip Rosidi (1955).

PENGANTAR

BUKU ini berisi kumpulan kenang-kenangan tentang masa jabatan para pendahulu saya, yakni masa jabatan para Kepala Pemerintahan Daerah di Jakarta sejak kita memperoleh Kemerdekaan pada tahun 1945.

Sebagian dari tulisan-tulisan itu, yakni yang menceritakan tentang masa jabatan almarhum Sdr. Suwirjo dan almarhum Sdr. Sjamsuridjal disusun oleh Mr. Supangkat. Sedang tulisan-tulisan lainnya disusun oleh bekas Kepala Pemerintahan Daerah yang bersangkutan sendiri.

Buku kenang-kenangan ini dikerjakan atas permohonan saya kepada Ibu Suwirjo, Ibu Sjamsuridjal, Sdr. Supangkat, Sdr. Sudiro, Sdr. Henk Ngantung dan Sdr. Dr. Soemarno Sosroatmodjo. Alhamdulillah, beliau semuanya telah menyanggupi untuk membantu.

Untuk itu melalui kesempatan ini saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih saya. Lebih-lebih karena saya mengetahui terbatasnya waktu yang tersedia ditengah-tengah kesibukan beliau-beliau itu.

Disusun dan diterbitkannya kumpulan tulisan-tulisan ini pertama dimaksud untuk ikut menandai genap 450 tahun usia kota Jakarta pada tahun ini, yang tepatnya jatuh pada tanggal 22 Juni 1977.

Saya merasa bahwa isi buku ini akan mempunyai manfaat yang besar untuk umum dan semua pihak yang mempunyai minat terhadap sejarah perkembangan kota ini.

Didalam tulisan ini kita akan berjumpa dengan pribadi pribadi yang saling berbeda, yang dihadapkan kepada situasi dan kondisi yang berbeda pula dan sudah barang tentu menghasilkan pemikiran dan kebijaksanaan yang tidak sama.

Tetapi di tengah-tengah segala perbedaan itu ada satu kesamaan kebijaksanaan yang menonjol. Semua Pemerintahan Daerah dan Kepala Pemerintahannya diwaktu yang lalu, waktu sekarang dan pada waktu-waktu selanjutnya, berkewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat kotanya secara sebaik-baiknya.

Maka pada hakekatnya semua Pemerintahan Daerah dan Kepala Pemerintahannya merupakan satu kontinuitas, dalam artian bahwa yang datang kemudian mau tidak mau harus bekerja dalam rangkaian matarantai kebijaksanaan pemberian pelayanan dari para pendahulunya.

Berdasarkan pengertian tersebut, kita harus mengakui bahwa Jakarta seperti adanya sekarang tidak timbul dari sesuatu kekosongan. Keadaan Jakarta sekarang serta arah dan gerak pembangunan yang berlangsung ini merupakan rangkaian hasil dari karya-karya maupun gagasan Pemerintahan Daerah dan Kepala Pemerintahannya terdahulu.

Dalam hubungan ini secara jelas ingin saya kemukakan disini bahwa alasan yang lebih dalam dari penerbitan buku ini adalah sebagai ungkapan penghargaan saya kepada para Kepala Pemerintahan Daerah yang terdahulu.

Bagi saya menyatakan penghargaan kepada para pendahulu saya ini saya rasakan *sebagai suatu kewajiban yang dituntut oleh kehendak nurani saya yang tulus.*

 Kewajiban ini saya fikir juga mengandung nilai-nilai sopan santun tradisionil kita yang

baik, malahan nilai-nilai sopan santun yang berlaku dimana-mana, yang menghukum sikap "habis manis sepah dibuang".

Saya juga menyadari betapa banyak nama-nama yang tidak dikenal telah membantu dengan cara, bakat dan kemampuan masing-masing sehingga menjadikan Jakarta seperti sekarang ini.
Juga kepada mereka, dalam rangka merayakan genap 450 tahun usia kota Jakarta, buku ini disusun dan dipersembahkan.

Sekian dan semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberkati kota ini Kepala Daerahnya dan segenap warganya.

Jakarta, 6 Januari 1977.–

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

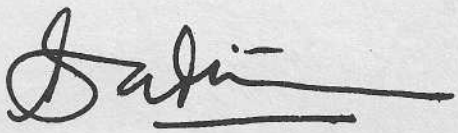

ALI SADIKIN
Letnan Jenderal TNI (Marinir)

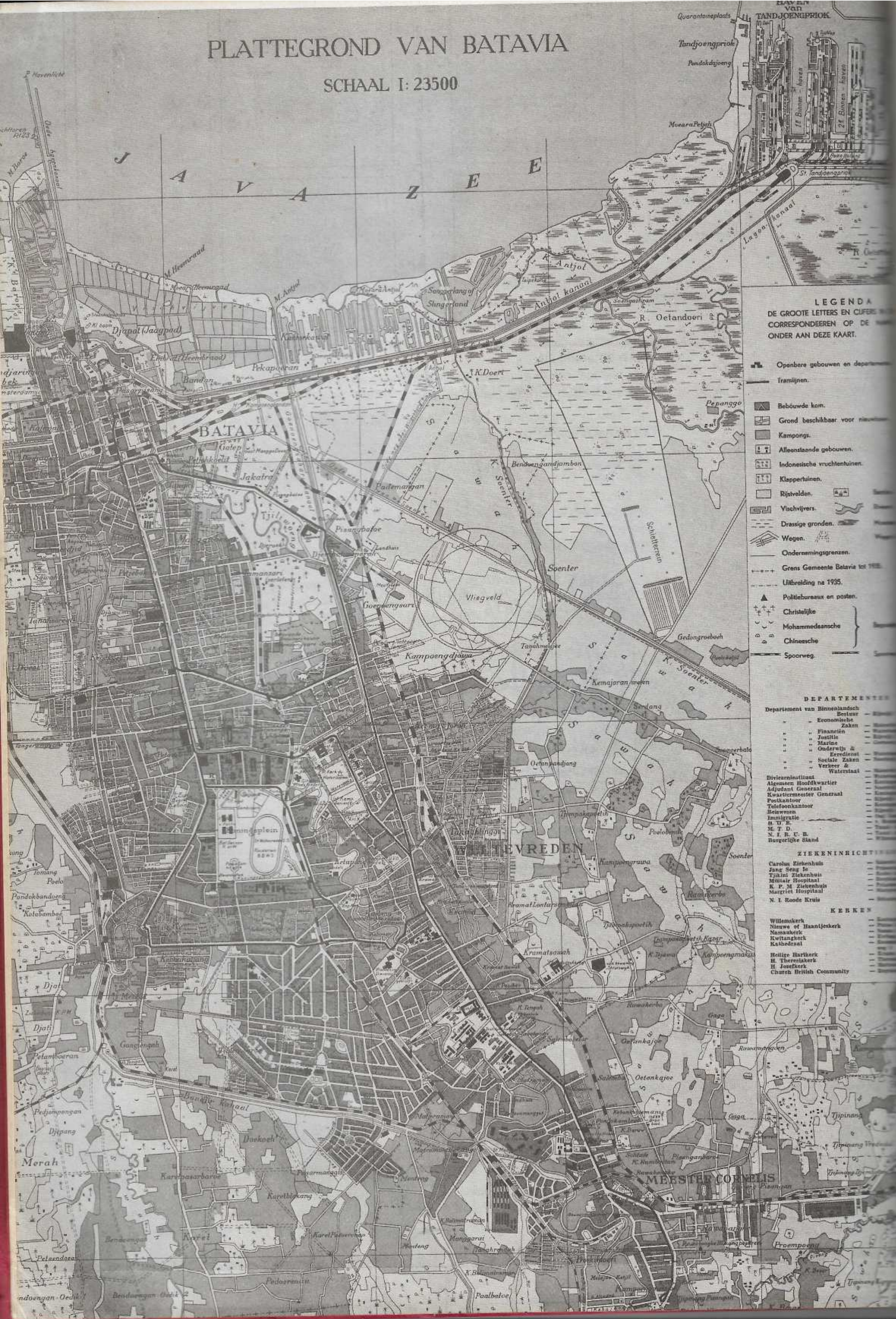
PLATTEGROND VAN BATAVIA
SCHAAL 1: 23500
JAVAZEE
HAVEN van TANDJOENGPRIOK
Tandjoengpriok
BATAVIA
WELTEVREDEN
MEESTER CORNELIS
Vliegveld
Koningsplein
Antjol kanaal
R. Oetandoeri
LEGENDA
DE GROOTE LETTERS EN CIJFERS
CORRESPONDEEREN OP DE
ONDER AAN DEZE KAART.
Openbare gebouwen en departementen
Tramlijnen.
Bebouwde kom.
Kampongs.
Alleenstaande gebouwen.
Indonesische vruchtentuinen.
Klappertuinen.
Rijstvelden.
Vischvijvers.
Drassige gronden.
Wegen.
Ondernemingsgrenzen.
Uitbreiding na 1935.
Politiebureaux en posten.
Christelijke
Mohammedaansche
Chineesche
Spoorweg.
DEPARTEMENTEN
ZIEKENINRICHTINGEN
KERKEN

IKHTISAR SEJARAH PEMERINTAHAN KOTA JAKARTA

DARI "GEMEENTE DAN STADSGEMEENTE BATAVIA" VIA "JAKARUTA TOKUBETSU SHI" SAMPAI PADA "PEMERINTAHAN NASIONAL KOTA JAKARTA".

SEJARAH Pemerintahan Kota Jakarta bukan hanya meliputi puluhan tahun saja, melainkan ratusan tahun sudah. Sungguh sangat menarik sekali, menelusuri sejarah Kota kesayangan kita ini. Yang nyatanya memang sudah berusia beberapa abad. Dan untuk meminjam kata-kata filosuf Cicero: "Sejarah adalah guru dari penghidupan dan pembawa berita dari masa yang lampau", maka saya yakin, bahwa catatan ini pasti masih akan ada gunanya bagi Generasi Penerus, betapa kurang lengkapnya-pun!

Setelah Fatahillah pada tahun 1527 mendirikan kota diatas puing-puing dari gedung-gedung Benteng Portugis, didekat muara Ciliwung, Negarawan itu segera pula menunjuk pembantu-pembantunya untuk memerintah kota baru, yang ia beri nama "Jayakarta". Bagaimana bentuk Pemerintahan Kota itu yang sesungguhnya, sayang sekali, kita tidak tahu secara tepat.

Kemudian setelah orang-orang Belanda pada permulaan abad ke-17, dengan cara-cara yang kurang wajar, berhasil mendirikan benteng di sekitar Teluk Jakarta, yang mereka beri nama "Batavia", mulailah berkobar pertentangan-pertentangan antara orang-orang Belanda dan orang-orang Indonesia.

Seringkali Gubernur Jenderal J.P. Coen disebut sebagai pendiri dari kota "Batavia". Historis ini tidak benar. Karena J.P. Coen sesungguhnya justru tidak setuju dengan nama "Batavia". itu. Dia ingin menamakan benteng itu: "Nieuw Hoorn", untuk mengingatkannya pada kota kelahirannya, yang terletak dalam Propinsi Holland Utara (Negeri Belanda). Yang memberi nama "Batavia" itu seorang pegawai V.O.C., bernama: Van Raay.

Pada masa Pemerintahan Hindia-Belanda dalam abad ke-19, "Stad (kota) Batavia" dengan daerah-daerah sekelilingnya merupakan suatu Karesidenan, yang dipimpin oleh seorang residen.

Daerah administratip Karesidenan Batavia ini dibagi pula secara administratip dalam lingkungan-lingkungan yang lebih kecil, yang disebut "afdeling".

Sampai permulaan abad ke-20, Karesidenan tersebut terdiri dari wilayah-wilayah sebagai berikut :

1. Afdeling "Stad en Voorsteden van Batavia" (Kota dan pinggiran kota Batavia),
2. Afdeling Meester Cornelis (sebutan sekarang: Jatinegara),
3. Afdeling Tanggerang,
4. Afdeling Buitenzorg (sebutan sekarang: Bogor), dan
5. Afdeling Krawang.

Afdeling "Stad en Voorsteden van Batavia" itu dikepalai oleh seorang Asisten-Residen. Afdeling ini dibagi lagi menjadi 4 distrik, yaitu: Penjaringan, Pasar Senen, Mangga Besar dan Tanah Abang. Termasuk pula dalam afdeling ini pulau-pulau diteluk Batavia dan sebelah Utaranya.

Jawatan yang pertama dibentuk oleh "Gemeente Batavia" yalah: Jawatan Kesehatan Kehewanan (1914), kemudian barulah: Jawatan Kesehatan Kota (1924).

Lambang dari "Gemeente Batavia", yang telah ditetapkan pada tahun 1911, umumnya masih meniru lambang "Stad Batavia" pada zaman V.O.C. dengan perobah-

an seperlunya. Yaitu sebuah lukisan: sebilah pedang pada suatu perisai. Pedang tersebut dihiasi dengan 2 dahan berdaun yang diikat dengan pita berwarna perak, tepat diatas gagang pedang. Diatas perisai ada mahkota berbentuk benteng kota. Dan dikanan kiri perisai berdiri 2 ekor singa, masing-masing kedua kaki depannya memegang perisai tersebut. Dibawah perisai ada tulisan emas berbunyi: "Dispereert niet" (jangan putus asa). Yaitu "lijfspreuk" (ucapan pribadi, yang sering digunakan atau dikutip) dari Gubernur-Jenderal J.P. Coen.

Pada tahun 1922 keluarlah Undang-undang tentang Pembaharuan Pemerintahan. Berdasarkan Undang-undang ini berturut-turut terbitlah :

1. Undang-undang Propinsi (1924),
2. Undang-undang Regentschap (Kabupaten, 1924),
3. Undang-undang Stadsgemeente (Stadsgemeente Ordonnantie, disingkat: S.G.O., 1926).

Sejak saat itu, "Gemeente Batavia" ditetapkan menjadi "Stadsgemeente Batavia", yang selanjutnya menyelenggarakan Pemerintahan Daerahnya menurut ketentuan-ketentuan dalam S.G.O.

Dengan Staatsblad 1925 No. 378 dibentuklah Propinsi West -Java (Jawa Barat). Dan pada tahun 1926, dengan lahirnya Stadsgemeente Batavia, yang meliputi Distrik Batavia dan Distrik Weltevreden, maka Daerah otonom ini berada setingkat dibawah Propinsi Jawa-Barat tersebut.

Menurut ketentuan-ketentuan dalam S.G.O., beberapa keputusan tertentu dari Stadsgemeente Batavia harus terlebih dahulu disahkan oleh Propinsi tersebut, sebelum dapat mulai berlaku. Misalnya keputusan tentang Anggaran Keuangan Stadsgemeente, beberapa macam pajak dan lain sebagainya.

S.G.O. menetapkan susunan Pemerintahan suatu Stadsgemeente terdiri dari:

1. Raad (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah),
2. College van Burgemeester en Wethouders (Dewan Pemerintah Daerah),
3. Burgemeester (Walikota);

atau hanya:

1. Raad,
2. Burgemeester.

Baru pada tahun 1926, menjelang terbentuknya Stadsgemeente Batavia, maka oleh beberapa anggota Dewan, diusulkan diadakan jabatan Wethouder, guna melaksanakan Pemerintahan Daerah. Terpilihlah pada akhir tahun 1926 itu 3 orang Wethouder oleh dan dari anggota Dewan, yaitu: Moh. Husni Thamrin (almarhum) dan 2 orang Belanda.

Berdasarkan Ordonansi (Undang-undang) tanggal 18 Maret 1905, maka pada tanggal 1 April 1905 Kota Batavia ditetapkan sebagai sebuah daerah lokal, yang mempunyai keuangan sendiri, lengkap berikut dewannya dengan nama: Gemeente Batavia. Ini adalah Gemeente yang pertama kali dibentuk di Hindia-Belanda.

Batas-batas wilayah Gemeente Batavia ini sama seperti batas-batas Ibu-negeri Batavia tersebut diatas, minus pulau-pulau yang ada di Teluk Batavia. Luasnya waktu itu ± 125 Km2.

Pada tahun 1908, untuk keperluan menjalankan pemerintahan Pamongpraja, Afdeling Stad en Voorsteden van Batavia dibagi menjadi 2 Distrik dan 6 Onderdistrik, yang dikepalai oleh para Wedana dan Assisten-Wedana.
Onderdistrik-onderdistrik dibagi lagi menjadi "Wijk-wijk", yang semuanya berjumlah 27 buah, dan masing-masing wijk dibagi lagi dalam kampung-kampung.

2 Distrik itu yalah: 1. Batavia, 2. Weltevreden.

6 Onderdistrik yalah: 1. Mangga Besar, 2. Penjaringan, 3. Tanjung Priok, 4. Gambir, 5. Senen, 6. Tanah Abang.

Dewan yang pertama, yang disebut: "de Gemeenteraad van Batavia", terdiri dari 25 orang anggota (15 orang Eropa atau mereka yang dipersamakan, 7 orang Bumiputera dan 3 orang Timur Asing).

Sebagai Ketua dari pada Gemeenteraad van Batavia, dalam Undang-undang pembentukan itu, telah ditunjuk "Hoofd van Plaatselijk Bestuur", yaitu Ascisten-Residen dari "afdeling Stad en Voorsteden van Batavia". Yang pertama kali menjabat itu yalah: Asisten-Residen Kreischer. Keadaan yang demikian itu berlangsung hingga tahun 1916. Barulah "Decentralisatie-Besluit" tahun 1904 diubah, sehingga memuat ketentuan, bahwa untuk "Gemeente" tertentu oleh Gubernur-Jenderal dapat diangkat seorang Ketua Dewan "Gemeente" tersendiri. Ketua Dewan yang diangkat itu memakai sebutan: Burgemeester (Walikota). Sedang jabatan Wethouder baru dimungkinkan setelah keluarnya Undang-undang tahun 1922.

Sebagai Burgemeester (Walikota) Batavia yang pertama, oleh Gubernur-Jenderal pada tahun 1916 telah diangkat: Mr. G.J. Bisschop (Jl. Taman Suropati dulu bernama: Burgemeester Bisshopplein). Disamping jabatan Burgemeester, ada pula jabatan "Loco-burgemeester" (pengganti atau Wakil Walikota).

Beberapa tokoh bangsa Indonesia, yang pernah duduk sebagai anggota Gemeente Batavia, yalah antara lain: Prof. Dr. Sardjito (almarhum), bekas Rektor Universitas Gajah Mada, Prof. Mr. Dr. Husein Djajadiningrat (almarhum), Sutan Moh. Zain (almarhum), Abdulmoeis (almarhum), dan yang paling terkenal: Moh. Husni Thamrin (almarhum), yang pernah pula menjabat Loco-burgemeester dari Batavia, merangkap anggota "Volksraad

Kantor Sekretariat Gemeente Batavia hingga tahun 1912 berada di Binnen Nieuwpoortstraat (Gedung Balaikota dari masa Pemerintahan V.O.C.). Kemudian dalam tahun 1913 pindah ke Tanah Abang Barat No. 35, dan sejak 1919 di Koningsplein Zuid 9 (sekarang Merdeka Selatan 9, yaitu Balaikota yang sekarang).

Para anggota Dewan tersebut dipilih untuk 4 tahun lamanya oleh penduduk Stadsgemeente, menurut ketentuan-ketentuan dalam "Undang-undang Pemilihan Gemeenteraden".

Disebelah Timur dari "Stadsgemeente Batavia" terletak "Stadsgemeente Meester Cornelis" (sekarang Jatinegara). Maka untuk memperluas wilayah Stadsgemeente Batavia, pada tanggal 1 Januari 1936, oleh Pemerintah Hindia-Belanda, "Stadsgemeente Meester Cornelis tersebut dihapuskan, dan wilayahnya digabungkan pada "Stadsgemeente Batavia". Dengan demikian, luas wilayah "Stadsgemeente Batavia" menjadi 182 km2.

Burgemeester Batavia yang terakhir (hingga tahun 1942) adalah: Ir Voorneman.

Anggaran Belanja Stadsgemeente Batavia pada tahun 1941 yalah ± 7,5 juta gulden, yang berarti 25 kali lebih besar dari pada Anggaran Belanja yang pertama dari Gemeente Batavia (tahun 1905).

Setelah tanggal 5 Maret 1942 kota Batavia jatuh ditangan Balatentara Jepang, dan pada tanggal 9 Maret 1942 Pemerintah Hindia-Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang, dikeluarkanlah oleh fihak Jepang: Undang-undang 1942 No.42 tentang "Perobahan tata Pemerintahan Daerah".

Menurut Undang-undang tersebut pula, Pulau Jawa dibagi dalam satuan-satuan Daerah yang disebut "Syuu" (Karesidenan). "Syuu" dibagi dalam beberapa "Ken" (Kabupaten) dan "Shi" (Stadsgemeente).

Suatu perobahan yang dilakukan oleh fihak Jepang mengenai Pemerintahan "Shi" (Stadsgemeente) yalah: Kalau dalam Stadsgemeente dulu hanya merupakan Badan yang mengurus rumah tangganya saja, tanpa melaksanakan urusan Pamongpraja, maka menurut Undang-undang tata Pemerintahan Daerah tersebut diatas ditetapkan, bahwa kini "Shi" mengerjakan segala Pemerintahan Daerah didalam lingkungan daerahnya. Urusan Pemerintahan (Pamongpraja) didalam Stadsgemeente yang diurus oleh Regent (Bupati), Wedana, Assisten-Wedana, Lurah, Kepala Kampung atau Wijkmeester, sekarang termasuk dalam kekuasaan "Shichoo" (Walikota). Mereka itu menjadi pegawai Shi dan menjalankan urusan Pemerintahan Shi dibawah perintah dan pimpinan "Shichoo".

Selanjutnya menurut Undang-undang tersebut diatas, "Gunseikan" (Kepala Pemerintahan Balatentara Jepang) dapat membentuk "Tokubetsu Shi" (Stadsgemeente luar biasa).

Bedanya antara "Tokubetsu Shi" dan "Shi" yalah, bahwa Tokubetsu Shi tidak merupakan Daerah Otonom dibawah Syuu, melainkan langsung dibawah Gunseikan. Dengan demikian, maka kedudukan Pemerintahan kota Jakarta telah meningkat lagi.

"Jakaruta Tokubetsu Shi" dipimpin oleh "Tokubetsu Shichoo dan beberapa orang "Zyoyaku" (Pegawai Tinggi), yang masing-masing diangkat pula oleh Gunseikan.

Kepala Stadsgemeente luar biasa ini juga memimpin dan mengawasi Keisatsusyochoo (Kepala Kantor Besar Polisi) didalam Tokubetsu Shi. Apabila "Tokubetsu Shichoo" berhalangan menjalankan kewajibannya, maka "Zyoyaku" mewakilinya. Sampai berakhirnya pendudukan Jepang dalam tahun 1945, kota Jakarta adalah satu-satunya "Tokubetsu Shi" di Indonesia. "Jakaruta Tokubetsu Shichoo" yang pertama yalah: Tsukamoto, dan yang terakhir: Hasegawa.

Dalam cara Pemerintahan Daerah dari Pemerintah Balatentara Jepang itu tidak ada lagi Dewan-dewan. Semua kekuasaan Pemerintahan Daerah berada di dalam tangan 1 orang (Pemerintahan Tunggal). Alasan untuk mengadakan Pemerintahan Tunggal, secara resminya oleh Pemerintah Balatentara Jepang diumumkan sebagai berikut:

"Undang-undang untuk sementara waktu tentang "Ken" dan "Shi" ini berbeda sama sekali dengan aturan Pemerintah Belanda dulu! Peraturan yang sekarang ini akan dicatat didalam sejarah Pemerintah Daerah untuk selama-lamanya! Sekarang Pemerintahan Shi dan Ken diubah sifatnya dengan maksud, agar supaya Daerah itu dapat bekerja dengan sebaik-baiknya. Yaitu antara lain dengan menghapuskan cara dahulu yang bermain demokrasi dan kemerdekaan bicara. Pikiran, untuk mengadakan badan Pemerintahan yang berdiri sendiri atas dasar liberalisme dan cita-cita untuk mendirikan Dewan Rakyat dimasing-masing Daerah, sekarang dilempar sejauh-jauhnya!". Demikianlah penegasan dari fihak Jepang.

Semua pengawasan terhadap "Jakaruta Tokubetsu Shi" ditetapkan oleh Gunseikan.

Pada tahun 1943 terjadi perobahan dalam sistim Pemerintahan Balatentara Jepang. Yaitu dengan dibentuknya semacam Badan Penasehat. Di Pusat disebut: "Chuoo Sangiin, dan di "Syuu" disebut: "Sangikai".
Juga "Jakaruta Tokubetsu Shi" mendapat: "Tokubetsu Shi Sangikai". Menurut keterangan Pemerintah waktu itu, tentang apa yang oleh fihak Jepang dinyatakan sebagai "hak turut mengambil bagian dalam Pemerintahan Negeri", dinyatakannya sebagai "hadiah atas keikhlasan dan usaha penduduk Jawa, karena suka bekerja bersama-sama dengan Balatentara Jepang!".

Adapun "hak" dari "Chuoo Sangiin" dan "Sangikai"(termasuk Tokubetsu Shi Sangikai) itu hanyalah:

1. Menyampaikan pertimbangan kepada "Gunseikan" atau "Syuuchookan" (dan Tokubetsu Shichoo) tentang hal-hal yang mengenai Urusan Pemerintahan Daerah, sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan pejabat itu.
2. Memajukan usul-usul kepada "Syuuchokan" atau "Tokubetsu Shichoo", untuk mempersembahkan kebaktian dan bantuan rakyat dalam hal Pemerintahan kepada Balatentara Dai Nippon.

Didalam prakteknya, pasal 2 tersebut diatas tidak pernah dilaksanakan oleh Badan Penasehat itu. Mungkin disebabkan kurang adanya keberanian pada fihak Badan Penasehat tersebut untuk itu: Giin (anggota) Jakaruta Tokubetsu Shi Sangikai tersebut diatas terdiri dari paling banyak 12 orang laki-laki (wanita tidak diperkenankan), dan berbangsa Indonesia (berbangsa asing tidak diperkenankan). Dari bangsa kita yang pernah menjabat Zyoyaku di Jakarta hanya ada 2 orang, yalah: Suwirjo (alm.) dan Dahlan Abdullah (alm.).

DARI "PEMERINTAHAN NASIONAL KOTA JAKARTA", MELALUI "KOTA-PRAJA JAKARTA RAYA" MENUJU KE "D.C.I./D.K.I.".

DALAM upacara Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, bertempat di Pegangsaan Timur (sekarang: Jln. Proklamasi) No. 56, dimana saya turut menghadiri dan turut pula menyelenggarakannya, Sdr. Suwirjo (alm.) bertindak sebagai Ketua Panitya. Dan pada waktu itulah beliau secara de-facto sudah kita akui dan anggap sebagai Walikota Jakarta. Istilah "Jakaruta Tokubetsu Shi' diganti dengan "Pemerintahan Nasional Kota Jakarta".

Pengangkatan "pak Wir" secara resmi sebagai Walikota Jakarta oleh Presiden R.I. baru berlangsung pada tanggal 29 September 1945. Setelah pada tanggal 2 Mei 1951 Sdr. Suwirjo ditunjuk sebagai Wakil Perdana Menteri R.I., maka Sdr. Mr. Suwahjo (alm.) bertindak sebagai pejabat Walikota, sampai tanggal 29 Juni 1951, ketika Sdr. Sjamsuridjal (alm.) diangkat oleh Presiden R.I. sebagai Walikota Jakarta Raya.

Kotapraja Jakarta-Raya.

TATKALA pada tanggal 21 Nopember 1947 Walikota Suwirjo bersama beberapa orang pejabat ditangkap dan kemudian diusir dari kota Jakarta oleh "Pemerintah Nica", maka - untuk sementara waktu - habislah kekuasaan Pemerintahan Nasional Kota Jakarta.

Tetapi pada tanggal 27 Desember 1949 Pemerintah Kerajaan Belanda terpaksa mengakui Kedaulatan Indonesia sebagai sebuah Negara yang berbentuk Federasi dengan sebutan: Republik Indonesia Serikat.

Bagi Stadsgemeente Jakarta tidak ada banyak perobahan. Hanya saja-sesuai dengan apa yang telah ditetapkan semula - Majelis Pemerintahan Kota Jakarta dan Badan Pemerintah Harian, pada tanggal 1 Maret 1950 meletakkan jabatannya.

Untuk menghindari kekosongan Pemerintahan, pada tanggal 22 Pebruari 1950 Presiden R.I. memutuskan, bahwa semua kekuasaan dan kewajiban yang menurut Undang-undang seharusnya dilakukan oleh Dewan Perwakilan Kota dan "College van Burgemeester en Wethouders" dari "Haminte-Kota Jakarta, untuk sementawra waktu diselenggarakan oleh Walikota, yang waktu itu masih dijabat oleh Mr. Sastromuljono. Hal ini tidak berlangsung lama! Karena pada akhir bulan Pebruari 1950, dengan persetujuan Kementerian Dalam Negeri R.I.S., dibentuklah "Panitya Tujuh", yang terdiri dari 7 orang tokoh, yalah: Suwirjo sebagai Ketua, dan sebagai anggota masing-masing: Supranoto, Mr. Sudjono, Mr. Jusuf Wibisono, Sjamsudin Saat, Mr. St. Takdir Ali Sjahbana dan B.R. Motik. Panitya ini bertugas, untuk dalam waktu singkat membentuk Majelis baru yang didalamnya duduk wakil-wakil dari aliran-aliran politik dan lainnya yang mencerminkan keadaan yang sebenarnya dari masyarakat Kota Jakarta pada saat itu.

Pada tanggal 9 Maret 1950 selesailah tugas Panitya Tujuh,yang menghasilkan:

1. Pemerintahan Kotapraja Jakarta, yang terdiri dari :
   a. Dewan Perwakilan Kota Sementara,
   b. Badan Pemerintah Harian,
   c. Walikota;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Sementara, yang terdiri dari 25 orang anggota. Walikota menjadi anggota merangkap Ketua. Anggota-anggota diangkat oleh Menteri Dalam Negeri;
3. B.P.H. terdiri dari Walikota sebagai anggota merangkap Ketua, dan 4 orang anggota lainnya, yang dipilih dari anggota-anggota D.P.K. Sementara;
4. Oleh karena diharapkan, bahwa pemilihan umum akan dapat segera diadakan, maka D.P.K. Sementara dan B.P.H. tersebut, hanya diberi masa kerja 3 bulan saja, tetapi selambat-lambatnya pada tanggal 1 Juli 1950 harus sudah meletakkan Jabatannya.

Keputusan Panitya Tujuh tersebut diatas disyahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I.S. tanggal 16 Maret 1950 No. B.J.3/4/13, terhitung mulai tanggal 15 Maret 1950.

Yang diangkat untuk pertama kali sebagai anggota B.P.H. yalah: Supranoto, Sardjono, Tabrani dan De Quelju. Dan pada tanggal 23 Maret 1950 Suwirjo diangkat oleh Presiden R.I.S. sebagai Walikota Jakarta lagi. Mr. Sastromuljono mengadakan timbang-terima kepada Suwirjo pada tanggal 30 Maret 1950. Disusul dengan penyerahan kekuasaan Pemerintahan pada tanggal 31 Maret 1950 dari Gubernur Distrik Federal (Gubernur Batavia en Ommelanden) kepada Walikota Suwirjo, sepanjang mengenai lingkungan wilayah Kotapraja itu, yang telah ditambah dengan beberapa wilayah baru, yaitu:

1. Pulau Seribu,
2. Onderdistrik Cengkareng,
3. Sebagian dari Distrik Kebayoran (Onderdistrik Kebonjeruk, Kebayoran ilir dan Kebayoran Udik), dan
4. Sebagian dari Distrik Bekasi (Onderdistrik Pulogadung dan sebagian dari Onderdistrik Cilincing).

Pemerintahan Kotapraja ini diatur dalam Undang-undang Daerah R.I.S. tanggal 13 Mei 1950, yang berlaku surut sampai tanggal 31 Maret 1950, dengan nama: "Undang-undang Pemerintahan Jakarta Raya".

Dengan batas-batas yang baru ini, maka luas wilayah Kotapraja Jakarta Raya menjadi ± 530 km2. Ini berarti 3 x seluas wilayah "Stadsgemeente Batavia" dulu.

Dengan terbentuknya Negara Kesatuan R.I., maka wilayah-wilayah dari bekas negara-negara bagian yang dibubarkan, tunduk pada "Undang undang Pokok tentang Pemerintahan Daerah tahun 1948 No. 22". Oleh karena pada waktu Negara Pasundan dibentuk - dan kemudian dibubarkan - menurut Undang-undangnya yang waktu itu berlaku, Kota Jakarta tidak termasuk didalamnya, maka kemudian pun Undang-undang tahun 1948 No.22 tersebut juga tidak berlaku untuk Kotapraja Jakarta. Secara yuridis Kotapraja Jakarta waktu itu tunduk pada suatu rangkaian Peraturan tersendiri, yaitu:

a. mengenai otonominya: berdasarkan S.G.O., 1926.
b. mengenai aparatur Pemerintahannya diatur dengan Keputusan Presiden R.I.S. 1950 No. 114 dan No. 125; dan
c. mengenai pembentukan, nama dan statusnya dengan Undang-undang Darurat 1950 No. 20.

Meskipun demikian, dalam prakteknya Kotapraja Jakarta-Raya, setelah terbentuknya R.I. Kesatuan, diperlakukan sesuai dengan Undang-undang 1948 No.22, dan Walikota Jakarta-Raya mempunyai kedudukan yang setingkat dengan para Gubernur dari segenap Propinsi diseluruh Indonesia.

Wilayahnya.

KALAU kota lainnya, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sebagian disebut: "Kota Besar" dan lainnya "Kota Kecil", maka Kota Jakarta adalah satu-satunya yang dengan resmi disebut: "Kotapraja".

Wilayahnya waktu itu terdiri dari: 6 Kawedanan, 20 Kecamatan dan 136 Kelurahan, yaitu:

I. **Kawedanan:**
   1. Penjaringan,
   2. Tanjung Priok,
   3. Gambir,
   4. Matraman,
   5. Kebayoran
   6. Kramatjati.

Keputusan Panitya Tujuh tersebut diatas disyahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I.S. tanggal 16 Maret 1950 No. B.J.3/4/13, terhitung mulai tanggal 15 Maret 1950.

Yang diangkat untuk pertama kali sebagai anggota B.P.H. yalah: Supranoto, Sardjono, Tabrani dan De Quelju. Dan pada tanggal 23 Maret 1950 Suwirjo diangkat oleh Presiden R.I.S. sebagai Walikota Jakarta lagi. Mr. Sastromuljono mengadakan timbang-terima kepada Suwirjo pada tanggal 30 Maret 1950. Disusul dengan penyerahan kekuasaan Pemerintahan pada tanggal 31 Maret 1950 dari Gubernur Distrik Federal (Gubernur Batavia en Ommelanden) kepada Walikota Suwirjo, sepanjang mengenai lingkungan wilayah Kotapraja itu, yang telah ditambah dengan beberapa wilayah baru, yaitu:

1. Pulau Seribu,
2. Onderdistrik Cengkareng,
3. Sebagian dari Distrik Kebayoran (Onderdistrik Kebonjeruk, Kebayoran ilir dan Kebayoran Udik), dan
4. Sebagian dari Distrik Bekasi (Onderdistrik Pulogadung dan sebagian dari Onderdistrik Cilincing).

Pemerintahan Kotapraja ini diatur dalam Undang-undang Daerah R.I.S. tanggal 13 Mei 1950, yang berlaku surut sampai tanggal 31 Maret 1950, dengan nama: "Undang-undang Pemerintahan Jakarta Raya".

Dengan batas-batas yang baru ini, maka luas wilayah Kotapraja Jakarta Raya menjadi ± 530 km2. Ini berarti 3 x seluas wilayah "Stadsgemeente Batavia" dulu.

Dengan terbentuknya Negara Kesatuan R.I., maka wilayah-wilayah dari bekas negara-negara bagian yang dibubarkan, tunduk pada "Undang undang Pokok tentang Pemerintahan Daerah tahun 1948 No. 22". Oleh karena pada waktu Negara Pasundan dibentuk - dan kemudian dibubarkan - menurut Undang-undangnya yang waktu itu berlaku, Kota Jakarta tidak termasuk didalamnya, maka kemudian pun Undang-undang tahun 1948 No.22 tersebut juga tidak berlaku untuk Kotapraja Jakarta. Secara yuridis Kotapraja Jakarta waktu itu tunduk pada suatu rangkaian Peraturan tersendiri, yaitu:

a. mengenai otonominya: berdasarkan S.G.O., 1926.
b. mengenai aparatur Pemerintahannya diatur dengan Keputusan Presiden R.I.S. 1950 No. 114 dan No. 125; dan
c. mengenai pembentukan, nama dan statusnya dengan Undang-undang Darurat 1950 No. 20.

Meskipun demikian, dalam prakteknya Kotapraja Jakarta-Raya, setelah terbentuknya R.I. Kesatuan, diperlakukan sesuai dengan Undang-undang 1948 No.22, dan Walikota Jakarta-Raya mempunyai kedudukan yang setingkat dengan para Gubernur dari segenap Propinsi diseluruh Indonesia.

Wilayahnya.

KALAU kota lainnya, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sebagian disebut: "Kota Besar" dan lainnya "Kota Kecil", maka Kota Jakarta adalah satu-satunya yang dengan resmi disebut: "Kotapraja".

Wilayahnya waktu itu terdiri dari: 6 Kawedanan, 20 Kecamatan dan 136 Kelurahan, yaitu:

I. **Kawedanan:**
   1. Penjaringan,
   2. Tanjung Priok,
   3. Gambir,
   4. Matraman,
   5. Kebayoran
   6. Kramatjati.

II. Kecamatan:
1. Cengkareng,
2. Penjaringan,
3. Krukut,
4. Manggadua,
5. Sawah Besar,
6. Tg. Priok,
7. Gambir,
8. Tanah Abang,
9. Petamburan,
10. Matraman,
11. Senen,
12. Salemba,
13. Pulogadung,
14. Kebayoran,
15. Kebonjeruk,
16. Kamp. Melayu,
17. Mampang Prapatan,
18. Pasar Minggu,
19. Pasar Rebo,
20. Pulau Seribu.

III. Kelurahan:
1. Kalideres,
2. Pegadungan,
3. Kamal,
4. Benda,
5. Cengkareng,
5. Tegal Alur,
6. Kapuk.
7. Kedung Kali Angke
8. Cengkareng,
9. Penjaringan,
10. Krukut,
11. Angkeduri,
12. Manggadua,
13. Kebonjeruk,
14. Kebon Kelapa,
15. Pasar Baru/ Gunung Sahari,
16. Tanjung Priok,
17. Jembatan Tinggi,
18. Cilincing,
19. Semper,
20. Sunter,
21. Gambir,
22. Menteng,
23. Tanah Abang,
24. Karet,
25. Petojo,
26. Jati,
27. Slipi,
28. Palmerah,
29. Solitude,
30. Utan Kayu,
31. Jatirawamangun,
32. Pisangan,
33. Rawabangke,
34. Senen,
35. Kemayoran,
36. Salemba,
37. Rawasari,
38. Kramat,
39. Tanah Tinggi,
40. Jatinegara,
41. Rawaterate,
42. Petukangan,
43. Penggiling,
44. Pegangsaan,
45. Melaka,
46. Pulogadung,
47. Pondok Kelapa,
48. Kalender,
49. Durensawit,
50. Pondok Bambu,
51. Tanah Delapan,
52. Muara,
53. Kampung Besar,
54. Kampung Sumur,
55. Kebayoran,
56. Cipulir,
57. Grogol Udik,
58. Grogol Ilir,
59. Senayan,
60. Gandaria Ilir,
61. Gandaria Udik,
62. Pela Petogogan,
63. Cipete Ilir,
64. Cipete Udik,
65. Pondok Pinang,
66. Lebak Bulus,
67. Cilandak,
68. Pondok Labuh,
69. Kebonjeruk,
70. Serengseng,
71. Meruya Ilir,
72. Meruya Udik,
73. Kembangan,
74. Kedoya,
75. Duri,
76. Joglo,
77. Kelapa Dua,
78. Sukabumi Ilir,
79. Sukabumi Udik,
80. Melayu Besar,
81. Bukitduri,
82. Bidaracina,
83. Balimester,
84. Matraman,
85. Mampang Prapatan,
86. Mampang Tegal-Parang,
87. Bangka,
88. Kuningan,
89. Pancoran,
90. Kalibata Durentiga,
91. Cililitan Rawajati,
92. Pengadegan,
93. Cikoko,
94. Kampung Dalem,
95. Cilandak,
96. Serengseng Sawah,
97. Ragunan,
98. Jatipadang,
99. Ciganjur,
100. Pasar Minggu,
101. Kalibata Lenteng Agung,
102. Lenteng Agung,
103. Pejaten,
104. Jagakarsa,
105. Tanjung Barat,
106. Makasar,
107. Kramatjati,
108. Cipinang Melayu,
109. Dukuh,
110. Lobang Buaya,
111. Condet Balekambang,
112. Kampung Tengah,

113. Kampung Gedong,
114. Kampung Rambutan,
115. Kampung Susukan
116. Cijantung,
117. Ciracas,
118. Gandaria Udik,
119. Kampung Ceger,
120. Kampung Baru,
121. Bambu Apus,
122. Cipayung,
123. Kelapa Dua,
124. Cibubur,
125. Munjal,
126. Kalimati,
127. Kampung satu,
128. Cilangkap,
129. Pondok Rangon,
130. Cawang,
131. Batuampar,
132. Kebon Pala,
133. Pulau Panggang,
134. Pulau Tidung,
135. Pulau Kelapa,
136. Pulau Ubi,

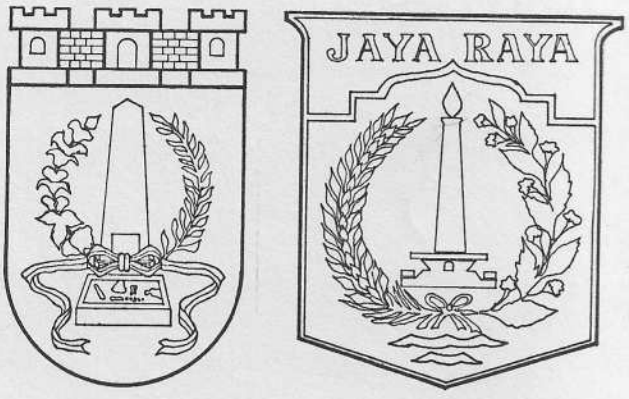
JAYA RAYA

SUWIRJO.

Lahir di Pracimantoro, 17 Pebruari 1903; Wafat di Jakarta, 27 Agustus 1967
Walikota Jakarta 29 September 1945 – 21 Juli 1947
Walikota Jakarta Raya 30 Maret 1950 – 2 Mei 1951

RIWAYAT HIDUP SINGKAT

SUWIRJO, lahir di Pracimantoro, Kab. Wonogiri pada tanggal 17 Pebruari 1903. Setelah selesai HIS (Hollands Inlandse School) belajar di MULO (Meer Uitgebred Lager Onderwijs) di Madiun. Kemudian masuk AMS (Algemene Middelbare School di Yogyakarta dan mencatatkan diri sebagai mahasiswa Rechtshogeschool di Betawi.

Sejak di sekolah menengah ia telah menjadi anggauta Jong Java, kemudian di Jakarta menjadi anggauta Indonesia Muda, yang telah didirikan pusatnya di Bandung atas prakarsa Ir. Sukarno dan kawan-kawannya, kemudian menjadi Anggauta PNI. Setelah PNI dibubarkan Suwirjo menjadi anggauta pengurus besar Partindo.

Di Jakarta ia tinggal di kompleks gedung Universitas Rakyat "Perguruan Rakyat" sebagai wakil direktur dan guru setelah Suwirjo dipecat sebagai redaktur komisi Biro Statistik karena kegiatan politiknya.

Setelah Partindo juga dibekukan, maka bersama Mr. Sartono dan Njonoprawoto, Suwirjo menerbitkan majalah"Kemudi"di Bogor. Tahun 1940 meninggalkan Bogor, kemudian menetap di Cepu membuka toko buku dan obat-obatan.

Sebelum Jepang mendarat di Indonesia, ia kembali ke Jakarta dan pada jaman pendudukan Jepang membantu kantor Pusat Tenaga Rakyat (Putera), yang kemudian menjadi Jawa Hookookai (Kebaktian Rakyat Jawa). Kedua organisasi itu merupakan pusat kegiatan kaum nasionalis, yang dipimpin oleh Ir. Sukarno. Suwirjo memegang jabatan sebagai kepala urusan Ekonomi, kemudian oleh pimpinan Jawa Hookookai ditempatkan sebagai wakil pertama Wali Kota Jakarta berbangsa Jepang, Hasegawa.

Suwirjo lah yang mengambil alih pemerintahan kota setelah Proklamasi Kemerdekaan dan menjabat Walikota Jakarta (1945 - 1947). Pada permulaan Aksi Militer Belanda Pertama (21 Juli 1947) Suwirjo diangkap dan ditawan oleh tentara Belanda. Bersama tawanan politik lainnya dibawa keperbatasan daerah Republik antara Semarang - Kedu. Dengan kereta api khusus dibawa dari Magelang ke Yogyakarta. Kedatangan para tawanan politik (12 orang) mendapat sambutan meriah. Panglima Besar Soedirman menyambut Suwirjo di setasiun Tugu dengan mobilnya. Didampingi oleh Mr. Supangkat ia melapor kepada Presiden R.I. dan diperbantukan kepada Perdana Menteri Hatta sebagai pemimpin Biro Kabinet Urusan Daerah Pendudukan.

Dalam aksi Militer Belanda ke-II ia ditangkap kembali dan dipenjarakan di penjara Wirogunan. Menjelang pemulihan kedaulatan, Suwirjo mendapat tugas dari pemerintah untuk mengkoordinasi jawatan-jawatan Republik di Jakarta dan kembali menjadi Wali Kota Jakarta Raya (1950 – 1951). Setelah itu selama setahun menjadi wakil Perdana Menteri dalam Kabinet Sukiman-Suwirjo. Sejak tahun 1956 menjadi ketua PNI, anggauta Konstituante MPRS, anggauta Dewan Pertimbangan Agung (1959) hingga wafatnya pada tanggal 27 Agustus 1967.

Beliau adalah Perintis Kemerdekaan, dan mendapat Bintang Mahaputera kelas III.

(ARS)

MENGENANG SUWIRJO WALIKOTA PERTAMA JAKARTA

Oleh: Mr. Soepangkat.

GAGASAN untuk mengabadikan dalam sebuah karangan jasa-jasa Kepala Daerah-Kepala Daerah Kota Jakarta yang berturut-turut memegang jabatan itu sejak Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia 17 Agustus 1945, datangnya dari Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Haji Ali Sadikin, Letnan Jenderal TNI Marinir. Buku tentang pejabat-pejabat itu, maksudnya, diterbitkan dalam rangka Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, bersama-sama rakyat Indonesia, penduduk kota Jakarta, merayakan 450 tahun berdirinya kota Jakarta pada 22 Juni 1977.

Saya mendapat kehormatan diserahi tugas oleh Gubernur Haji Ali Sadikin untuk membantu menyusun naskah karangan yang menyangkut masa jabatan walikota Jakarta yang pertama Suwirjo almarhum, sebagai salah satu pembantu yang terdekat Suwirjo: – sejak detik Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, sebagai pegawai pamongpraja di wilayah kota Jakarta; – setelah pemulihan kedaulatan, sebagai sekretaris kota.

Dalam penyusunan karangan ini saya menggunakan manuscript tentang Walikota Suwirjo dari Drs. Nammang Pacellengi yang disampaikan kepada saya oleh Sdr. G.A. Warmansjah, B.A., Kepala Dinas Museum dan Sejarah Pemerintah DKI Jakarta, sebagai titik tolak, dibantu oleh Drs. Nurhadi S., kedua-duanya pegawai pada Dinas tersebut.

Karangan bersumber kepada: 1) keterangan-keterangan lisan yang saya dapat dari Ibu Purnami Indiah Suwirjo, janda almarhum, 2) keterangan-keterangan lisan dari adik kandung Suwirjo, Ibu Suparto, 3) D.A. Winoto dan Mr. Wilopo, teman-teman separtai Suwirjo, 4) Dra. Jo Masdani, 5) a. Rangkaian Penerbitan resmi Kementerian Penerangan, Buku yang mengenai Kotapraja Jakarta Raya, b. Sejarah Pemerintah Kota Jakarta, penyusun The Liang Gie, diterbitkan oleh Kotapraja Jakarta Raya, tahun 1958, 6) penerbitan luar negeri: a. Nationalism and Revolution in INDONESIA karangan George McTurnan KAHIN, terbitan Cornell University Press, Ithaca, New York, b. The Formation of Federal Indonesia, karangan A. ARTHUR SCHILLER, Professor of Law, Columbia University, School of Law, penerbitan W. van Hoeven Ltd/The Hague, Bandung, 1955.

Saya sampaikan terima kasih kepada mereka semua yang namanya saya sebut diatas.

Saya mohon maaf atas kekurangan-kekurangan dalam karangan ini, yang disusun dalam waktu yang singkat.
Kritik-kritik dan bahan-bahan untuk penyempurnaan akan saya terima dengan segala senang hati.-

PENDAHULUAN

DALAM mengenangkan kembali jasa-jasa Suwirjo sebagai Walikota pertama kota Jakarta dalam alam kemerdekaan tanah air, sejak Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, perlu diadakan pentahapan kejadian-kejadian bersejarah yang melibatkan dirinya dalam penegakan Pemerintahan Nasional kota Jakarta. Kejadian-kejadian itu merupakan bagian yang penting dalam rangkaian peristiwa-peristiwa di tanah air, yang akhirnya mendudukkan bangsa Indonesia dalam negara yang merdeka, sejajar dengan bangsa-bangsa merdeka yang lain di dunia.

Kota Jakarta sepanjang masa akan tercatat sebagai kota proklamasi, Ibukota Republik Indonesia, yang berkat perjuangan rakyat Indonesia di Jakarta di bawah pimpinan Suwirjo, pada permulaan perwujudannya, berhasil ditegakkan, dibela dan dipertahankan sebagai Pemerintahan Daerah di bawah naungan Republik Indonesia, berdasarkan Undang-undang Dasar 1945.

Tahap Pertama.
Sejarah mencatat Suwirjo sebagai pemegang pimpinan dalam penyelenggaraan tempat di mana kemerdekaan bangsa Indonesia oleh pimpinan Revolusi diproklamasikan.

Tahap Kedua.
Sejarah dengan maksud Proklamasi, Suwirjo mengambil tanggungjawab untuk mengemudikan pemerintahan kota Jakarta sebagai Pemerintahan Nasional kota Jakarta, tanpa tenaga bangsa Jepang di dalamnya.

Susunan aparatur pemerintahan kota ia sesuaikan dengan keperluan untuk menghadapai situasi dan kondisi kota Jakarta dalam pergolakan Revolusi.

Pegawai-pegawai bangsa Indonesia kota Jakarta yang menyelenggarakan tugas pada jaman Jepang, mentalnya ia persiapkan untuk menghadapi tugas baru dalam pemerintahan daerah kota Jakarta yang berat dengan semangat pengabdian, sanggup mengorbankan, segala-galanya untuk kepentingan bangsa, rakyat dan negara yang baru diproklamasikan kemerdekaannya.

Tugas pimpinan pemerintahan kota Jakarta dalam masa pergolakan Revolusi di wilayah kota Jakarta ini, ia jalankan dengan sepenuhnya taat kepada instruksi-instruksi Pemerintah Pusat hingga Suwirjo ditangkap oleh pihak Belanda dalam Aksi Militer I pada tanggal 21 Juli 1947.

Tahap Ketiga.
Setelah pemulihan kedaulatan Suwirjo kembali memegang tampuk pimpinan pemerintahan daerah kota Jakarta dalam situasi dan kondisi yang sangat berbeda (berlainan): status hukum dan organisasi pemerintahan daerah, warisan pemerintahan prefederal yang pada pokoknya kembali kepada kedudukan hukum pemerintahan kota dari jaman sebelum Perang Dunia II, berdasarkan ketentuan-ketentuan "Stadsgemeente Ordonnantie 1926".

Pada tanggal 2 Mei 1951 Suwirjo diangkat menjadi Wakil Perdana Menteri dalam Kabinet Sukiman - Suwirjo. Dengan demikian maka berakhirlah karier Suwirjo dalam pemerintahan kota Jakarta.

Mereka, kawan ataupun lawan, yang mengenal dari dekat Suwirjo, yang berbadan kecil, pendiam dan amat sederhana dalam kehidupannya itu, -- hingga akhir hayatnya

Suwirjo tergolong orang yang tidak punya, -- tertarik oleh wataknya yang jujur, setiakawan, berbudi halus terhadap kawan maupun lawan ideologinya, setia dan konsekwen dalam mengabdi kepada cita-citanya sebagai nasionalis sejati, orang yang satu dalam kata dan perbuatan. Sekalipun cerdas, bukan orang yang brilyan seperti misalnya Amir Sjarifuddin. Sebaliknya teguh pada pendirian yang ia anggap menguntungkan bagi rakyat dan bangsa Indonesia, yang ia bela terhadap siapapun dan dalam kedudukan apapun.-

SUWIRJO WALIKOTA PERTAMA KOTA JAKARTA.

Suwirjo Sebagai Penyelenggara Upacara Proklamasi Kemerdekaan.

MENJELANG meletusnya revolusi pada bulan Juli 1945, pemimpin-pemimpin Indonesia yang tergabung didalam PUTERA, yang kemudian oleh penguasa Jepang dirubah namanya menjadi Jawa Hookookai, berhasil mempengaruhi penguasa Jepang yang berkuasa di Jakarta agar mau menempatkan Suwirjo sebagai wakil I (Joyaku I) dan Bagindo Dahlan Abdullah sebagai wakil III (Joyaku III) "Tokubetsu Shityo". Shityonya adalah Hasegawa dan wakil II (Joyaku II) seorang Jepang.

Dalam kedudukannya sebagai wakil walikota Suwirjo mendapat keleluasaan dalam hubungan dengan rakyat kota Jakarta.

Berita tersiar dan sampai kepada organisasi-organisasi di bawah tanah pada tangal 10 Agustus 1945 bahwa Jepang telah atau sedang berkapitulasi kepada Sekutu. Berita ini oleh Suwirjo disampaikan kepada rakyat dalam suatu pertemuan. Dengan mengeluarkan pengumuman ini ia mengambil resiko atas dirinya terhadap tentara Jepang yang masih berkuasa. Memang, karena menyiarkan berita itu, kemudian berurusan dengan kempetai, yang meminta tanggungjawab atas perbuatannya. Untung Suwirjo masih dapat mengelakkan tindakan terhadapnya.

Berita tentang kekalahan Jepang itu menggerakkan organisasi-organisasi di bawah tanah untuk mempersiapkan perlawanan terhadap tentara Jepang, bilamana Sekutu mendarat di pantai Indonesia. Desakan diadakan oleh mereka agar Sukarno - Hatta segera mengumumkan kemerdekaan Tanah air dan Bangsa.

Karena belum yakin akan kebenaran berita itu dan atas pertimbangan-pertimbangan lain, antaranya, apakah kita telah cukup kuat untuk menghadapi tentara Jepang yang masih bersenjata lengkap, kedua pemimpin Indonesia itu bersikap ragu-ragu, sehingga mengakibatkan mereka diculik oleh para pemuda dan dibawa ke Rengasdengklok. Tentara Jepang yang mengetahui gerak-gerik itu, bersikap waspada dan siap siaga.

Setelah Sukarno - Hatta dapat diyakinkan, dapatlah mereka kembali ke Jakarta untuk mengadakan persiapan bagi Proklamasi Kemerdekaan. Hal ini hanya dapat dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh tentara Jepang. Tempat dimana proklamasi akan dilaksanakan, menjadi tugas Suwirjo untuk mempersiapkannya.

Rencana semula untuk menyelenggarakan upacara tersebut di lapangan Ikada Gambir dibatalkan. Hal ini disebabkan karena maksud ini telah tercium oleh pihak tentara Jepang. Massa rakyat yang berbondong-bondong datang ke tempat dimana Proklamasi Kemerdekaan akan diucapkan, yang semula direncanakan untuk dilakukan di lapangan Ikada Gambir itu masih sempat disalurkan ke Pegangsaan Timur No. 56, walaupun perobahan tempat upacara ini dikeluarkan secara mendadak. Berkat kerja sama yang erat dan disiplin yang teguh para pemuda Barisan Pelopor yang mencegat aliran rakyat dari segala penjuru yang menuju ke lapangan Ikada, maka massa rakyat dapat disalurkan ke Pegangsaan Timur No. 56.

Pimpinan yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan upacara Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ini adalah Suwirjo, dibantu dengan Petunjuk dan nasehat kawan-kawannya seperjuangan, seperti, Mr. Moehammad Roem, Mr. Wilopo dan tenaga fisik Barisan Pelopornya Sukardjo Wirjopranoto, yang dipimpin oleh Dr. Muwardi. Pembicara-pembicara dalam upacara adalah Dr. Muwardi, disusul oleh Suwirjo sebagai wakil pemerintahan nasional kota Jakarta, kemudian Bung Hatta..

Setelah itu segera mendengung suara Bung Karno, membacakan teks Proklamasi, yang naskahnya sudah dipersiapkan terlebih dahulu, pada detik bersejarah jam 10 pagi yang cerah, tanggal 17 Agustus 1945. Melalui radio, Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia kemudian disiarkan ke seluruh penjuru Tanah Air dan seluruh penjuru dunia, atas usaha Bung Hatta dan kawan-kawannya serta bantuan para pegawai bangsa Indonesia di Kantor Berita "Domei", Jakarta.

Pemuda-pemuda bergerak untuk menempelkan plakat-plakat Proklamasi di mana saja, di pohon-pohon di pinggir jalan, di tembok-tembok gedung-gedung dan pagar-pagar di seluruh kota Jakarta.

Orang-orang Jepang yang telah memberi bantuan dalam penyelenggaraan Proklamasi itu, oleh penguasa Jepang ditangkap dan dipenjarakan. Penguasa Jepang bertindak demikian, karena sebagai bangsa yang kalah perang, bertanggungjawab kepada Sekutu untuk mempertahankan "status quo" hingga penyerahan bumi Indonesia yang mereka duduki kepada Sekutu.

Peralihan Pemerintahan Kota Jakarta dari Penguasa Jepang Dalam Tangan Indonesia dan Pembentukan Nasional. Kota Jakarta.

SETELAH Proklamasi, apakah tindakan selanjutnya yang harus diambil? Ternyata bahwa Proklamasi di seluruh pelosok tanah air menyentuh hati nurani rakyat sedalam-dalamnya.

Undang-Undang Dasar pada hari berikutnya, sesudah Proklamasi, ditetapkan dan diumumkan. Pasal 18 Undang-Undang Dasar merupakan dasar hukum bagi Pemrintahan Daerah Republik Indonesia. Mendahului tindakan-tindakan kebijaksanaan Pemerintah Pusat yang telah terbentuk, Suwirjo mengambil langkah-langkah untuk mendudukkan Pemerintahan Nasional Kota Jakarta, mengganti Pemerintahan "Jakaruta Tokubetsu Shi".

Mengenai peralihan Pemerintahan Kota Jakarta dari Jepang Ke Pemerintahan Nasional Indonesia ini, tercatat dalam arsip Balai Kota hal ikhwalnya sebagai berikut : Di kalangan para organisasi (bangsa Indonesia Peny.) "Jakaruta Tokubetsu Shi" timbullah usaha-usaha agar kekuasaan dari tangan pejabat-pejabat Jepang berpindah kepada orang-orang Bangsa Indonesia. Oleh para pegawai itu lalu dibentuk sebuah panitya yang diketuai oleh Martaamidjaja, dengan maksud untuk mengoperkan tanggungjawab atas "Jakarta Tokubetsu Shi" dari tangan Hasegawa kepada Suwirjo.

Pada tanggal 7 September 1945 panitia tersebut menyelenggarakan rapat besar yang dikunjungi oleh seluruh pegawai (pegawai Indonesia, Peny.). "Jakaruta Tokubetsu Shi". Rapat mengambil keputusan bahwa tanggungjawab atas "Jakaruta Tokubetsu Shi" harus diserahkan kepada Suwirjo. Pada malam harinya pergilah satu delegasi yang mewakili seluruh pegawai kerumah Hasegawa untuk meminta secara damai, agar pembesar Jepang tersebut suka menyerahkan kekuasaan dan tanggungjawab atas Pemerintahan Kota Jakarta kepada Suwirjo. Permintaan tidak dikabulkan, tetapi pada keesokan harinya dan hari-hari berikutnya Hasegawa tidak masuk kantor lagi. Pimpinan Pemerintahan Kota selanjutnya dipegang oleh Suwirjo dengan Suratno Sastroamidjojo sebagai sekretaris. Nama pemerintahan tidak lagi "Tokubetsu Shi" akan tetapi diganti menjadi Pemerintahan Nasional Kota Jakarta. Semua kepala jawatan/bagian kemudian mengangkat sumpah di ruangan Balai Kota, menyatakan setia kepada Pemerintah Republik Indonesia dan kepada Pemerintah Nasional Kota Jakarta. Dengan adanya perubahan itu semua pegawai Bangsa Jepang kemudian mengundurkan diri dan tidak masuk kantor lagi.

Sementara belum ada ketetapan resmi dari pemerintahan pusat, pimpinan Pemerintahan Kota Jakarta dijalankan oleh Suwirjo sebagai pemimpin umum. Wakil adalah Bagindo Dahlan Abdullah, Suratno Sastroamidjojo Sekretaris.

Pada tanggal 29 September 1945, bertepatan dengan mendaratnya Tentara Sekutu

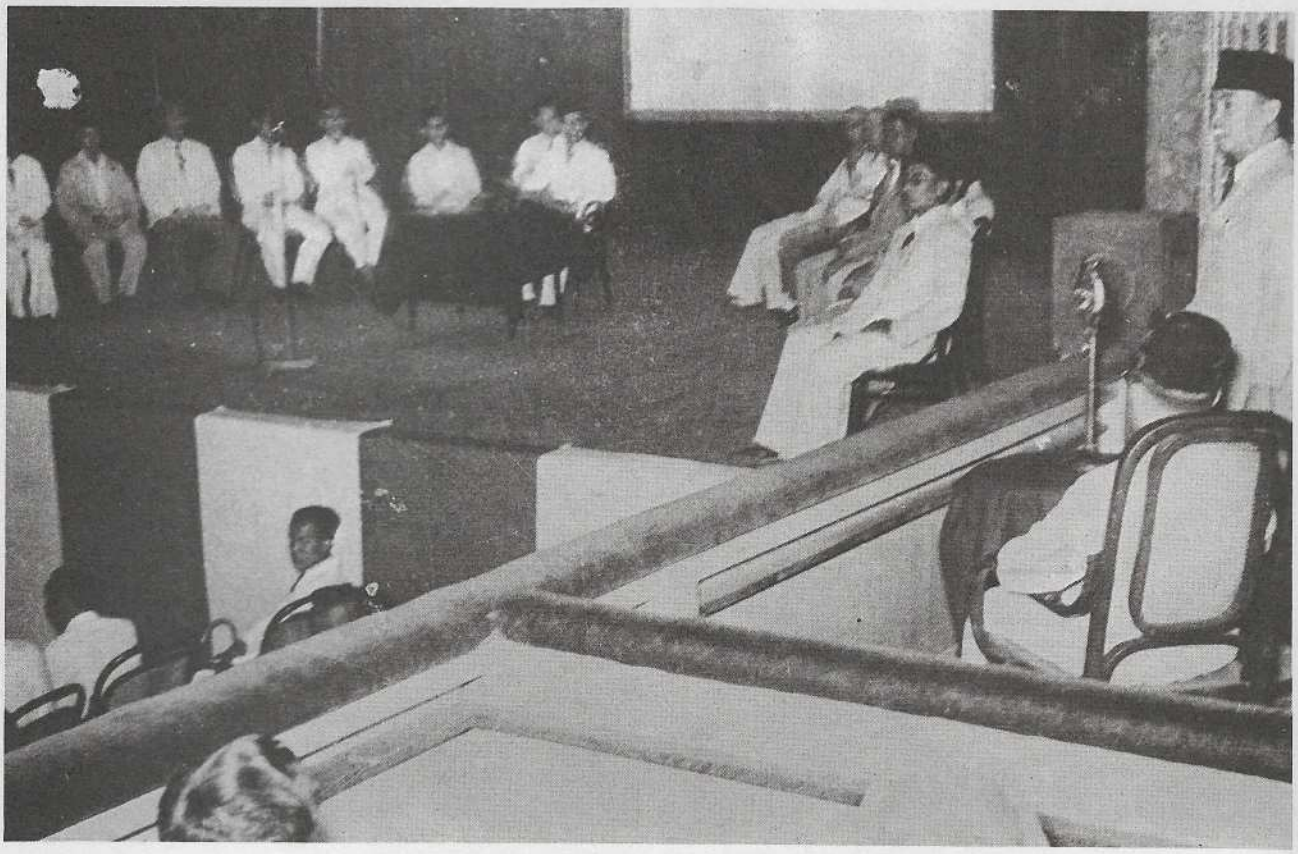

Pelantikan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada tanggal 29 Agustus 1945 di Gedung Komidi, Pasar Baru, Jakarta.

di pantai Jakarta, untuk pelaksanaan tugas menerima penyerahan Jepang, Suwirjo dengan resmi diangkat oleh Presiden Republik Indonesia sebagai Walikota Jakarta.

Di Pemerintahan Pusat sendiri pada tanggal 29 Agustus 1945 telah dilantik Komite Nasional Indonesia Pusat (K.N.I.P.). Pembentukannya sesuai dengan keputusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang telah menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Menurut penetapan panitia tersebut, Komite Nasional dibentuk di seluruh Indonesia dengan pusatnya di Jakarta.

Tugas/kewajiban Komite :

a. menyatakan kemauan rakyat Indonesia untuk hidup sebagai bangsa yang merdeka.

b. mempersatukan rakyat dari segala lapisan dan jabatan, supaya terpadu pada segala tempat di seluruh Indonesia, persatuan kebangsaan yang bulat dan erat.

c. membantu menenteramkan rakyat dan turut menjaga keselamatan umum.

d. membantu pimpinan dalam menyelenggarakan cita-cita Bangsa Indonesia, di daerah membantu pemerintah daerah untuk kesejahteraan umum.

Komite Nasional di pusat memimpin dan memberi petunjuk kepada Komite-Komite Nasional di Daerah.

Sejarah dengan pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat, untuk Jakarta dibentuk sebuah Komite Nasional Daerah Kota Jakarta, diketuai oleh Mr. Moehammad Roem.

Komite Nasional di daerah dalam perkembangan situasi kemudian dimasukkan dalam Pemerintahan Daerah sebagai badan legislatip Daerah (hanya dibatasi pada ko-

mite keresidenan, kabupaten, kota, dan desa berotonomi), berdasarkan ketentuan Undang-Undang tahun 1945 No. 1, yang ditetapkan oleh Pemerintah bersama-sama Badan Pekerja Nasional Pusat pada tanggal 23 November 1945. Undang-Undang ini, yang sangat singkat dan hanya terdiri dari 6 pasal, merupakan undang undang desentralisasi yang pertama Republik Indonesia yang memuat ketentuan tentang otonomi daerah.

Menurut undang undang itu Komite Nasional Daerah menjadi Dewan Perwakilan Daerah. Antara para anggotanya sendiri dipilih beberapa, sebanyak lima orang untuk duduk dalam Badan Eksekutip yang bersama-sama dengan dan dipimpin oleh Kepala Daerah, menjalankan pemerintahan sehari-hari dalam daerah.

Biaya untuk keperluan Komite Nasional Daerah disediakan oleh Pemerintah Daerah sendiri. Hingga akhir tahun 1946 Badan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jakarta beranggota 39 orang, di antaranya 18 orang dari kelurahan-kelurahan, 2 orang dari Partai Sosialis, 5 orang dari Partai Nasional Indonesia, 1 orang dari Barisan Buruh Indonesia, 2 orang dari golongan Arab, 4 orang dari perkumpulan-perkumpulan Sosial. Beberapa waktu kemudian bertambah dengan wakil-wakil dari organisasi-organisasi lainnya seperti Masyumi, golongan Kristen dan golongan keturunan Tionghoa.

Nama-nama yang tercantum sebagai anggota-anggota badan legislatip Pemerintahan Nasional Kota Jakarta:

1. A.A. Alaydroes, 2. Abdul Manaf, 3. Assa Bafaqih, 4. A.F. Gultom, 5. A.J. Supit, 6. A. Wahab, 7. Abd. Martin, 8. Asmad, 9. A. Moeis As, 10. Asnawi, 11. B.R. Motik, 12. Bahri, 13. Dr. A.M. Soetama, 14. Dr. Diran, 15. Dr. Ouw Eng Liang, 16. Djokolaksamono, 17. G.S. Pandjaitan, 18. Hanafi, 19. M. Moh. Gosin, 20. Iskandar Wahono, 21. Ibrahim, 22. J.St. Pamuncak, 23. Khou Eng Tjiang, 24. L.A. Naim, 25. M. Hasmoeni, 26. Muhammad, 27. M. Saman, 28. Moh. Alwi, 29, Moh. Aooi, 30. Moehadjir, 31. Moessah, 32. M. Ahmad Tjakrawardhana, 33. Moh. Baseri, 34. Mr. Asmaun, 35. M. Dachlan, 36. Noersjid, 37. Nn. R.A. Minarsih Wiranatakusumah, 38. Oesman, 39. Oebeid, 40. R.M.S. Mangkoedipoero, 41. R. Soemarjono, 42. R. Gatot Soetadipradja, 43. Moeharam A. Soetisna, 44. R. Soetardjo, 45. Ramelan, 46. Sri Juliani, 47. Soepadi Notosoeparto, 48. Soemardji, 49. Soeprapto, 50. Sjawal, 51. Soerjosoemirat, 52. St. Sanif, 53. Sabikin, 54. Sjamsoeddin Saat.

Tercatat sebagai anggota yang dipilih dan duduk dalam Badan Eksekutip namanama: 1. Nur Sutan Iskandar, 2. Jusuf Jahja, 3. Supranoto dan 4. Boerai.

Sebagai Kepala Daerah Suwirjo memegang pimpinan korps Pamongpraja dan Kepolisian di kota Jakarta.

Susunan pamongpraja Wilayah kota Jakarta dibagi dalam tujuh kawedanan:

1.	Tanjung Priok	— wedana :	Endun Moh. Enoch;
2.	Manggabesar	— wedana :	Mr. Soepangkat;
3.	Penjaringan	— wedana :	R. Kapitu Puraatmadja;
4.	Gambir	— wedana :	Mr. Roosdiono;
5.	Tanah Abang	— wedana :	Sanoesi;
6.	Senen	— wedana :	R. Soewardi Djajakusuma;
7.	Jatinegara	— wedana :	R. Martaamidjaja.

Kantor pusat pamongpraja di Balai Agung Kota dipimpin oleh Patih Prawiradinata Kantor Besar Polisi bertempat di gedung markasnya, di kantor yang letaknya berhadapan dengan Departemen Penerangan sekarang, di kompleks gedung kepolisian yang telah dibongkar dengan Komisaris Besar: Jasin. Di tiap kawedanan ada kantor seksi kepolisian.

Aparatur kepegawaian Pemerintah Nasional Jakarta di Balai Agung terdiri atas:

I. **Jawatan Sekretariat terdiri dari :**
   1. Bagian Urusan Pegawai
   2. Bagian Perbaikan Balai Agung

3. Bagian Penerangan
4. Bagian Mobil-mobil
5. Bagian Pajak
6. Bagian Urusan Surat-surat
7. Bagian Arsip
8. Bagian Kamar ketik
9. Bagian Pengiriman Surat-surat.

II. Jawatan Tata Keuangan, terdiri dari :
1. Bagian Perhitungan Keuangan
2. Bagian Keuangan Negeri
3. Bagian Alat-alat
4. Bagian Pemeriksaan Bendahara
5. Bagian Urusan Tanah
6. Bagian Urusan Arsip
7. Bagian Urusan Bendahari

III. Jawatan Pamong Praja, dibedakan antara :
1. Pusat Pamong Praja
2. Pamong Praja di wilayah Kawedanaan.

IV Jawatan Pengajaran dan Pendidikan.

V Jawatan Kesehatan Kota.

VI. Jawatan Kesehatan Kehewanan.

VII. Jawatan Tehnik.

VIII' Jawatan Ekonomi.

IX. Jawatan Sosial.

Jumlah Pegawai termasuk Pamong Praja sebanyak 1.410 orang.

Sebagai Walikota Jakarta Suwirjo menghadapi masalah-masalah dalam mengemudikan Pemerintahan Daerah yang berkisar pada pokoknya, dalam hal-hal berikut:

Keluar : Membantu Pemerintahan Pusat dalam diplomasinya untuk membuktikan kepada dunia internasional umumnya dan balatentara Sekutu yang bertugas menerima penyerahan Jepang di Indonesia pada khususnya, bahwa Proklamasi bukan merupakan semboyan belaka, akan tetapi berakar pada hasrat dan kehendak hati nurani rakyat Indonesia.

Kedalam : Menyelenggarakan, memelihara dan mempertahankan Pemerintahan Daerah yang effektip, kompak dan berdisiplin dalam pengabdian untuk cita-cita bangsa Indonesia dengan kesediaan untuk berkorban.

Tekad untuk merdeka benar-benar telah merasuk ke tulang sungsum seluruh bangsa Indonesia. Dikomando atau tidak, dikerahkan atau tidak dikerahkan, dengan seluruh kekuatan yang ada dengan pernyataan yang sangat sederhana, secara sadar dan spontan rakyat Jakarta bersiap-siaga mempertahankan Proklamasi Indonesia. Bahkan mengecam semangat perjuangan yang diperlihatkan oleh pemimpin-pemimpinnya, yang mungkin terlampau berhati-hati dalam menentukan langkah-langkah dan tindakan-tindakan selanjutnya sesudah Proklamasi didengungkan.

Sambutan rakyat waktu tibanya detik Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan demontrasi yang nyata dari semangat juang mereka. Dimana-mana terdengar pekik "MERDEKA" dengan acungan kepalan tangan terhadap kawan dan lawan. Para pemuda-

pemuda selalu siap manakala menghadapi bahaya. Komando "Siaap" inilah yang paling ditakuti oleh interniran Belanda yang telah dilepaskan Jepang. Siapa yang ingin dianggap orang Republik harus memakai lencana merah putih di dadanya walau dengan bahan seadanya. Kampung-kampung merupakan benteng pertahanan rakyat dengan barikade pada ujung jalan kampung yang bertemu dengan jalan besar.

Tantangan pertama dari Proklamasi itu datangnya dari pihak Jepang yang menghalang-halangi penyebar-luasan berita Proklamasi, Plakat-plakat Proklamasi dirobek-robek oleh serdadu Jepang.

Rakyat di Jakarta bangkit untuk melawan kekuasaan Jepang. Dimana-mana timbul perlawanan terhadap Jepang yang masih bersenjata lengkap. Dengan bersenjatakan beberapa pucuk senjata hasil rampasan dari Jepang, serta dengan bambu runcing dan senjata-senjata tajam lainnya, rakyat Jakarta menyerbu ke tempat-tempat penting yang masih diduduki Jepang.

Manifestasi kebulatan Tekad di Lapangan Ikada.

SEBAGAI manifestasi kebulatan tekad dan semangat rakyat yang cinta kemerdekaan. pada tanggal 19 September 1945 diadakan rapat raksasa di Lapangan Ikada Jakarta. Rakyat dari seluruh penjuru Jakarta, bahkan dari luar Jakarta terus mengalir tak ada henti-hentinya tanpa menghiraukan serdadu-serdadu Jepang yang berusaha menghalang-halangi aliran massa. Rakyat tidak menghiraukan sangkur-sangkur terhunus tentara Jepang dan tank-tank yang dikerahkan. Jepang tidak berhasil menghalang-halangi gelora patriotisme Bangsa Indonesia. Dalam rapat raksasa di lapangan Ikada itu rakyat Jakarta menunggu komando dari Pimpinan Revolusi Bangsa Indonesia.

Penguasa Jepang dihadapkan pada satu dilemma: Apa yang harus diperbuat? Menangkap Sukarno-Hatta? Dengan mengambil risiko pertumpahan darah dalam menghadapi perlawanan massa rakyat yang akan serentak membela kemerdekaan yang telah diproklamasikan?

Atas dasar berbagai pertimbangan, antara lain tidak diharapkan terjadinya pertumpahan darah yang sia-sia, Bung Karno memerintahkan agar rapat bubar dan massa rakyat pulang kembali secara tertib ke rumahnya masing-masing. Rakyat yang telah memenuhi lapangan Ikada mematuhi perintah dan meninggalkan tempat dengan tertib dan teratur.

Dunia internasional dan Tentara Jepang khususnya sangat terkesan akan wibawa Bung Karno terhadap rakyat dan bangsa Indonesia yang demikian patuh dan taat pada perintah Presidennya.

Sementara itu ditengah-tengah kemelutnya api perlawanan terhadap Jepang, pada tanggal 29 September 1945, tentara Sekutu dengan escort kapal-kapal perangnya telah merapat di pantai Jakarta. Bersama kapal-kapal Sekutu dengan cara membonceng, turut serta kapal-kapal perang Belanda. Pada tanggal 4-5 Oktober Tentara Belanda sudah menembaki Stasiun Tanjung Priok dan kemudian mengatur persediaan alat-alat perang dengan bantuan Tentara Sekutu.

Kedatangan Balatentara Sekutu di Jakarta disambut dengan lautan bendera Merah Putih, yang berkibar di kampung-kampung di seluruh pelosok Kota Jakarta.

Untuk dapat menilai dan menempatkan tindakan-tindakan Sekutu pada proporsi yang sebenarnya dalam pelaksanaan tugasnya di Indonesia, mengenai: 1. pelucutan senjata tentara Jepang di bumi Indonesia, 2. pembebasan tawanan perang, terutama Bangsa Belanda dan musuh Jepang lainnya, perlu diketahui latar belakangnya:

Pembagian strategis dalam lingkungan Sekutu, terdiri dari :

1. SWPA (South West Pacific Area) dibawah Jenderal Mac Arthur termasuk di dalamnya: Irian Jaya, Kepulauan Maluku dan Kalimantan, Sulawesi.
2. SEAC (South East Asia Command) dibawah Admiral Mountbatten termasuk didalamnya : Sumatera, Jawa, Bali, dan Lombok.

Pada bulan Oktober 1943 oleh Van Mook diadakan pembicaraan dengan kedua pimpinan Tentara Sekutu tersebut, yang bertujuan mendapat ketegasan tentang peranan Pemerintah Hindia Belanda kelak di daerah yang akan dikuasainya kembali.

Pemerintah Republik Indonesia yang pertama dengan Presiden dan Wakil Presiden berdiri di muka rumah Jl. Pegangsaan Timur 56 pada tanggal 4 September 1945.

Persetujuan dengan SWPA ditandatangani pada 10 Desember 1944. Yang menyangkut SEAC pada tanggal 24 Agustus 1945. Setelah Jepang menyerah diadakan pula suatu Civil Affairs Agreement, antara pemerintah Inggris dan Belanda.

Menurut perjanjian, kekuasaan tertinggi ada pada pimpinan Militer Sekutu. The Netherlands Indies Civil Affairs (NICA) yang bertugas urusan administratip terhadap penduduk di daerah yang dibebaskan, adalah membonceng (istilah Inggrisnya "Attached to") pada Tentara Sekutu. Jabatan di dalam NICA terdiri dari SO (Staff Officer) NICA, sama dengan residen sebelum Perang Dunia II, COS (Chief officers) NICA, sama dengan asisten residen di daerah SWPA.

Pada bulan Januari 1946 dikeluarkan dekrit yang berlaku surut hingga September 1945, yang menciptakan AMACAB (Allied Military Administration Civil Affairs Branch) untuk urusan administratif di Jawa dan Sumatera, yang terdiri seluruhnya dari pejabat-pejabat Hindia Belanda dulu. Setelah orang-orang Belanda yang telah sekian lama ditawan oleh Jepang dilepaskan dari tawanan, kebanyakan bermimpi : kembali kepada keadaan semula. Akibatnya mencelakakan mereka; mereka tergilas oleh roda revolusi yang sedang menggelora. Di Jakarta terdapat banyak pembunuhan-pembunuhan terhadap mereka, karena provokasi mereka atau lain-lain hal.

Sedangkan AMACAB, sambil berlindung di bawah kekuasaan Sekutu, kemudian dengan bantuan tentara mereka sendiri yang didatangkan dari Negeri Belanda, bercita-cita menanam kembali kekuasaan Hindia Belanda almarhum.
Pihak Tentara Sekutu, yang memegang kekuasaan tertinggi, menginginkan penyelesaian pelaksanaan tugas dalam suasana yang tertib, untuk keperluan itu mengambil tindakan penertiban, seperti mengadakan jam malam, bertindak terhadap rakyat yang sedang mempertahankan kemerdekaan, dengan bermacam-macam ancaman, misalnya akan menggempur kampung-kampung dengan tank-tank bilamana barikade-barikade rakyat di kampung-kampung tidak dibongkar, dengan memberi batas waktu, dan sebagainya. Sedangkan terhadap apa yang mereka anggap penggedoran, penyabotan oleh rakyat diadakan tindakan-tindakan kekerasan.

Dalam keadaan yang ruwet dan panas itu Walikota Suwirjo dengan bantuan aparaturnya, harus mengemudikan Pemerintahan Kota Jakarta. Berkat kepemimpinannya yang berwibawa dan keramahan dalam hubungan dengan pegawai-pegawainya golongan tinggi, menengah dan golongan rendah, tanpa kecuali dan perbedaan, dan sepenuhnya didukung oleh rakyat Jakarta, akhirnya "Pak Wir" dapat pengertian dari pihak Sekutu, yang terpaksa menerima kenyataan bahwa Pemerintahan Nasional Kota Jakarta itu ada.

Pihak Belanda pun akhirnya tidak dapat menutup mata atas kenyataan itu. Perlu diingat, bahwa Jakarta dikala itu masih merupakan bagian administratip dari Propinsi Jawa Barat. Akan tetapi dalam kenyataan secara langsung mendapat perintah dan instruksi Kementerian Dalam Negeri, bahkan dari Kepala Negara sendiri. Pemerintahan Kota berkedudukan di Balai Agung Kota di Gambir Selatan No. 9. Nama Balai Agung adalah ciptaan Wakil Walikota Dahlan Abdullah.

Tentara Sekutu berpendirian bahwa sampai saat pendaratan mereka di Jakarta, Jepanglah yang masih berkuasa. Akan tetapi mereka mengalami dan melihat kenyataan bahwa mereka disambut dengan lautan bendera merah putih yang berkibar di rumah-rumah dan bangunan gedung gedung di seluruh Kota Jakarta. Sejak mendaratnya Sekutu di Jakarta tanggal 29 September 1945 berlaku Pemerintahan Militer Sekutu. Jepang dipertahankan, dilihat dari mata rakyat Indonesia, sebagai alat untuk memadamkan api kemerdekaan di seluruh pelosok kota.

Suasana Rapat Raksasa di Lapangan Ikada dimana Bung Karno Presiden Republik Indonesia yang pertama membakar semangat rakyat pada tanggal 19 September 1945, sore hari.

Sikap Sekutu mendapat perlawanan rakyat Jakarta dan para pencinta kemerdekaan, yang telah bersumpah : "MERDEKA ATAU MATI" dan "NEVER AGAIN THE LIFEBLOOD OF ANY NATION", sebagai mana terpancang dalam coretan-coretan di mana-mana. Pertempuran terjadi di mana-mana.

Tentara Sekutu melaksanakan aksi penangkapan-penangkapan, pensitaan barang-barang, penculikan-penculikan seperti di Jalan Karet, Dukuh Atas, Gang Tengah, Gang Sentiong, Kampung Pejambon dibakar habis. Semuanya ini dilakukan untuk

INDONESIA NEVER
AGAIN THE
"LIFE-BLOOD"
OF
ANY NATION!

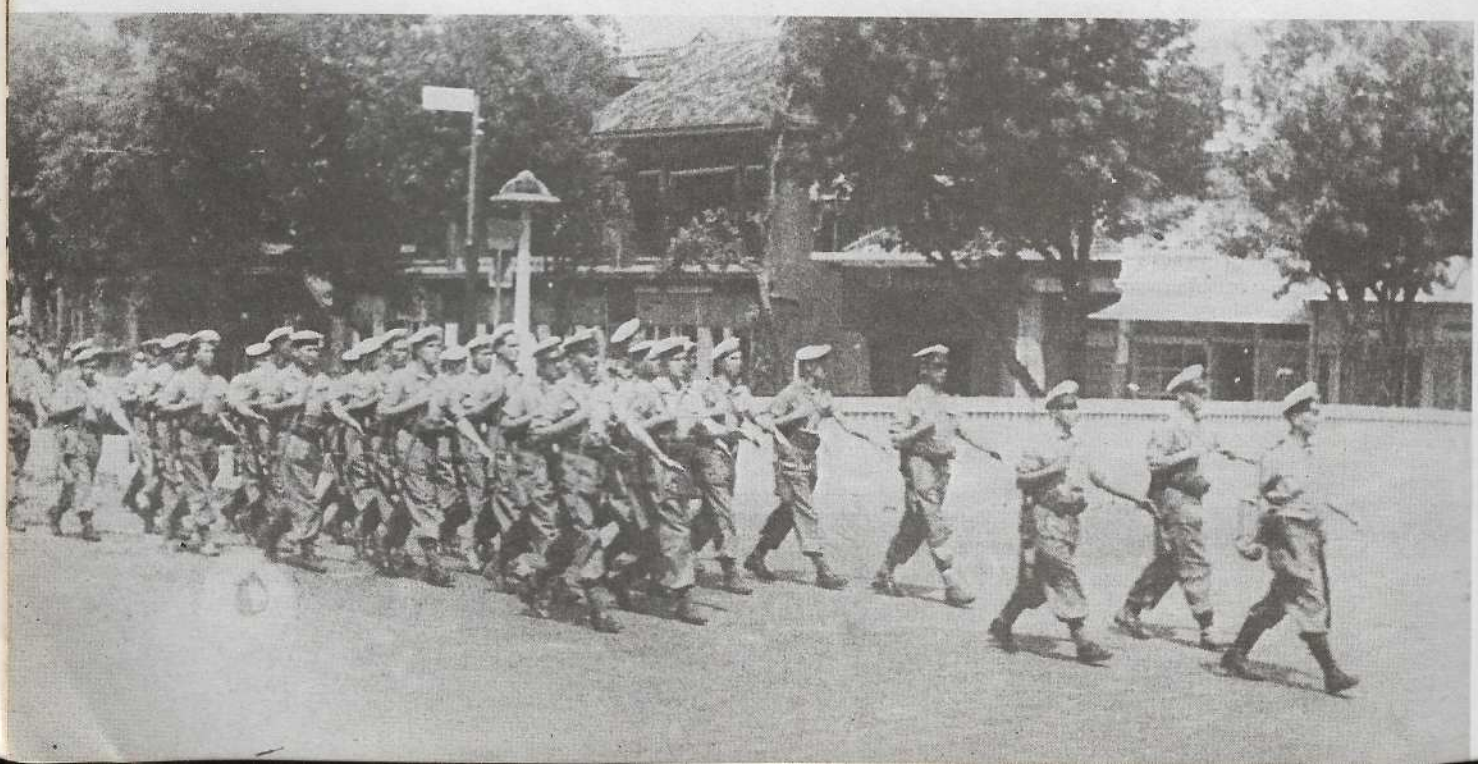

meniadakan segala apa yang mereka anggap pengacauan.

Terhadap Dr. Mohammad Roem yang tinggal di Kwitang dilakukan penembakan, sehingga ia cidera. Wedana Tanjung Priok, Endun Moh. Enoch yang diantara kawan-kawannya pejabat pamongpraja, dikenal sebagai orang yang berwatak lemah lembut, dibunuh oleh serdadu-serdadu NICA, yang sebelumnya mereka siksa secara biadab. Terhadap Wedana Gambir dilakukan percobaan pembunuhan. Walikota Suwirjo sendiri mengalami percobaan pembunuhan. Sering tidak dapat diketahui apakah penembakan-penembakan dilakukan oleh Tentara Belanda atau Sekutu.

Terdapat korban-korban pertempuran dari petugas-petugas Pemadam Kebakaran yang sedang menjalankan tugasnya memadamkan kebakaran di Jalan Sawah Besar dan Pintu Besi. Mereka ditembaki oleh serdadu-serdadu NICA yang melakukan pembakaran-pembakaran itu, sehingga beberapa pegawai pemadam kebakaran tewas.

Dimana-mana terjadi penggedoran-penggedoran terhadap toko-toko yang dianggap milik orang asing, khususnya Belanda. Masalah penggedoran ini, mengakibatkan Wedana Mangga Besar didatangi pasukan Tentara Sekutu, di bawah pimpinan seorang bangsa Scot, yang memperkenalkan diri kepada Wedana, sebagai seorang yang bernama Kapten Thompson, yang menangkap dan membawa Wedana Mangga Besar bersama-sama mantri pamongpraja ke tangsi Tentara Sekutu di Jalan Tanah Abang II (sekarang Asrama Gatot Subroto), berhubung dengan banyaknya terjadi penggedoran-penggedoran di wilayah daerah kekuasaannya.

Wedana Mangga Besar menghubungkan peristiwa tersebut diatas dengan penggedoran-penggedoran yang terjadi di daerahnya, terhadap: Bank of China di Daerah Glodok, dan pembeslahan oleh BKR atas senjata yang terdapat di rumah di depan kantor wedana. Dahulu rumah tersebut bekas rumah makan orang-orang Jepang. Oleh BKR senjata-senjata orang Jepang yang lari mencari perlindungan di bekas rumah makan tersebut disita dan diserahkan kepada Wedana Mangga Besar yang kemudian melaporkan hal itu kepada Komisaris Besar Polisi Pemerintah Nasional Kota Jakarta, dengan permintaan agar senjata-senjata itu dibawa ke Kantor Besar Polisi. Hal mana dapat di setujui oleh Komisaris Besar Polisi, dan dilaksanakan.

Peristiwa menarik perhatian Tentara Sekutu yang merasa perlu dan mempunyai alasan untuk menangkap wedana Mangga Besar, dan mantri pamongpraja atas tuduhan terlibat dalam penggedoran.

Semangat rakyat Indonesia terpancang pada corat-coret di monumen Van Heutz (sekarang Taman Cut Mutiah).

Tanggal 31 Oktober 1945 Mayor Jenderal D.C. Hawthorn D.S.O. sebagai Panglima Tentara Sekutu di Jawa, Bali dan Lombok mengeluarkan maklumat yang berbunyi, bahwa sejak tanggal 31 Oktober 1945 Kota Jakarta berada di bawah pengawasan/kekuasaan Pemerintah Militer Sekutu dengan batas wilayah :

1. Sebelah Barat, Banjir Kanal.
2. Sebelah Selatan, Jalan Kereta Api termasuk bagian Jatinegara sebelah Selatan.
3. Sebelah Timur, Kali Buaran dan Kali Cakung.
4. Sebelah Utara, Tanjung Priok dan Kampung Koja.

Maklumat ini membawa konsekwensi bahwa soal keamanan, kesehatan, persediaan makanan dan lain-lain hal menyangkut keperluan penduduk sehari-hari, menjadi tanggungjawab Pemerintah Militer Sekutu.

Walikota Suwirjo menganggap perlu untuk memberikan penjelasan kepada penduduk kota Jakarta. Dengan tegas ia nyatakan bahwa Pemerintah Nasional masih tetap berdiri, dan bekerja sepeti biasa. Ditekankan oleh Suwirjo bahwa, sesuai dengan perintah Presiden Republik Indonesia, pegawai-pegawai Pemerintah Nasional Kota Jakarta tidak boleh meninggalkan tempat.
Mereka harus bekerja seperti biasa. Pemerintah Nasional Pusat menyatakan bersedia membantu Tentara Sekutu dengan memegang teguh prinsip-prinsip kemerdekaan yang telah dimiliki rakyat dan bangsa Indonesia.

Pemerintah Pusat telah memberikan patokan dan petunjuk apa yang harus dijalankan oleh Pemerintah Nasional Kota untuk menghadapi suasana di kota Jakarta ini :

1. Kota Jakarta harus dipertahankan sebagai Ibukota Negara.

Tentara Sekutu mendarat di Jakarta pada tanggal 29 September 1945 dengan tidak mengindahkan Proklamasi Kemerdekaan Rakyat Indonesia.

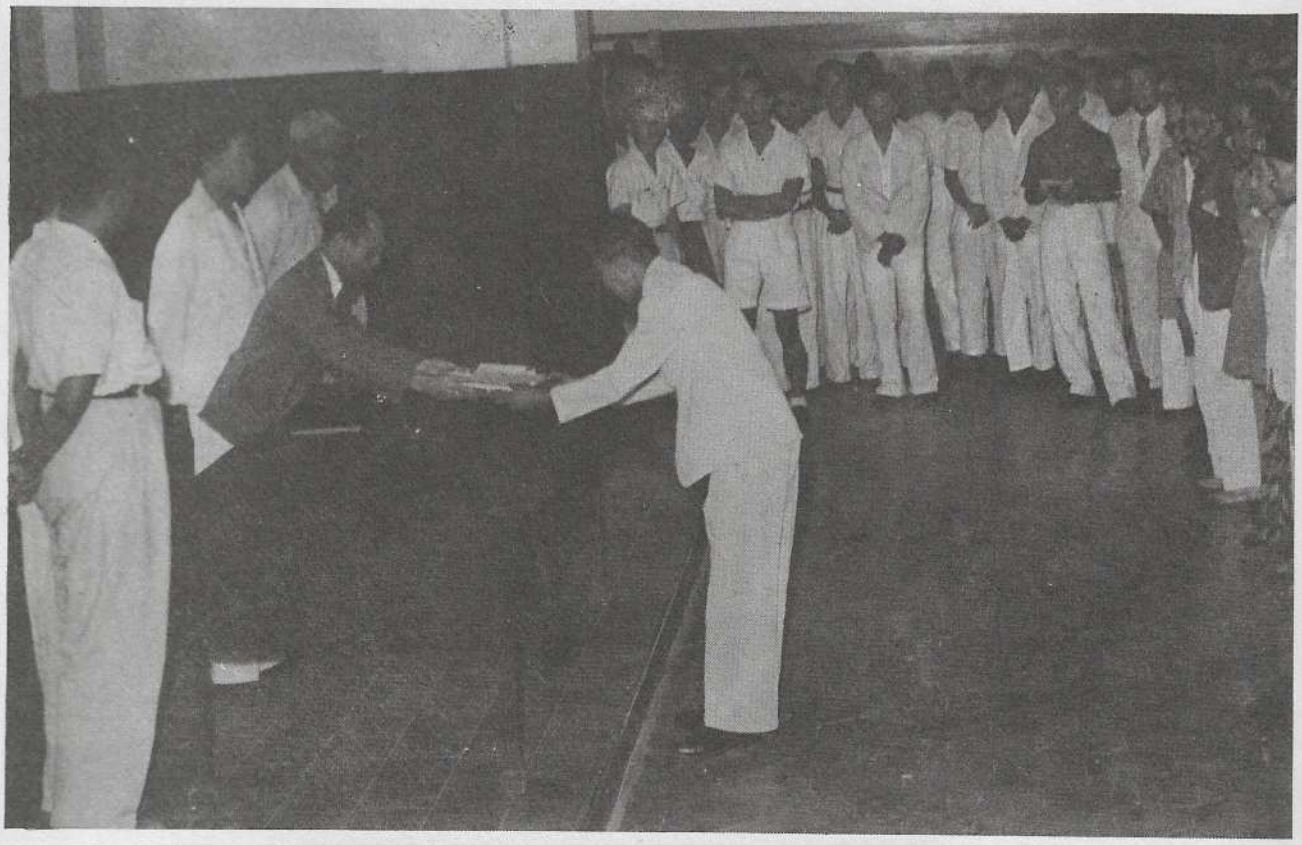

Perdana Menteri Sjahrir bersama Walikota Suwirjo menyaksikan pertandingan sepak bola antara kesebelasan Sekutu dengan kesebelasan Indonesia pada bulan Mei 1946.

2. Kota Jakarta jangan dijadikan kota pertempuran.
3. Kota Jakarta harus bekerja sama dengan Tentara Pendudukan Sekutu.

Bulan Nopember 1945 Pemerintahan Sekutu mulai menjalankan tugasnya di Jakarta, dibantu oleh Allied Militer Administration Civil Affairs (AMACAB), yang terdiri dari pegawai-pegawai Belanda sebagai tersebut diatas. Dengan demikian di dalam Kota Jakarta terdapat dua pemerintahan sipil yaitu C.O. AMACAB Batavia dan Pemerintahan Nasional Kota Jakarta yang dipimpin Walikota Suwirjo yang masih tetap berdiri dan menjalankan tugasnya.

Pemerintah kota, karena ada dua macam, tidak dapat berjalan dengan lancar. Agar terdapat koordinasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan kota Jakarta dapat berjalan lancar dan sebaik-baiknya demi kepentingan rakyat, Pemerintah Nasional Kota Jakarta mengadakan hubungan dan kerja sama dengan Pemerintah Militer Sekutu, untuk merundingkan dan memecahkan beberapa persoalan seperti masalah keamanan dan kepentingan penduduk di dalam kota.

Pada tanggal 21 Nopember 1945 dibentuk Panitya Penghubung antara Pemerintah Nasional Kota, yang diketuai Suwirjo, dengan Pemerintah Militer Sekutu.

Pemerintah Tentara Sekutu meyakini bahwa Pemerintah Nasional Kota Jakarta adalah pemerintah yang hidup di kota ini. Oleh karena itu di dalam tindakan-tindakan yang mereka lakukan yang menyangkut kepentingan penduduk, Tentara Sekutu umumnya berkonsultasi dengan Pemerintah Nasional Kota. Seperti misalnya pembentukan "Civil Police" yang anggota-anggotanya oleh pihak Sekutu ditetapkan sebanyak 65 orang Bangsa Indonesia, 500 orang Belanda dan 250 orang Tionghoa.

Dibentuk pula "Rural Police" yang anggota-anggotanya terdiri dari Tentara Keamanan Rakyat (TKR) untuk mengawal konvooi RAPWI. Dalam surat-surat resmi yang disampaikan kepada pemerintah kota, Pemerintah Militer Sekutu selalu menyebut Pemerintah Nasional Kota Jakarta sebagai the „Municipality of Jakarta" sedangkan Walikota Suwirjo sebagai the Mayor of Jakarta. Suatu perkembangan keadaan yang menunjukkan pengertian.

Memberikan tanda penghargaan oleh Walikota Suwirjo kepada pegawai yang masa dinasnya sudah 25 tahun, pada peringatan 1 tahun kemerdekaan R.I. di Balai Agung pada tanggal 17 April 1946.

Situasi Kota Jakarta makin hari makin gawat. Untuk menertibkan situasi keamanan yang gawat, Pemerintah Tentara Sekutu membuat peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan sendiri. Peraturan-peraturan ini dalam kenyatannya tidak dapat menjamin keselamatan dan keamanan penduduk. Satu sebab yang paling penting ialah, bahwa dibelakang Tentara Sekutu bersembunyi serdadu-serdadu Belanda bermental kolonial yang bernafsu melampiaskan rasa dendamnya terhadap bangsa Indonesia. Mereka mengadakan sabotase dan pengacauan terhadap Pemerintah Kota Jakarta dalam rangka usaha untuk mengembalikan kekuasaannya.
Kekejaman dan pembunuhan secara membabi buta, tanpa mengenal peri kemanusiaan dilakukan di mana-mana. Akibatnya daripada kekejaman-kekejaman yang dilakukan penilaian masyarakat Jakarta terhadap Tentara Sekutu menjadi negatip.

Tanggal 30 Nopember 1946 Tentara Inggris meninggalkan Indonesia. Pemerintah Tentara Sekutu dialihkan kepada Pemerintahan Sipil Belanda (Netherlands Indies Civil Administration) NICA.

Kekacauan-kekacauan memaksa Pemerintah Pusat untuk hijrah ke Jogyakarta sebagai kota yang dianggap aman dan untuk melanjutkan perjuangan. Soekarno dan Hatta untuk menghindari percobaan-percobaan pembunuhan terhadap diri mereka meninggalkan Jakarta, diikuti staf pemerintahan pusat lainnya, kecuali Kementerian Penerangan.

Walikota Jakarta Suwirjo apakah ada pilihan? tetap tinggal di Jakarta, bertanggungjawab atas nasib penduduk Jakarta. Namun Jakarta tidak lagi berfungsi sebagai tempat pemerintahan pusat. Jakarta terus bergolak dan Suwirjo lebih meningkatkan adanya kekompakan dari setiap golongan dan para pencinta kemerdekaan. Walikota Suwirjo, mengeluarkan instruksi ditujukan kepada semua pegawai pamongpraja Jakarta agar tetap tinggal di tempat menjalankan tugas seperti biasa dengan penuh rasa tanggungjawab.

Persaingan dan pertentangan makin meningkat antara Pemerintah Nasional Jakarta dan Pemerintah yang ditinggalkan Tentara Sekutu.

Masing-masing ingin berkuasa terutama menguasai keamanan dan ekonomi yang sangat sering dan selalu diperebutkan antara kedua belah pihak. Satu hal yang sangat menyulitkan Pemerintah Nasional Jakarta yaitu adanya kecenderungan dari organisasi-organisasi perjuangan di pedalaman untuk melarang pemasukan beras ke Jakarta karena adanya Pemerintahan Belanda. Untunglah kesulitan ini dapat diatasi.

Pemerintah Nasional Jakarta dalam menanggulangi kesulitan akan bahan pokok tertolong, berhubung tugas yang dibebankan kepada Pemerintah Nasional Kota Jakarta oleh Bank Negara Indonesia 1946 untuk mengedarkan uang Republik (ORI) di dalam masyarakat. Pemerintah Kota sibuk melaksanakan penukaran uang Jepang dengan uang ORI. Bagi mereka yang membutuhkan beras haruslah membelinya dengan uang Ori. Uang ORI mulai memasuki pasaran.

Masalah terpenting yang dihadapi pemerintah kota adalah masalah ekonomi, terutama soal beras. Sehubungan dengan itu maka Pemerintah Kota membentuk suatu badan yang bernama Bagian Pembagian Makanan (B.P.M.). Bagian inilah yang mengurus hal-hal tentang makanan.

AMACAB terus-menerus mengadakan bermacam-macam tindakan dan peraturan yang menyulitkan jalannya Pemerintah Nasional Kota Jakarta. Keadaan ini pada hakekatnya secara langsung melanggar kedaulatan Republik Indonesia. Tindakan mereka berupa perampasan-perampasan atas gedung-gedung dan beberapa jawatan yang mereka ambil dengan cara paksa.

Peristiwa Tugu Peringatan satu tahun berdirinya Republik Indonesia.

SETIAP kejadian yang melambangkan eksistensi Republik Indonesia, boleh dipastikan akan mendapat tentangan keras dari pihak Belanda. Kira-kira akhir bulan Mei 1946, beberapa mahasiswi - antara nya puteri Dr. Ratulangi dan Minarsih Wiranatakusumah, datang kepada Jo Masdani minta agar ia bersedia menjadi ketua panitia untuk membangun Tugu Peringatan HUT Republik Indonesia. Bagi peringatan itu sudah dibentuk sebuah panitia. Kami, kaum wanita, demikian dikemukakan, ingin menyumbangkan karya sumbangsih dalam bentuk tugu peringatan yang maksudnya untuk diresmikan pada hari ulang tahun yang pertama Republik Indonesia. Jo Masdani hendaknya bersedia bertindak selaku ketua yang mengumpulkan dana dan mencari arsitek untuk pembangunan tugu, yang harus diresmikan pada tanggal 17 Agustus 1946.

Peristiwa Tugu Peringatan Satu Tahun berdirinya Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1946. Tampak para mahasiswa Indonesia dihalang-halangi oleh serdadu Sekutu (serdadu Ubel-ubel) dihalaman belakang rumah Pegangsaan Timur 56.

Jo Masdani menerima permintaan untuk menjadi ketua itu. Setiap pagi ia kemudian berkeliling untuk mengumpulkan dana yang diperlukan dengan berkendaraan truck yang dikemudikan oleh pemuda pejuang sebagai sopirnya. Selalu ada pemuda-pemuda dari Karawang yang mencari senjata di Jakarta. Jo Masdani sendiri adalah Ibu Palang Merah yang bekerja dirumah sakit umum pusat (sekarang rumah sakit Cipto Mangunkusumo). Disitu ia mempunyai banyak hubungan dengan puteri-puteri Palang Merah yang bekerja dirumah sakit pusat itu.

Dalam usaha untuk mengumpulkan dana bagi tugu tersebut Jo Masdani dapat mengumpulkan uang sejumlah enam puluh ribu rupiah. Dalam merencanakan bentuk tugu didapat bantuan dari Kores Siregar, seorang mahasiswa Institut Teknologi Bandung. Pelaksanaan Pembangunan tugu dikerjakan oleh Abutajib dari Biro Teknik Salam, di Kebon Sirih. Pelaksanaan pembangunan hanya menelan biaya tiga puluh tiga ribu rupiah. Sisa uangnya oleh Jo Masdani diberikan kepada Panitia Peringatan.

Pelaksanaan peresmian menghadapi kesulitan. Terdapat berita dari Walikota Suwirjo, bahwa penguasa Sekutu tidak menghendaki bila HUT Republik Indonesia dirayakan secara besar-besaran, untuk mencegah adanya reaksi dari pihak Belanda yang tidak diinginkan.

Masalah menjadi bahan pembicaraan di Balai Agung Kota antara pihak Panitia Tugu dan Walikota Suwirjo beserta para anggota Pemerintahan Nasional Kota Jakarta dan tokoh-tokoh Indonesia. Demi memelihara hubungan baik antara pemerintah an kota dan pihak Sekutu sebaiknya pemerintah pihak Sekutu jangan diabaikan. Mr. AA. Maramis memperingatkan agar tidak terjadi Amritsar kedua di bumi Indonesia. Walikota Suwirjo menyarankan agar peresmian Tugu dilakukan tanggal 18 Agustus

Suasana Upacara Peresmian Tugu Peringatan Proklamasi Kemerdekaan R.I. oleh Perdana Menteri Sjahrir bersama Walikota Suwirjo dan Jo Masdani pada tanggal 17 Agustus 1946 di Jl. Pegangsaan Timur 56.

1946 saja. Saran Suwirjo mendapat tantangan keras dari kaum wanita, terutama dari Jo Masdani. Sebagian dari kaum wanita yang menjadi peserta peresmian, bahkan telah ada di Pegangsaan Timur 56. Pada keesokan harinya para peserta lainnya maksudnya akan berbaris ke Pegangsaan Timur 56. Nyonya Tirtaamidjaja, isteri anggota Mahkamah Agung, menyarankan agar masalahnya dibeberkan kepada Bung Sjahrir, yang ditemui oleh Jo Masdani, menanya apakah yang dikehendakinya. Dan menyetujui peresmian dilakukan pada hari yang dikehendaki. Bung Sjahrir meresmikan Tugu Peringatan pada tanggal 17 Agustuts 1946, setelah kata pembukaan oleh Jo Masdani. Walikota Suwirjo hadir pada upacara itu.

Para kaum wanita yang semula akan berbaris dari Balai Agung menuju ketempat upacara di Pegangsaan Timur 56, membatalkan maksud yang semula, karena dihalang-halangi oleh Tentara Sekutu yang bertugas. Mereka berkumpul di Taman Kimia untuk dari sana menuju ke Pegansaan Timur 56 dari jalan belakang. Maksud inipun dapat dihalang-halangi oleh serdadu-serdadu Tentara Sekutu. Walaupun demikian upacara peresmian dapat berjalan dengan baik, dihadiri oleh puteri-puteri Palang Merah yang telah hadir malam sebelumnya dan para undangan. Terdapat kabar kemudian, bahwa Penguasa Bala Tentara Sekutu telah mengkosinyasi tentara Belanda pada waktu peresmian Tugu.

Persetujuan Linggarjati.

PADA tanggal 15 Nopember 1946 telah diparaf naskah persetujuan antara Indonesia dan Belanda. Naskah ini terkenal dengan nama Perjanjian Linggarjati. Tentara Inggris ditarik dari Jawa dan Sumatera. Kedua peristiwa tersebut tentunya berpengaruh terhadap keadaan Pemerintahan Kota Jakarta.

Antara Pemerintah Belanda dan Indonesia dibentuk suatu "Joint Commitee" yang terdiri dari 3 bagian yaitu: "Joint Committee for Truce", "Joint Committee for Political Truce Application" dan "Joint Committee for Civil Affairs".

Sub Panitia Daerah dibentuk untuk menghadapi soal-soal yang timbul disebabkan karena adanya "Truce" tersebut. Harus ditinjau sampai dimana urusan Pemerintahan Sipil di daerah-daerah yang diduduki Sekutu dapat dikembalikan lagi. Banyak masalah yang timbul. Pada prinsipnya Pemerintah Kota berusaha agar supaya di dalam satu daerah hanya ada satu kekuasaan, ialah kekuasaan yang diakui oleh rakyat atau penduduk daerah itu.

Pada tanggal 2 Desember 1946 untuk kota Jakarta dibentuk Panitia Daerah (Locale Commissie) urusan pemerintahan sipil. Anggota-anggota dari Panitia Daerah ini dari pihak Indonesia terdiri dari Suwirjo sebagai Ketua/anggota, para anggota lainnya adalah Mr. Soepangkat, Jusuf Jahja dan sekretarisnya M. Bustami, sedang dari pihak Belanda Ketua adalah Mr. Ysebaert dan para anggotanya: Drs. Bogaardt dan Mr. Vander Veen, sekretaris: A.M. Venselaar.

Pembentukan Pantia Daerah dipandang perlu karena adanya dua buah Pemerintahan yaitu Pemerintah Nasional Kota Jakarta dan Tydelyke Bestuurdienst (TBD) yang sebelumnya bernama: AMACAB. pemerintahan yang dipegang oleh Belanda.

Pertemuan antara Panitia Daerah urusan pemerintah sipil yang diwakili oleh pihak Indonesia dan pihak Belanda diadakan seminggu sekali dan mengambil tempat bergilir di Balai Agung Kota dan di Kantor Pemerintahan Kota dari pihak Belanda, beralamat Willemslaan 3 (sekarang Jalan Perwira), di gedung Eerste Europeesche Lagere School dulu

Perundingan-perundingan yang diselenggarakan oleh Panitia bersama ini tidak membawa hasil apa-apa.

Sejak tentara Sekutu meninggalkan Jakarta keadaan tidak semakin baik, justeru semakin memburuk. Sewaktu Tentara Pendudukan Inggris hendak meninggalkan Jakarta, semula dikandung maksud untuk membentuk Komisi Indonesia-Belanda, dengan tujuan, bahwa komisi itulah yang menjalankan pimpinan jawatan-jawatan pemerintahan, bukan sesuatu badan resmi ciptaan Belanda sepihak.

Upacara Peresmian Tugu Proklamasi di halaman rumah Jl. Pegangsaan Timur 56.

Tetap ada dua pemerintahan di kota Jakarta: pemerintahan nasional kota Jakarta dan pemerintahan kota yang diciptakan oleh pihak Belanda.

Pada mulanya Belanda hanya menyelesaikan urusan-urusan RAPWI, tetapi lambat laun Belanda melebarkan sayapnya dan menguasai daerah dengan menetapkan Gewest Batavia en Ommelanden.

Berakhirnya Pemerintah Nasional Kota Jakarta.

PERJANJIAN Linggarjati telah berjalan sekian lama. Akan tetapi pihak Belanda nyatanya tidak bermaksud menepatinya. Belanda melancarkan Aksi Militernya yang pertama pada tanggal 21 Juli 1947. Serangan Belanda terhadap Republik Indonesia diarahkan kesegala penjuru. Pemerintah Nasional Kota Jakarta dengan paksa mereka bubarkan. Balai Agung Kota diduduki. Pada tanggal 21 Juli 1947 jam 24.00 walikota Suwirjo dan anggota Badan Eksekutif Jusuf Jahja ditangkap dan mereka ditawan di Gang Chassee bekas tempat rekreasi dan restoran Tentara Jepang, bersama-sama tawanan dari Bogor. Para tawanan kemudian dipindahkan ke tempat tahanan di Tangerang, hanya untuk seminggu lamanya. Pada tanggal 21 Nopember 1947 para tawanan diangkut dengan kapal terbang dari Kemayoran, ternyata dengan tujuan Lapangan Udara Kalibanteng, Semarang.

Dari Lapangan Udara Kalibanteng rombongan tawanan terdiri dari dua belas orang dengan truck konvoi militer Belanda diangkut ke perbatasan di daerah pegu-

Jamuan perpisahan Bapak Supangkat menjadi Residen Bogor oleh Walikota Suwirjo yang diselenggarakan di Balai Agung pada tanggal 11 Maret 1947.

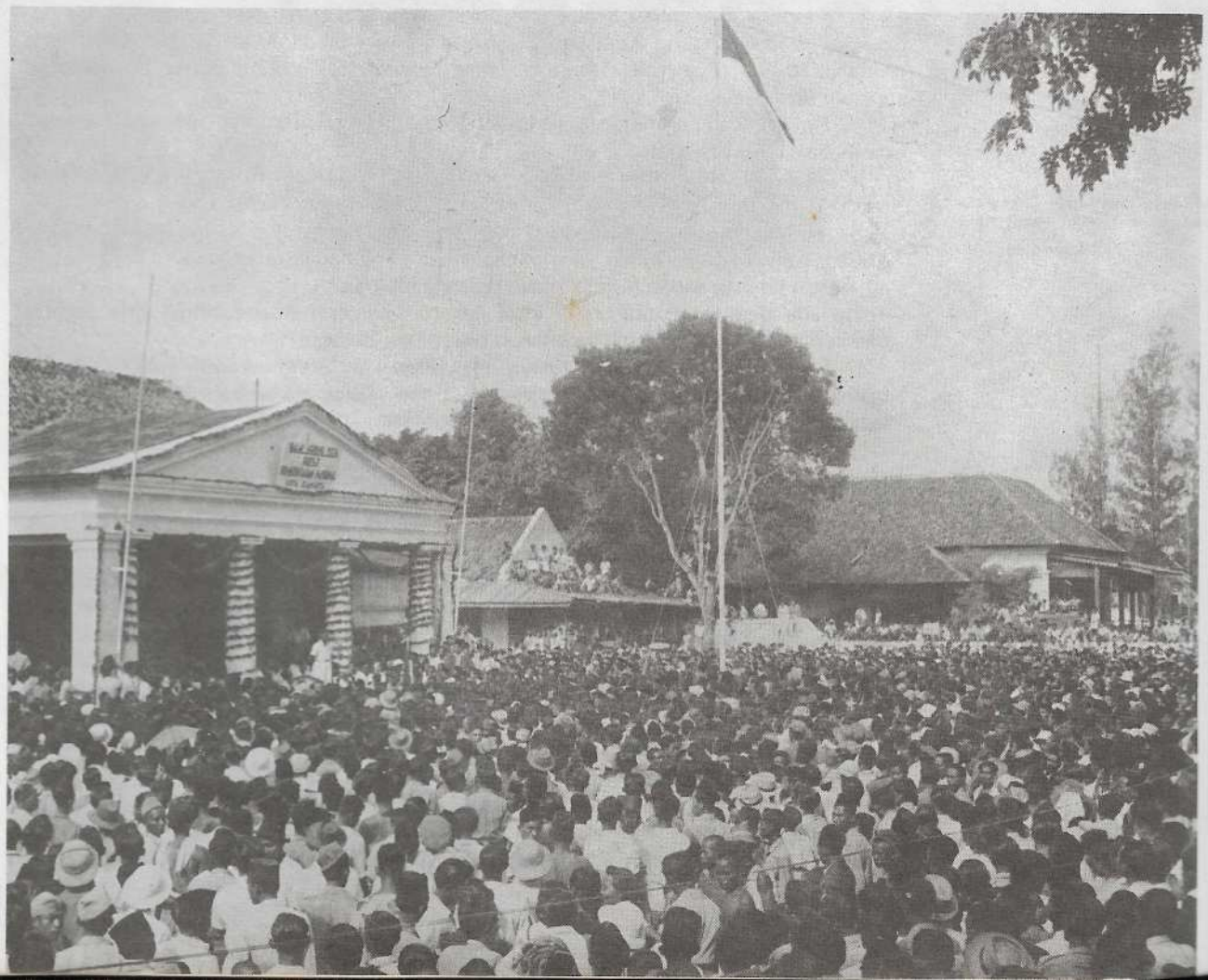

nungan antara karesidenan Semarang batasan Kedu, untuk dilepaskan di daerah Republik. Dengan bantuan Tentara Republik Indonesia rombongan tawanan sampai di Jogyakarta.

Dengan didudukinya Balai Agung Kota Jakarta dan ditawannya Walikota Suwirjo berakhir sistim Pemerintahan Nasional Kota Jakarta, menurut pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dan ketentuan perundang-undangan terdiri dari enam pasal dalam Undang-undang No. 1 tahun 1945, undang desentralisasi yang pertama Republik Indonesia.

Suwirjo Kepala Biro Kabinet Perdana Menteri Hatta Urusan Daerah Pendudukan..

SUWIRYO sebagai Walikota yang sementara berfungsi dalam jabatan itu, ditempatkan di Kabinet Perdana Menteri Hatta, sebagai Kepala Biro Kabinet Urusan Daerah Pendudukan.

Selaku Kepala Biro Suwirjo bertugas kewajiban menyelenggarakan hubungan dengan pegawai-pegawai Republik di daerah yang diduduki Belanda dan memperhatikan kepentingan mereka.

Beberapa hari setelah Belanda dalam Aksi Militernya yang kedua, pada tanggal 18 Desember 1948, menduduki Jogyakarta, beserta pemimpin-pemimpin Republik Indonesia lainnya, Suwirjo ditangkap oleh Belanda dan ditahan di penjara Wirogunan. Menjelang pemulihan kedaulatan, dengan dilepaskannya tawanan-tawanan Belanda pada aksi militer II, Suwirjo. mendapat tugas dari Pemerintah selaku koordinator dari jawatan-jawatan Republik Indonesia di Jakarta.

Pada tanggal 1 Maret 1950 Majelis Pemerintahan Kota Jakarta dan Badan Pemerintahan Hariannya, yang dibentuk oleh Pemerintahan Prefederal di Jakarta untuk jangka waktu satu tahun, habis waktunya. Sebagai tindakan sementara sebelum dapat diadakan pemilihan dewan perwakilan kota dan pemilihan Badan Pemerintahan Harian yang baru, Presiden RIS mengeluarkan surat keputusan yang maksudnya meletakkan pemerintahan harian itu ditangan walikota, sebagai penguasa tunggal. Walikota angkatan Pemerintah Prefederal itu adalah Mr. Sastromuljono. Keadaan ini tidak berlangsung lama. Oleh Kementerian Dalam Negeri RIS diusahakan pembentukan majelis kota yang baru. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RIS Wongsonegoro mengadakan pertemuan dengan pelbagai partai politik dan organisasi-organisasi lain dalam usaha untuk membentuk majelis perwakilankota yang baru.

Suwirjo Ketua Panitia Tujuh.

AKHIRNYA disetujui untuk membentuk suatu Panitia Pembaharuan Majelis Pemerintahan Kota Jakarta yang terdiri dari tujuh orang, diketuai oleh Suwirjo sedangkan para anggota lainnya adalah Supranoto, Mr. Sudjono, Mr. Jusuf Wibisono, Sjamsuddin Saat, Mr. Takdir Alisjahbana dan B.R. Motik.

"Panitia Tujuh" ini, berdasarkan atas prinsip dan sistim pemilihan yang ditetapkan oleh Panitia terlebih dulu, berhasil melangsungkan pemilihan yang diikuti oleh 117 organisasi: 25 orang yang mendapat suara terbanyak, diusulkan kemudian angkatannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Kota sementara kepada Menteri Dalam Negeri. Sesuai dengan usul Panitia dengan keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 16 Maret 1950 No.B.Z.3/4/13, 25 orang yang dikemukakan diangkat sebagai anggota-anggota terhitung mulai tanggal 15 Maret 1950.

Para anggota Dewan Perwakilan Kota Sementara itu adalah: 1. Suwirjo, PNI, 2. Dt. Zainal Arifin, Masyumi, 3. Ny. Abuhanifah, Masyumi, 4. Sardjono, Masyumi, 5. Zainal Arifin Tanamas, Masyumi, 6. Mr. St. T. Alisjahbana, PSI, 7. P.A. De Quelju, PIR, 8. Supranoto, Persatuan Pegawai RI, 9. D.M. Janur, Serikat Buruh Bank, 10. Mr. Soewahjo, Gabungan Serikat Buruh Pemerintah, 11. Abdullah Salam, Serikat Dagang Islam Indonesia, 12. M.A.L. Tobing, Partai Murba, 13. Gazali Sjahlan, Serikat Tani Islam Indonesia, 14 A.A. Alaydroes, Panitia Politik Kalangan Arab, 15. Supardi, Serikat Buruh Sepatu Indonesia, 16. Hadji Darwis Amini, Gerakan Pemuda

Rapat Umum di depan Balai Agung Jakarta, setelah Perjanjian Linggar Jati ditanda tangani pada tanggal 26 Maret 1947.

Islam Indonesia, 17. Tabrani Noto Soedirdjo, Serikat Tani Indonesia, 18. S. Moestaman, Persatuan Bekas Tawanan, 19. Nawawi Dasuki, Gerakan Islam Indonesia, 20. Asmara Hadi, Serikat Buruh Balai Pustaka, 21. Ny. Setiati Surasto, Pemuda Puteri Indonesia, 22. Jusuf Bandjar, Pemuda Republik, 23. J. Hutagalung, Buruh Pemerintahan, 24. Jahja Malik, Serikat Tani Indonesia, 25. E. Coerdian, Serikat Buruh Perkebunan Indonesia.

Suwirjo Kembali Walikota Jakarta.

ATAS usul Partai Persatuan Marhaen, disokong oleh 55 organisasi lainnya, dikemukakan sebuah usul mosi untuk mendesak kepada Pemerintah agar diadakan pula pembaharuan jabatan walikota, yang masih di jabat oleh seorang yang diangkat pada jaman Prefederal.

Usul yang dikemukakan dalam rapat Panitia Tujuh disetujui. Dengan surat keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat tanggal 21 Maret 1950 No. 479 Suwirjo diangkat menjadi Walikota Jakarta lagi.

Pada tanggal 30 Maret 1950 dilangsungkan serah terima jabatan Walikota Jakarta dari Mr. Sastromuljono kepada Suwirjo.

Dalam waktu yang singkat Suwirjo menjabat Walikota Jakarta setelah pemulihan kedaulatan, berdasarkan sistim Pemerintahan Kota Jakarta, ciptaan Pemerintah Prefederal Belanda, yang pada pokoknya kembali kepada ketentuan-ketentuan Stadsgemeente ordonnantie 1926, ia antara lain merintis garis kebijaksanaan mengenai pemecahan masalah tanah perkotaan sebagai diuraikan dibawah ini.

Masalah Tanah Perkotaan dan Rencana Kota Pada Jaman Walikota Suwirjo.

PADA jaman pendudukan Jepang, yaitu pada tahun 1942 sampai 1945, oleh Pemerintah pada waktu itu dianjurkan, bahkan diharuskan kepada penduduk dengan perantaraan tonarigumi (rukun tetangga) dan kumicho-kumicho (kepala rukun tetangga) untuk menggarap semua tanah-tanah kosong, dengan menanam sayur-sayuran dan jarak untuk melipat ganda hasil bumi guna kepentingan bersama, dengan tidak memperdulikan tanah kepunyaan siapa yang digarap, bahkan juga taman-taman tidak ketinggalan untuk dipakai sebagai keperluan penanaman yang dianjurkan oleh pemerintahan pendudukan Jepang. Kepada penduduk diperbolehkan pula untuk mendirikan gubug-gubug di kebon tadi buat tempat menjaga kebon dengan ukuran gubug itu 2 x 2 M^2. Gubug-gubug ini lambat laun menjadi tambah besar sehingga lama kelama-lamaan merupakan rumah sederhana.

Upacara Penyerahan Kedaulatan yang ditandai dengan penurunan bendera Belanda dan penaikan Sang Merah Putih di Istana Gambir pada tanggal 27 Desember 1949.

Untuk pemakaian tanah-tanah ini oleh pemilik tanah tidak dipungut sewa baik oleh Pemerintah maupun oleh pihak partikelir apalagi kalau tanah-tanah ini kepunyaan bangsa asing yang pada waktu itu berada dalam tahanan. Selanjutnya tentang penggarapan tanah-tanah ini tidak diadakan pendaftaran sehingga tidak diketahui pula tentang letak, luasnya, nama penggarap dan atau lain-lain keterangan yang kemudian terbukti perlu dalam pemecahan persoalan okupasi yang dianjurkan oleh pemerintah pendudukan Jepang.

Pengumuman Pemerintah Kota tentang wajib pendaftaran.

PADA waktu pemerintahan nasional di tahun 1945 sampai tanggal 21 Juli 1947, saat Suwirjo ditangkap, walaupun dalam keadaan repot dan tempo-tempo berbahaya, Pemerintah Kota mengadakan pengumuman-pengumuman di surat-surat kabar, yang maksudnya mengharuskan penduduk agar mendaftarkan tanah yang digarapnya pada waktu Jepang di Kantor Urusan Tanah yang pada waktu itu berada di Kebon Sirih No. 20.

Banyak yang sudah didaftarkan tapi masih banyak pula yang belum. Kiranya dapat dimengerti, berhubung dengan kekacauan pada waktu itu, sehingga pelaksanaannya tidak dapat berjalan dengan sempurna. Malahan hanya sedapat-dapatnya saja dengan tenaga seada-adanya hingga pada tanggal 21 Juli 1947 kantor-kantor Pemerintah diduduki oleh orang-orang Belanda.

Presiden Sukarno didampingi oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke IX tiba di Jakarta dari Yogyakarta disambut oleh rakyat Jakarta pada tanggal 29 Desember 1949 masuk ke halaman Istana Merdeka.

Upacara pelantikan Suwirjo menjadi Walikota Jakarta yang pertama oleh Menteri Dalam Negeri Anak Agung Gede Agung pada tanggal 29 Maret 1950.

Bapak Suwirjo menghadap Presiden Sukarno di Istana Merdeka pada tanggal 5 Juni 1950.

Tindakan Pemerintah Kota sejak pertengahan 1950.

PADA pertengahan tahun 1950 dan seterusnya, seperti terbukti dari keputusan-keputusan, tercantum dalam notulen rapat-rapat Badan Pemerintahan Harian sejak tanggal 14 September 1950., persoalan pemakaian tanah yang melanggar hukum mendapat perhatian kembali sepenuhnya dari pihak pemerintah kota.

Keputusan-keputusan antara lain menetapkan penunjukan koordinator semua dinas yang bersangkutan dengan pembangunan fisik kota. Segala usaha akan dijalankan oleh Kotapraja untuk menyelesaikan soal pemakaian tanah yang tidak sah dengan cara yang tegas dan bijaksana. Sejak pertengahan tahun 1950 itu diadakan langkah-langkah untuk mengadakan penertiban pemakaian tanah yang tidak sah. Juga diputuskan, atas usul salah satu anggota dewan perwakilan rakyat kota pada waktu itu, Tabrani Notosoedirjo, supaya Jawatan Urusan Tanah bersama-sama Jawatan Urusan Daerah mengirimkan daftar pemakaian tanah yang lengkap dan jelas mengenai: 1) nama; 2) luas, 3) tujuan pemakaian, 4) mulai kapan dan keterangan-keterangan lain.

Pembuatan rencana dasar perkembangan kota oleh Jawatan Pekerjaan Umum.

DIPUTUSKAN bahwa Jawatan Pekerjaan Umum harus membuat sebuah Rencana Dasar Kota tersebut harus dipikirkan masalah pemindahan orang yang memakai tanah yang tidak sah.

Diinstruksikan agar supaya Bagian Pengawasan Bangunan bertindak seperlunya menurut ketentuan peraturan daerah yang berlaku terhadap orang-orang yang mendirikan gubug-gubug ditepi jalan untuk berjualan. Dalam rapatnya pada tanggal 12 Oktober 1950 BHP telah memperhatikan antara lain apa yang dikemukakan oleh Sekretaris Kota bahwa sudah waktunya pemerintah kota mengambil tindakan-tindakan terhadap berbagai pelanggaran, misalnya tentang pemakaian tanah yang tidak sah, mendirikan bangunan tidak seizin Kotapraja dan berjualan ditepi jalan.

Diperingatkan pula bahwa pelanggaran-pelanggaran tadi sekarang telah meningkat menjadi masalah yang besar. Oleh Badan Pemerintah Harian pada bulan Oktober 1950 diperintahkan kepada Jawatan Urusan Tanah supaya memberitahukan tanah-tanah mana dapat dipakai untuk pasar untuk penempatan pedagang-pedagang yang memakai tanah tanpa izin.

Ketetapan-ketetapan tentang cara pemakaian tanah dan okupasi liar.

DALAM rapat Badan Pemerintahan Harian pada akhir tahun 1950 diadakan suatu ketetapan mengenai masasalah pemakaian tanah sebagai berikut:

1. Tanah-tanah persil perpetakan yang sudah merupakan perpetakan untuk bangunan yang telah diokupasi oleh orang yang telah dijanjikan akan diberi hak atas tanah untuk mendirikan rumah, yang konsep kontraknya belum dibikin dan rumah belum selesai, sedang dibikin atau akan dibikin, diberikan hak atas tanah dimaksud, dengan syarat bahwa pembangunan rumah harus segera diselesaikan.
2. Tanah-tanah yang belum termasuk perpetakan, yang dipakai dengan tidak sah, sementara pemakaian dapat dilegalisasi dengan perjanjian sewa menyewa yang sewaktu-waktu dapat dibatalkan, dengan syarat bahwa tanah harus diserahkan kembali kepada kotapraja atau kepada negara, jika rencana kota dilaksanakan dan memerlukan persil yang dipakai tadi, bilamana okupasi tidak dapat disesuaikan dengan rencana kota tersebut.
3. Mengenai tanah yang dipakai, tanpa rencana perpetakannya, yang menyalahi rencana kota atau pemandangan dan atau yang dapat membahayakan, seperti okupasi dipinggir jalan, dipinggir kali dan sebagainya, harus selekas mungkin diusahakan pemindahan atau pengusiran pemakai tidak sah.

Selanjutnya dikemukakan, bahwa perlu pula diberi petunjuk-petunjuk oleh Badan Pemerintahan Harian tentang cara bagaimana meniadakan pemakaian tanah dan mendirikan bangunan secara gelap sekarang ini. Selain dari petunjuk-petunjuk yang diberikan pada waktu yang lampau, antara lain mengambil tindakan dengan bantuan polisi, perlu pemecahan-pemecahan masalahnya dengan jalan lain.

Keinginan mendapat tanah dan mendirikan rumah-rumah yang hingga kini berjalan

1950
PASAR-MALAM
KENANG-KENANGAN
17 AGUST.- 17 SEPT.

secara gelap ini wajib oleh Kotapraja dialirkan kepada jalan yang teratur agar Kotapraja dikemudian hari tidak menghadapi soal-soal planologis atau "Stedebouwkundig" yang sulit yang akan memakan biaya berlipat ganda untuk membereskannya, daripada jika pada waktu sekarang Kotapraja telah dapat memberi pimpinan kearah okupasi tanah dan mendirikan bangunan secara teratur. Untuk keperluan itu agar, demikian Badan Pemerintahan Harian, diadakan rapat oleh Direktur Jawatan Pekerjaan Umum dan Kepala Jawatan Urusan Tanah untuk pemecahan persoalannya.

Tindakan-tindakan tertib hukum (law enforcement).

TINDAKAN-tindakan penertiban, sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dilakukan dengan menempuh jalan: Mengkoordinasi tindakan dibawah pimpinan Pemerintah Kota dengan menyusun program antar-jawatan kotapraja sendiri (Jawatan Penerangan), Jawatan Urusan Tanah dan Jawatan Urusan Daerah dalam kerjasama dengan Kantor Besar Kepolisian dan Kejaksaan, dimana dipandang perlu, dengan minta bantuan Komandan KMKBDR untuk pelaksanaan ketentuan-ketentuan Darurat Perang (SOB) yang masih berlaku, untuk mengambil tindakan bersama melalui proses:

a memberi penerangan dan pemberitahuan terlebih dulu;
b. bila tidak berhasil dan pemberitahuan diabaikan, mengambil tindakan kepolisian;
c. mengingat situasi dan kondisi, bila okupasi liar dapat membahayakan kepentingan/keselamatan Negara, dengan penerapan ketentuan-ketentuan Keadaan Darurat Perang (SOB) yang masih berlaku.

Hal ini khususnya perlu dilakukan untuk mengatasi okupasi liar di daerah perkampungan (sekarang telah menjadi Jalan Mohammad Husni Thamrin, kompleks Hotel Indonesia, Hotel Asoka dan President Hotel), yang pada tahun lima puluhan masih penuh dengan okupasi liar.

Upacara Kemerdekaan R.I. pada tanggal 17 Agustus 1950 di Gedung Proklamasi.

Yang dipandang membahayakan khususnya okupasi liar dibawah antena-antena radio (zendermasten) dari PTT di perkampungan pada ujung jalan Madura, yang dipergunakan bagi siaran-siaran keluar negeri.

Dikhawatirkan kemungkinan adanya maksud subversi, yang dapat membahayakan keselamatan Negara.

Tantangan yang berupa pemakaian tanah dengan menyalahi hukum yang penangulangannya telah dirintis oleh Suwirjo ini (Suwirjo sendiri langsung terjun kelapangan untuk memberi penerangan di kala itu), segera setelah menggantikan Suwirjo sebagai Walikota Jakarta Raya, dilanjutkan oleh Sjamsuridjal, dengan turut menandatangani pengumuman bersama yang disiarkan dengan perantaraan, surat-surat kabar oleh Kepala Kejaksaan Let. Kol. Rd. Soenario, Komandan K.M.K.B.D.R. May. Kosasih dan Kepala Kepolisian Jakarta Raya dan Sekitarnya.

Pengumuman berbunyi sebagai berikut:

"Kepala Kejaksaan pada Pengadilan Negeri, merangkap Kepala Kejaksaan Tentara pada Pengadilan Negeri Tentara di Jakarta c.a. bersama ini memberitahukan kepada khalayak ramai: Barang siapa yang mendirikan bangunan-bangunan dengan tiada pakai ijin yang syah dan karena itu melanggar undang-undang yang sekarang masih berlaku, diwajibkan dalam tempo satu bulan dari tanggal pengumuman ini, membongkar bangunan-bangunan tersebut. Terhadap mereka yang tidak memenuhi kewajiban tersebut diatas akan diambil tindakan keras. Tindakan ini dapat juga diadakan, meskipun waktu tersebut belum liwat jikalau dianggap perlu."

Berhubung dengan banyaknya kejadian tentang penyerobotan tanah milik Kotapraja kasus yang terkenal adalah antara lain penyerobotan tanah VIJ Petojo - oleh Walikota Suwirjo, pada tanggal 28 September 1950, dikeluarkan pengumuman mengenai „PEMAKAIAN TANAH" yang berbunyi sebagai berikut:

"Dengan sangat menyesal Kotapraja dewasa ini harus berhadapan dengan kenyataan, bahwa telah banyak sekali tanah kepunyaannya yang digunakan oleh penduduk dengan cara yang tidak sah. Kotapraja cukup menginsyafi bahwa kebanyakan dari perbuatan-perbuatan itu semata-mata terdorong oleh kebutuhan, akan tetapi meskipun demikian perlu diketahui oleh yang bersangkutan, bahwa perbuatan serupa itu tidak saja melanggar peraturan hukum, akan tetapi juga sangat merugikan kepentingan masyarakat umumnya.

Pasar Malam dalam rangka memeriahkan Peringatan Proklamasi Kemerdekaan R.I. pada tanggal 17 Agustus 1950 yang diadakan di Lapangan Gambir.

Oleh karena itu, maka dengan jalan ini Kotapraja memperingatkan penduduk seumumnya, supaya jangan perbuatan semacam itu dan mereka yang melanggar akan dituntut berdasarkan pasal 25

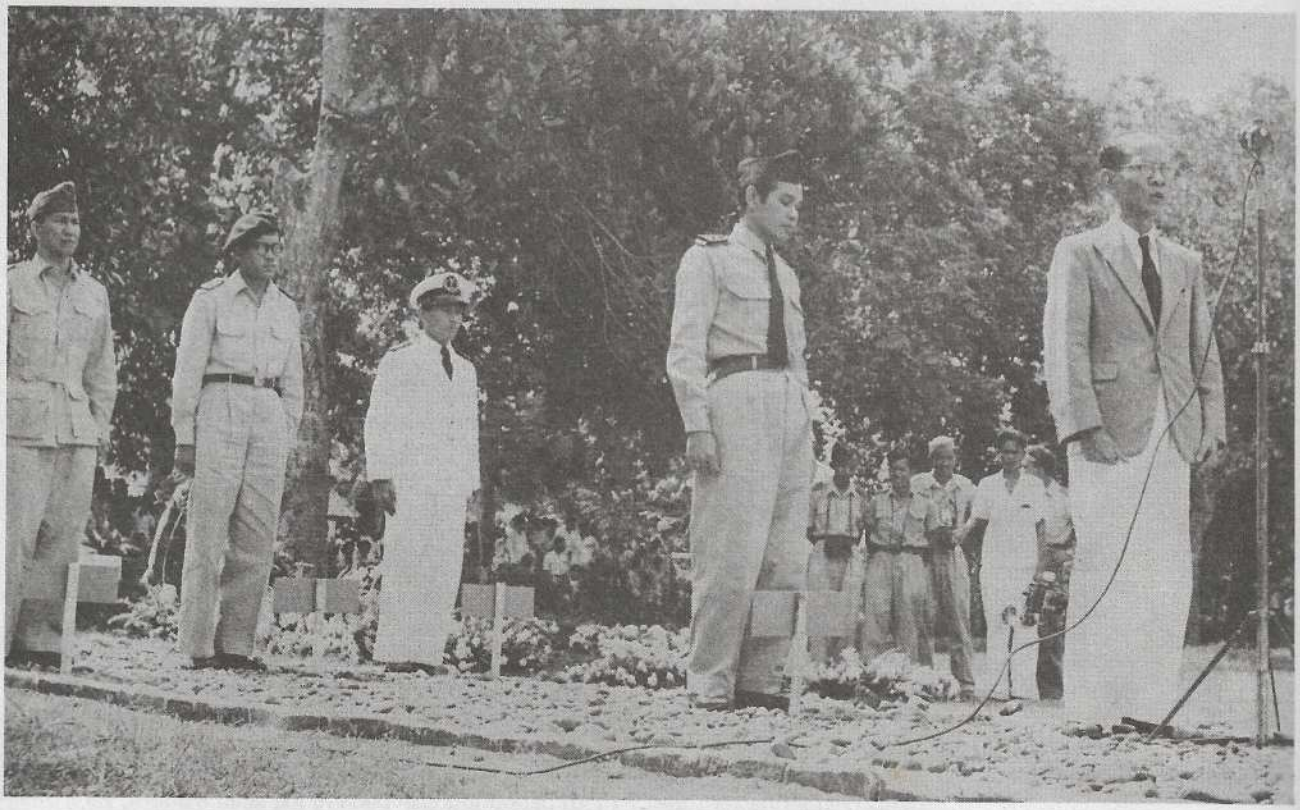

ayat 3 dari Peraturan Polisi Umum 1942. Kotapraja sangat mengharapkan bantuan penduduk seumumnya mengenai masalah ini dan berpengharapan pula, bahwa sesudahnya pengumuman ini tidak lagi akan terjadi pemakaian tanah seperti diterangkan diatas".

Mengenai permohonan penduduk yang menyampaikan permintaan kepada Kotapraja agar Kotapraja mengambil tindakan terhadap orang-orang yang memakai tanah mereka tanpa izin mereka, Kotapraja mengambil sikap, bahwa pemilik atau pemegang hak yang sah hendaknya dengan ketentuan hukum, mengajukan hal itu dimuka pengadilan.

Perhatian Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap masalah okupasi liar.

PERHATIAN Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap okupasi tanah secara tidak sah, ternyata dari surat tertanggal 10 Maret 1952, No. S.P.P.5/3/23 dari Menteri Dalam Negeri, Mr. Iskaq Tjokrohadisurjo, yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, perihal pertanyaan-pertanyaan dalam rapat Seksi Dalam Negeri DPR-RI pada tanggal 14, 21 dan 28 Nopember 1951 (pembongkaran rumah-rumah di Surabaya). Surat berbunyi sebagai berikut:

"Menyambung surat kami bertanggal 28 Januari 1952 No. SPP.5/2/6 mengenai ikhwal tersebut diatas, bersama ini kami sampaikan dengan hormat penjelasan-penjelasan susulan tentang tindakan terhadap "onwettige occupanten" di Kota Besar Surabaya sebagai berikut: Sebagaimana halnya di Kotapraja Jakarta Raya dan Kota-kota Besar lainnya, maka kesukaran-kesukaran yang timbul disebabkan oleh orang-orang yang secara tidak sah telah menempati di dalam Kota, dialami juga oleh Kota Besar Surabaya. Disamping memberi penerangan-penerangan secara sabar dan teratur, maka untuk bertindak tegas. Adapun para pemakai tanah yang tidak sah itu boleh dibagai dalam 5 golongan, yaitu:

1. mereka yang menempati tanah-tanah ditepi jalan, taman-taman (termasuk juga jalan umum),
2. mereka yang menempati tanah-tanah Kota Besar Surabaya,
3. mereka yang menempati tanah-tanah kepunyaan bangsa Indonesia (hak yayasan),
4. mereka yang menempati tanah-tanah Kota Besar Surabaya,
4. mereka yang menempati tanah-tanah eigendom,
5. mereka yang menempati tanah-tanah partikelir,

Mula-mula

Surabaya mengadakan tindakan terhadap golongan pertama dan kedua. Pelanggar-pelanggar dari golongan ini dihadapkan pengadilan. Setelah mereka oleh Hakim dijatuhi hukuman denda atau hukuman kurungan berdasarkan pelanggaran terhadap pasal 13 ayat 1 dari "Peraturan Pendirian Banguan-bangunan Kota Besar, jika dalam waktu 14 (empat belas) hari sebagai ditetapkan dalam surat putusan itu, bangun-bangunan yang bersangkutan belum juga dibongkar, maka pembongkaran dilakukan oleh Kota Besar Surabaya atas biaya yang berkepentingan.

Tindakan seperti telah kami uraikan diatas kemudian berlaku pula terhadap golongan ketiga, keempat dan kelima, setelah pemilik-pemilik tanah yang bersangkutan memajukan permohonan kepada Kota Besar Surabaya untuk mempergunakan tanahnya sendiri, terutama untuk mendirikan bangun-bangunan yang izinnya menurut pertimbangan Kota Besar Surabaya dapat diberikan.

Mengenai pelanggar-pelanggar dari golongan kelima dapat diterangkan lebih lanjut, bahwa mereka terlebih dulu dipersilahkan berhubungan dengan kantor Gubernur Bagian Agraria guna menyelesaikan soal hak penempatan tanah yang bersangkutan.

Jika kemudian ternyata, bahwa mereka sungguh-sungguh berhak menempati tanah tersebut, maka kepada mereka dapat diberi izin mendirikan bangunan dengan syarat, bahwa dalam konstruksi bangun-bangunannya yang telah mereka dirikan itu harus diadakan perubahan-perubahan menurut petunjuk-petunjuk dari Kota Besar Surabaya.

Mengenai pemakaian tanah untuk keperluan pertanian dapatlah diterangkan disini, bahwa soal ini harus diselesaikan sendiri oleh mereka yang berkepentingan dengan pemilik tanah secara tidak sah, maka disamping pembongkaran gubug-gubug, Kota Besar Surabaya mengadakan tindakan-tindakan sebagai berikut: Untuk mereka yang gubug-gubugnya telah dibongkar, disediakan tanah diperbatasan Kota yang masih termasuk daerah Kota Besar Surabaya. [Dengan demkian, maka banyaklah orang-orang yang tidak mempunyai tempat tinggal dapat tertolong, sedang jumlah penduduk di tengah-tengah Kota, yang makin lama makin meningkat, dapat dikurangi, sedangkan rangka bidang-bidang tanah yang diperuntukkan guna mendirikan bangun-bangunan (bebouwdekom) bertumbuh luas.

Untuk mereka yang membutuhkan tempat berjualan (warung, dsb.), disediakan tanah-tanah guna mendirikan kiosk dari kayu yang berbentuk sementara , satu dan lain menurut petunjuk-petunjuk dari Kota Besar Surabaya.

Peresmian Taman Pahlawan Tanggerang oleh Walikota Suwirjo pada Hari Angkatan Perang 5 Oktober 1950 yang disaksikan oleh Kolonel Simatupang dan lain-lain pejabat sipil dan militer.

Walikota Suwirjo bersama wartawan dalam rangka meninjau kota pada tanggal 1 Nopember 1950 dipotret dimuka Gedung Balai Kota.

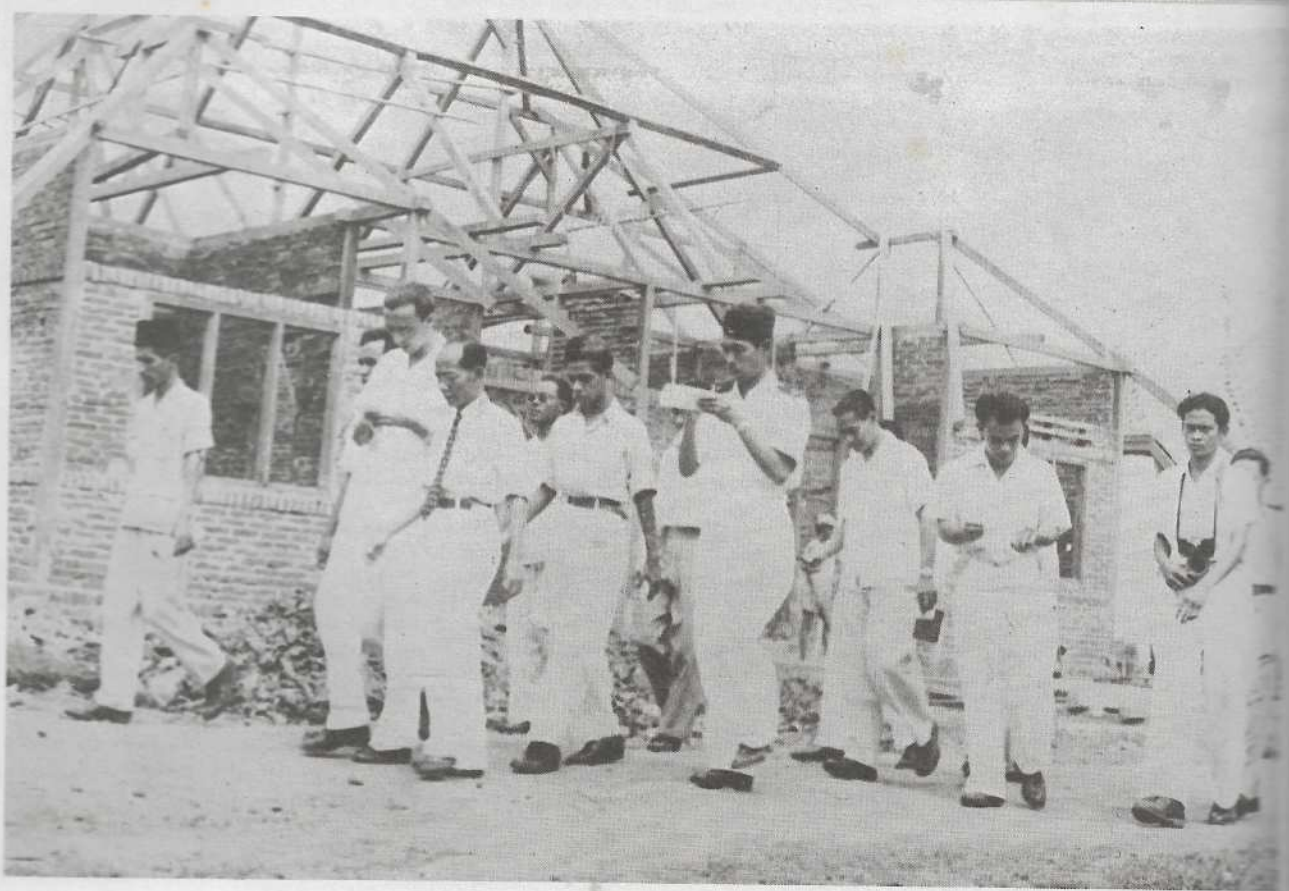

Kebijaksaan pengeluaran tanah perkotaan.

PADA sidangnya tertanggal 6 Juli 1950, Dewan Perwakilan Sementara kotapraja Jakarta Raya, mengajukan mosi, yang bunyinya seluruhnya sebagai berikut:

MOSI DEWAN PERWAKILAN SEMENTARA
KOTAPRAJA JAKARTA RAYA

Sidang Dewan Perwakilan Sementara Kotapraja Jakarta Raya yang diadakan pada tanggal 6 Juli 1950,

Mengingat :
1. Bahwa tanah adalah pokok dan sendi bagi penghidupan rakyat seumumnya, oleh karenanya maka perlulah ada peraturan-peraturan yang tertentu dari Pemerintah agar rakyat terjamin untuk dapat memergunakan tanah-tanah itu.
2. Bahwa Bangsa Indonesia dizaman yang lampau tidak mempunyai hak yang tertentu yang progressief di dalam negaranya mengenai soal tanah.
3. Bahwa keadaan dan kebiasaan Bangsa Indonesia di desa-desa mempunyai rumah-rumah sendiri walaupun dibangun dengan cara sederhana yang hingga sekarang ini masih berjalan demikian; tetapi dikota-kota bangsa Indonesia keadaannya tiadalah sedemikian.
4. Bahwa tanah Kotapraja tahun 1949 sudah banyak dijual oleh Pemerintah yang silam sehingga jumlahnya mencapai angka 147.783 m^2 dengan harga f.1.215.089,47.
5. Bahwa tanah-tanah (persil-persil) kepunyaan Kotapraja yang disewakan ditahun 1949 jumlah yang terbesar bukan ditangan bangsa Indonesia.

Menimbang :
1. Bahwa keadaan sekarang tidak mengizinkan lagi kejadian semacam itu berjalan terus-menerus.
2. Bahwa kalau hal semacam ini tidak mendapat perobahan, akan sangat merugikan bagi negara dan rakyat Indonesia.

Memutuskan :
1. Mendesak kepada Pemerintah Pusat agar supaya segera menetapkan suatu politik agraria yang progresief, sesuai dengan perobahan zaman dan yang mengutamakan kepentingan serta kesejahteraan rakyat banyak.
2. Mendesak kepada Pemerintah Kotapraja Jakarta Raya dan Pemerintah Pusat agar supaya sementara menunggu Politik Agraria yang baru itu:
   a. Menunda semua penjualan tanah baru kepunyaan Kotapraja dan Negeri.
   b. Menunda persewaan tanah-tanah baru kepunyaan Kotapraja dan Negeri.
   c. Mengambil kembali tanah-tanah Kotapraja dan Negeri yang sesudah disewakan dan hingga kini belum juga dipergunakan untuk maksud semula.
   d. Mengadakan peraturan-peraturan yang menentukan bahwa tiap pemindahan persewaan tanah Kotapraja dan Negeri hendaklah dengan persetujuan Pemerintah Kotapraja dan Negeri.

Jakarta, 6 Juli 1950.

Disampaikan kepada :
1. Pemerintah Pusat R.I.S. dan R.I.
2. Menteri Dalam Negeri R.I.S. dan R.I.
3. Kepada Parlemen R.I.S. dan K.N.I.P.

Pemberian hadiah oleh Walikota Suwirjo kepada ibu-ibu yang anaknya lahir tepat pada hari kemerdekaan di Balai Kota pada tanggal 21 Oktober 1950.

Sehubungan dengan mosi tersebut, yang oleh Dewan Perwakilan Sementara diterima dengan suara bulat, Walikota Suwirjo mengadakan pengumuman sebagai berikut: "Selaras dengan makna mosi Dewan Perwakilan Kota Sementara Kotapraja Jakarta Raya, tanggal 6 Juli 1950, yang diambil dengan suara bulat, agar untuk sementara waktu Kotapraja Jakarta Raya membekukan segala pemberian hak atas tanah, baik yang berupa hak eigendom, maupun erfpacht atau sewa hingga ada petunjuk-petunjuk Pemerintah Pusat, berdasarkan politik baru terhadap pemberian hak atas tanah, dengan ini, atas nama Badan Pemerintahan Harian Kotapraja Jakarta Raya, diberitahukan sebagai berikut:

Peninjauan Kerja Walikota Suwirjo bersama wartawan keberbagai tempat di Jakarta pada tanggal 1 Nopember 1950.

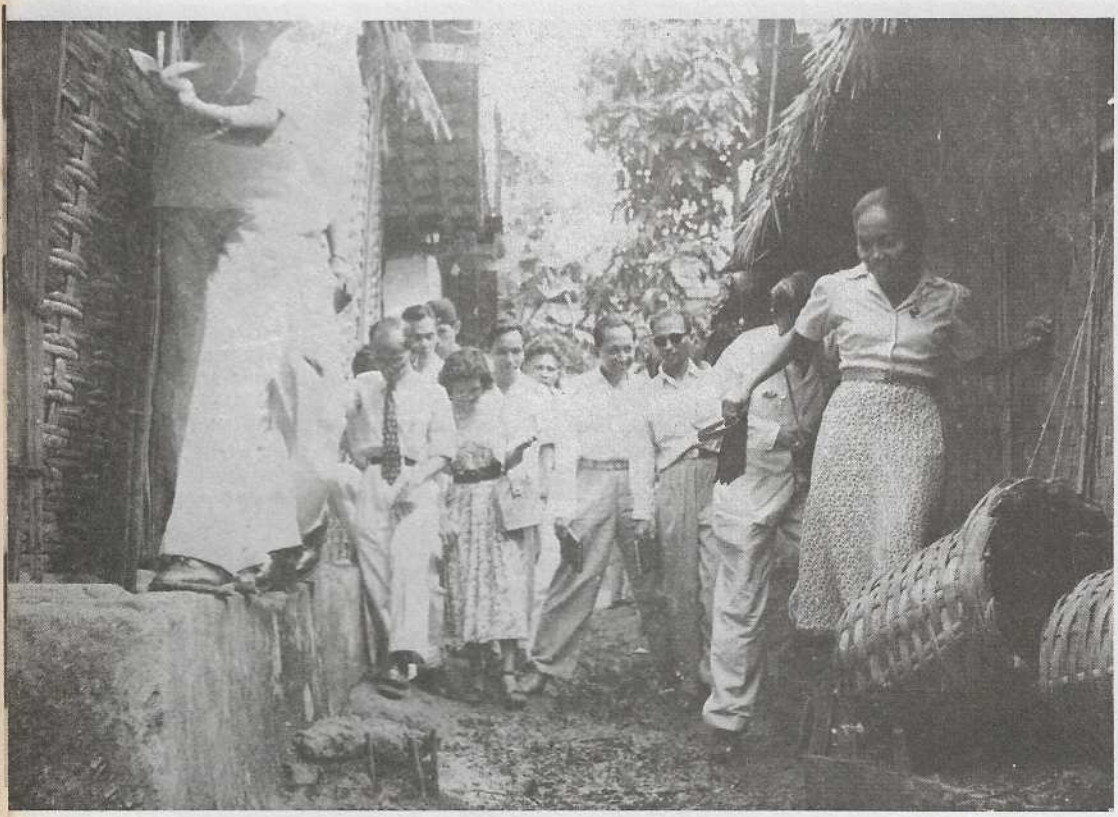

Peninjauan Kerja Walikota Suwirjo bersama wartawan masuk kekampung kampung kota pada tanggal 1 November 1950.

I.. Untuk sementara waktu, sambil menunggu keputusan Pemerintah Pusat tadi, permintaan membeli tanah dengan hak eigendom oleh pemegang erfpacht atau penyewa tanah Kotapraja yang dalam kontrak erfpacht atau sewa menyewa oleh Pemerintah Kotapraja yang dahulu stadsgemeente Batavia pada zaman Hindia Belanda (Penulis) diberi hak untuk membeli tanah erfpacht atau sewa tadi dengan hak eigendom, penyelesaiannya terpaksa ditunda hingga diterima petunjuk-petunjuk dari Pemerintah Pusat tentang pemberian hak atas tanah Kotapraja;

II. Penyewa tanah Kotapraja yang hendak mengoperkan hak sewa tanah yang disewanya dari Kotapraja, diwajibkan terlebih dahulu meminta izin Badan Pemerintahan Harian, Kotapraja, izin mana harus diminta sebelum penyewa melaksanakan maksud menjual atau mengoperkan bangunan-bangunan yang ada diatas tanah yang disewanya itu kepada orang lain."

Latar belakang dari mosi Dewan.

PADA masa pemerintahan Hindia Belanda "Stadsgemeente Batavia", menjalankan kebijaksanaan tanah perkotaan bagi perluasan dan pengembangan kota dengan jalan membeli tanah-tanah partikelir sebanyak mungkin, yang dimasukkan dalam suatu perusahaan tanah. Dengan jalan demikian tercipta bagian-bagian wilayah kota seperti Gondangdia, Menteng, Petojo, Matraman dan sebagainya yang memenuhi persyaratan sebagai tempat kediaman, tempat kerja dan usaha, rekreasi dan lalu-lintas, sesuai dengan tuntutan persyaratan planologi zaman modern dalam permulaan abad XX, di kota-kota besar, dalam rangka politik desentralisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Belanda terhadap kota-kota besar tersebut.

Kota-kota besar merupakan "growth poles" bagi pengembangan politik ekonomi jajahan yang didominasi oleh kepentingan golongan Belanda, yang merupakan mayoritas didalam dewan pemerintahan kota. Tanah-tanah perpetakan bagi segala macam keperluan disediakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan daerah untuk diperoleh bagi setiap peminat dengan hak eigendom, hak erfpacht untuk jangka waktu 75 tahun dan hak sewa untuk lima belas tahun. Dalam kontrak erfpacht umumnya terdapat ketentuan, bahwa pemegang erfpacht, jika dikehendaki, bisa mendapat tanah erfpachtnya sebagai tanah dengan hak eigendom.

Dalam situasi dan kondisi kolonial pada waktu itu tanah-tanah perpetakan yang tersedia, boleh dikatakan semuanya jatuh ditangan golongan Belanda dan mereka yang kondisi ekonominya sederajat dengan mereka. Pada "intermezzo", di kala pemerintahan prefederal Belanda sejak Aksi Militer Pertama pada pertengahan tahun 1947 hingga pemulihan kedaulatan, terjadi penjualan tanah-tanah perpetakan kepada pemegang hak erfpacht yang mempergunakan kesempatan dalam kontrak erfpacht untuk membeli sebagai tersebut diatas.

Mosi Dewan tidak sejalan dengan instruksi Menteri Dalam Negeri No. 5 H 50.

JIWA dari mosi Dewan ini pada hekekatnya tidak sejalan dengan instruksi sebagai dimaksud dalam surat *Menteri Dalam Negeri tertanggal 6 Juni 1950 No. H. 20/7/10*, yaitu Instruksi No. 5 H 50 tentang pemberian hak Barat baru, yan bagi kotapraja-kotapraja yang ditunjuk, yaitu, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Malang dan Palembang, demi kepentingan pembangunan yang harus berjalan terus, tidak keberatan bila sementara menunggu undang-undang Agraria yang baru, diberikan hak eigendom oleh kota-kota besar yang dimaksud.

Kebijaksanaan tanah perkotaan dari Pemerintah Pusat yang diharapkan akan memberi pedoman bagi pengeluaran tanah perkotaan pada zaman walikota Suwirjo tidak kunjung datang.

Sementara itu, bagi mengisi kekosongan, Dewan Perwakilan Kota Sementara memberi kuasa kepada Badan Pemerintahan Harian untuk pengeluaran tanah perpetakan Kotapraja bagi pembangunan dengan hak sewa yang sewaktu-waktu dapat dibatalkan, dengan surat keputusannya, tertanggal 19 April 1951 No. 9/D.K., yang berbunyi sebagai berikut.

Walikota Suwirjo menerima Tamu Agung Perdana Menteri Nehru dari India dalam jamuan makan di Balai Kota pada tahun 1951.

DEWAN PERWAKILAN KOTA SEMENTARA JAKARTA RAYA

Mengingat :

1. bahwa oleh Dewan pada tanggal 6 Juli 1950 telah diterima suatu mosi yang mengandung maksud untuk membekukan pemberian tanah, sementara menunggu politik agraria yang baru oleh Pemerintah Pusat;
2. bahwa sampai kini belum juga diberikan pedoman baru oleh Pemerintah Pusat;
3. bahwa pada khususnya masyarakat golongan bangsa Indonesia sangat membutuhkan untuk mendapatkan tanah untuk mendirikan rumah-rumah rakyat dan perusahaan-perusahaan kecil-kecil;
4. bahwa sementara menunggu penetapan politik agraria yang baru oleh Pemerintah Pusat, dianggap perlu mengadakan aturan sementara bagi memberikan tanah-tanah;
5. bahwa untuk sementara, sebelum adanya suatu aturan yang tetap, untuk memenuhi kebutuhan pada waktu ini, sebaik-baiknya diadakan aturan menyewakan tanah dengan perjanjian yang dapat diakhiri pada setiap waktu;
6. bahwa untuk mempercepat penyelesaiannya dianggap perlu kepada B.P.H. diberikan kuasa penuh untuk mengatur dan menyelenggarakan pemberian tanah itu.

Membaca surat B.P.H. tanggal 18 April 1951 No. 1099/1;

Mendengar : keterangan dengan lisan dan pemandangan B.P.H. tersebut;

Mengingat : pasal 93 dan 96 dari "Stadsgemeente Ordonantie 1926", keputusan Presiden R.I.S. tanggal 30 Juni 1950 No. 203 dan Keputusan Presiden R.I. No. 69 tahun 1950;

M E M U T U S K A N :

Sambil menunggu penetapan politik agraria oleh Pemerintah Pusat memberi kuasa mulai hari ini kepada Badan Pemerintahan Harian untuk :
menetapkan perpetakan dan peruntukan ("bestemming..) tanah, menetapkan harga dasar tanah, menyewakan tanah di bawah tangan atau dengan tawaran kepada umum, menurut ketentuan-ketentuan yang dianggapnya baik dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. bahwa kepada Dewan tiap-tiap triwulan harus disampaikan laporan tentang segala perbuatan B.P.H. dalam hal ini;
2. bahwa jumlah harga sewa tanah itu dalam setahun 7% dari harga dasar tanah yang ditetapkan;
3. bahwa persewaan boleh diakhiri pada setiap waktu;

dan selanjutnya dengan syarat, bahwa pemberian kuasa tersebut diatas itu dapat ditarik kembali pada setiap waktu.

Dewan Perwakilan Kota Sementara tersebut;

Walikota,

ttd,

Suwirjo

Kesimpulan yang dapat diambil tentang cara-cara Pemerintah Kota menanggulangi masalah tanah perkotaan di wilayah kekuasannya pada zaman Suwirjo, ialah bahwa tindakan-tindakan Pemerintah Kota mencerminkan hasrat untuk :

- menegakkan tertib hukum dalam hal pemakaian tanah;
- agar Pemerintah Pusat menetapkan kebijaksanaan nasional tentang tanah perkotaan yang memenuhi aspirasi bangsa Indonesia dalam alam kemerdekaan Tanah Air.

SJAMSURIDJAL

SJAMSURIDJAL

Lahir di Karanganyar, 11 Oktober 1903; Wafat di Surabaya, 29 Desember 1964
Walikota Jakarta Raya, 27 Juni 1951 – 1 Nopember 1953.

RIWAYAT HIDUP SINGKAT

SJAMSURIDJAL dilahirkan pada tanggal 11 Oktober 1903 di Karanganyar, Karesidenan Kedu putra seorang penghulu pengadilan Negeri. Ia disekolahkan di Eerste Europeesche Lagere School (ELS) di Gombong dan tamat pada tahun 1917, kemudian melanjutkan ke Hogree Burgerschool (HBS) di Jakarta, hanya sampai kelas III karena ayah Sjamsuridjal meninggal, sehingga ia melanjutkan pelajarannya di Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) Magelang, kemudian kembali lagi ke Jakarta untuk belajar di Rechtsschool (Sekolah Menengah Hukum) dan selesai pada tahun 1925.

Kesadaran nasional dan bakatnya berorganisasi terlihat sejak ia duduk di HBS. Pada tahun 1923 ia terpilih menjadi Ketua Jong Java karena tidak puas, bahwa organisasi itu tidak berpolitik dan tidak menerima usulnya untuk memajukan Islam dalam programnya, maka ia keluar bersama kawan-kawan sepaham dan mendirikan Jong Islamieten Bond (Perserikatan Muda Islam) pada tanggal 1 Januari 1925 serta menjadi ketuanya.

Setelah menjadi Penasehat JIB, pada tahun 1929 menjadi Anggauta Pengurus Besar Partai Sarikat Islam Indonesia. Di samping itu juga menjadi Ketua Pengurus Besar Sarikat Sekerja Pegawai-Pegawai Pegadaian Indonesia (1930) untuk seluruh Indonesia. 1950 menjadi Anggauta Dewan Pimpinan Masjumi.

Di antara para walikota Jakarta Raya, barangkali Sjamsuridjal adalah yang banyak pengalaman di bidang pemerintahan sejak jaman Hindia Belanda.

Setelah selesai dari Sekolah Menengah Hukum (Rechtsschool) ia menjadi pegawai Pengadilan Negeri (Landraad), Pengadilan Kepolisian (Landgerecht), anggauta pengadilan dan jaksa pada Pengadilan Kepolisian.

Jabatan itu diduduki secara berpindah-pindah sejak dari Karanganyar (Kedu), Yogyakarta, Indramayu, Tasikmalaya, Purworejo dan Bandung. Pada jaman Jepang menjadi Ketua Pengadilan Negeri di Bandung.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan, Sjamsuridjal menjadi Ketua Komite Nasional Indonesia Kota Bandung dan sejak Oktober 1945 menjadi walikotanya. Oktober 1945 menjadi walikota Solo dengan pangkat Residen. Setelah Aksi Militer Belanda, pada Januari 1949 ditangkap dan dipenjarakan tentara Belanda selama ± 6 bulan dan baru dilepaskan di Jakarta setelah perjanjian Roem-van Royen di tanda tangani. Beliau diperbantukan pada Delegasi (perutusan) Republik Indonesia di Jakarta. Kemudian dipekerjakan di Kementerian Dalam Negeri Yogyakarta, dan diangkat menjadi penasehat Delegasi Republik Indonesia. Beliau juga menjadi Residen Pati, tetapi tetap berkedudukan di Kementerian Dalam Negeri. Setelah pemulihan kedaulatan, menjadi Kepala Bagian Urusan Parlemen, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Serikat di Jakarta dan kemudian Wali Kota Jakarta Raya (1951 – 1953). Setelah kembali ke Kementerian Dalam Negeri beliau pensiun sebagai Gubernur pada tahun 1959. Sejak itu aktif sebagai pemimpin kegiatan sosial Pra Yuana hingga wafatnya pada tanggal 29 Desember 1964.

Menurut Mr. Supangkat, yang telah mengenal Sjamsuridjal sejak jaman pergerakan nasional beliau berbakat kepemimpinan dalam organisasi politik, sosial maupun agama, ramah tamah dalam pergaulan dan rapih dalam berbusana.

(ARS)

MENGENANG JASA SJAMSURIDJAL SEBAGAI WALIKOTA JAKARTA

Oleh : Mr. Soepangkat

SEHUBUNGAN dengan penunjukan saya, dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 97 Tahun 1977 tanggal 22 Pebruari 1977, sebagai pembantu khusus pengumpulan data-data mengenai peristiwa-peristiwa bersejarah Kota Jakarta; dihubungkan dengan maksud untuk penulisan karangan yang mengenangkan jasa-jasa Kepala Daerah-Kepala Daerah Ibukota Negara sejak Kemerdekaan , dalam rangka perayaan ulang tahun Kota Jakarta tepat 450 tahun pada 22 Juni 1977, maka saya mendapat bahan yang berupa manuscript sejarah tentang Walikota Sjamsuridjal yang ditulis oleh Sdr. Drs. Idik Mutholib dari Sdr. G.A. Warmansjah BA Kepala Dinas Museum & Sejarah Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Manuscript tersebut menurut anggapan saya cukup menggambarkan jasa-jasa Sjamsuridjal sebagai Walikota Jakarta, di masa jabatannya yang singkat antara tanggal pengangkatan 27 Juni 1951 hingga berakhirnya jabatannya, berhubung dengan penggantian Kabinet, pada akhir tahun 1953.

Setelah saya mengadakan pembicaraan beberapa kali dengan penulis dengan tujuan menyesuaikan manuscript bagi keperluan publikasi dalam rangka peringatan 450 tahun usia kota Jakarta, lahir karangan ini.

Saya sekedar memberi petunjuk sebagai ex-pejabat yang dimasa jabatan Walikota Sjamsuridjal almarhum menjadi pembantunya terdekat, selaku Sekretaris Daerah.

Pada kesempatan ini saya ingin menyatakan terima kasih kepada Bapak Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta atas penunjukan saya untuk memberi bantuan.

Kepada Sdr. Warmansyah atas bantuannya memberikan manuscript dan Sdr. Idik Mutholib atas kesediaannya untuk menerima petunjuk-petunjuk saya dalam penyempurnaan naskah karyanya, saya menyampaikan terima kasih pula.

SJAMSURIDJAL SEBELUM MENJADI WALIKOTA JAKARTA RAYA

Bandung Lautan Api.

PADA waktu peristiwa Bandung Lautan Api meletus, tepatnya pada tanggal 24 Maret 1946, Sjamsuridjal ikut berperanan ditengah-tengah massa rakyat sebagai Walikota Bandung sejak berdirinya Republik Indonesia.

Pengangkatan Sjamsuridjal menjadi Walikota Bandung besar artinya bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia, yang sudah dirintisnya sejak masa muda sebagai anggota Jong Java, pendiri Jong Islamieten Bond dan ketua KNIP kota Bandung.

Pada waktu timbul revolusi, Sjamsuridjal wakil ketua (ondervoorzitter) Pengadilan Negeri Bandung. Karirnya dibidang Pengadilan, sudah dimulai sejak tahun 1925 di Yogyakarta setelah lulus dari Rechtsschool di Jakarta, kemudian beberapa kali pindah tugas. Pada tahun 1933 bertugas di kantor pengadilan Indramayu, Jawa Barat, tahun 1936 bertugas di kantor pengadilan Tasikmalaya, Jawa Barat dan pada tahun 1942 dipindahkan tugasnya kekantor Kehakiman Bandung.

Pergolakan revolusi melanda kota Bandung, dimana para pemuda bangkit mengadakan perlawanan, perebutan senjata dan pengambil alihan kekuasaan dari tangan Jepang yang tetap mempertahankannya.

Sjamsuridjal yang dikenal sebagai pejuang pergerakan kemerdekaan Indonesia, tidak tinggal diam. Ia lalu menggabungkan diri dengan pemuda-pemuda Bandung yang revolusioner untuk ikut aktif.

Sjamsuridjal kemudian atas saran dan permintaan kawannya, Djerman Prawira Winata, masuk menjadi anggota KNIP kota Bandung karena bakat dan kecakapannya dibidang politik, maka Sjamsuridjal menjadi ketua KNIP kota Bandung. Tugas KNIP kota Bandung antara lain melaksanakan pengambil alihan kekuasaan dari tangan Jepang. Dalam hubungan ini Sjamsuridjal sebagai ketua KNIP kota Bandung mengeluarkan pengumuman dalam rangka pengambil alihan kekuasaan dari tangan Jepang. Dalam pengumuman itu antara lain dikatakan: "..... harus dilakukan pengoperan pimpinan kantor-kantor dan perusahaan-perusahaan dari pegawai Nippon kepada kepala-kepala bangsa Indonesia.

Tugas Sjamsuridjal berat menghadapi persoalan pengoperan kekuasaan dari tangan Jepang. Karena ia harus menghadapi massa rakyat, terutama para pemuda yang radikal revolusioner. Sedangkan pemerintah senantiasa menghindari pertumpahan darah, sesuai dengan haluan politik diplomasi yang dianutnya pada waktu itu.

Massa rakyat bergerak melakukan pengambil alihan kekuasaan dari tangan Jepang setelah ada pengumuman dari Komite Nasional kota Bandung itu, pemuda-pemuda yang berada di Jawatan-Jawatan, kantor-kantor dan perusahaan-perusahaan yang masih dikuasai Jepang, segera melakukan pengambil alihan dengan cara mereka bersikap menentang dan mengadakan gertakan kepada orang-orang Jepang, sehingga mereka menjadi ketakutan dan menyerah.

Keberhasilan Sjamsuridjal didalam melaksanakan tugas melakukan pengambilalihan kekuasaan dari tangan Jepang dengan tanpa pertumpahan darah, telah menarik perhatian Pemerintah dan meyakinkan rakyat akan kepemimpinannya. Demikianlah pada bulan September 1945, Sjamsuridjal terpilih oleh rakyat dan diangkat oleh Pemerintah menjadi Walikota Bandung yang pertama sejak berdirinya Republik Indonesia.

DENGAN pengangkatannya sebagai Walikota, maka tugas yang harus dipikul menjadi bertambah berat. Ia sekarang harus memeras tenaga dan pikiran dalam menghadapi tugas utama, yaitu mempertahankan keutuhan wilayah kekuasaannya bersama-sama rakyat dari ancaman dan rongrongan musuh.

Tentara sekutu masuklah di Bandung dengan diboncengi tentara Belanda. Tentara sekutu menduduki wilayah Bandung Utara. Bandung Selatan diduduki Republik. Pembagian kota Bandung menjadi dua daerah kekuasaan, terjadi tidak lama setelah Sjamsuridjal baru saja memegang tampuk pemerintahan.

Sekutu telah menjadikan Bandung Utara tempat melindungi dan menyelamatkan orang-orang Nica. Tentara Sekutu kemudian mempersenjatai orang-orang Nica. dan orang-orang Belanda yang dikeluarkan dari interniran. Mereka dibiarkan mengadakan pengacauan dikota Bandung. Akibatnya berkobarlah perlawanan pemuda pejuang terhadap Sekutu di Bandung. Pemuda-pemuda pejuang melakukan serangan terhadap markas-markas Sekutu. Tindakan para pemuda pejuang ini telah membangkitkan kemarahan Jenderal Sekutu, Mac Donald.

Mac Donald selanjutnya mengadakan tindakan, yaitu mengadakan pengusiran bagi penduduk Indonesia yang ada di wilayah Bandung Utara. Mac Donald didalam ultimatumnya menyatakan bahwa orang-orang Indonesia diharuskan keluar dari wilayah Utara selambat-lambatnya jam 11.00, tanggal 28 Oktober 1945. Mereka yang ternyata membandel akan ditangkap dan yang terbukti memiliki senjata akan ditembak mati. Berduyun-duyun penduduk mengungsi dari daerah Utara ke Selatan.

Disusul dengan pemboman atas wilayah Republik di Bandung Selatan. Akibat kebiadaban sekutu ini maka korban jiwa berjatuhan, mayat-mayat bergelimpangan, sehingga kota Bandung diliputi udara yang berbau busuk.

Tindakan sekutu yang biadab ini telah membangkitkan kemarahan Walikota Sjamsuridjal. Dengan melalui corong radio Republik Indonesia Bandung, Walikota Sjamsuridjal menyampaikan protesnya kepada pihak Sekutu.

Pemboman dilancarkan lagi oleh Sekutu pada bulan Maret 1946. Protes diajukan lagi oleh Walikota Sjamsuridjal. Sekutu menjawab atas protes Walikota kali ini, bahwa pemboman dilancarkan karena pihak tentara Republik telah melancarkan serangan mortir atas wilayah Bandung Utara. Dan Sekutu selanjutnya mengeluarkan ancaman, apabila terjadi lagi penembakan mortir atas wilayah Bandung Utara, maka wilayah Bandung Selatan akan dihancurkan dengan bombardemen-bombardemen. Ancaman itu tidak dihiraukan oleh pemuda pejuang. Sekarang pertempuran berkecamuk dan tekanan-tekanan dilancarkan terhadap kedudukan tentara Sekutu di Utara. Untuk menghindarkan tekanan-tekanan, maka sekutu pada tanggal 23 Maret 1946 mengeluarkan ultimatum, yang isinya memerintahkan mengosongkan daerah Bandung Selatan dari para pemuda pejuang dengan batas waktu selambat-lambatnya tanggal 24 Maret 1946.

Berkenaan dengan ultimatum Sekutu itu, maka Walikota Sjamsuridjal dan Komandan TRI, Divisi III, Kolonel A.H. Nasution mengadakan pertemuan. Hasilnya sepakat untuk mengadakan pengungsian keluar kota. Dan Bandung akan dibakar menjadi Lautan Api.

OLEH Walikota Sjamsuridjal kemudian diinstruksikan kepada semua instansi-instansi, jawatan-jawatan Republik Indonesia dikota Bandung agar segera mengungsi keluar kota. Rakyatpun berduyun-duyun meninggalkan kota, dengan perasaan sedih dan hati berdebar-debar dalam menantikan apa yang terjadi atas kotanya.

Walikota Sjamsuridjal tampak sangat sibuk mengatur pengungsian rakyatnya. Anak-anak dan wanita didahulukan. Untuk pemerintahan diungsikan menuju kota Garut.

Tepat pada jam 20.01, tanggal 24 Maret 1946, terdengarlah ledakan pertama yang kemudian susul menyusul meluas kesegala penjuru kota. Langitpun mulai merah dan Bandung kini sudah menjadi lautan api.

Peristiwa Bandung Lautan Api ini kemudian pada tanggal 4 April 1946 dilaporkan kepada Perdana Menteri R.I. oleh Walikota Sjamsuridjal dan pada tanggal

16 April 1946 Walikota Sjamsuridjal menghadap Presiden Republik Indonesia.

Bagi Sjamsuridjal dengan keluarganya, Peristiwa Bandung Lautan Api akan selalu dikenang dan peristiwa ini merupakan peristiwa sejarah selama ia menjabat Walikota Bandung.

Pembentukan Pemerintahan Daerah Surakarta.

ORANG-orang Nica yang telah mendapat persenjataan dari tentara Sekutu itu, di Jakarta mereka mengadakan pengacauan dan melakukan teror-teror terhadap pembesar-pembesar R.I. seperti Mr.Moh.Roem, P.M. Sjahrir dan Menteri Pertahanan Amir Sjarifudin telah diteror, tapi untung mereka itu dapat terhindar dari bahaya maut itu.

Menjelang awal tahun 1946 keadaan situasi di Ibukota Jakarta semakin tidak aman, sehingga perlu diambil kebijaksanaan untuk memindahkan kedudukan Ibukota Negara dari Jakarta.

Pemerintah Pusat telah memalingkan perhatiannya kepada dua kota kerajaan, Surakarta dan Yogyakarta, karena kedua kota kerajaan itu masih aman keadaannya. Pilihan Pemerintah Pusat jatuh kekota Yogyakarta untuk dijadikan Ibukota dan pada tanggal 4 Januari 1946 Ibukota dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta. Pemerintah Pusat merencanakan untuk merubah status kerajaan Mangkunegaran dan Kesunanan Surakarta itu menjadi Kotapraja. Untuk melaksanakan rencananya Pemerintah Pusat memerlukan seorang yang mempunyai kecakapan, kemampuan dan kesanggupan dalam melaksanakan tugas yang berat ini. Sebab untuk merubah status Pemerintah kota dari status bentuk kerajaan ke status Kotapraja bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Dalam hal ini Pemerintah Pusat telah memilih Sjamsuridjal yang telah terbukti kecakapannya sebagai Walikota Bandung.

Pada awal tahun 1947 Sjamsuridjal diangkat menjadi Walikota Surakarta dengan tugas merubah status kota Surakarta dari kerajaan Mangkunegaran dan Kesunanan menjadi Kotapradja. Dalam tugas ini Sjamsuridjal dibantu oleh anggota-anggota Badan Pemerintahan Harian, hingga terbentuklah daerah kota Surakarta menjadi Kotapraja. Disini sekali lagi Sjamsuridjal membuktikan kecakapannya dan memberikan jasa-jasa yang besar dalam pengabdiannya kepada Nusa dan Bangsa.

Tidak lama berselang setelah Sjamsuridjal menjadi Walikota Surakarta, berkobarlah pemberontakan PKI Madiun yang terjadi pada tahun 1948. Golongan yang menamakan dirinya Front Demokrasi Rakyat (FDR) dari golongan sayap kiri yaitu sejumlah gabungan orpol dan ormas PKI. Mereka ini sebagai golongan oposisi menentang kebijaksanaan Pemerintah dalam menyesuaikan diri pada persetujuan Renville.

Pemerintah telah mengadakan rasionalisasi/rekonstruksi antara lain dalam Angkatan Perang. Kebijaksanaan ini ditentang oleh golongan kiri. Muso menggunakan kesempatan ini untuk mengkambing hitamkan dan melakukan penghasutan terhadap pasukan-pasukan yang kena rasionalisasi itu.

MUSUH utama golongan Front Demokrasi Rakyat ini ialah golongan persatuan dan Barisan Pemberontak Republik Indonesia yang pusatnya dikota Surakarta. Golongan kiri berusaha melemahkan Barisan Pemberontak Republik Indonesia. Golongan kiri kemudian mengadakan penculikan dan pengacauan di Surakarta. Dengan demikian Pemerintahan Sjamsuridjal di Surakarta mengalami gangguan dan musibah besar. Pembunuhan-pembunuhan terjadi di Surakarta yang dilakukan PKI.

Pada waktu terjadi peristiwa ini di Surakarta sedang diselenggarakan Pekan Olah Raga Nasional pertama pada tanggal 9 September 1948, yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Surakarta.

Dalam peristiwa ini telah gugur Dr. Muwardi, Ketua Barisan Pemberontak Republik Indonesia. Satu jam sebelum terbunuh, Dr. Muwardi berada di tengah-tengah keluarga Sjamsuridjal, dimana ia ikut makan siang bersama. Tiba-tiba Sjamsuridjal menerima berita bahwa Dr. Muwardi telah hilang diculik sekitar jam 13.00. Karena berita itu maka Sjamsuridjal dengan berani berangkat men-

Kesibukan di Kota Jakarta dengan lalu-lintas yang semakin lama semakin penuh, mobil dengan sejumlah 26.000, beca dengan angka 25.000, belum termasuk lalu-lintas trem dan kereta api.

Polantas mengamankan arus lalu-lintas daerah Pusat Perniagaan di Kota.

carinya. Ternyata Dr. Muwardi telah dibunuh oleh gerombolan PKI dan ditemukan disebuah lubang. Peristiwa ini sangat menyedihkan keluarga Sjamsuridjal. Selain Dr. Muwardi telah gugur pula Panglima Divisi IV, Kolonel Sutarto, sebagai korban pembunuhan gerombolan PKI.

Sjamsuridjal selaku Walikota kemudian mengusahakan dan mewujudkan sebuah makam pahlawan untuk mereka yang diberi nama "Makam Pahlawan Kusuma Bangsa".

Sesungguhnya untuk Sjamsuridjal sendiri dan keluarganya telah disediakan lubang kubur oleh orang-orang PKI, tetapi berkat perlindungan Tuhan Yang Maha Esa mereka terhindar dari kepungan maut.

Pemberontakan PKI di Surakarta berakhir setelah diadakan penumpasan oleh Pemerintah. Lebih kurang 14.000 orang anggota PKI yang terlibat ditangkap. Musibah datang silih berganti. Agresi Militer Belanda kedua meletus. Surakarta diserbu dan diduduki setelah tentara Republik tidak sanggup lagi mempertahankannya. Tentara Republik mundur melakukan gerilya di luar kota.

Walikota Sjamsuridjal tidak ikút mengungsi, karena Pemerintah Pusat memerintahkannya tidak boleh meninggalkan kota sebelum rakyat diselamatkan. Perintah Pemerintah Pusat dipatuhinya dan akhirnya Walikota Sjamsuridjal ditangkap Belanda. Kemudian dijebloskan kedalam penjara. Enam bulan lamanya meringkuk dalam penjara Belanda. Setelah terjadi perjanjian Roem Royen barulah dilepaskan dan diangkut ke Jakarta. Di Jakarta Sjamsuridjal dan keluarga ditampung di hotel Central oleh seseorang warga Surakarta. Pemilik hotel ini bernama Ali Sungkar.

Upacara timbang terima Walikota Sjamsurizal menggantikan pejabat Walikota yang lama, yang disambung dengan penanda-tanganan timbang terima di Balaikota pada tanggal 29 Juni 1951.

SJAMSURIDJAL WALIKOTA JAKARTA RAYA

Pemerintahan Daerah Kota Jakarta.

PEMERINTAHAN Daerah kota Jakarta dijalankan oleh Dewan Perwakilan Kota Sementara, Badan Pemerintahan Harian dan Walikota.

Fungsi Wali Kota Jakarta Raya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang darurat tahun 1953 No. 20 dan keputusan Presiden tahun 1950 No.114 masih tetap merupakan jabatan dualistis:

1. Pejabat tersebut merupakan organ daerah dengan kedudukan sebagai ketua merangkap anggota dalam Dewan Perwakilan Kota Sementara maupun Badan Pemerintahan Harian.
2. Pejabat Pemerintah Pusat dengan kedudukan sebagai Kepala Daerah setingkat dengan Gubernur atas wilayah Kotapraja Jakarta Raya dan langsung bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri.

Dalam menjalankan tugas kekuasaannya sebagai pejabat Pamongpraja untuk lingkungan wilayah Kotapraja Jakarta Raya, ia dibantu oleh Residen, Bupati, dan Patih diperbantukan serta para Wedana, Camat, dan Lurah dibawahnya yang mengepalai wilayah-wilayah bagian.

Aparatur Perwakilan Tertinggi dari Kotapraja Jakarta adalah Dewan Pemerintahan Kota Sementara, hasil bentukan Panitia Tujuh. Panitia ini telah dibentuk oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai hasil pertemuannya dengan pelbagai partai Politik dan organisasi lain pada akhir bulan Pebruari 1950. Panitia Tujuh ini personalianya terdiri dari:

1. Ketuanya : Suwirjo
2. Anggota : Supranoto
   Mr. Sudjono
   Mr. Jusuf Wibisono
   Sjamsudin Saat
   Mt. Sutan Takdir Alisjahbana
   B.R. Motik.

Adapun tugas panitia ini adalah membentuk sebuah majelis baru, yang didalamnya duduk wakil-wakil dari aliran-aliran politik dan aliran-aliran lainnya, yang dapat mencerminkan keadaan yang sebenarnya dari masyarakat kota Jakarta pada dewasa itu.

Dalam waktu singkat panitia ini telah berhasil menyelenggarakan pemilihan yang diikuti oleh 177 organisasi untuk menetapkan calon-calon yang akan duduk dalam Dewan Perwakilan Kota Jakarta.

Sebagai hasil pemilihan itu, terdapatlah dua puluh lima orang yang mendapat suara terbanyak, yaitu:

1. Suwirjo . . . . . dari PNI
2. Dt. Zainal Arifin . . . . . dari Masjumi
3. Ny. Dr. Abuhanifah . . . . . dari Masjumi
4. Sardjono . . . . . dari Masjumi.
5. Zainal Arifin Tanamas . . . . . dari Masjumi
6. Mr. St. T. Alisjahbana . . . . . dari P.S.I.
7. P.A. De Quelju . . . . . dari P.I.R
8. Supranoto . . . . . dari Persatuan Pegawai Negeri Republik Indonesia
9. D.M. Januar . . . . . dari Serikat Buruh Bank

Suasana penyumpahan Walikota Sjamsurizal dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Mr. Iskaq Tjokroadisurjo di Balaikota pada tanggal 29 Juni 1951.

Malam hari jamuan resmi Walikota Sjamsurizal dihadiri oleh Presiden Sukarno beserta Ibu Fatmawati di Taman Suropati 7

10. Mr. Suwahjo . . . . . dari Gabungan Serikat Buruh Pemerintah.
11. Abdullah Salim . . . . . dari Serikat Dagang Islam Indonesia.
12. M.A.L. Tobing . . . . . dari Partai Murba.
13. Gozali Sjahlan . . . . . dari Serikat Tani Islam Indonesia.
14. A.A. Alaydrus . . . . . dari Panitia Politik kalangan Arab.
15. Supardi . . . . . dari Serikat Buruh Sepatu Indonesia.
16. H. Darwis Amini . . . . . dari Gerakan Pemuda Islam Indonesia.
17. Tabrani Notosudiro . . . . . dari Serikat Tani Indonesia.
18. S. Mustaman . . . . . dari Persatuan Bekas Wartawan.
19. Nawawi Duski . . . . . dari Gerakan Pemuda Islam Indonesia.
20. Asmara Hadi . . . . . dari Serikat Buruh Balai Pustaka.
21. Ny. Setiati Surasto . . . . . dari Pemuda Partai Indonesia.
22. Jusuf Banjar . . . . . dari Persatuan Pemuda Republik.
23. J. Hutagalung . . . . . dari Buruh Pemerintah.
24. Jahja Malik . . . . . dari Serikat Tani Indonesia.
25. E. Coerdian . . . . . dari Serikat Buruh Perhubungan Republik Indonesia.

Setelah diajukan kepada Menteri Dalam Negeri dan atas keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 16 Maret 1950 no. B.Z.3/4/13, diangkatlah 25 orang yang dikemukakan panitia Tujuh itu menjadi Anggota Dewan Perwakilan Kota Sementara dari Kotapraja Jakarta terhitung mulai tanggal 15 Maret 1950.

Kemudian dalam bulan April berikutnya, diangkatlah 4 orang anggota Dewan menjadi anggota Badan Pemerintahan Harian yaitu:

1. Supranoto.
2. Sjardjono.
3. Tabrani.
4. de Quelju.

Menurut ketentuan dalam pembentukannya Dewan Perwakilan Rakyat Sementara dan Badan Pemerintahan Harian ini hanya diberi masa duduk selama tiga bulan. Jadi selambat-lambatnya pada tanggal 1 Juli 1950 sudah harus membubarkan diri dan diganti dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Umum. Tetapi selama jangka waktu tiga bulan itu belum dapat diselenggarakan Pemilihan Umum untuk membentuk suatu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang akan menggantikan Dewan Perwakilan Kota Sementara tersebut diatas. Oleh karena itu oleh Presiden R.I.S. dengan keputusan tanggal 30 Juni 1950 no. 203 masa duduk Dewan Perwakilan Kota Sementara itu diperpanjang dengan 6 bulan yaitu hingga 1 Januari 1951.

Ternyata sampai zaman Republik Indonesia Kesatuan, aparatur Pemerintahan Tertinggi Kota Jakarta masih tetap Dewan Perwakilan Kota Sementara dan ini berlangsung terus sampai mencapai usia 6½ tahun yaitu sampai tanggal 31 Agustus 1956.

Demikianlah pada masa pemerintahan Walikota Sjamsuridjal Dewan Perwakilan Kota Sementara itu masih tetap duduk. Yang mengalami perubahan susunan anggota ialah Badan Pemerintah Harian, terjadi pada tanggal 2 April 1951 sebagai berikut:

1. Walikota.
2. Mr. R. Suwahjo.
3. M.A.L. Tobing.
4. Z. Arifin Tanamas.

Dan dalam bulan September 1951 terjadi lagi pergantian susunan Badan Pemerintahan Harian sebagai berikut:

1. Walikota.
2. Mr. R. Suwahjo, kemudian bulan Maret diganti oleh Supranoto.
3. Zainal Arifin Tanamas.
4. D.M. Januar.
5. Sardjono.

Tempat aparatur pemerintahan tertinggi dari Kotapraja Jakarta Raya dalam melaksanakan tugasnya ialah di Balai Kota, sebagai pusat pemerintahan dan ke-

Jumpa Pers di Balaikota dimana Walikota Sjamsurizal sedang di wawancarai oleh para wartawan untuk lebih mengetahui gerak pembangunan di kota Jakarta.

pamongprajaan Ibukota Negara.

Bagian yang mengkoordinir pekerjaan dinas dan perusahaan Kotapraja adalah Sekretariat Kotapraja yang merupakan staf, baik dari Dewan maupun seksi-seksi Dewan, Badan Pemerintahan Harian dan Walikota.

Semua putusan-putusan dari lembaga legislatif (Dewan) dan eksekutif (BPH) diolah oleh sekretaris yang kemudian dilanjutkan kepada dinas-dinas dan perusahaan-perusahaan bersangkutan, sedangkan yang patut dibicarakan dalam legislatif disampaikan kepada Dewan Legislatif.

Bagian dari Sekretariat ialah: Keuangan, Personalia, Peralatan, Arsip-Kotapraja, Urusan Umum dan Pemerintahan Umum.

Pimpinan dari Balaikota ini dipegang oleh Sekretaris kota, yang juga menjadi Sekretaris dari Dewan, BPH dan Walikota.

Walikota Jakarta Raya kedudukannya setingkat dengan Gubernur daerah-daerah Propinsi, tetapi ia tidak mempunyai kekuasaan dalam lapangan kepolisian.

Pemilihan Walikota Jakarta.

DENGAN terbentuknya Kabinet Sukiman-Suwirjo maka terjadilah lowongan jabatan untuk Walikota Jakarta Raya.

Walikota Jakarta Raya, Suwirjo, karena terpilih menjadi Wakil Perdana Menteri dalam Kabinet Sukiman, pada tanggal 2 Mei 1951 meletakkan jabatan sebagai Walikota Jakarta Raya. Jabatan Walikota Jakarta Raya untuk sementara dipangku oleh Mr. Suwahjo Sumodilogo, Anggota Badan Pemerintahan Harian Kotapraja Jakarta Raya.

Dewan Perwakilan Kota Sementara dalam usahanya untuk mengisi lowongan jabatan Walikota Jakarta Raya itu, mengadakan sidang untuk mengadakan pemilihan. Dari hasil pemilihan itu telah diperoleh 4 (empat) calon Walikota Jakarta Raya, yaitu masing-masing:

1. Mr. Moh. Roem.
2. Sjamsuridjal.
3. Jahja Malik.
4. Dr. Buntaran.

Keempat calon ini diajukan kepada Menteri Dalam Negeri yang pada waktu itu dijabat oleh Mr. Iskaq Tjokroadisurjo.

Dari keempat calon tersebut diatas, ternyata Pemerintah Pusat telah menetapkan Sjamsuridjal yang diangkat menjadi Walikota Jakarta Raya, walaupun dalam pemilihan di Dewan Perwakilan Kota Sementara suara terbanyak diperoleh oleh Mr. Moh. Roem.

Sjamsuridjal ditetapkan oleh Pemerintah Pusat menjadi Walikota Jakarta Raya jelas atas kepercayaan Pemerintah bahwa akan sanggup menghadapi tantangan dalam mengemudikan Pemerintahan Daerah Ibukota Negara dengan pengalamannya dari Bandung dan Surakarta.

Berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri, tanggal 27 Juni 1951, maka Sjamsuridjal dengan resmi menjadi Walikota Jakarta Raya dengan pangkat Residen. Dengan demikian kekosongan Jabatan Walikota Jakarta Raya telah diisi kembali. Pelantikan Walikota Jakarta yang baru ini diselenggarakan pada tanggal 29 Juni 1951, bertempat di Balaikota. Pada pelantikan ini hadir Menteri Dalam-Negeri, anggota-anggota Dewan Perwakilan kota Sementara, Kepala-Kepala Jawatan, Kepala-kepala Bagian Kotapraja dan undangan sipil dan militer. Tepat jam 11.00 pagi upacara timbang terima jabatan Walikota dari Mr. Suwahjo Sumodilogo kepada Walikota baru, Sjamsuridjal, dimulai.

Pada kata sambutannya, Mr. Suwahjo menyatakan rasa terima kasih kepada Pemerintah Pusat yang telah memenuhi dan memperhatikan Dewan. Juga dalam sambutannya Mr. Suwahjo, mengakui bahwa Sjamsuridjal adalah seorang yang cukup cakap dan banyak pengalamannya, karena sudah pernah dua kali menjabat Walikota yaitu di Bandung dan Surakarta.

Kemudian Sjamsuridjal selaku Walikota baru Jakarta dalam pidatonya, antara lain mengemukakan harapan-harapan yang akan dicapainya. Ia menyatakan, bahwa

Walikota Sjamsurizal beserta Ibu diabadikan bersama-sama petugas-petugas Keamanan lalu-lintas selesai jamuan resmi di Taman Suropati 7.

Walikota Sjamsurizal diabadikan bersama-sama dengan Organisasi [illegible] Jakarta dimuka Gedung Balaikota.

tugas yang dipikulnya sekarang amat berat, dan tidak ada jalan lain yang dapat meringankannya hanyalah harus ada kerjasama yang sebaik-baiknya dengan segenap lapisan dan golongan. Selanjutnya ia menambahkan, bahwa pengalamannya selama menjalankan tugas sebagai Walikota diwaktu perjuangan akan berguna pula didalam menjalankan tugas yang baru ini.

Walikota Sjamsuridjal dalam pidato sambutannya itu juga sekaligus mengemukakan cita-cita dan rencana pembangunan kota mendatang. Ia mencita-citakan untuk membangun kota Jakarta menjadi kota yang indah dan ternama.

Pokok-pokok yang akan menjadi perhatiannya dalam rencana pembangunan kota Jakarta, antara lain masalah lalu lintas, masalah air minum, penutupan kali Ciliwung (sepanjang jalan Gajah Mada), perbaikan kampung dan kebersihan kota.

Konsepsi dalam pembinaan fisik kota Jakarta sebagai Ibukota Negara.

TUGAS Walikota dizaman kemerdekaan berbeda dengan dizaman pergolakan revolusi. Sekarang dizaman kemerdekaan tugas Walikota adalah melaksanakan pembangunan disegala bidang dalam rangka mengisi kemerdekaan. Walikota adalah pengemban amanat penderitaan rakyat, karena itu ia bertanggung jawab atas terlaksananya pembangunan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.

Sjamsuridjal sebagai Walikota Jakarta mempunyai tugas yang lebih berat, jika dibandingkan dengan Walikota didaerah-daerah lainnya, sesuai dengan kedudukan Jakarta sebagai ibukota Negara. Dan mengingat pula amanat Bapak Presiden pada pertemuannya dengan Walikota Sjamsuridjal, dimana Bapak Presiden menekankan agar dalam pelaksanaan pembangunan di Jakarta harus berkonsepsi yang berani dan tidak melakukan hal-hal yang sepele.

DEMIKIANLAH maka didalam menghadapi pembangunan kota Jakarta, Walikota Sjamsuridjal telah merumuskan konsepsinya, yang kemudian diumumkan dimuka pertemuan dengan para wartawan ibukota pada tanggal 15 September 1951.

Pada pertemuannya dengan para Wartawan itu, Walikota Sjamsuridjal, pertama-tama menekankan 3 masalah pokok yang sangat urgent yang senantiasa menjadi problem pemerintah Kotapraja Jakarta Raya, yaitu masalah pembagian aliran listrik, penambahan air minum dan urusan tanah.

Dalam menyinggung masalah kekurangan aliran listrik, Walikota Sjamsuridjal mengatakan kepada para Wartawan, bahwa kota Jakarta dewasa ini selalu mengalami pemadaman aliran listrik untuk 3 hari sekali. Kekurangan ini disebabkan karena Jakarta hanya diberikan jatah dari pusat sebesar 240 kilowat, sedangkan yang diperlukan adalah sebesar 272 kilowat. Untuk mengatasi kekurangannya itu akan dibangun pusat tenaga listrik di Ancol dan diharapkan pemadaman listrik dapat diperkecil menjadi 6 hari sekali.

Selanjutnya dalam menyinggung masalah kekurangan air minum dikatakan oleh Walikota Sjamsuridjal, bahwa Kotapraja mengusahakan "Waterzuivering" didaerah Karet yang diperkirakan akan dapat menambah sebanyak 5000 liter air per detik. Juga dalam rangka memenuhi kebutuha air minum ini, Kotapraja akan menambah jumlah pipa leding dan penambahan air dari sumbernya di Ciomas Bogor, meskipun hanya 60 liter air per detiknya. Bagi penduduk yang bertempat tinggal didaerah-daerah kering dibuatkan 230 hydrant, dimana penjualan-penjualan kepada umum dengan perantaraan agen-agen yang telah ditetapkan.

Tentang masalah tanah, Walikota Sjamsuridjal menjelaskan bahwa masalah tanah di Kotapradja Jakarta terbagi atas 4 (empat) macam, yaitu tanah Kotapradja, tanah Negara, tanah individuil, tanah partikulir. Tanah yang menjadi pemikiran Kotapraja ialah masalah tanah partikulir. Di Jakarta masih terdapat 3.566 ha tanah partikulir milik 16 perusahaan yang sangat terlantar pengurusannya.

Kampung-kampung yang berada di atas tanah partikulir ini sangat kotor, jalan-jalannya tidak diaspal, sehingga musim kemarau berdebu dan dimusim hujan sukar dilalui karena becek dan berlumpur, disana sini terdapat comberan yang baunya

Kunjungan Tamu Agung Presiden Filipina Quirino dimana tampak Walikota Sjamsurizal memakai kalung tanda Jakarta sebagaimana dulu lazim dipakai seorang Walikota.

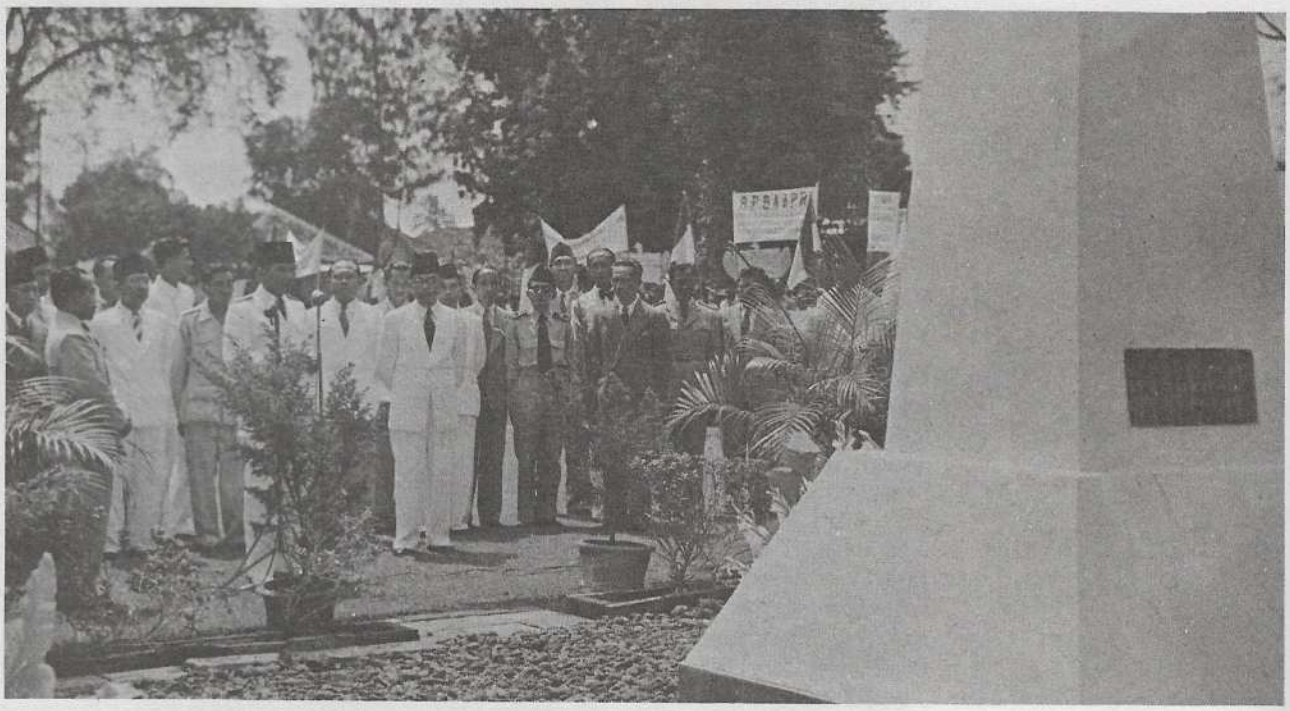

Pidato singkat diucapkan Presiden Sukarno kemudian disusul dengan perletakan karangan bunga pada Tugu Peringatan Kemerdekaan Pegangsaan Timur 56 pada upacara 17 Agustus tahun 1951.

Walikota Sjamsurizal dan Presiden Sukarno beserta Ibu Fatmawati meresmikan pemakaian sebuah mobil poliklinik Keliling yang pertama di Indonesia atas usaha D.K.K. Jakarta.

menusuk hidung. Keadaan perumahan penduduk sangat berjubel-jubel diatas sebidang tanah yang sempit sehingga sumur dan tempat buang air bergandengan dengan tiada menurut syarat hygiene sama sekali.

BEGITULAH pemandangan didaerah perkampungan tanah partikulir ini sangat tidak sesuai dengan jalan pembangunan yang sekarang dilaksanakan Kota seperti di jalan Alaydrus, dikampung Kwitang, di gang Arjuna.

Pemerintah Kotapraja Jakarta Raya dalam hal ini akan membelinya kembali tanah-tanah tersebut dan kemudian akan dilakukan pembangunan dalam arti perbaikan kampung sebagaimana layaknya untuk tempat manusia merdeka sekarang ini.

Kemudian Walikota Sjamsuridjal dalam pertemuannya dengan para wartawan itu, menyampaikan pula program kerja lainnya disamping 3 (tiga) masalah pokok diatas, antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah Daeran Kotapradja Jakarta Raya senantiasa akan mengadakan kontak dengan seluruh lapisan masyarakat dengan jalan mengadakan pertemuan seperti dengan partai-partai, Organisasi-organisasi rakyat dan Organisasi-organisasi yang terkemuka dalam masyarakat.
2. Mengusahakan secepat mungkin terdapatnya pengesahan dari keputusan Dewan Kotapraja tentang otonomi Kotapraja, Pajak, Opcenten, dan bahagian retribusi dan pajak pemerintah pusat dan juga lambang Kota Jakarta.
3. Kotapraja menuntut kepada Pemerintah Pusat, supaya selekas mungkin jawatan-jawatan yang belum masuk Kotapraja diserahkan, seperti Jawatan Sosial dengan UPDnya, Jawatan Penerangan dan Jawatan Agama.
4. Mengadakan persiapan-persiapan untuk melaksanakan Volkstelling (sensus) dan Verkeerstelling (transportasi).
5. Perbaikan kampung dan perluasan kampung, pembakaran sampah-sampah di kampung. Penetapan stadsplan (rencana kota).
6. Mengadakan seksi urusan politik dan aliran masyarakat.
7. Pemerintahan :
   a. Mengawasi semua jalannya Undang-Undang dan Peraturan-peraturan pemerintah.
   b. Mengamat-amati dan menyokong mencarikan jalan yang sebaik-baiknya untuk memajukan hidup dan menghidupkan rakyat, karena itu harus diketahui bagaimana keadaan sehari-hari dari bahan makanan rakyat, bahan pakaian rakyat dan harga sehari-hari, perkerjaan rakyat sehari-hari, perumahan rakyat sehari-hari.
8. Kesejahteraan Rakyat.
   Pemerintah harus mengamat-amati dan mencarikan jalan yang sebaik-baiknya untuk perkembangan-perkembangan dalam urusan pertanian, peternakan, perindustrian rakyat dan perekonomian rakyat.

Sedang untuk rencana pembangunan jangka panjang, Walikota Sjamsuridjal merencanakan antara lain.

1. Rencana pembangunan sebuah mesjid Agung yang selaras dengan ibukota.
2. Mendirikan Balaikota yang baru.
3. Mengusahakan terlaksananya "nationale tentoostelling op internationale peil" menggantikan los pasar dari bambu dengan material yang modern.

Demikianlah konsepsi rencana Walikota Sjamsuridjal dalam pembangunan fisik kota Jakarta sebagai ibukota Negara.

Sebagai penutup keterangannya dimuka para Wartawan yang sengaja diundang itu, Walikota Sjamsuridjal tidak lupa menyampaikan harapan bantuan dari segenap lapisan masyarakat untuk dapat menciptakan rencana dan usaha-usaha tersebut diatas, karena pekerjaan yang sedemikian besar dan disamping kesukaran serta kesulitan-kesulitan hanya akan terlaksana apabila masyarakat bersama-sama dengan pemerintahnya berbuat, bekerja dan berusaha dengan segenap daya kekuatan dan semangat.

Bung Karno, Bung Hatta, Kolonel Simatupang, Let. Kol. Taswin dan Walikota Sjamsurizal menyaksikan taptu yang dilakukan oleh ABRI dan Pandu dalam rangka Perayaan 17 Agustus 1951.

Usaha-usaha Sjamsuridjal dalam pembangunan di Jakarta.

WALIKOTA Sjamsuridjal dalam melaksanakan pembangunan dikota Jakarta bermaksud melaksanakan secara bertahap dan berangsur-angsur. Masa jabatannya hanya berlangsung dalam waktu yang pendek, sehingga segala rencana kerjanya itu belum dapat dilaksanakan secara keseluruhan. Namun walaupun demikian, sudah banyak usaha-usaha pembangunan telah dilaksanakan seperti akan dikemukakan dibawah ini.

Dalam rangka melengkapkan otonomi Kotapraja Jakarta Raya, Kotapraja menuntut kepada Pemerintah Pusat supaya beberapa jawatan diserahkan. Usaha ini telah berhasil dengan diserahkan Jawatan Sosial dan Urusan Perumahan Jakarta dan Jawatan Penerangan Kotapraja Jakarta Raya. Untuk kepentingan perburuhan telah dibangun kantornya dan diresmikan oleh Walikota Sjamsuridjal pada tanggal 4 Desember 1951. Sedangkan untuk memenuhi kesehatan rakyat, Pemerintah Kotapraja telah mengambil beberapa jalan. Menambah dua buah rumah sakit rakyat di jalan Balikpapan dan Tanjung Priok ditahun 1953. Pendirian 10 buah rumah sakit ditiap-tiap Kewedanaan juga pendirian beberapa klinik bersalin dibeberapa tempat diwilayah Jakarta.

Masalah pusat-pusat kesehatan ini memang dirasakan sangat kurang untuk melayani penduduk Jakarta yang berjumlah lebih dari dua juta itu. Dimana sebelumnya hanya ada satu rumah sakit rakyat yang didirikan pada tahun 1947 di daerah Bidara Cina.

Untuk melayani penduduk yang bertempat tinggal jauh dari pusat-pusat kesehatan, karena mereka tinggal jauh dipelosok kampung dan desa, maka diadakan balai pengobatan keliling dengan mobil, sehingga dengan demikian peningkatan kesehatan rakyat diseluruh wilayah Jakarta benar-benar dapat dilaksanakan.

Usaha-usaha pemberantasan penyakit menularpun segera dilaksanakan oleh team kesehatan dari Jawatan kesehatan kota. Penyuntikan secara massal untuk penyuntikan cacar terhadap bayi-bayi dan suntikan vaccin bagi pegawai-pegawai kantor. Penyemprotan rumah-rumah dengan DDT dalam usaha pemberantasan penyakit malaria dilakukan tahun 1952 secara besar-besaran, sehingga telah selesai disemprot 9.624 rumah dengan DDT sebanyak 5 ton. Begitu pula pemberantasan penyakit patek di wilayah Jakarta yang diderita penduduk akibat kekurangan zat makanan dan tidak teraturnya makanan, dilakukan oleh Pemerintah Kotapraja secara besar-besaran pula.

TEAM pemberantas penyakit patek ini terdiri dari 24 dokter, 2 orang dokter gigi dan 24 orang bidan, 1 orang kontrolir kesehatan kepala dan 2 orang kontrolir kesehatan, 62 jururawat dan 150 orang pembantu jururawat, 3 assisten Apoteker dan sejumlah orang pegawai lainnya. Team ini disebar ketiap-tiap Kecamatan yang telah ditentukan.

Kegiatan pemberantasan penyakit menular ini benar-benar manfaatnya dirasakan rakyat, seperti jumlah penderita penyakit typhus diwilayah Jakarta tampak menurun sekali. Tahun 1950 terdapat 1080 orang penderita, tahun 1951 menjadi 437 penderita dan tahun 1952 menurun lagi menjadi 392 orang penderita.

Walikota Sjamsuridjal memperhatikan pula perawatan kesehatan anak-anak sekolah terutama murid-murid sekolah dasar. Untuk kepentingan kesehatan anak-anak sekolah dasar dibentuklah suatu yayasan pada tahun 1952, bernama "Yayasan Putra Bahagia". Yayasan tersebut bertugas melakukan perawatan terhadap anak-anak yang kurang mampu, tetapi karena kesehatannya memerlukan perawatan ditempat peristirahatan diberikan juga pelajaran, supaya tidak ketinggalan sekolahnya.

Dalam yayasan ini turut duduk ibu Walikota Sjamsuridjal sebagai anggota Pengurus.

Dibidang usaha dalam mencukupi kebutuhan perumahan rakyat direncanakan pendirian kampung baru ditiga tempat masing-masing di Bendungan Hir, Karet Pasar Baru, Jembatan Duren. Perumahan akan dapat menampung 33.000 orang.

Pencangkulan pertama menandai dimulainya pembangunan daerah Grogol dilakukan oleh Walikota Sjamsurizal dan disaksikan oleh Anggota Parlemen.

Walikota Sjamsurizal bersama dengan anggota Parlemen meninjau pembangunan kota, tampak beliau sedang memperhatikan peta perencanaan Grogol.

Juga untuk memenuhi kebutuhan yang sama akan dibangun perkampungan di Tanjung Grogol. Ayunan cangkul pertama peresmian pembangunan perkampungan di Grogol, dilakukan oleh Walikota Sjamsuridjal pada tanggal 5 Oktober 1952. Rumah dibangun disana sejumlah 103 buah, rumah-rumah ini bila selesai akan dijual kepada rakyat yang membutuhkan.

Selanjutnya dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan pegawai dan perkantoran Sjamsuridjal telah mendorong Pemerintah Kotapraja Jakarta Raya untuk membuka tanah-tanah baru secara tepat dan teratur, sedangkan pembangunannya akan diselenggarakan oleh tiga unsur, yaitu Pemerintah Pusat, Partikulir dan Kotapraja.

Sedangkan untuk menolong mereka dari golongan kecil seperti tukang beca, tukang jual makanan dan sebagainya Pemerintah Daerah telah membangun beberapa perumahan darurat untuk disewa dengan pembayaran yang ringan, misalnya di Pisangbatu Karanganyar I, Karanganyar II, Tanjung Periuk, Tanah Tinggi. Semuanya dapat memuat 2.000 orang.

Ada sebuah yayasan yang namanya "Yayasan Purbawisesa" telah mengusahakan asrama untuk para pelajar, SMP, SMA di Bidara Cina 64 b untuk anak laki-laki dan di Mampang 63 untuk anak perempuan.

Pembukaan tanah baru dilakukan di jalan Gunung Sahari, seluas 12 ha oleh jawatan pelayaran. Di Karet Bendungan seluas 4 ha untuk Penupetel. Di Cipinang Vredendal dibangun komplek asrama seluas 50 ha. Akan dibangun perkampungan mahasiswa seluas 50 ha didaerah Utan Kayu. Perkampungan baru didaerah Rajawali seluas 25 ha.

Untuk lengkapnya pembukaan tanah baru diwilayah Jakarta yang sudah dimulai dari sejak tahun 1950 disajikan dibawah ini.

TAHUN	DAERAH YANG DIBUKA/DIPERLUAS	LUAS	KETERANGAN
1950	Kompleks pelaju (Kebayoran Baru)	8 ha	Perumahan
1951	Gang Tengah	4 ha	
	Tanah Tinggi	25 ha	Perbaikan
	Kebon Jahe	3 ha	Kampung
1952	Grogol	25 ha	Perumahan
	Kebon Sereh	25 ha	Perumahan/Penampungan
	Karet Pasar Baru	4 ha	Perumahan/Sekolah
	Tembusan Jalan Thamrin	....	Perumahan
	RWJ. Bendungan Ilir	6 ha	Perumahan
	Krekot Bundar	2 ha	Perumahan/toko
	Rawa Kerbo (Sari)	30 ha	Perumahan
	Rawa Sari	6 ha	Pabrik obat
	Kebon Kacang	3 ha	Perbaikan kampung
	Jalan Lokomotif	3 ha	Perbaikan kampung
	Kampung Sultan Agung	2 ha	Perbaikan kampung
	Petamburan (Partikulir)	2 ha	Asrama Polisi
	Pejompongan	25 ha	Perumahan
	Pejompongan	15 ha	Penjernihan air
	Sentiong Seribu	2 ha	Perumahan/Kampung Baru
	Galur	5 ha	Perumahan

WALIKOTA Sjamsuridjal bercita-cita menjadikan Jakarta sebagai Metropole, yaitu membangun Jakarta setaraf dengan kota-kota lain diluar negeri yang mempunyai sifat-sifat dan tradisi internasional. Dalam hal ini keindahan kota dan kebersihan kota perlu diperhatikan. Maka Walikota Sjamsuridjal membangun lampu-lampu penerangan untuk keindahan kota dan kelancaran lalu lintas. Pembukaan peresmian pemakaian lampu sinar gas di jalan Merdeka Utara dan Selatan, dilakukan Walikota Sjamsuridjal pada tanggal 15 Agustus 1951. Direncanakan disetiap persimpangan jalan, dijalan-jalan yang gelap dan di kampung-kampung akan diberikan penerangan seperti itu.

Walikota Sjamsuridjal dalam usahanya menjadikan Jakarta kota yang indah mengadakan tindakan membersihkannya dari kaum gelandangan. Tindakan ini di-

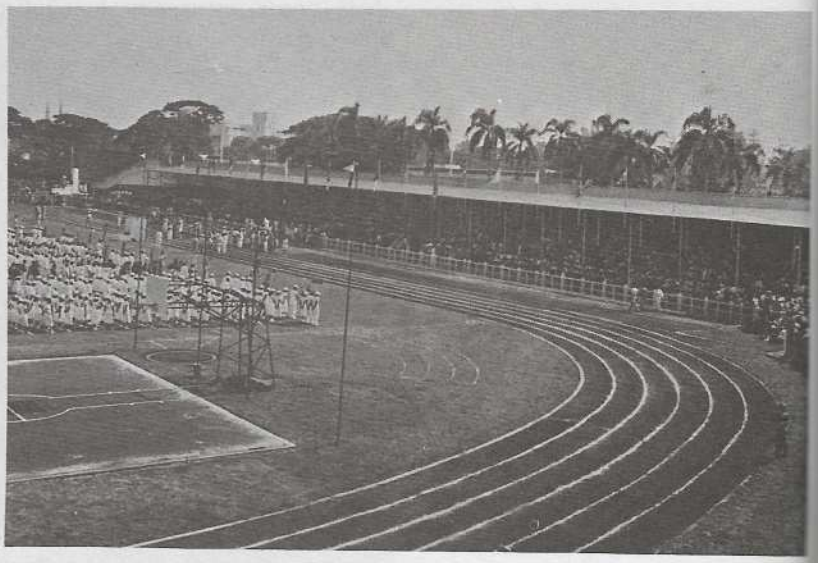

Barisan pembawa bendera PON II memasuki halaman Balaikota untuk diserahkan kepada Walikota Jakarta.

samping untuk menjadikan Ibukota indah, juga untuk menyelamatkan golongan masyarakat sengsara ini agar mereka dapat kembali kedalam masyarakatnya sebagai manusia yang layak. Tidak seperti sekarang mereka tinggal di emper-emper toko, di bawah jembatan, di dalam gubuk-gubuk kecil sepanjang jalan kereta, sehingga menjadi tontonan orang-orang asing dan menjatuhkan martabat bangsa, karena itu mereka perlu diselamatkan dengan jalan dikembalikan ketempat asalnya atau ditransmigrasikan diluar pulau Jawa.

Untuk menanggulangi masalah kaum gelandangan maka Walikota pada tanggal 29 Desember 1952 mengadakan konperensi antara Residen daerah perbatasan dengan Jakarta yaitu Residen Bogor, Banten, Pekalongan, Jakarta Raya dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Konperensi telah menghasilkan panitia yang bertugas melaksanakan tempat penampungan dan mentransmigrasikan mereka.

Walikota Sjamsuridjal dalam konperensi ini mengatakan, bahwa mereka datang dari daerah perbatasan Jakarta karena itu persoalan perlu dirundingkan dan dipecahkan bersama-sama oleh daerah yang berdekatan pula.

Menurut catatan berdasarkan laporan para Lurah, bahwa gelandangan-gelandangan ini berasal dari daerah Cirebon berjumlah 7240, dari daerah Jakarta sendiri berjumlah 6075, dari daerah Pekalongan berjumlah 4861, dari daerah Bogor berjumlah 40.000 jiwa dan masih banyak yang belum tercatat.

Adapun mereka yang datang ke Jakarta ini terbagi atas beberapa golongan, yaitu orang-orang yang miskin dari daerahnya sehingga menjadi terlantar, mereka inilah yang paling banyak jumlahnya. Ada juga antara mereka itu yang bermodal sedikit, mereka inilah yang menjadi pedagang-pedagang kecil. Mereka datang sebagai kuli kasar dibawa ke Jakarta oleh mandor-mandornya dan sampai di Jakarta tidak tersedia penampungan bagi mereka itu. Dan terakhir adalah mereka datang membawa modal, mereka inilah yang membuat rumah-rumah liar.

Jalan lain yang ditempuh dalam mengatasi kaum gelandangan ini ialah mengembalikan mereka ketanah asalnya, memindahkan mereka kedaerah-daerah yang sudah dibuka di Keresidenan. Untuk Jakarta sendiri akan dibuka daerah baru diselatan Jakarta, yaitu didaerah Tanjung Oost.

Disamping orang tua terdapat juga anak-anak terlantar yang sudah tidak mempunyai orang tua atau mereka sudah putus hubungan dengan orang tuanya.

Usaha untuk penampungan anak-anak gelandangan sudah dimulai sejak bulan Juni 1950 di Pulau Damar Teluk Jakarta, disini mereka dididik dan dirawat. Pendidikan yang diberikan kepada mereka adalah pendidikan yang praktis yang dapat selesai dalam waktu singkat. Percobaan ini telah berhasil baik sehingga Pemerintah Daerah kemudian menjadikan cara ini sebagai usaha yang tetap. Sekarang ada 500 anak terlantar yang tertolong dan masih ada ± 5000 anak yang masih bergelandangan di Jakarta.

Kompleks perumahan yang rapih didaerah Kebayoran Baru merupakan sarana tempat tinggal yang mutlak, demikian rencana Kotapraja.

Inilah pembangunan Stadion Ikada yang dapat diciptakan dalam tempo 93 hari siap menyambut PON II pada tahun 1952.

UNTUK menampung mereka ini telah dibuat asrama penampungan seperti di Pulau Edam. Disini dapat ditampung 2000 anak terlantar. Asrama mereka diberi nama "Putra Utama I". Karena penampungan asarama dipulau Edam masih juga kurang cukup, didirikan pula asrama "Putra Utama II" di Jatinegara. Keadaan anak-anak gelandangan di Jakarta telah diabadikan dalam sebuah film yang berjudul "Si-Pincang".

Sedangkan untuk fakir miskin diusahakan dengan pertolongan memberi perawatan, pakaian dan bahan makanan. Tempat perawatan mereka di perumahan "Taman Harapan" (di Cawang), dimana mereka diberi pekerjaan bercocok tanam dan pendidikan kerajinan-tangan (anyam-anyaman). Mereka yang ditampung itu berjumlah 1025 orang.

PENAMPUNGAN fakir miskin ini juga terdapat di Karanganyar, yang berjumlah 472 orang. Mereka diberi latihan membuat kesed dan karpet dari sabut kelapa.

Pemeliharaan anak yatim piatu banyak diselenggarakan oleh masyarakat. Ada 14 buah yayasan yang bergerak dibidang ini. Pemerintah Daerah telah memberi bantuan subsidi antara lain kepada R.P. Muslimin, R.P. Rukun Istri, R.J.P. Muhamadiyah.

Pertolongan-pertolongan lain yang diusahakan pemerintah yaitu kepada para

KARYA JAYA

bekas Romusha dan Heiho yang diangkut oleh tentara Jepang, diusahakan pemulangan mereka kekampung halamannya. Kepada para penderita cacat diberikan perawatan dan sumbangan.

Perkumpulan-perkumpulan yang berjasa dalam usaha dibidang lapangan sosial ini antara lain, Perwari (Persatuan Wanita Republik Indonesia), Gerwis (Gerakan Wanita Indonesia Sedar), Wanita Demokrasi Indonesia, P.K.U. (Pertolongan Kesengsaraan Umum), Muslimat, Yayasan Cinta Sejati, Chichiku (bagian dari Chung Hua Tsing Hui), yang tersebut terakhir memperhatikan nasib fakir miskin golongan Tionghoa.

Kemudian ada masalah pemakaian tanah liar oleh penduduk pendatang (pengungsi) dari Jawa Barat dan Jawa Tengah. Mereka datang membanjiri Jakarta karena adanya kesulitan-kesulitan, baik ekonomis maupun politis di daerah pedalaman itu.

Pada masa pemerintahan Walikota Suwirjo masalah pemakaian tanah liar ini sudah mulai dirintis pemecahannya dan sampai sekarang masih meminta perhatian pemerintah Daerah. Walikota Sjamsuridjal dalam masalah ini, telah mengadakan pertemuan pada tanggal 20 Nopember 1952 yang dihadiri oleh wakil-wakil Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Tengah, KMKBDR, Kepala Kepolisian Jakarta dan Jawatan-Jawatan Kotapraja yang bersangkutan. Dari hasil pertemuan ini dapat disimpulkan, bahwa para Residen belum mempunyai kesanggupan untuk memulihkan kembali para pengungsi itu kekampungnya masing-masing, berhubung keadaan belum mengizinkan. Walikota kemudian dengan para peserta rapat mengadakan acara peninjauan ketempat-tempat atau komplek rumah liar di Petojo, jalan Tanggerang dan Tanah Tinggi.

Walikota Sjamsurizal dan rombongan diabadikan dengan Pengurus Taman Harapan Putra Utama, dalam rangka peninjauan ke Pulau Damar.

Walikota Sjamsurizal sedang berdialog dengan Pengurus Taman Harapan Putra Utama di Pulau Damar.

Selanjutnya masalah tanah ini dibahas didalam Dewan secara berturut-turut oleh Seksi Planologi pada tanggal 3 Maret 1952, 17 Maret 1952, 24 Maret 1952, 5 April 1952, 5 Mei 1952, 12 Mei 1952 dan pada rapat ini khusus dibicarakan mengenai pemakaian tanah liar disekitar lapangan VIJ dan Petojo.

Dalam rapat tanggal 12 Mei 1952, sdr. Rozali Sahlan, anggota seksi Planologi, mengusulkan supaya pembahasan mengenai tanah liar ini dihentikan sebelum ada pendirian Badan Pemerintah Harian atas keputusan seksi.

Selanjutnya usaha pemberantasan pemakaian tanah liar dan mendirikan rumah tanpa izin Kotapraja Jakarta Raya ini ialah diadakan pengumuman Kejaksaan Pengadilan Negeri Tentara Jakarta, No. 4 tahun 1952, tanggal 17 Mei 1952 yang berbunyi sebagai berikut :

> Kepala Kejaksaan Pengadilan Negeri merangkap Kepala Jawatan Tentara Pengadilan Negeri tentara di Jakarta c.a. : Bersama ini diberitahukan kepada khalayak ramai, barang siapa yang mendirikan bangunan dengan tidak ada izin yang sah dan karena itu melanggar Undang-Undang yang sekarang masih berlaku diwajibkan dalam tempo satu bulan dari tanggal pengumuman ini membongkar bangunan-bagunan tersebut. Terhadap mereka yang tidak memenuhi kewajiban tersebut diatas akan diambil tindakan.

Pengumuman ini ditanda tangani oleh Letkol R.Sunarjo, Walikota Sjamsuridjal komandan KMKBDR Mayor Kosasih, Kepala Kepolisian Jakarta Raya dan sekitarnya, R. Ating Natahadikusumah.

Usaha-usaha untuk meningkatkan pendidikan sudah mulai dirintis. Demikian lah pada tahun 1953 telah dibangun 53 buah ruang belajar pada dua tempat dengan uang bantuan Pemerintah Pusat. Sedangkan kepada pihak partikelir dianjurkan untuk mendirikan sekolah sebanyak-banyaknya.

DISAMPING menyelenggarakan sekolah rakyat, Kotapraja juga mempunyai Kursus Pegawai Administrasi (K.P.A.), dengan tujuan untuk memberi pengetahuan dan kecakapan kepada mereka tentang urusan administrasi kantor, yang tingkat pelajarannya disamakan dengan SMP. Sekolah ini bertempat di jalan Pintu Air No. II.

Kursus ini pada mulanya diselenggarakan oleh Serikat Buruh Kotapraja Jakarta Raya dan pada tahun ajaran 1951/1952 diserahkan kepada Kotapraja yang langsung diurus oleh Jawatan P.P.K. Kotapraja. Sekarang jumlah pelajarnya hampir 500 orang dengan 18 orang guru.

Jumlah anak-anak terlantar dikota Jakarta sangat banyak, sebagian dari mereka telah masuk dalam didikan di Taman Harapan Putra Utama di Pulau Edam.

Sekolah-sekolah lanjutan banyak coraknya yakni ada yang bersifat umum dan khusus. Yang bersifat umum ada 13 buah sekolah lanjutan pertama (SMP) dan 6 buah

Untuk lebih mendalami pentingnya hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dalam semua lapangan pekerjaan, itulah pokok yang dirundingkan oleh konperensi para Gubernur seluruh Indonesia yang diadakan di Jakarta mulai dari tanggal 19 sampai 21 Mei 1952. Konperensi ini didahului dengan suatu resepsi dikediaman Walikota Sjamsurizal, Taman Suropati 7, sebagai tanda konperensi akan dimulai.

sekolah lanjutan atas (SMA) negeri. Disamping itu terdapat 20 buah SMP dan 22 SMA partikelir. Sekolah lanjutan vak yakni 1 buah Sekolah Guru B (SGB) dan 1 buah Sekolah Guru A (SGA). Disamping itu ada SGA Kristen dan SGA Katholik. Sekolah tehnik pertama (ST) ada 1 buah dan sekolah tehnik menengah (STM) 1 buah. Sekolah ekonomi menengah (SMEP) ada 1 buah dan sekolah menengah atas (SMEA) ada 1 buah. Bagi anak-anak perempuan diadakan sekolah kepandaian puteri (SKP) dan sekolah guru kepandaian puteri (SGKP), masing-masing ada 1 buah. Sekolah taman kanak-kanak banyak terdapat di Jakarta, tetapi semuanya diselenggarakan oleh partikulir. Pendidikan guru bagi taman kanak-kanak pun diusahakan oleh partikulir yakni SGTK (Sekolah Guru Taman Kanak-Kanak). Sedangkan untuk meningkatkan pengetahuan guru-guru dan mutu pengajaran sekolah rakyat, diselenggarakan kursus-kursus bersama dan di Jakarta terdapat 3 buah kursus yang semacam itu.

Disamping sekolah-sekolah tersebut diatas, telah diusahakan pula pemberantasan buta huruf dalam kalangan orang-orang dewasa oleh Jawatan Pendidikan Masyarakat. Kursus-kursus buta huruf ini telah ada 334 buah dengan jumlah murid 1200 orang. Yang telah tamat dari kursus ini ada 4300 orang.

Kemudian diusahakan kursus-kursus untuk menambah pengetahuan umum yang boleh diikuti oleh semua warga negara. Usaha ini belum mencapai hasil yang memuaskan. Di Jakarta baru ada 2 buah dengan jumlah murid 475 orang. Diantaranya 105 orang telah tamat.

Pendidikan Islam yang khusus diselenggarakan oleh madrasah-madrasah, pesantren dan langgar-langgar atau guru-guru agama sendiri diseluruh Jakarta terdapat 153 madrasah, 2 buah pesantren. Diantaranya ada yang mendapat bantuan dari Kementerian Agama.

Mengenai dunia Universitas sebelum tahun 1950 hanya ada Fakultas Kedokteran dan Fakultas Hukum, sekarang telah timbul Fakultas Sastra dan Filsafat, Fakultas Ekonomi, semuanya itu ada dalam penyelenggaraan Universitas Indonesia.

Timbul pula akademi-akademi seperti Akademi Kepolisian, Akademi Luar Negeri dan Akademi Tehnik Nasional. Ada pula akademi yang didirikan oleh swasta seperti Akademi Wartawan dan Akademi Islam. Disamping itu ada Akademi Nasional yang diselenggarakan oleh "Perkumpulan Memajukan Ilmu Kebudayaan"(PMIK), yakni suatu perkumpulan oleh kaum republik dalam zaman pemerintahan pre-federal.

Mengenai perekonomian di Jakarta waktu itu dapat diutarakan sebagai berikut :

Pusat perniagaan di Jakarta yang ternama, yaitu Kali Besar, Roa Malaka, Pasar Pagi, Pintu Kecil, dan Kongsi, sebagian besar masih ditangan asing. Kantor-kantor perniagaan bangsa Indonesia yang patut disebut adalah Dasaad Concern, Wahab Kongsi, Djohan Djohor, Rahman Tamin, Intraport.

Pada tanggal 18 Pebruari 1952 didirikan Dewan Ekonomi Indonesia (Indonesian Chamber of Commerce and Industry). Tujuan dari pada D.E.I. ini adalah ::

1. Turut membantu pembangunan dalam lapangan ekonomi nasional.
2. Memajukan dan menyelenggarakan kepentingan usaha-usaha Indonesia
3. Mendorong dan memperbesar kegiatan dalam lapangan ekonomi diantara bangsa Indonesia.

Suatu kejadian penting dibidang perekonomian di Jakarta ialah pendirian Bursa Jakarta pada tanggal 4 Juli 1952.

Pada umumnya industri besi, kayu, minyak kulit, sabun, es, makanan dan minuman diberbagai tempat di Jakarta sebagian besar ditangan bangsa asing terutama orang Tionghoa. Demikian pula industri batik.

Dalam perusahaan percetakan nampak banyak inisiatip orang Indonesia, antaranya Percetakan Pemandangan, Pustaka Rakyat, Seno N.V., Siliwangi, Dharma.

Perdagangan toko-toko dan warung-warung (eceran) sebagian besar masih tetap ditangan orang Tionghoa. Dikalangan ini nampak banyak orang Arab terutama dalam perdagangan alat-alat bangunan, perabot rumah tangga dan barang tua.

Permintaan mendirikan perusahaan-perusahaan baru yang tercatat di Balai Kota menunjukkan perbandingan yang menyolok, ialah rata-rata sepuluh perusahaan setiap

Upacara halal-bihalal pada Hari Raya yang mendapat kunjungan dari seluruh lapisan masyarakat Jakarta di Taman Suropati 7.

hari, diantaranya hanya satu buah perusahaan bangsa Indonesia asli. Sebabnya tidak lain, karena bangsa Indonesia masih terlalu lemah keuangannya.

Oleh karena itu pemerintah menganjur-anjurkan dan bahkan menyokong usaha rakyat dalam mendirikan koperasi maupun perusahaan. Pada tahun 1952 terdapat 76 buah koperasi dengan perincian, 13 buah koperasi pusat, 34 buah koperasi simpan pinjam, 15 buah koperasi produksi, 23 buah koperasi konsumsi dan 1 buah koperasi lainnya. Ini menunjukkan bahwa di Jakarta koperasi sudah ada kemajuan.

Mengenai hasil pertanian, yaitu padi dihasilkan dari sawah-sawah yang berada di bagian barat Cengkareng, bagian timur Kelender, dan bagian utara Tanjung Periuk. Hasilnya diperlukan untuk konsumsi rakyat Jakarta sendiri. Lebih penting adalah hasil buah-buahan seperti jeruk, jambu, rambutan, duren, nenas dan lain-lain, yang dihasilkan dari daerah selatan Jakarta yaitu Pasar Minggu, Pasar Rebo, Kebun Jeruk, Kebayoran dan Mampang Prapatan. Usaha pemerintah untuk menjaga mutu buah-buahan ini, telah membuat kebun percobaan di Pasar Minggu. Buah-buahan ini tidak hanya untuk dijual di Jakarta tetapi juga dikirim keluar Jakarta.

Sedangkan untuk keperluan hewan potong, umumnya didatangkan dari luar Jakarta. Demikian pula telor ayam dan itik. Babi dan kambing dipelihara dibeberapa tempat di Jakarta untuk keperluan itu. Didaerah Jakarta Selatan seperti didaerah Mampang Prapatan terdapat perusahaan susu dengan produksi 8858 liter tiap hari dari 536 ekor sapi.

SEPANJANG pantai utara Jakarta terdapat empang-empang ikan seluas 1201,01 ha yang terutama menghasilkan ikan bandeng. Tercatat dalam bulan Maret 1952 pendapatannya 95718 kg. Sedangkan empang-empang untuk ikan air tawar terdapat dibagian selatan wilayah Kotapraja, yang luasnya 658 ha dengan hasilnya ikan gurame, tawes dan ikan mas.

Penangkapan ikan dilaut dilakukan oleh para nelayan dengan perahu layar maupun motor. Para nelayan ini hidup disepanjang pantai utara dan dikelompok Pulau Seribu. Untuk kepentingan para nelayan telah didirikan koperasi dengan nama Koperasi Perikanan Pulau Seribu. Koperasi ini berusaha memberikan pinjaman alat-alat penangkapan ikan kepada mereka yang membutuhkan.

Peninjauan Walikota Sjamsurizal beserta Ibu ke Gelanggang Dagang Wanita yang diselenggarakan di Lapangan Merdeka.

Pemerintah Kotapraja telah menentukan 3 (tiga) tempat untuk pelelangan ikan, yaitu di Pasar Ikan, Tanjung Priok, Kamal. Kepada para nelayan yang menjual ikannya harus melalui tempat pelelangan ikan Kotapraja. Pemasukan ikan yang tercatat tahun 1951 diketiga tempat itu masing-masing, 3.561.573 kg, 2.119.918 kg, dan 147.126 kg.

Walikota Sjamsuridjal dalam rangka melancarkan roda pemerintahan antara pusat dan daerah juga untuk mengenal dari dekat keadaan-keadaan dan penghidupan rakyatnya, telah melakukan peninjauan ke beberapa daerah pinggiran Jakarta.

Peninjauan ke Kepulauan Seribu dilakukan oleh Walikota Sjamsuridjal didamdingi oleh anggota BPH, anggota Dewan Perwakilan Kota Sementara, Kepala Bagian dari Kotapraja Wakil-wakil dari Jawatan Sosial, Pendidikan, Kesehatan dan Penerangan. Peninjauan ke Kepulauan Seribu ini dilakukan dalam dua hari, Walikota dapat melihat dari dekat keadaan kehidupan rakyat nelayan Pulau Seribu yang berpenduduk 5.000 jiwa.

Walikota Sjamsuridjal melakukan pula kunjungan ke Kecamatan Cengkareng yang terletak 25 km dari pusat kota. Rakyat disini hidup sebagai pengusaha industri kecil, penangkap ikan dan sebagai buruh tani. Mengenai pendidikan pada waktu itu terbelakang sekali, hanya ada 4 sekolah pemerintah dan 3 sekolah partikelir. Kesehatan rakyat perlu mendapat perhatian, rakyat banyak yang menderita penyakit patek.

Obyek-obyek pembangunan ditinjau pula oleh Walikota Sjamsuridjal dalam rangka melihat perkembangannya. Berturut-turut Walikota dan rombongan meninjau proyek penjernihan air minum Pejompongan yang menonjol sebagai hasil karya pembangunan Walikota Sjamsuridjal selama ia menjadi Walikota Jakarta Raya. Juga proyek jalan Thamrin dan mesjid Agung di Kebayoran Baru dibangun dalam masa jabatannya. Proyek pendidikan telah dilaksanakan berupa komplek pelajar yang bernama "Komplek Taman Setia Budi" terdiri dari komplek SD, SMP, SMA yang dilengkapi dengan perkampungan pelajar dan ruang olah raga.

RIWAYAT HIDUP SINGKAT MR. SUPANGKAT.

- **Pegawai Shtadsgemeentee Batavia (1936 – 1942)**
- Wedana Mangga Besar (1944 – 1946)
- Sekretaris Daerah Pemerintahan Kotapraja Jakarta (1950 – 1960).

LAHIR pada tanggal 16 Agustus 1908 di desa Manggis, distrik Karanglo (Singosari), Kabupaten Malang. Tamat dari Hollands Inlandse School (HIS) di Pasuruan (1921), Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) di Malang (1925) dan Algemene Middelbare School (AMS) di Bandung (1928). Antara lain, yang menjadi teman sekolahnya ialah Sutan Sjahrir. Dari situ kemudian melanjutkan di Rechshogeschool Jakarta (RHS) (1928 – 1934) dan mendapat gelar Meester in de Rechten (Sarjana Hukum).

Sejak usia 14 tahun ikut dalam perkumpulan Jong Java, kemudian Jong Indonesia sebagai anggauta Pengurus Besar dan memegang pimpinan redaksi majalah Jong Indonesia. Sebagai mahasiswa RHS di Jakarta ia adalah pula anggauta Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia (PPPI) dengan majalahnya Indonesia Raya, yang dipimpinnya sebagai pemimpin redaksi. Pernah dipenjara (1933) karena pers delict (pelanggaran pers).

Setelah selesai pelajaran di AMS ia belajar praktek di kantor pengacara Mr. Gatot Tarunamihardja (ex pemimpin Perhimpunan Indonesia di Nederland, pernah menjadi Jaksa Agung R.I.) di Cirebon. Sejak 1 Januari 1936 bekerja pada Stadsgemeente Batavia (Kotapraja) dan berpengalaman sebagai pegawai bagian hukum, urusan tanah, perumahan dan perencanaan kota pada dinas perkembangan kota hingga tahun 1942.

Jaman pendudukan Jepang tetap bekerja di Kotapraja (Jakarta Tokubetsu Shi), menggantikan Mr. Assaat (di kemudian hari ketua KNIP dan Pj. Presiden R.I. Yogya), kemudian sebagai kepala distrik Manggabesar, kini di bawah Pemerintah Nasional Jakarta.

Pebruari 1947 ditempatkan sebagai patih kepala Urusan pamongpraja di Balai Agung Kota, namun tidak lama karena segera diangkat sebagai Residen Bogor, yang praktis tidak dapat melaksanakan tugas secara penuh, karena halangan Residen Belanda tandingan di Bogor dan gangguan dari Partai Rakyat Pasundannya Kartalegawa.

Pada Aksi Militer ke-I ditangkap Belanda dan bertemu dengan Suwirjo di tempat tahanan politik di Gang Chassee, Jakarta.

Kemudian di"kembali"kan ke daerah Rèpublik, dan menjabat sebagai wakil Suwirjo dalam Biro Kabinet, Urusan Daerah Pendudukan, Kabinet Hatta.
Dalam Aksi Militer II ditangkap lagi oleh Belanda. Setelah pengakuan kedaulatan menjadi Sekretaris Daerah Pemerintahan Kotapraja Jakarta (1950 – 1960) dan pensiun atas permohonan sendiri.

Anggota Direksi PT. PP pada ketika Perusahaan Negara dibidang bangunan tersebut melaksanakan pembangunan Hotel Indonesia (1960 – 1963). Pada masa menjabat Sekretaris Daerah ikut dalam perjalanan studi tentang pemerintahan kota ke USA, dan hadir dalam konperensi internasional yang diselenggarakan oleh PBB di New Delhi pada tahun 1954 sebagai utusan Pemerintah mengenai "Housing and Community Improvement". Anggauta Panitia Agraria pemerintah R.I. dan menjadi dosen luar biasa pada Departemen Arsitektur ITB dan dosen tidak tetap di Fakultas Tehnik Universitas Trisakti.

Banyak kegiatannya hingga sekarang dalam bidang tata kota dan hukum tanah perkotaan.

(ARS)

SUDIRO

SUDIRO

Lahir di Yogyakarta, 24 April 1911
Gubernur Kepala Daerah yang bertugas sebagai Walikota Jakarta Raya
1 Nopember 1953 – 25 Pebruari 1958
Kepala Daerah Tingkat I Kotapraja Jakarta Raya, 25 Pebruari 1958 – 6 Pebruari 1960

RIWAYAT HIDUP SINGKAT

SUDIRO lahir di Yogyakarta pada tanggal 24 April 1911. Berpendidikan HIS Kweekschool (Sekolah Guru) dan tamat dalam usia 20 tahun dari Hogere Kweekschool di Magelang.

Berpengalaman dalam dunia pendidikan sebagai Direktur MULO-Kweekschool Budi Utomo di Madiun, Ketua Umum Taman Siswa Madiun (1933 – 1936), Guru Kesatrian Institut dari E.F.E. Douwes Dekker di Cianjur (1936 – 1937), Kepala HIS di Curup, Plaju, dan Inspektur Sekolah Balatentara Jepang di Plaju-Sungai Gerong.

Sejak di bangku sekolah telah aktif di dalam organisasi Jong Java, Indonesia Muda dan Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI). Setelah tamat dari sekolah aktif sebagai komisaris Pengurus Besar Partai Indonesia untuk daerah Jawa Tengah Selatan, dan duduk dalam Seksi Serikat Sekerja. Pernah menjadi Ketua Perserikatan Sopir, Kusir dan penasehat Perserikatan Kaum Tani Indonesia. Pada masa ini karena pelanggaran politik dan pers sering keluar-masuk penjara kolonial.

Pada tahun 1944 – 1945 bekerja di Pusat Jawa Hoo koo kai (Kebaktian Rakyat Jawa) sebagai pimpinan Barisan Pelopor dan turut menyelenggarakan upacara Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Pegangsaan Timur 56 Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian menjadi Anggauta Komite Nasional Indonesia Pusat (1945 – 1947), wakil Pemimpin Umum Barisan Banteng (1945 – 1948).

Setelah menjadi wakil Residen Surakarta selama setahun kemudian menjadi Residen yang ikut bergerilya, sebagai residen koordinator Solo-Madiun, Semarang-Pati. Setelah pengakuan kedaulatan R.I. menjadi Residen Madiun dan Gubernur Propinsi Sulawesi (1951 – 1953), kemudian Wali Kota Jakarta Raya (1953 – 1960).

Di samping itu beliau menjadi Ketua Umum Dana Perjoangan Irian Barat dan Anggauta Konstituante. Pada tahun 1960 berhenti atas permintaan sendiri sebagai Gubernur KDH.

Di dalam masa peralihan ke Orde Baru, diberi tugas oleh Pengemban Surat Perintah Sebelas Maret, Let.Jen. Suharto, untuk memimpin kongres Pemersatuan PNI di Bandung (1966) bersama Mr. Iskaq Tjokrohadisurjo dan Prof. Sunawar Sukawati dan dua orang lain.

Jasa-jasanya diakui dengan banyaknya Bintang Anugerah/Tanda Jasa dan Piagam. Dewasa ini masih aktif di berbagai bidang kegiatan organisasi pensiunan, veteran, pendidikan dan sebagainya. Khusus bertalian dengan Jakarta, dewasa ini beliau adalah Ketua Yayasan Gedung-gedung Bersejarah Jakarta.

Selama ini beliau didampingi oleh Bu Diro, lengkapnya Ny. Siti Djauhari Sudiro, yang juga aktif di dalam pergerakan nasional umumnya, gerakan wanita Indonesia khususnya. Pak dan Bu Diro berputra 5; 3 laki-laki dan 2 putri, yang kini semuanya telah menikah.

(ARS)

KALA ITU.....

Oleh: Sudiro.

Tentang "Memorie van Overgave".

ADA yang berpendapat, bahwa pembuatan "Memorie van Overgave" (Naskah serah-terima) itu meniru "cara kolonial Belanda". Memang benar, dizaman penjajahan Belanda dulu, para Gouverneur, Resident, Burgemeester (Walikota), Assistent-Resident, Controleur", yang akan mengakhiri tugasnya sebagai kepala dari suatu daerah, diwajibkan untuk membuat "Memorie van Overgave". Sebagai semacam "penuntun" bagi mereka yang akan menggantikannya.

Sebenarnya keharusan tersebut juga sudah ada bagi para pegawai B.B. (Binnenlands Bestuur = Pamong Praja) Bumiputera (Bupati, Patih, Wedana, Assisten-Wedana), tetapi nyatanya itu hanya dilakukan oleh tokoh Pamong Praja tertentu saja. Dari ratusan bendel "memorie van overgave", yang penulis telah membacanya disebuah kantor arsip Pemerintah Nederland (Negeri Belanda), hanya terdapat satu yang telah ditulis oleh seorang berbangsa Indonesia, yaitu pak Surjo (alm.), yang pernah menjabat Gubernur Jawa-Timur. Beliau meninggalkan "memorie van overgave" itu pada waktu beliau dipindah sebagai Wedana di Kabupaten Pacitan kelain tempat.

Saya berpendapat: Tidak semua cara "administrasi kolonial Belanda" jelek. Yang mengenai keharusan membuat "memorie van overgave" ini - menurut pendapat saya - justru pantas ditiru. Dan sebaiknya diteruskan dalam administrasi Pemerintahan Dalam Negeri di Negara kita!.

Kalau sekarang Gubernur Ali Sadikin minta kepada para bekas Kepala Daerah Kota Jakarta, untuk melengkapi "memorie" beliau, maka ini adalah suatu bukti, bahwa beliaupun pada asasnya sependirian dengan saya. Mungkin pula beliau telah mengetahui, bahwa di Indonesia ini pergantian seorang Pejabat Pemerintah (Daerah) - terutama di antara tahun 1945 dan 1965 - seringkali mendadak. Sehingga Pejabat tersebut biasanya tidak mempunyai cukup waktu, untuk menyiapkan sebuah "memorie van overgave".

Kejadian tersebut telah saya alami sendiri, bahkan berkali-kali. Kalau sekarang saya diminta, untuk melengkapi "memorie"nya Bang Ali dengan semacam "memorie van overgave" juga, yang tentunya akan lebih berupa "memoires" (kenangan), maka permintaan itu tentu saja saya terima dengan baik, dan dengan perasaan gembira pula. Dan lagi saya merasa, bahwa pemberian kesempatan ini, sesungguhnya adalah suatu penghargaan yang tinggi bagi orang-orang yang pernah menduduki tempat, yang sama dengan beliau. Ini sangat berbeda dengan suatu "kebiasaan" untuk melupakan, bahkan kadang-kadang sedikit banyak "memusuhi" pejabat yang telah digantinya.

Upacara serah terima jabatan Walikota yang lama Sjamsuridjal kepada Walikota yang baru Sudiro di Balai Kota pada tanggal 1 Nopember 1953.

"Memorie" dan "memoires".

SAYA berpendapat, bahwa istilah "memorie" itu tidak sama dengan "memoires" Sdr. Gubernur Ali Sadikin kini telah menyiapkan sebuah "memorie van overgave", yang diberi judul "Gita Jaya". Yalah sebuah Risalah Penyerahan Kekuasaan, suatu pertanggungan jawab kepada penggantinya. Menjelang beliau berhenti sebagai Gubernur Kepala Daerah. Bahkan sejak beberapa waktu, kedudukan beliau resminya yalah sebagai "pejabat Gubernur".

Pertanggungan jawab ini mengenai segala apa yang telah dikerjakan selama beliau jadi Gubernur dan prospek-prospek ke masa depan. Kalau para ex-Gubernur Kepala Daerah Jakarta, diminta oleh beliau untuk melengkapi "memorie itu", tentulah

dalam hubungan pertanggungan jawab itu. Khususnya, saya kira, yalah pengalaman dalam hal pemerintahan sewaktu mereka ini menjadi Kepala Daerah Kota Jakarta. Misalnya: bagaimana keadaan pada waktu itu dan apa saja usaha-usaha yang telah dilakukan. Bukanlah "memoires" yang biasanya dimulai dari waktu orang masih anak-anak, masih berusia muda.

Khusus dalam hal yang diminta dari saya, oleh Bang Ali ini, tentu saja hanya "memoires" selama saya menjabat Kepala Daerah Kota Jakarta saja. Sehingga sedikit banyaknya masih akan ada hubungannya dengan "Gita Jaya" beliau. Dan "memoires" ini hanya berdasar "apa yang kebetulan teringat pada saat ini saja". Berdasar atas sedikit catatan dan foto-foto, yang kebetulan tersimpan dalam arsip pribadi saya. Maklum, daya ingat sudah mulai kurang, disebabkan oleh lanjutnya usia.

Sifat uraian ini tidak perlu seperti laporan dinas, tetapi pasti lebih bersifat pribadi, kenang-kenangan pribadi, pengalaman pribadi, singkatnya: manusiawi (persoonlijk).

Demikian itulah yang tercakup dalam suatu istilah berasal dari bahasa Perancis, yaitu: "memoires". Artinya kenang-kenangan pribadi (persoonlijke gedenschriften). Sedangkan "memorie" - menurut Van Dale's Woordenboek (Kamus Van Dale)- yalah: uraian, pemandangan, tulisan tentang sesuatu, verhandeling (dissertation), beschouwing (considerations), Schriftuur over zeker onderwerp.

Sekianlah mengenai dua istilah, yang kedengarannya hampir sama, tetapi isinya berbeda itu.

Dua kali pertemuan dengan beberapa orang pembantu terdekat, tatkala saya masih bertugas sebagai Walikota Jakarta-Raya, menghasilkan bertambahnya bahan-bahan, yang pantas pula saya hidangkan kepada pembaca. Kepada mereka itu, yang hampir semuanya telah beruban, dan yang tidak saya sebut namanya satu demi satu, saya ucapkan banyak terima kasih.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Jth sdr Sudiro
Gubernur Sulawesi

Sdr.,

Kemarin saja telah menandatangani pengangkatan sdr sebagai Gubernur di Sulawesi. Kewadjiban2 jang saja limpahkan diatas pundak sdr dengan pengangkatan ini, tidak ringan. Negara kita masih muda, dan oleh karenanja, disana-sini masih perlu dipendalamkan dikalangan rakjat serta pemimpin-pemimpinnja rasa dan kesadaran „berNegara". Disana-sini orang masih berfikir dalam term golongan, term partai, term daerah, d.l.s. Bekerjalah dengan bidaksana, agar supaja kesedaran-berNegara mendalam diseluruh Sulawesi.

Sulawesi memang masih mengandung pula problem-problem lain jang pelik. Saja menempatkan sdr disana dengan harapan supaja

Surat dari Presiden Sukarno tentang penugasan Sudiro untuk menjabat Gubernur di Propinsi Sulawesi tanggal 29 Juni 1951.

odr, — dengan bantuan semua fihak — dapat menjelesaikan problem-problem itu. Ja, „dengan bantuan semua fihak"! Ini berarti pula, bahwa djuga „semua fihak" itu harus dengan ichlas suka mendahulukan kepentingan Negara diatas kepentingan lain-lain. Kewadjiban odr sebagai Gubernur ialah agar supaja kesedaran-berNegara itu menjadi kenjataan jang hidup.

Saja do'akan, moga-moga Tuhan memberi pimpinan serta taufik sebanjak-banjaknja kepada odr dalam post odr jang baru ini.

Merdeka!

Bachamo. —

29/6 '57

PEMERINTAHAN KOLLEGIAL DIANTARA AKHIR TAHUN 1953 SAMPAI DENGAN TAHUN 1960.

DALAM bulan Nopember 1953, saya (Sudiro) yang sejak bulan Juli 1951 menjabat Gubernur Propinsi seluruh Sulawesi dan berkedudukan di Makasar (sebutan sekarang: Ujung Pandang), dipindah ke Jakarta untuk menjalankan tugas baru sebagai Walikota Kotapraja Jakarta-Raya.

Sebelumnya saya masih diberi kesempatan memilih, yaitu sebagai Gubernur Propinsi (seluruh) Kalimantan atau sebagai Walikota Kotapraja Jakarta-Raya. Atas desakan Menteri Dalam Negeri Prof. Dr. Mr. Hazairin (alm), akhirnya saya menerima: Jakarta.

Pada waktu diadakan timbang-terima dengan Walikota Sjamsurizal yang juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Prof. Dr. Mr. Hazairin, saya mengucapkan pidato, dimana saya tegaskan pendirian saya, antara lain sebagai berikut :

1. Bagi saya, aesthetika sosial akan lebih saya utamakan dari pada aesthetika physik;
2. Pemerintahan kollegial harus berarti pula, dekatnya anggota anggota Pemerintahan – termasuk Walikotanya – pada masyarakat;
3. Pedoman, yang oleh Pemerintah R.I. pada tahun 1951 diberikan kepada saya, sebagai bekal bekerja sebagai Gubernur Sulawesi yaitu :
"Adil, suci dan tegas", juga dalam jabatan yang baru ini, akan tetap saya pegang teguh;
4. Adalah suatu kemahiran : mengadakan Pemerintahan yang baik tanpa tersedianya biaya yang memadai. Tetapi lebih mahir lagilah : mengadakan Pemerintahan yang baik, dengan tersedianya biaya yang cukup, diperoleh dari dan diusahakan dengan kekuatan sendiri.

Meskipun surat kepindahan saya dari Makasar ke Jakarta itu ditanda-tangani oleh Presiden R.I. sendiri, tetapi pelantikan secara resmi sebagai Walikota Jakarta-Raya tidak pernah saya alami.
Rupanya waktu itu kita tidak begitu memperhatikan soal upacara-upacara pelantikan. Dalam riwayat pekerjaan saya sebagai pegawai Pemerintah R.I., hanya satu kali saja saya dilantik. Yaitu pada tahun 1946 sebagai Wakil Residen Surakarta oleh Presiden R.I.

Kegiatan sehari-hari.

PEKERJAAN Walikota dalam prinsipnya berbeda dari pekerjaan seorang Gubernur, Residen atau Bupati.

Kalau tugas seorang Gubernur dari sebuah Propinsi yang luas, dapat diibaratkan sebagai seorang "landbouwer" (petani), maka seorang Walikota adalah seorang "tuinier" (tukang kebun). Alat petani umumnya besar dan kasar, misalnya: pacul, bajak, buldoser. Sedangkan alat tukang kebun yalah: gunting dan pisau.

Seorang Walikota yang baik harus memperhatikan soal-soal yang tampaknya kecil dan remeh tanpa mengabaikan hal-hal yang besar. Itulah sebabnya, maka disamping sering harus turut serta dalam urusan-urusan besar, sebagai Walikota saya waktu itu sering mengadakan dialog dengan rakyat jelata. Sehingga tidak perlu diherankan, apabila pada Hari Raya Idulfitri dan hari-hari besar tertentu lainnya, yang datang menemui saya, juga banyak dari kalangan mereka ini. Tetapi kebijaksanaan saya, yang membuka pintu seluas-luasnya bagi masyarakat yang ingin menemui saya

itu - penjagaan dirumah dinas telah saya tiadakan, maka ada juga akibatnya. Mungkin, karena sedang meluapnya faham demokrasi, tidak jarang, pada waktu tengah malam, saya didatangi: ya rombongan pengendara becak atau pedagang kecil, ya wartawan, ya orang-orang yang berebutan rumah.

Soal hak kepolisian (Politionele bevoegdheid):

TERNYATA, bahwa tindakan yang adil dan sekaligus tegas, tidak mudah dijalankan. Para "pedagang kecil" yang dengan seenaknya berjualan diatas kaki-lima (trottoir), sangat mengganggu lalu-lintas dan orang-orang yang berjalan kaki. Demi adilnya, berjualan - terutama yang bersifat menetap - diatas kaki-lima, saya larang. Yang membandel, terpaksa ditindak dengan tegas, gubuk tempat jualannya saya suruh bongkar juga. Terhadap gubuk-gubuk liar, saya mulai bertindak tegas. Segera para penghuninya mencari dan mendapatkan "backing". P.K.I. dan beberapa oknum dari kalangan tentara waktu itu, biasanya lalu turut campur. Padahal fihak Kepolisian Negara sudah sangat sibuk dengan tugasnya memelihara peraturan perundangan Pusat sendiri, lagi pula formasinya memang tidak cukup.

Begitulah berat rasanya, memerintah tanpa mempunyai kekuatan yang langsung dapat saya gerakkan, sehingga akhirnya bersama Dewan Perwakilan Kota Sementara saya mendesak Pemerintah Pusat, agar kekuasaan kepolisian dari "Gouverneur Gewest Batavia en Ommelanden" dahulu, diserahkan kepada Walikota Jakarta-Raya. Dengan demikian dapat diharapkan, bahwa semua Peraturan Pemerintah Daerah akan dapat dilaksanakan dengan baik dan tertib. Karena memerintah mengandung arti pula: dimana perlu, Pemerintah harus dapat memaksakan kehendaknya, sehingga perintah-perintah dan peraturan-peraturannya ditaati oleh masyarakat.

Pada bulan Pebruari 1956 Undang-undang Darurat R.I.S. 1950 No. 2 ditetapkan menjadi Undang-undang biasa, yaitu sebagai Undang-undang tahun 1956 No. 1. Kini kepada Walikota Jakarta-Raya kekuasaan kepolisian itu diberikannya. Berdasarkan itu saya segera membentuk "Onbezoldigde Politie-ambtenaren". Kekuasaan mereka ini terbatas, yaitu:

1. Hanya meliputi wilayah Kotapraja Jakarta-Raya saja;
2. Hanya pada pengusutan pelanggaran dari Peraturan-peraturan Daerah Kota Jakarta-Raya saja.

Para pegawai Kotapraja yang diangkat sebagai "Onbezoldigde Politie-ambtenaren" itu, tidak menerima gaji tambahan. Oleh karena sebutan "polisi tanpa bayaran" tidak sedap didengar, maka kemudian sebutan yang resmi bagi mereka yalah: "Pegawai Petugas Kepolisian Jakarta-Raya". Dengan keputusan Dewan Perwakilan Kota Sementara dalam bulan Juni 1955, ditentukan pula bentuk dan warna pakaian seragam bagi mereka.

R.T. dan R.K.

LEBIH dari 3000 orang pemuka masyarakat, selama 3 hari saya kumpulkan, untuk merundingkan tentang pembentukan "Rukun Tetangga" dan "Rukun Kampung". Seorang perwira menengah oleh Pimpinan A.B.R.I. waktu itu diperbantukan pada saya. Hasil dari musyawarah ini antara lain berbentuk buku-saku, yang memuat Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan petunjuk-petunjuk bagi para Ketua R.T. dan R.K. (kemudian nama ini di-ubah menjadi R.W. = Rukun Warga). Intinya yalah: R.T. dan R.K. membantu pimpinan instansi-instansi Pemerintah dibawah, yaitu Lurah dan Kepala Kampung, dan tidak boleh menganggap dirinya sebagai instansi Pemerintah sendiri.

U.P.D.

PADA akhir tahun 1955 oleh Menteri Sosial telah diserahkan pula suatu urusan yang berat kepada Walikota Jakarta-Raya, yaitu urusan kekuasaan pengawasan dan pertanggungan jawab atas perumahan (U.P.D.). Pada waktu Pemerintah Kotapraja tidak/belum memiliki kekuasaan kepolisian, dapat dibayangkan betapa berat dan sukarnya pelaksanaan urusan itu. Saling "serobot-menyerobot" rumah, dengan menggunakan "backing orang yang bersenjata", beberapa tahun lamanya merajalela di kota Jakarta.

Enclave (daerah kantong).

SECARA senda-gurau, pada sekitar tahun 1954-1956, saya sering menyatakan, bahwa didalam Daerah Kotapraja Jakarta-Raya ada 3 buah "enclaves". Karena di 3 wilayah tersebut Walikota tidak/belum mempunyai hak yang mutlak. Masih diurus langsung oleh instansi Pusat.

Hanya kalau ada kesulitan-kesulitan saja, biasanya Pemerintah Kotaprajalah yang diwajibkan menyelesaikannya. Bagi masyarakat, keadaan yang ganjil ini tentu saja tidak dapat mudah dimengerti. Rakyat mengira, bahwa 3 tempat yang saya sebut "enclaves" itu, merupakan bagian-bagian yang mutlak dari wilayah kekuasaan Pemerintah Kotapraja.

Tiga enclaves itu yalah: Airport di Kemayoran, Pelabuhan Tanjung Priok dan Kebayoran Baru.

Kementerian Perhubungan (bagian Udara dan Laut) seringkali menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan bagi Airport Kemayoran dan Pelabuhan Laut Tanjung Priok itu, tanpa berunding lebih dahulu dengan Pemerintah Kota. Tetapi tatkala

pada suatu hari ada seekor kambing yang masuk sampai landasan pendaratan kapal terbang, atas laporan Departemen tersebut, Presiden memberi tegoran keras kepada Walikota!.

Mengenai wilayah "kotabaru" Kebayoran, sampai awal tahun 1957, statusnya belumlah ada kepastiannya. Pembangunannya dimulai pada tahun 1948 oleh Pemerintah Pre-federal. Maksudnya: untuk menyediakan perumahan, terutama bagi para pegawai negeri, karena pertambahan penduduk dari kota Jakarta sangat pesatnya.

Menurut sebuah catatan, pada tahun 1630 jumlah penduduk kota Jakarta hanya 600 orang. Pada tahun 1912 oleh Gemeente Batavia tercatat 162.126 orang penduduk.

Pada waktu balatentara Jepang menduduki kota Jakarta, penduduknya diperkirakan 600.000 orang, dan pada tahun 1948 jumlah itu sudah meningkat menjadi 1.174.252 orang.

Yang diberi hak oleh Pemerintah Pre-federal untuk merencanakan dan membangun kota satelit Kebayoran Baru tersebut, yalah sebuah Yayasan bernama : "Centrale Stichting Wederopbouw" (disingkat: C.S.W.). Untuk "Kebayoran Commissie" dan diangkatlah seorang pegawai Pamongpraja dengan sebutan: "Stedelijk Bestuursambtenaar". Ternyata tempat yang direncanakan akan menjadi sebuah kota tersendiri ini, kemudian digabungkan saja dengan wilayah Kota Jakarta, sehingga merupakan sebagian dari Daerah Kotapraja Jakarta-Raya. Meskipun kemudian oleh Pemerintah Kotapraja ditempatkan disitu seorang Wedana, tetapi pembangunannya tetap dilaksanakan sendiri oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

Dan mulai tahun 1952 Jawatan yang diberi tugas membangun Kebayoran Baru, bernama "P.C.K." (Pembangunan Khusus Kebayoran). Mungkin disebabkan oleh karena ingin lekas selesai, maka ditepi jalan-jalan di Kebayoran Baru ini, umumnya tidak digali lebih dahulu saluran air. Untunglah, bahwa letak wilayah ini agak tinggi, sehingga umumnya - bahkan hingga sekarang! - tidak pernah diserang banjir, terkecuali sebagian kecil saja. Pada tahun-tahun permulaan itu, pegawai negeri yang diberi tempat tinggal di Kebayoran Baru pada umumnya mengeluh. Ada sementara orang yang berkata: "Kami ini seperti dibuang saja".

Walikota Sudiro membuka sidang DPRD Jakarta pada tahun 1954.

Tiga Wilayah Kabupaten Administratip.

SETELAH melihat demikian luasnya pekerjaan Kepala Daerah Kotapraja Jakarta-Raya, dengan bermacam-macam urusannya yang menuntut penanganan dengan segera, maka pada sekitar tahun 1955 timbul fikiran pada diri saya, untuk membentuk beberapa wilayah administratip, yang akan kami beri sebutan "Kabupaten administratip". Kalau rencana ini dapat dilaksanakan, maka sekaligus kedudukan Pamongpraja dalam Kotapraja Jakarta-Raya ini juga akan berubah. Waktu itu pegawai Pamongpraja yang tertinggi didalam kota ini, pangkatnya hanyalah: Wedana!

Jika rencana saya tersebut diatas saya mintakan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri lebih dahulu, saya khawatir kalau sebagai biasanya - akan ditolaknya. Setidaknya, dengan alasan akan dipelajari lebih dulu dengan seksama, akhirnya akan terkatung-katung saja. Itulah sebabnya, maka saya rasa, tidak ada jalan lain dari men"fait accompli"-kan Pemerintah Pusat saja, dengan penuh rasa tanggung jawab. Dalam surat saya kepada Menteri Dalam Negeri waktu itu, saya nyatakan, bahwa demi kelancaran Pemerintahan, kami terpaksa membagi kota Jakarta menjadi 3 Wilayah Kabupaten administratip. Yaitu masing-masing: Jakarta Utara, Jakarta Tengah dan Jakarta Selatan. Tanpa mengangkat tenaga baru, 3 orang Wedana Senior, saya angkat sebagai tenaga untuk mengepalai wilayah-wilayah administratip baru itu. Dengan usul kepada Kementerian Dalam Negeri, agar mereka dapat dinaikkan pangkatnya menjadi: Patih.

Dengan mengucap syukur alhamdulillah, ternyata tindakan kami itu disetujui oleh Pemerintah Pusat. Dan tidak antara lama, untuk pertama kali dalam sejarah kepamong-prajaan dalam Kotapraja Jakarta Raya, ada beberapa orang pegawai, yang berpangkat Patih.

"Pendobrakan" dari pangkat dalam kepamong-prajaan ini, kemudian berlang-

sung terus, dan cepat. Sehingga pada waktu saya meletakan jabatan sebagai Kepala Daerah Kotapraja Jakarta-Raya, sudah ada beberapa orang pegawai Pamongpraja yang berpangkat Bupati dan Residen. Bahkan ada seorang Gubernur yang diperbantukan pada Kepala Daerah Jakarta-Raya, dengan kedudukan dalam golongan F 6 P.G.P.N.

Koordinasi Keamanan Daerah.

UNTUNG bagi Pemerintah Kotapraja, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah tahun 1955, dibentuklah "Badan Koordinasi Keamanan Daerah". Tugasnya: memberi pertimbangan kepada Walikota dalam hal menetapkan kebijaksanaan mengenai pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum.

Koordinasi Keamanan Daerah Jakarta-Raya terdiri dari Walikota selaku Ketua, dan K.M.K.B. (Komando Militer Kota Besar) Jakarta-Raya, Kepala Kepolisian Jakarta-Raya dan Sekitarnya, serta Pengawas Kejaksaan Daerah Jakarta-Raya sebagai anggota. Dalam keadaan perang atau darurat perang, yang menjadi Ketuanya yalah: Komandan Militer Kota, sedangkan Kepala Daerah menjadi Wakil Ketuanya.

Sesuai pula dengan "Undang-undang keadaan bahaya 1957" tertanggal 17 Desember 1957, maka Peraturan-peraturan Kotapraja sebelum dapat diundangkan, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Penguasa Perang Daerah.

Ibu-kota sebaiknya dimana?

SUATU gejala yang lambat laun merupakan semacam "gerakan" untuk memindahkan Ibu-kota dari Jakarta kelain tempat, yang dimulai pada sekitar tahun 1955, turut menyebabkan tidak stabilnya keadaan. Pernah kota Jakarta oleh Daerah-daerah lain di-"diskreditkan" (dijelekkan): antara lain, tatkala P.O.N. (Pekan Olah Raga Nasional) berlangsung di Medan. Peserta-peserta dari Jakarta dikota tersebut mengalami perlakuan-perlakuan yang mirip pada suatu pemboikotan. Misalnya oleh para sopir beca bermotor.

Kecaman-kecaman dari Daerah-daerah, yang ditujukan kepada Pemerintah Pusat waktu itu, dengan sendirinya juga menyebabkan penderitaan bagi Kota Jakarta. Karena Pemerintah Pusat menjadi selalu khawatir kalau membangun apa-apa di Kota Jakarta, pasti akan segera dinilai oleh Daerah sebagai suatu tindakan yang "Jakarta-sentris"!

Rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan, bahkan seminar-seminar untuk membicarakan soal tempat bagi Ibu-kota Negara Republik Indonesia, mulai diadakan, baik di Jakarta sendiri, maupun dikota-kota lain. Memang harus diakui, bahwa hanya didalam Undang-undang Dasar Sementara R.I.S. sajalah, Jakarta dinyatakan sebagai Ibu-kota Negara. Dengan hapusnya R.I.S., maka dengan sendirinya waktu itu, tidak ada lagi ketetapan, bahwa Ibu-kota R.I. yalah Jakarta.

Agar "sentiment" (perasaan buruk) terhadap Kota Jakarta tidak lebih meluap, dalam pidato-pidato sambutan, saya selalu menandaskan, bahwa sekalipun Jakarta belum dinyatakan dengan tegas dan berdasarkan hukum sebagai Ibu-kota Negara kita, tetapi yang pasti tidak ada duanya ditanah air kita yalah, bahwa Jakarta adalah: Kota Proklamasi!

Bahwa tidak hanya kaum politisi saja yang membicarakan tentang "keharusan" memilih dan menetapkan Ibu-kota baru - yang pasti dimaksudkan bukan Jakarta - dapat dibuktikan dengan diadakannya "seminar oleh para akhli kebatinan untuk mengusulkan Ibu-kota baru".

Dengan bermacam-macam dalih yang sukar dimengerti oleh pikiran yang logis, ada yang mengusulkan kota Magelang, bahkan Palangka Raya, untuk ditetapkan sebagai Ibu-kota yang baru. (Baru setelah Sdr. Dr. Sumarno menjadi Gubernur KDH. D.C.I. Jakarta, yaitu sesudah tahun 1960, Presiden R.I. menetapkan dengan sebuah Penpres, kota Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia, yang kemudian disusul dengan Undang-Undang)

Konperensi Walikota Indonesia yang pertama.

PADA tahun 1954 saya mengundang para Walikota dari Ibu-kota seluruh Propinsi di Indonesia untuk datang di Jakarta guna membicarakan bersama tentang status, hak dan kewajiban Pemerintah Kota. Hasilnya yang antara lain: terbentuknya sebuah organisasi "Persatuan Pemerintah Kota" yang permanen, dengan Sekretariat yang tetap pula, berkedudukan di Jakarta.

Organisasi Angkatan 45 dan Legiun Veteran R.I.

BAHWA tidaklah setiap organisasi besar itu mesti didirikan oleh tokoh penting, terbukti misalnya dengan Organisasi Angkatan 45, yang untuk pertama kalinya didirikan di kota Jakarta ini.

Seorang dari kalangan rakyat biasa, bernama: Adnan Anas bersama 2 orang temannya dari daerah Senen, telah menemui saya dirumah dinas Walikota, untuk menyampaikan keinginannya: membentuk sebuah organisasi, khusus bagi para pejoang Angkatan 45. "Mumpung banyak yang sekarang masih hidup", tambahnya. Mengingat waktu itu sedang sangat meruncingnya pertentangan-pertentangan antara Partai-partai Politik, maka gagasan itu saya sambut dengan gembira.

Setelah daftar nama-nama dari tokoh-tokoh Angkatan 45, yang waktu itu bertempat tinggal di Jakarta, kita susun bersama, sdr. Adnan Anas menyatakan kesediaannya untuk menghubungi mereka, asal pertemuan nantinya boleh diadakan dirumah dinas Walikota.

Demikianlah, maka pada suatu hari berkumpullah kurang lebih 50 orang kawan-kawan seperjoangan, antara lain: Isa Anshari (alm., tokoh Masyumi), Aidit (alm., tokoh P.K.I.), Suwirjo (alm., tokoh P.N.I.) dan lain-lain. Setelah garis-garis besar dari Anggaran Dasarnya disetujui, maka berdirilah Organisasi, yang sejak saat itu cabang-cabangnya bertambah terus, dan sekarang sudah meliputi seluruh Tanah Air, dan anggota-anggotanya yang tersebar disegenap pelosok Indonesia.

Juga sebuah Organisasi, yang mempersatukan segenap perkumpulan Veteran, yang waktu itu puluhan jumlahnya, lahir di Jakarta. Tepatnya pada tanggal 2 Januari 1957. Setelah Kongres Pemersatuan, yang berlangsung beberapa hari di Gedung Olah Raga (waktu itu berada diatas Lapangan Ikada, tetapi sekarang sudah tidak ada lagi) berhasil membentuk satu-satunya wadah, dengan nama: "Legiun Veteran R.I.", maka kemudian Organisasi ini dibina oleh sebuah Departeman tersendiri, yaitu: Kementerian Veteran.

Penanggulangan kebakaran dan banjir.

DI Jakarta Utara pernah ada kebakaran besar sekitar Krekot Bunder, yaitu mencakup lingkungan Jalan Toa Se Beo, Jalan Lautze sampai jalur kereta api, perumahan sekitar gang Pak Siam dan belakang Kantor Polisi Pasar Baru (Seksi III).

Segera setelah kebakaran itu berhasil dipadamkan, dibentuklah Panitya Penampungan para korban dan Panitya Dapur Umum, sehingga para korban pada hari itu juga dapat tempat meneduh dan makanan sekedarnya. Kesemuanya itu adalah berkat kerjasama antara rakyat, pejabat-pejabat Kotapraja dan P.M.I.

Para korban kebakaran segera berusaha mencari harta-bendanya yang mung-

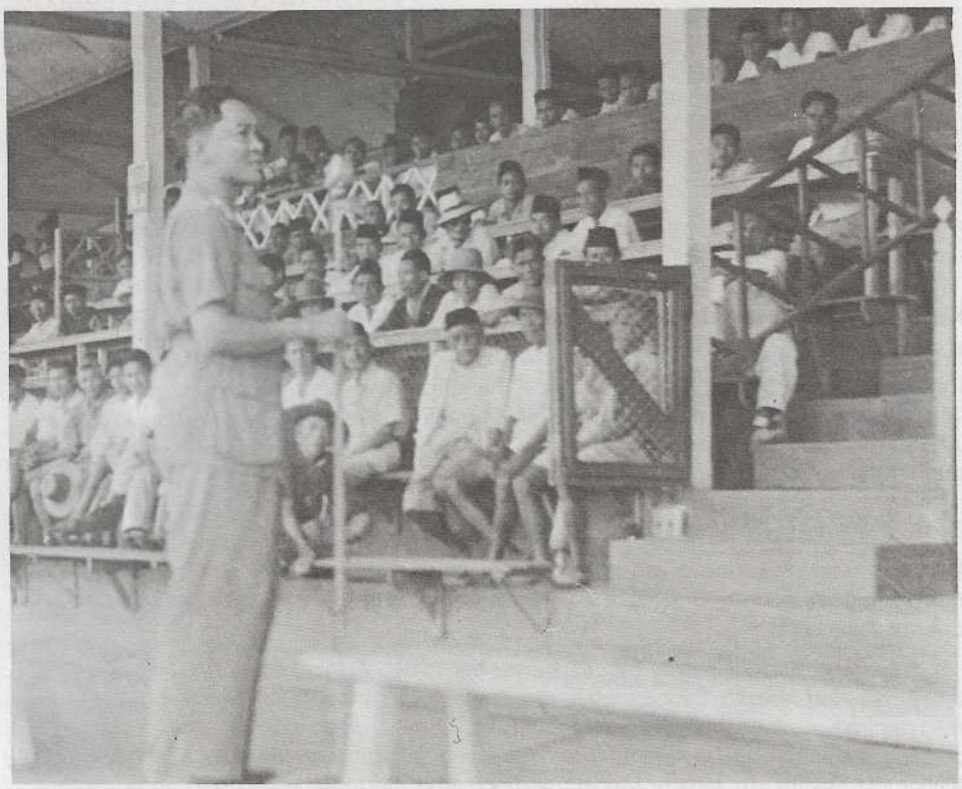

Walikota Sudiro sedang memberikan sambutan dalam rapat dengan para Ketua RT/RK se Jakarta pada tahun 1954.

kin masih ada harganya. Pada waktu itu Presiden diantar Walikota melawat ketempat bekas kebakaran dan pada kesempatan itu beramah-tamah dengan para korban.

Selang beberapa hari tanah yang luas itu sudah penuh dengan perumahan liar. Sementara Pemerintah Kotapraja merencanakan untuk memperindah tempat bekas kebakaran. Dengan cepatnya diperbuat perpetakan (kaveling) untuk pertokoan dan perumahan rakyat. Untuk pelaksanaan selanjutnya diperlukan tata-tertib. Karenanya dibentuk: Panitya Kebakaran Krekot Bundar, terdiri dari 3 orang anggota D.P.R.D., 1 orang pejabat Polisi dan 1 orang pejabat Pamongpraja.

Sesudah penghuni rumah liar selesai dipindahkan ke tempat penampungan yang tetap, yang dibangun oleh Pemerintah Kotapraja dilapangan Manggabesar, maka dengan lancar di tempat bekas kebakaran dibangun gedung-gedung pertokoan tingkat dua, perumahan untuk rakyat serta jalan raya yang diperlukan sesuai dengan rencana Pemerintah Kotapraja.

Pada waktu itu sering di desas-desuskan, bahwa kebakaran yang seringkali terjadi itu, didalangi oleh kaum komunis. Karena mereka dianggap, tidak mengingini keadaan di kota Jakarta ini dapat stabil. Tetapi bukti tentang benarnya anggapan itu, tidak pernah didapat.

Dan nyatanya, waktu itu gubuk-gubuk yang dibuat dari bahan-bahan yang sangat mudah terbakar, berdiri berhimpit-himpitan dimana-mana.

Jika pada musim kemarau, kota Jakarta adalah diancam oleh kebakaran, maka pada musim hujan, beberapa bagian dari kota kita selalu menderita karena banjir. Mengingat tidak tersedianya biaya guna menanggulanginya, maka usaha dari Pemerintah Kotapraja hanya terbatas pada anjuran-anjuran kepada masyarakat setempat, untuk dengan jalan bergotong-royong membatasi/mengurangi akibat keganasan banjir.

Kalau diingat, bahwa ada beberapa bagian dari kota kita ini, yang bahkan lebih rendah dari permukaan laut, ditambah dengan mendangkalnya muara-muara sungai, yang sudah "historis" itu, maka hanya dengan biaya yang sangat banyak dan peralatan besar yang modern, kita mungkin akan mampu mengatasi kesulitan ini. Pernah Pemerintah Kotapraja mempunyai gagasan untuk mendirikan "stoomgemalen", seperti di Negeri Belanda, sehingga air yang mengambang dibeberapa tempat dapat segera terus-menerus dipompa, untuk kemudian dibuang jauh ke laut. Tetapi lagi-lagi gagasan ini tertumbuk pada soal biaya.

Lalu-lintas.

ATAS usaha (waktu itu) dari Komisaris Polisi Untung Margono, maka mulailah digunakan "cirkelverkeer" (lalu-lintas bundar) di kota Jakarta. Meskipun dengan cara ini, tempat yang satu dengan yang lain menjadi agak "jauh", tetapi kecelakaan lalu-lintas dapat dibatasi. Apalagi karena waktu itu belum ada cara "kebut-kebutan".

Pada saat saya meletakkan jabatan sebagai Kepala Daerah Jakarta-Raya ditahun 1960, pemasangan lampu lalu-lintas (tanda "merah dan hijau") baru dimulai dibeberapa tempat saja.

Listrik.

DENGAN Jawatan Gas dan Listrik, waktu itu telah dicapai cara kerja-sama yang cukup baik. Sehingga tanpa bukti adanya izin dari Kotapraja mengenai pembangunannya, tidak akan ada pemberian aliran listrik dari jawatan tersebut. Tetapi sangat disayangkan, waktu itu tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum mulailah berjalan dan ..... menular secara cepat. Misalnya: pencurian aliran listrik, tanpa mengingat yang diakibatkannya. Juga "permainan bersama fihak dalam" waktu itu, mulai djjalankan juga.

Kereta-api.

ANGKUTAN yang tergolong murah waktu itu, yalah kereta-api listrik, didalam kota, terkenal dengan istilah "ringbaan".

Walikota Sudiro mengucapkan pidato didepan masyarakat Jakarta dalam rangka HUT Proklamasi Kemerdekaan R.I. pada tanggal 17 Agustus 1954.

Presiden Sukarno, sebagai seorang insinyur-arsitek, berpendapat bawha kereta-api listrik itu sebenarnya sudah tidak cocok lagi untuk kota-kota besar yang modern. Terkecuali kalau berjalan dibawah tanah, kata beliau.

Saya yang melihat keadaan dan kebutuhan masyarakat kota Jakarta sehari-hari, waktu itu masih ingin berusaha untuk menyediakan, dalam bentuk bis kota lebih dahulu, apabila kami terpaksa harus lekas memenuhi keinginan Kepala Negara itu. Desakan terus-menerus, yang seringkali oleh beliau diucapkan dimuka orang banyak, menyebabkan Pemerintah Kotapraja mengambil tindakan untuk tidak lagi menggunakan kereta-api listrik. Karena biaya untuk membongkar ril sangat besar, bahkan menurut perhitungan lebih besar dari harga ril sebagai besi tua, maka terpaksa sebagian besar ril kereta-api diatas jalan raya itu ditutup saja dengan tanah. Usaha saya yang terakhir, untuk mempertahankan lin: Jatinegara via Matraman dan Kramat ke Senen, sebagai urat nadi perdagangan bagi para pengusaha kecil pun, tidak juga berhasil.

Undang-undang Gangguan (Hinder-ordonantie).

PEMBERIAN izin Undang-undang Gangguan waktu itu, oleh para pengusaha, seringkali dirasa sangat lambat. Kadang-kadang izin tersebut, yang memang naskahnya harus dibaca dan disetujui lebih dulu oleh kurang lebih 20 instansi (waktu itu), baru keluar setelah setahun sejak diajukannya.

Pada sekitar tahun 1958, saya telah berusaha menyederhanakan prosedur pemberian izin itu, sehingga waktu menunggu keluarnya izin, tidak perlu sekian lama lagi.

Bea-siswa.

PADA tahun 1956, Pemerintah Kotapraja Jakarta-Raya telah berhasil mendirikan "Yayasan Beasiswa Jakarta", yang diketuai - secara ex-officio - oleh Walikota. Yang diberi kesempatan untuk mendapat beasiswa tersebut, haruslah mahasiswa yang lahir di Jakarta.

Anak-anak dari para pegawai Kotapraja diberi prioritas. Saya merasa bangga dan bahagia, bahwa diantara sarjana-sarjana, yang kini bekerja pada Pemerintahan D.K.I. Jakarta, ada beberapa orang, yang pernah selama beberapa tahun menerima bantuan dari Yayasan beasiswa tersebut.

Kepanduan.

JAUH sebelum dibentuknya Pramuka di Tanah Air kita, para bekas anggota kepanduan - antaranya: Dr Azis Saleh, Rudy Pirngadi (almarhum), Dr Sudarsono dan kami suami-isteri - mengambil inisiatip untuk mengadakan "jambore nasional", bertempat di Ragunan. Ternyata ratusan orang, baik pria maupun wanita, bersedia ikut serta selama beberapa hari berkemah ditempat tersebut, meskipun tanpa bantuan keuangan dari Pemerintah.

Bersama beberapa orang pejabat Pemerintah Pusat dan Kotapraja - sebagai perorangan - saya turut menginap diperkemahan, meskipun hanya semalam saja.

Pariwisata.

SEORANG wargakota yang sangat giat dan banyak gagasannya mengenai kepariwisataan bagi kota Jakarta, yalah Prof. Dr Hendarmin (almarhum). Bersama beliau dan beberapa orang tokoh lainnya (antara lain: sdr. Harris, Sumanang, S.H., Ir. Danunegoro) telah kami dirikan sebuah organisasi, dengan nama "Rintis Wisata" (singkatan dari: Perkumpulan guna merintis Pariwisata). Usul-usul dan saran-saran yang pernah disampaikan kepada Pemerintah oleh "Rintis Wisata" tersebut, antara lain: pemindahan kebun binatang ke pinggiran kota, pendirian hotel-hotel, dan suatu gagasan yang kemudian dilaksanakan dan disempurnakan dalam bentuk "Taman Mini Indonesia Indah" sekarang ini.

Museum dan Sejarah.

TIGA buah gedung bersejarah, yaitu masing-masing: Gedung ex-Stovia, Gedung ex-Club Indonesia dan Gedung Joang Menteng 31, yang telah selama puluhan tahun tidak berfungsi lagi sebagai keinginan masyarakat, meskipun telah saya usahakan dengan berbagai cara, tetapi tidak berhasil untuk dikosongkan. Guna keperluan ini dibutuhkan biaya yang sangat besar, dan terus terang saya tidak mampu mengumpulkannya. (Gedung Menteng 31 baru dapat dikosongkan, tatkala Pemerintah Pusat memutuskan untuk menggunakan tempat tersebut sebagai sebuah Departemen, yaitu: Kementerian Petera = Pengerahan Tenaga Rakyat).

Salah satu bangunan, yang saya anggap sangat bersejarah, yalah: Gedung Pegangsaan Timur No.56, dimana Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 telah diucapkan. Rencana Presiden untuk membongkar gedung ini, dan diganti

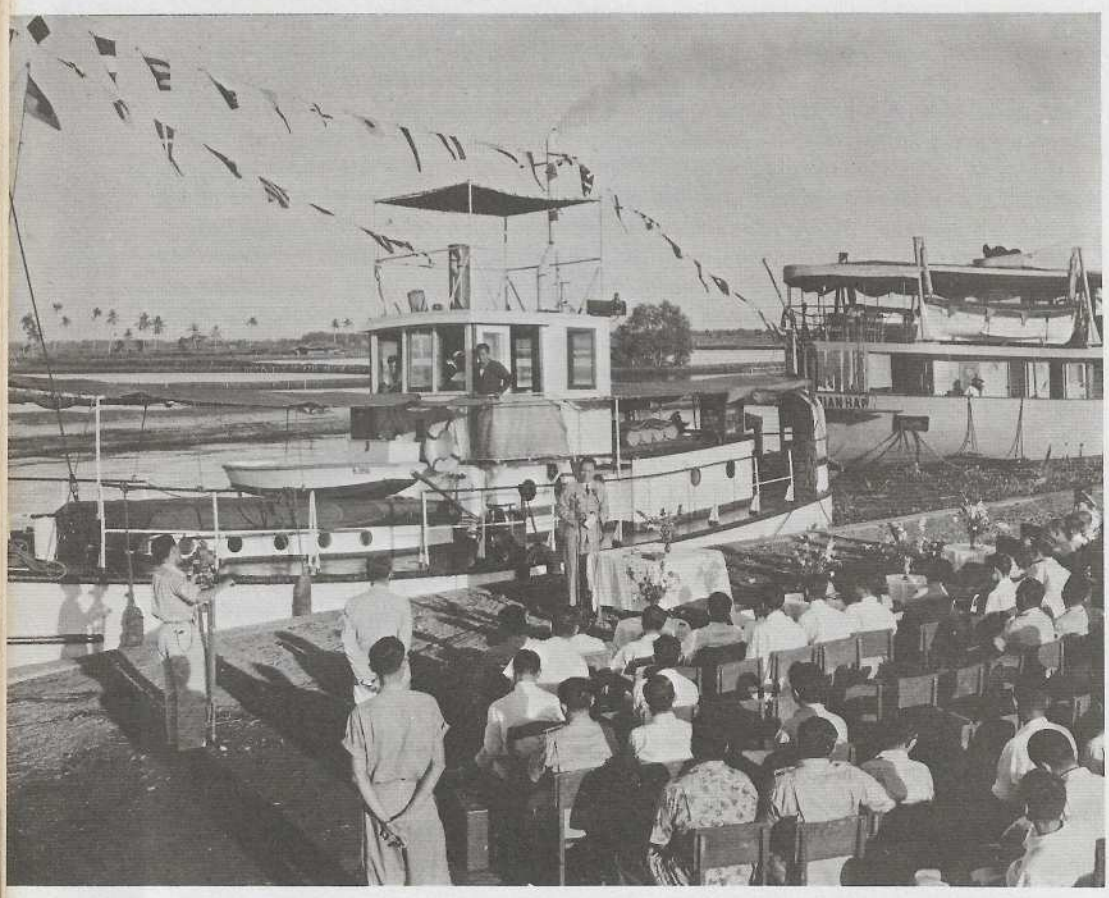

Peresmian pemakaian Kapal bermotor untuk Kepulauan Seribu yang dilakukan oleh Walikota Sudiro.

Walikota Sudiro meninjau pembangunan Pekan Raya Indonesia di Jalan Raya Jenderal Sudirman (sekarang kompleks Yayasan Rumah Sakit Jakarta) pada tahun 1955.

dengan bangunan lain, yang akan disebut: Gedung Pola, telah saya tentang keras. Ternyata, gedung bersejarah tersebut telah dirobohkan juga, tetapi untung bagi saya, hal itu terjadi, setelah saya tidak lagi menjadi Kepala Daerah Kotapraja Jakarta-Raya.

S.D. gratis.

PADA tahun 1957, saya dengan bangga dapat mengumumkan keputusan Pemerintah Daerah, bahwa di sekolah-sekolah Dasar dalam wilayah Kotapraja Jakarta-Raya, murid-muridnya tidak perlu membayar uang sekolah lagi. Sayang sekali keadaan itu hanya berlangsung kurang lebih setahun saja, karena kemudian datanglah keputusan dari Pemerintah Pusat, yang menyebabkan ditariknya kembali S.K. tersebut diatas.

Pengadaan Gedung-gedung Sekolah.

SESUAI dengan hak dan kewajiban Pemerintah Daerah Kotapraja Jakarta-Raya, dan sedikitnya dana yang tersedia, maka Gedung-gedung Sekolah Dasar (waktu itu sebutannya: Sekolah Rakyat), terutama saya dirikan di Daerah pinggiran, misalnya: di Pulau Seribu, Pasar Rebo dan lain sebagainya. Usaha untuk membebaskan beberapa Gedung Sekolah Rakyat, yang sampai waktu itu, masih ditempati oleh anggota-anggota ABRI beserta keluarganya, umumnya tidak berhasil. Karena baik Pemerintah Daerah, maupun Kementerian Pertahanan waktu itu, tidak mampu menyediakan tempat penampungan yang layak.

Kalau Kedatangan Tamu Agung .....

WAKTU itu, Indonesia sering, bahkan terlalu sering, kedatangan tamu agung dari luar Negeri. Dan Pemerintah Pusat selalu menghendaki, agar tamu agung tersebut mendapat sambutan yang semeriah-meriahnya. Murid-murid sekolah dan kaum buruh harus dikerahkan untuk penyambutannya. Akibatnya tentu saja: turunnya produksi dan mundurnya pelajaran. Baru kemudian, atas desakan Pemerintah Kota, penyambutan itu boleh dibatasi sampai pada jalan-jalan besar saja, yang (akan) dilalui oleh rombongan tamu agung.

Tarip dokter.

PERATURAN-peraturan Pemerintah Kotapraja waktu itu banyak dijalankan, terutama setelah melewati perundingan-perundingan dan pembicaraan-pembicaraan. Misalnya dalam bidang kesehatan, saya telah beberapa kali mengumpulkan para dokter dan dokter gigi diseluruh kota, untuk merundingkan tentang tarip, yang harus dapat dijangkau oleh rakyat, tanpa menyebabkan kurangnya pendapatan bagi para dokter yang berpraktek.

Berdasarkan pengertian dan kesadaran yang dalam, akhirnya dengan persetujuan mereka sendiri, Pemerintah Kotapraja dapat menetapkan tarip dokter yang seragam. Dan yang dapat diterima, baik oleh para dokter, maupun oleh para pasien.

Masalah Kesehatan Rakyat.

a. Administratip:

- Perbaikan susunan dan formasi pegawai D.K.K.,
- Registrasi para dokter yang berpraktek di Jakarta,
- Penertiban balai-balai pengobatan yang diusahakan oleh Perawat,
- Registrasi dan pengobatan W.T.S. pada lokalisasi-lokalisasi tertentu, untuk mengurangi penularan penyakit venerik.

b. Preventip:

- Peningkatan usaha K.I.A. dengan membuka beberapa Balai K.I.A. tambahan di Pulogadung, Kramatjati, Pasar Rebo dan Kebon Jeruk (terutama di daerah

Dalam rangka kampanye derma darah Walikota Sudiro sedang menyumbangkan darah pada Palang Merah Indonesia.

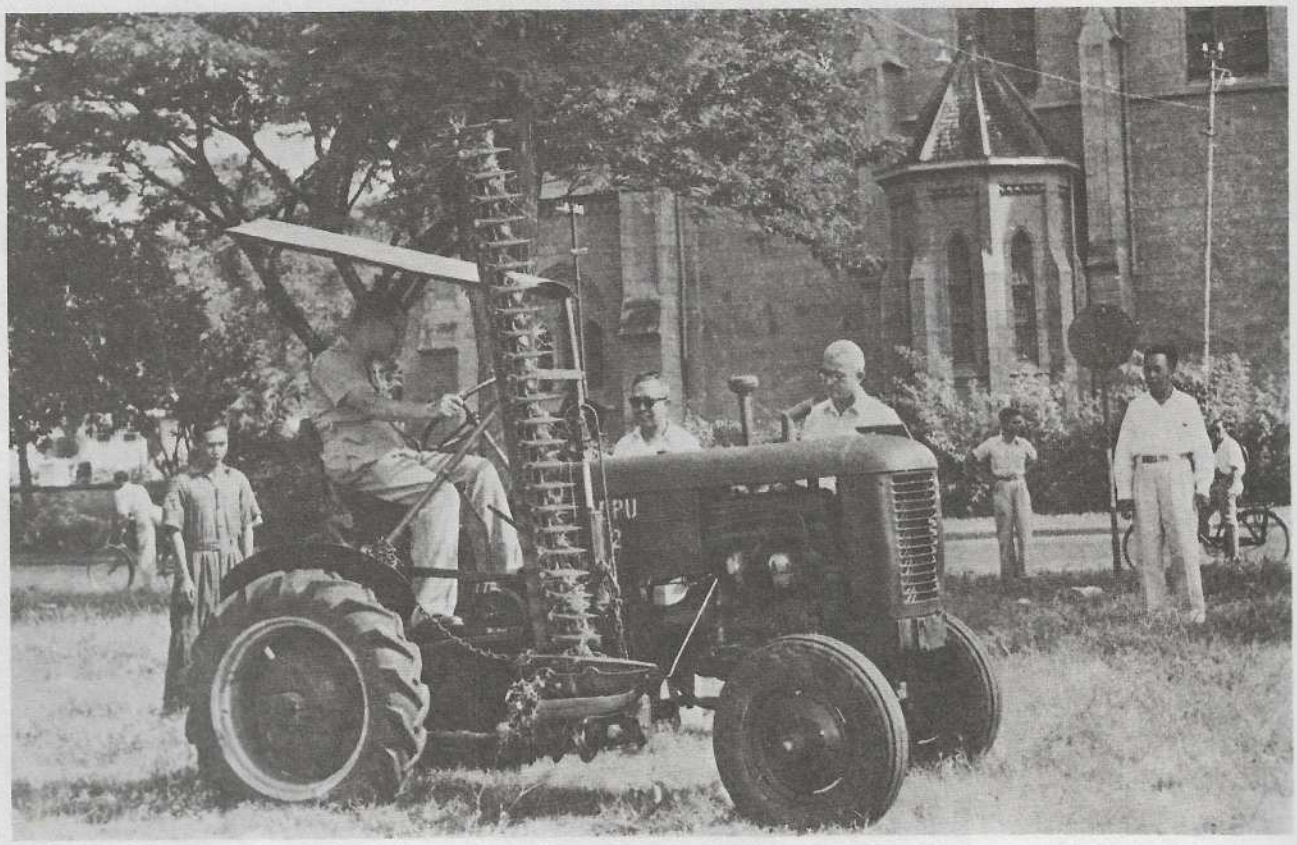

pinggiran),
- Peningkatan suntikan immunisasi pada bayi dan anak-anak,
- Penambahan tempat bersalin di Matraman dan Karet,
- Dalam rangka immunisasi terhadap penyakit T.B.C., dikerjakan vaksinasi B.C.G. pada anak-anak sekolah,
- Pembangunan Konsultasi Biro untuk pembrantasan penyakit T.B.C. di Pasar Rebo, Matraman, Jln. Tarakan, Tanjung Priok,
- Pembukaan Health Center di Jln. Tarakan.

c. Kuratip:

- Penambahan poliklinik, terutama di daerah pinggiran kota (Pulogadung, Kebon Jeruk, Cengkareng) dan penambahan jumlah dokter.

d. Sumbangan darah:

- Pada tahun 1954, mulailah terasa perlunya sumbangan darah dari masyarakat bagi keperluan pemeliharaan kesehatan. Untuk pertama kali saya mengadakan gerakan pemberian sumbangan darah dengan perantaraan Palang Merah Indonesia. Bersama saya, para pegawai pimpinan Pemerintahan Kotapraja Jakarta-Raya, telah memenuhi seruan bagi usaha perikemanusiaan tersebut.

Tugu Nasional, yang kemudian menjadi Monas.

SEPERTI halnya dengan Organisasi Angkatan 45, Monas yang sekarang menjulang tinggi ditengah-tengah kota Jakarta, adalah idee (gagasan) dari seorang wargakota dari kalangan rakyat biasa: Sarwoko, namanya.

Pada suatu hari, dia menemui saya, untuk menguraikan gagasannya. Saya anjurkan kepadanya, untuk menemui beberapa orang tokoh, yang kiranya bersedia, turut membentuk sebuah Panitya. Ini kemudian berhasil, dengan Sdr. Sarwoko tersebut sebagai Ketuanya, dan - antara lain - saya sebagai pembantu umumnya.

Ternyata Presiden Sukarno bersedia untuk menjadi pelindungnya, sehingga pada tanggal 17 Agustus 1955, sewaktu beliau didampingi Wakil Presiden Moh. Hatta dalam suatu kendaraan, dari Istana Merdeka menuju Pegangsaan Timur 56 (untuk meletakkan karangan bunga disana), kedua orang pimpinan Negara tersebut berkenan berhenti sebentar ditengah-tengah Lapangan Merdeka, dimana tugu setinggi 45 meter akan segera mulai dibangun.

Presiden Sukarno kemudian merobah/menambah rencana tugu ini, antara lain dengan: Emas Murni seberat sekian kilogram diatas tugu dan lain sebagainya, serta mengundang tekhnisi-tekhnisi Jepang untuk menyelesaikan pembangunannya. Sebenarnya ini bertentangan dengan idee semula. Karena para seniman dan pejoang yang pernah saya kumpulkan guna diminta nasehatnya, setelah Panitya Tugu Nasional terbentuk, berkeinginan sebagai berikut:

1. Meskipun Tugu Nasional bentuknya akan tetap dibuat sederhana, tetapi harus terasa agung;
2. Tugu Nasional harus seluruhnya direncanakan dan ditangani oleh orang-orang Indonesia sendiri, syukur kalau dapat: oleh Pejoang-pejoang Bangsa Indonesia.

Hiburan Rakyat.

SEBAGAI salah satu saka-guru dari tiap kota besar, yang saya rangkaikan dengan istilah "Wisma - Karya - Marga - Suka" (tempat tinggal, lapangan pekerjaan, perhubungan dan hiburan), maka Pemerintah Kotapraja berusaha keras, untuk memelihara dan menyediakan hiburan rakyat yang sehat, tetapi murah.

Dengan sebuah Peraturan Daerah, bioskop-bioskop kelas I waktu itu diharuskan memutar lagu-lagu Indonesia, dan paling sedikit sekali sebulan sebuah film Indonesia.

Rombongan-rombongan musik dari Dinas Pemadam Kebakaran dan beberapa instansi militer dikoordinir, untuk mengadakan pertunjukan prodeo ditaman-taman

Walikota Sudiro sedang mencoba sebuah motor pemotong rumput di Lapangan Banteng pada tanggal 9 Juni 1954.

BALAI KOTA

kita. Bahkan para pemain musik dijalanan (straat-muzikanten) dikumpulkan dan saya usahakan pembinaan yang wajar. Memang ada yang waktu itu salah terima dan mengira, bahwa Walikota Jakarta-Raya anti "tanjidor". Padahal yang sebenarnya saya tentang, yalah "mengamen", yang tidak jauh berbeda dari mengemis, suatu usaha mencari nafkah yang sama sekali tidak terhormat.

Para seniman sering saya undang kerumah dinas Walikota, untuk bertukar fikiran mengenai usaha-usaha memperindah kota Jakarta.

Hiburan rakyat diadakan secara teratur diseluruh wilayah kota, terutama didaerah pinggiran, yang selalu haus akan hiburan sehat.

Hari Ulang Tahun Kota Jakarta : 22 Juni.

PADA sekitar tahun 1955 saya menghubungi beberapa orang akhli sejarah, antara lain : Mr. Moh. Jamin, wartawan senior Sudarjo Tjokrosisworo dan Mr. Dr. Sukanto. Saya mohon kesediaan mereka untuk meneliti, kapankah kota Jakarta ini telah didirikan. Yang kami maksud, bukanlah "Batavia"nya Jan Pieterszoon Coen (meskipun yang memberi nama "Batavia" itu, tepatnya : Van Raay), melainkan kota Jakarta, yang didirikan oleh Fatahillah diatas puing-puing benteng Portugis. Tahunnya menurut sejarah sudah pasti, yaitu 1527. Tetapi pada hari tanggal berapa tepatnya?

Saya sangat ingin nantinya, memperingati dan Insya Allah merayakan hari lahir kota Jakarta itu setiap tahun. Dan para wargakota akan saya anjurkan, untuk memperingatinya, Insya Allah – sepanjang masa! Dari 3 orang tokoh tersebut, ternyata hanya Mr. Dr. Sukanto sajalah yang rupanya berhasil. Penyelidikan beliau pasti sangat terbantu oleh lingkungan pekerjaan beliau, karena waktu itu beliau menjabat Kepala Arsip Nasional.

Pada tahun 1956 beliau menyerahkan naskah, berjudul : "Dari Jakarta ke Jayakarta". Sebagai hasil penyelidikannya selama berbulan-bulan, beliau berkesimpulan, bahwa tanggal 22 Juni 1527 adalah hari yang paling dekat pada kenyataan dibangunnya kota Jakarta oleh Fatahillah.

Naskah tersebut kemudian kami serahkan kepada seksi-seksi dalam Dewan Perwakilan Kota Sementara, untuk dibahasnya. Yang kemudian dapat menerimanya dengan baik. Dan tatkala tepat pada tanggal 22 Juni 1956, saya ajukan dengan resmi kepada Sidang Pleno, maka ternyata usul saya tersebut diterima dengan suara bulat. Juga, bahwa pada tiap tanggal 22 Juni akan diadakan Sidang Istimewa D.P.R.D. Kota Jakarta, sebagai suatu tradisi untuk memperingati berdirinya Kota kita ini.

Penertiban Poster Reklame.

MULAI tahun 1955 diadakan penertiban poster reklame di bioskop dan toko-toko, yang pelaksanaan dan pengawasannya dilakukan oleh Panitya Sensor Reklame, terdiri dari :

- Kepala Dinas Pajak sebagai anggota dan Ketua;
- Anggota Komisi A (Agama, Pendidikan dan Sosial) sebagai anggota dan
- Anggota B.P.H. Bidang Agama, Pendidikan dan Sosial sebagai pengawas..

Suasana upacara hari ulang tahun Jakarta yang dirayakan untuk pertama kalinya di halaman Balai Kota pada tanggal 22 Juni 1956.

Berdasarkan pedoman-pedoman yang disusun oleh Panitya, saya telah berhasil menertibkan poster reklame bioskop dan toko-toko dari gambar-gambar porno.

Penertiban Waktu Tontonan dan Pertandingan-pertandingan.

BERDASARKAN pedoman-pedoman yang disusun oleh Panitya Sensor Poster dan Reklame tersebut juga, sejak tahun itu telah berhasil diatur, bahwa segala tontonan (baik bioskop, maupun pertandingan-pertandingan) tidak ada yang menyebabkan penonton terpaksa meninggalkan ibadahnya sebagai umat beragama.

Sebagai catatan, hanya pertunjukan (pembukaan dan penutupan) Asian Games dan Ganefo-lah yang terpaksa mengadakan pertunjukan yang langsung dari ashar sampai maghrib. (Kegiatan Panitya ini konon terhenti pada permulaan tahun 1964, setelah P.K.I. menguasai suasana politik).

Walikota Sudiro bersama Presiden Sukarno menyambut Presiden Tito dari Jugoslavia.

Permulaan tradisi Courtesy Call para Duta-duta Asing yang berdinas di Jakarta.
SEJAK ± tahun 1953 para Kepala Perwakilan Asing di Jakarta selalu mengadakan kunjungan kehormatan pada Walikota.

Dalam kesempatan itu, diadakan tukar fikiran yang sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak. Dan oleh karena Indonesia waktu itu belum begitu banyak dikenal oleh Dunia, maka disamping perjalanan-perjalanan yang sering diadakan oleh rombongan Presiden R.I. ke luar Negeri, tidak sedikit Walikota Jakarta-Raya menerima undangan-undangan dari Walikota-walikota Ibu-kota Negara Asing.

Permulaan adanya undangan-undangan kunjungan dari Negara-negara sahabat.
SEWAKTU saya berdinas sebagai Kepala Daerah Kotapraja Jakarta-Raya selama ±6½ tahun, undangan-undangan yang pernah saya terima, biasanya secara kollegial kami bicarakan dulu dalam Sidang D.P.R.D. Yang kemudian memilih anggota-anggota rombongan, yang akan menyertai saya. Tentu saja sebelum rombongan berangkat, lebih dahulu diadakan perundingan dengan Perwakilan Negara yang mengundang itu.

Usaha-usaha Sosial dan penampungan Tenaga Kerja.
TAHUN 1945—1950 dikenal sebagai periode perjuangan phisik. Karena sejak tahun 1950 sampai terlaksananya hasil Pemilihan Umum tahun 1955, keadaan Negara kita, terutama sekali kota Jakarta, tak ubahnya seperti rumah yang baru saja dilanda banjir dahsyat. Segalanya berantakan, hingga kadang-kadang kita tidak tahu mana yang harus didahulukan. Namun kemudian, tidak menjadi soal, karena modal utama adalah semangat rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru saja direbutnya. Dan dalam iklim yang demikian itulah, roda Pemerintahan kota Jakarta ditumbuhkandan perlahan-lahan disempurnakan.

Semangat revolusioner meluap-luap, hingga Sidang D.P.K.S. selalu berlangsung dengan perdebatan sengit. Masing-masing mempertahankan hak-hak rakyat merdeka yang harus dijunjung tinggi. Justru itu pula pada periode 1950 — 1955 tidak banyak dilakukan pembangunan phisik, disamping banyak lagi masalah-masalah lain sebagai akibat dari revolusi.

Periode diatas dapat disamakan dengan periode "bebenah" (istilah sehari-hari untuk : berkemas). Karena segalanya berantakan, kita benahi kembali, dan memperbaiki kembali apa-apa yang kurang. Namun demikian Pemerintah Kota berusaha terus, memberi jawaban atas segala tantangan situasi waktu itu, seperti : perbaikan jalan-jalan, perbaikan kampung dan masalah sosial lainnya. Memang bagi sementara kalangan, apalagi generasi sekarang yang menyaksikan gedung-gedung pencakar langit di Jakarta sekarang ini, pasti tidak dapat mudah mengikuti, apalagi merasakan suasana perjuangan waktu itu, hingga mungkin saja ada anggapan bahwa Pemerintah Kota sebenarnya tidak banyak berbuat apa-apa. Padahal justru Pemerintah Kota periode 1950 — 1955 telah melicinkan jalan, serta meletakkan dasar-dasar untuk kemudian membina suatu Pemerintahan yang berorientasi pada pembangunan disegala bidang.

Dibawah ini disampaikan beberapa catatan yang jauh dari lengkap, karena hanya berdasarkan ingatan saja :

a. Dibagian kota lama Jakarta, yang dikenal juga sebagai Kota Intan, terdapat sebuah meriam tua, yang oleh masyarakat Jakarta dianggap sebagai "keramat" atau mempunyai kekuatan gaib. Pada hari-hari tertentu tempat tersebut banyak dikunjungi orang, dengan membawa "sesajen". Ditempat ini mereka minta, agar diberi anak bagi yang belum punya anak. Ada pula yang ingin lekas dapat jodoh, pendek kata seribu satu permintaan dan pengharapan. Memperhatikan gejala yang kurang baik ini dan menyesatkan, D.P.K.S. telah mengambil keputusan, agar meriam si Jagur (demikian nama yang dikenal oleh rakyat Jakarta) dipindahkan ke Museum;

b. Usaha Pemerintah dalam lapangan sosial, mengingat tuntutan zaman ketika itu, terutama masalah penampungan dari rakyat yang gelandangan dan fakir miskin. Disamping itu tidak diabaikan nasib dari ribuan anak-anak nakal yang terlantar,

DIPERSEMBAHKAN KEPADA JANG MULIA

U NU
PERDANA MENTERI BIRMA

SHRI JAWAHARLAL NEHRU
PERDANA MENTERI INDIA

MOHAMMAD ALI
PERDANA MENTERI PAKISTAN

SIR JOHN KOTELAWALA K. B. E.
PERDANA MENTERI SAILAN

Mr. ALI SASTROAMIDJOJO
PERDANA MENTERI INDONESIA

SEBAGAI WALIKOTA DJAKARTA, IBU-KOTA INDONESIA.
DAN DENGAN DEMIKIAN SEBAGAI WAKIL DARI PENDUDUKNJA JANG BERDJUMLAH DUA SETENGAH DJUTA, SAJA MENDAPAT KEHORMATAN DAN KEBAHAGIAAN MENDJADI TUAN RUMAH DARI TAMU² KAMI JANG TERHORMAT.

SELAMA DUA HARI JANG LALU SUATU KONPERENSI
JANG PENDEK TETAPI JANG BERSEDJARAH, TELAH DIADAKAN DINEGERI KAMI DAN PIKIRAN KAMI MENGIKUTI JANG MULIA SELAMA PERUNDINGAN BERLANGSUNG.

ADALAH MENDJADI PENGHARAPAN KAMI BAHWA KAMI
AKAN MENDAPAT KEHORMATAN LAGI UNTUK MENERIMA UTUSAN² JANG AKAN MENGHADIRI SUATU KONPERENSI LAIN DINEGERI KAMI, JAITU KONPERENSI AFRO-ASIA JANG DALAM SEDJARAH AKAN MEMPUNJAI ARTI DAN MEMBAWA AKIBAT² JANG AMAT LUAS.

KITA SEMUA SEDANG MENGUSAHAKAN SUATU KONSOLIDASI
DAN PERLUASAN SUATU DAERAH PERDAMAIAN.

MENGINGAT KEDJADIAN² DIWAKTU JANG LAMPAU, KITA
MENGETAHUI BAHWA SUATU DAERAH PERDAMAIAN SEMATJAM ITU TIDAK DAPAT MENGANDUNG KOLONIALISME, BAGAIMANAPUN DJUGA DISEMBUNJIKAN. KITA MENGETAHUI BAHWA PERDAMAIAN DAN KOLONIALISME, SEPERTI MINJAK DAN AIR, TIDAK DAPAT BERTJAMPUR. BERLAINAN DENGAN NEGARA² DAN SISTIM² POLITIK, PERDAMAIAN DAN KOLONIALISME TIDAK DAPAT BERDIRI BERSAMA-SAMA.

DAERAH PERDAMAIAN SEMATJAM ITU DALAM DUNIA JANG
KATJAU MENGANDUNG KEKUATAN² UNTUK MENDJADI SESUATU JANG MELEBIHI SUATU KONSEPSI POLITIK, KEMUNGKINAN² KERDJASAMA EKONOMI TIDAK KURANG PENTINGNJA. ADANJA PERDAMAIAN EKONOMI JANG SESUNGGUHNJA AKAN MERUPAKAN SUATU DASAR BAGI NEGERI² DI ASIA. JANG SAJA MAKSUDKAN DENGAN PERDAMAIAN EKONOMI IALAH PERDAGANGAN JANG BETUL² MEMBERIKAN KEUNTUNGAN TIMBAL BALIK DAN TIDAK DIDJALANKAN DALAM ARTI KEKUASAAN DAN KEKUATAN EKONOMI DAN TIDAK PULA BERARTI BAHWA SESUATU PIHAK SENANTIASA MENGALAMI PENINDASAN DAN PENDJADJAHAN EKONOMI.

SAJA JAKIN, AKAN SANGAT PENTING ARTI PERSAHABATAN
ANTARA NEGARA KITA BERSAMA INI JANG MEMPUNJAI PENDUDUK ± SEPEREMPAT DARI DJUMLAH PENDUDUK SELURUH DUNIA.

PARA JANG MULIA, SAJA SANGAT TERHARU AKAN KEHORMATAN
JANG DIBERIKAN KEPADA SAJA DAN KEPADA KOTA DJAKARTA HARI INI. ATAS NAMA PENDUDUK DJAKARTA SAJA MENJAMBUT DENGAN GEMBIRA KEDATANGAN PARA JANG MULIA DAN SAJA MENDOA MOGA² PARA JANG MULIA AKAN MEMBAWA KENANG-KENANGAN JANG MENJENANGKAN DARI NEGERI KAMI DAN MEMPEROLEH KEJAKINAN TELAH MENJELESAIKAN TUGAS JANG PENTING DENGAN BAIK. DISAMPING ITU SAJA MENGHARAP MOGA² KITA DAPAT BERTEMU LAGI DIKEMUDIAN HARI.

DJAKARTA, 30 DESEMBER 1954

SUDIRO
WALIKOTA DJAKARTA RAJA

bergelandangan dipasar-pasar.
Sebagai langkah pertama, mereka itu dikumpulkan untuk kemudian diangkut ke Pulau Damar di Teluk Jakarta, yang lebih dulu telah disiapkan. Mereka disana diberi pendidikan dan perawatan Yang diutamakan adalah pendidikan praktis, hingga dalam waktu singkat mereka dapat berdiri sendiri. Usaha ini berhasil baik sekali, hingga mencapai 500 orang anak yang sudah ditolong pada tahun 1953. Ditaksir anak-anak yang bergelandangan waktu itu ± 5.000 orang;

c. Pertolongan kepada fakir miskin berupa perawatan, pemberian pakaian, bahan makanan dan uang. Untuk tempat perawatan, mereka dikumpulkan dan ditampung dalam "Taman Harapan" yang terletak di Cawang.
"Taman Harapan" adalah suatu kompleks perumahan dan pekarangan yang luas, dimana mereka dapat diberi berbagai pendidikan. Disamping bercocok tanam, mereka diberi didikan mengerjakan kerajinan tangan, seperti membuat kesed/karpet dari sabut kelapa, dan barang-barang anyaman lainnya. Pemerintah juga membangun beberapa tempat penampungan berupa rumah perawatan fakir miskin/bekas pengemis, antara lain di Karanganyar.
Perumahan darurat telah didirikan juga diberbagai tempat, seperti di Tanjung Priok dan Tanah Tinggi. Seluruhnya dapat menampung 2.000 orang;

d. Pemeliharaan anak-anak yatim piatu banyak diselenggarakan atas inisiatip penduduk. Pada waktu itu terdapat 14 buah perkumpulan yang bergerak dilapangan itu, dengan mendapat bantuan subsidi dari Pemerintah melalui Jawatan Sosial Kotapraja. Demikian pula usaha pemulangan kekampung halamannya, terutama orang-orang bekas romusha dan Heiho yang diangkut oleh Pemerintah pendudukan Jepang. Organisasi-organisasi dan Badan-Badan Sosial, seperti: Perwari, Gerwis, W.D.I., P.R.U., Muslimat dan banyak lain lagi, sangat besar jasanya, membantu dan bekerja sama dengan Pemerintah Kota;

e. Masalah pelacuran yang banyak terdapat diwaktu itu sebagai akibat dari situasi, telah banyak dibicarakan dalam Seksi Dewan Kota. Pernah dipertimbangkan untuk mengadakan semacam tempat penampungan (lokalisasi). Usaha ini diambil dengan pertimbangan, agar jangan sampai menjalar kekampung-kampung. Akhirnya usaha lokalisasi ini tidak mendapat kata bulat dalam Seksi;

f. Masalah lainnya yang sangat dirasakan sebagai sesuatu beban moril yang tidak ringan bagi Pemerintah Kota Jakarta waktu itu, adalah masalah perumahan. Dalam tahun 1942 penduduk kota Jakarta berjumlah ± 430.000 jiwa, meningkat pada tahun 1950 ditaksir mencapai kurang lebih 2 juta jiwa. Adalah dengan sendirinya menimbulkan masalah perumahan yang tidak mudah mengatasinya. Banyak sekali mereka menempati emperan-emperan, gerbong-gerbong dan tempat-tempat lainnya yang kurang layak untuk didiami manusia. Sekalipun usaha dibidang pembangunan perumahan untuk buruh kecil ada juga, antara lain telah ditampung oleh perusahaan-perusahaan swasta, terutama yang ada hubungan dengan pelabuhan Tanjung Priok, tetapi ini semua masih dirasa sangat kurang.
Kotapraja berhasil menyediakan tanah matang (bouwklaar) didaerah pinggiran kota, yakni di Kampung Grogol dengan kapasitas tanah seluas untuk 2.800 buah rumah. Pada tahun 1953 telah siap dibangun 103 buah rumah, dan telah dibagikan kepada rakyat, terutama kaum buruh dengan pembayaran cicilan selama 20 tahun;

g. Jumlah penganggur di Jakarta pada sekitar tahun 1954 ditaksir ± 20.000 orang. Angka yang relatip besar ini disebabkan karena perekonomian kita belum lancar sebagaimana diharapkan, hingga kesempatan bekerja jauh tidak seimbang dengan bertambahnya penduduk.
Menyadari akan situasi yang berat, istimewa untuk Pemerintah Kota yang baru dalam periode "bebenah" ini, maka Dewan Kota pernah mengarahkan pikirannya untuk melakukan transmigrasi kelian daerah. Ternyata gagasan inipun tidak mungkin terlaksana, karena terbentur pada berbagai masalah, antara lain soal keuangan. Untuk mengembalikan mereka ketempat asalnya bukanlah pe-

Surat Piagam Walikota Jakarta Raya yang dipersembahkan kepada kelima Perdana Menteri Birma, India, Pakistan, Sri Langka dan Indonesia yang bertemu untuk mempersiapkan konperensi Asia-Afrika yang diselenggarakan tahun 1955 di Bandung..

kerjaan yang mudah, disamping pertimbangan bahwa mereka akan kembali lagi dengan mudah ke Jakarta. Kota Jakarta menjadi tempat pelarian bagi penduduk tempat sekitarnya, seperti: Krawang, Cikampek, Cikarang dan sebagainya, untuk menjadi buruh kecil atau buruh kasar.

Pada tahun 1952 telah terdaftar 15.875 tenaga buruh pada Kantor Penempatan Tenaga. Pada tahun 1953 hanya berhasil ditempatkan sekitar 378 orang tenaga terlatih, dan 603 tenaga tak terlatih diberbagai kantor perusahaan.

Ikhtiar Pemerintah terus diarahkan untuk mencarikan/memperlukan kesempatan bekerja dengan juga mengadakan latihan kerja guna mempertinggi kecakapan kerja kaum buruh dan kaum penganggur khususnya.

Festival Film Indonesia Pertama.

PADA tahun 1955 tokoh-tokoh perfilman Indonesia: H. Djamaludin Malik (alm.) dan H. Usmar Ismail (alm.), menemui saya dan Menteri P.P.K. waktu itu: Prof. Dr. Bahder Djohan, untuk menyampaikan keinginannya, mengadakan Festival Film Indonesia yang pertama. Mereka berpendapat, bahwa kebun dan rumah dinas Walikota Jakarta-Raya di Jln. Taman Suropati No. 7 sudah cukup baik untuk keperluan itu.

Ternyata, Festival Film ditempat tersebut berlangsung dengan cukup meriah. Bahwa mutu film Indonesia waktu itu tentu saja belum setinggi sekarang ini, kiranya dapat dimaklumi.

Hubungan dengan Pulau Seribu.

SESUAI pula dengan apa yang oleh Pemerintah Kotapraja Jakarta-Raya disebut "politik kampung dan pinggiran", maka terkecuali usaha-usaha perbaikan kampung, saya selalu memprioritaskan "daerah pinggiran kota".

Karena daerah-daerah itulah yang umumnya belum dapat turut mengenyam kenikmatanan sebagai bagian juga dari kota ini. Penduduknya sebagian besar belum dapat aliran listrik, belum menikmati saluran air minum, jalan-jalannya masih sempit, dan diwaktu hujan biasanya becek.

Walikota Sudiro beserta Ibu diabadikan bersama-sama dengan para artis dalam rangka Festival Film Indonesia yang pertama ditempat kediaman Taman Suropati tahun 1955.

Pulau Seribu, yang terdiri dari puluhan pulau itu, penduduknya masih jauh lebih terbelakang lagi. Camatnya sejak bertahun-tahun bertempat tinggal di luar daerah tanggung jawabnya. Keadaan ini telah saya ubah: Camat dan pegawai-pegawainya harus bertempat tinggal ditengah-tengah penduduk Pulau Seribu sendiri. Tentu saja ini berarti penyediaan fasilitas-fasilitas tertentu bagi mereka, antara lain: perumahan, gedung sekolah bagi anak-anaknya dan lain-lain.

Dengan bekerja sama dengan instansi-instansi lain, seperti: Pelni, Jawatan Pelabuhan dan perusahaan-perusahaan perkapalan swasta, saya telah berhasil memperoleh bantuan yang sangat diperlukan. Yaitu hubungan yang tetap antara Jakarta dengan Pulau Seribu, dengan perahu-perahu bermotor.

Untuk mulai sesuatu usaha, seperti misalnya perhubungan dengan Pulau Seribu ini, biasanya ada upacara "pengguntingan pita". Yang lazim dihadiri oleh pembesar-pembesar dan tokoh-tokoh masyarakat. Pengguntingan pita biasanya saya serahkan kepada isteri saya atau isteri pejabat lain.

"Peletakan batu pertama" waktu itu, sebanyak mungkin saya hindari. Saya lebih suka meletakkan "batu terakhir" bagi bangunan atau jembatan tertentu.

Pemuda, Wanita, Wartawan.

MENGINGAT betapa pentingnya pergerakan Pemuda, pergerakan Wanita dan kedudukan Wartawan dalam negara yang masih muda ini, maka sudah pada tahun 1954 saya berusaha, untuk memberi perhatian dan bantuan pada mereka itu.

Meskipun waktu itu sukar sekali, untuk menyediakan gedung guna tempat kegiatan mereka, tetapi akhirnya usaha kami itu ada juga hasilnya. Sebuah rumah makan besar di Jln. Merdeka Utara telah dapat kami pindahkan dari situ, untuk kemudian kami jadikan "Gedung Pemuda".

Upacara pembukaan Pekan Raya Indonesia ke-III di Jalan Raya Jenderal Sudirman (sekarang kompleks Yayasan Rumah Sakit Jakarta) pada tanggal 18 Agustus 1955.

Atas seruan kami, guna membangun sebuah Gedung Wanita, seorang hartawan yang tidak bersedia disebut namanya, menyerahkan sumbangan satu juta rupiah — sua-

tu jumlah yang sudah besar sekali waktu itu! - guna keperluan tersebut.
Kemudian dengan usaha organisasi-organisasi Wanita se-Jakarta sendiri, yaitu Badan Penghubung Organisasi-organisasi Wanita Jakarta-Raya — jumlah itu kemudian dapat ditambah dengan 400.000 rupiah.

Sebidang tanah di Jln. Diponegoro oleh Pemerintah Daerah Kotapraja dapat disediakan, untuk membangun Gedung tersebut. Yang pada hari pertama telah dilaksanakan secara gotong royong oleh para Wanita sendiri. Dengan dipelopori oleh para ibu:

Pada awal tahun 1956 diperoleh bantuan teknik lagi dari P.B.B. yang menugasi Organisasi-organisasi Wanita. Sehingga pada tanggal 21 April (Hari Kartini) tahun 1956 dapatlah Gedung Wanita di Jln. Diponegoro No. 26 di resmikan penggunaannya.

Untuk para Wartawan, kami telah dapat mengusahakan sebuah gedung di Menteng Raya. Yang waktu itu kami gunakan sebagai tempat tinggal bagi para Wartawan yang masih bujangan.
Gedung itu kami sebut: Mess Wartawan.

RENCANA/USAHA PEMBANGUNAN

DALAM periode 1953 sampai dengan 1959 di wilayah Kotapraja Jakarta-Raya diselenggarakan beberapa proyek pembangunan, diantara yang terpenting adalah sebagai berikut:

1. **Proyek penyediaan air** (water supply)

   INSTALASI pembersih air Pejompongan dibangun dengan bantuan Kementerian P.U.T.L. dengan kapasitas 2.000 liter/detik. Instalasi tersebut merupakan proyek pembersihan air secara modern yang pertama. Sebelumnya Jakarta-Raya memperoleh air dari sumber Ciburial (dekat Bogor), dengan kapasitas 600 liter/detik. Dengan demikian, maka pemberian air minum bagi wargakota Jakarta menjadi 2.600 liter/detik. Yang jika perlu, masih dapat ditingkatkan lagi menjadi 3.000 liter/detik. Dengan dibangunnya instalasi air tadi, D.P.U. Daerah harus memperluas jaringan induk dan memperbaharui sebagian dari jaringan saluran pembagian untuk daerah baru.

   Pada upacara peresmian instalasi tersebut, dalam pidatonya Presiden Sukarno sudah memperingatkan, bahwa sedikit waktu lagi, 3.000 liter per-secondepun bagi penduduk Kotapraja Jakarta-Raya, pasti sudah akan ternyata kurang lagi.

2. **Rencana Pluit.**

   DIWAKTU musim hujan di Jakarta senantiasa terjadi banjir ditempat-tempat tertentu. Sistim pembuangan air dari zaman Hindia-Belanda tidak mencukupi lagi. Untuk mengadakan perbaikan, dalam hal ini suatu rencana dalam rangka besar, telah disusun yang dikenal dengan Rencana Pluit.

   Rencana ini meliputi antara lain pembuatan waduk pengumpulan air banjir sungai Cideng/Krukut dan cabang-cabangnya, dan kemudian air dipompa kelaut. Dalam hubungan ini beberapa terusan perlu diperlebar.

3. **Rencana pembangunan perumahan bagi anggota-anggota ABRI.**

   DENGAN dukungan Kementerian Pertahanan telah dirintis suatu rencana untuk pembagian kembali wilayah tempat kediaman bagi para anggota Angkatan Bersenjata, yang pada waktu itu tersebar diseluruh kota, kedalam tiga wilayah, satu bagi tiap Angkatan Bersenjata. Tiap wilayah tempat kediaman tadi akan diperkembangkan sebagai kesatuan yang dapat melayani kebutuhan diri sendiri. Bagi para anggota T.N.I. Angkatan Darat telah dibangun perumahan di Kompleks Cijantung.

4. **Jalan Raya.**

   PEMBANGUNAN jalan raya dari Tanjung Priok ke Cililitan yang bersambung dengan jalan raya menuju Bogor perlu dilaksanakan. Proyek ini lebih dikenal dengan nama "Jakarta By Pass", suatu proyek pembangunan jalan dengan standard (model) konstruksi yang modern, dengan dua jalur lalu-lintas kedua jurusan masing-masing, yang kemudian hari dapat diperluas menjadi tiga jalur tiap-tiap jurusan. Pelaksanaannya dilakukan dengan mempergunakan peralatan modern (full scale mechanical operation). Pembangunan jalan ini direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka bantuan dari Amerika Serikat.

5. Pilot project.

USAHA peremajaan bagian kota tertentu mulai dirintis dengan mengadakan proyek percobaan (pilot project) dilokasi bekas tempat kebakaran Krekot Bundar (Urban Redevelopment).

6. Pembangunan perumahan di Grogol.

UNTUK para anggota D.P.R. dalam rangka kerja sama dengan Bank Industri Negara, telah dibangun Proyek Perumahan di daerah Grogol. Untuk umum dalam jumlah terbatas dibangun pula proyek perumahan didaerah Grogol melalui Yayasan Kas Pembangunan.

7. Mesjid Istiqlal.

PEMERINTAH Daerah Kotapraja Jakarta-Raya memberikan bantuan dalam Persiapan Pembangunan Mesjid Istiqlal.

8. Hotel Indonesia.

DALAM persiapan pembangunan Hotel Indonesia, pembebasan tanah dan pemindahan penduduk dari tempat pembangunan hotel tersebut dilaksanakan oleh D.P.U. Jakarta-Raya.

Outline Plan kota Jakarta-Raya.

DALAM periode 1953 - 1959 disamping pelaksanaan secara phisik proyek-proyek pembangunan tersebut diatas, telah pula dirumuskan rencana pembangunan dalam jangka panjang secara konsepsionil. Perumusan itu dituangkan dalam bentuk Rencana Pendahuluan (Outline Plan), yang dikemudian hari diperkembangkan menjadi Rencana Induk (Master Plan) untuk Kota Jakarta-Raya.

Adapun makna dan arti Rencana Pendahuluan tadi, dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Berdasarkan Undang-undang Pembentukan Kota 1948 No. 168, maka oleh Pemerintah Kotapraja Jakarta-Raya dianggap perlu untuk mengadakan persiapan-persiapan kearah penyusunan Rencana Induk, yang dikenal juga dengan nama "Master Plan", untuk perkembangan Kota Jakarta. Rencana Induk merupakan suatu rencana penggunaan tanah, yang dalam garis besar menetapkan tempat-tempat mana kemungkinannya baik untuk diperuntukan bagi perumahan, tempat pekerjaan dan tempat hiburan, yang menguntungkan bagi para wargakota (a place for home, work and recreation);
b. Untuk keperluan itu diperoleh bantuan teknik dari P.B.B., yang menugasi Prof. Clifford Holliday dalam tahun 1954 guna merintis persiapan-persiapan tersebut diatas. Gagasan untuk menyusun Master Plan diperkenalkan oleh Prof. Clifford Holliday, yang melakukan pendekatan menurut perkembangan dalam ilmu pengetahuan rencana kota, yang pada akhir abad lalu dipelopori oleh Prof. Sir Patrick Geddes. Sebelum ilmu tersebut berkembang, segala rencana dibuat oleh insinyur dan arsitek tanpa dipertimbangkan secara masak-masak tentang peranan kota tersebut dalam masa mendatang, dan tanpa adanya usaha memperoleh gambaran tentang kesulitan dan kesukaran yang akan timbul dan harus dihadapi dalam waktu mendatang. Sehubungan dengan itu, maka Prof. Holliday sedatangnya di Indonesia segera mulai dengan melakukan berbagai pekerjaan survey mengenai keadaan-keadaan disegala bidang dalam kehidupan masyarakat kota. Untuk dapat menghayati secara mendalam tentang kebutuhan wargakota dari segala lapisan masyarakat, maka perlu diketahui terlebih dahulu keadaan dan sifat kehidupan penduduk, kesulitan dan kesukaran apa yang dihadapi olehnya, baik dalam kehidupan sehari-hari pada waktu itu, maupun dalam masa mendatang dalam jangka panjang. Oleh karena Prof. Holliday hanya diperbantukan dalam jangka waktu 6 bulan, maka kegiatannya terbatas pada mengadakan berbagai survey tersebut diatas sebagai tindakan pendahuluan;

Peninjauan kerja Walikota Sudiro beserta rombongan ke Pembangunan Proyek Air Minum Pejompongan pada tanggal 22 Juli 1954.

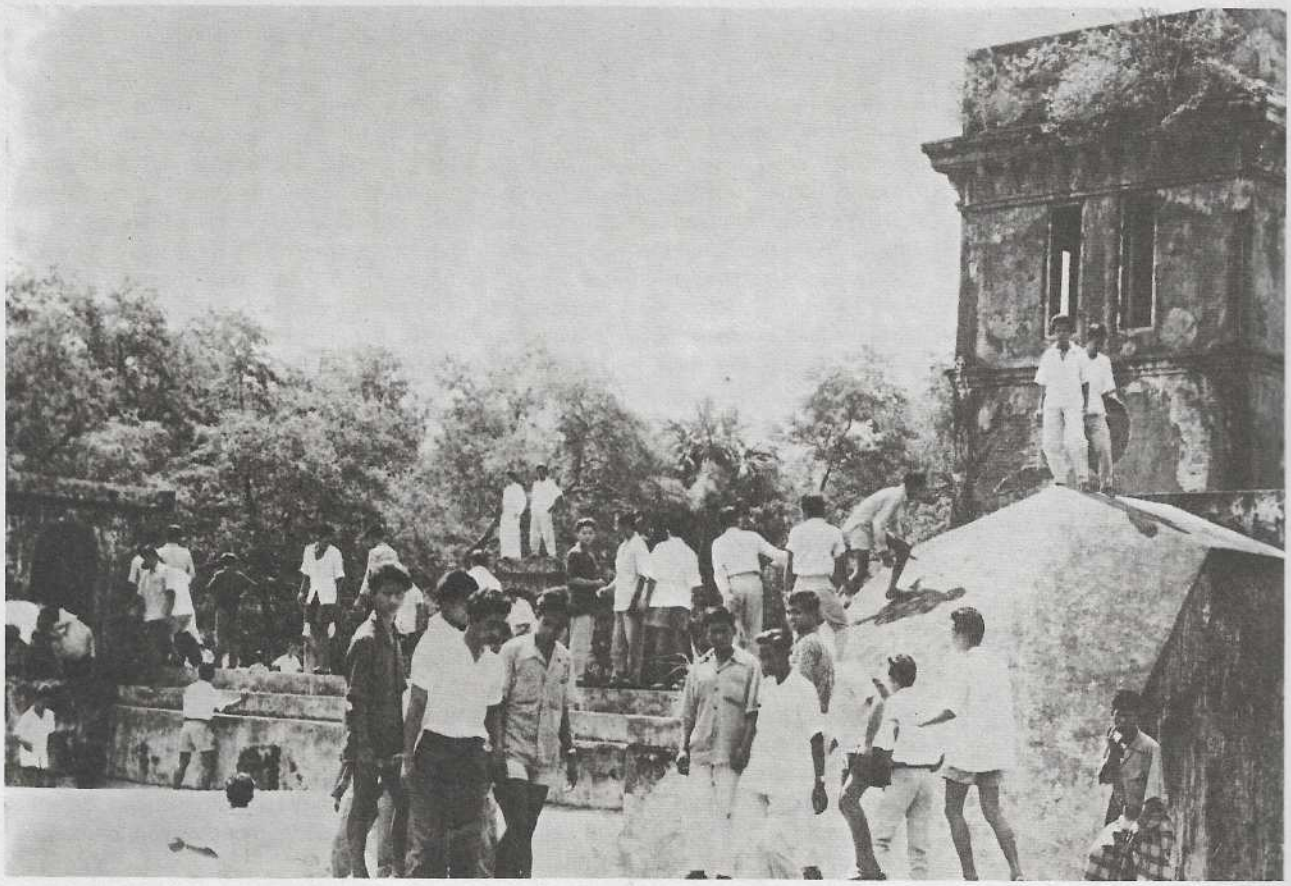

c. Oleh karena konsep dan cara pendekatan penyusunan Master Plan merupakan hal yang baru bagi tenaga teknik Indonesia pada waktu itu, maka Direktur D.P.U. Ir. S. Danunegoro diberi kesempatan untuk menjalankan study-tour selama 6 bulan ke Amerika Serikat dan Eropa Barat, untuk mempelajari dan memahami pengetrapan ilmu pengetahuan Rencana Perkembangan Kota yang baru.

Pada awal tahun 1956 diperoleh bantuan teknik lagi dari P.B.B., yang menugasi Mr. K.A. Watts melanjutkan usahanya Prof. C. Holliday. Untuk memanfaatkan tenaganya Mr. Watts, maka D.P.U. Daerah membentuk Bagian Master Plan secara khusus, yang bekerja langsung dibawah pimpinan tenaga akhli tersebut;

d. Untuk meningkatkan pekerjaan persiapan tentang penyusunan Master Plan dan pelaksanaan Program pembangunan selanjutnya, diusahakan perbantuan tambahan tenaga-tenaga akhli lainnya, yang ternyata baru dapat mulai bekerja dalam tahun 1958. Tenaga-tenaga ini adalah: Mr. Petit, tenaga akhli dari P.B.B. dibidang Pembiayaan Pembangunan Kota dan Mr. Franklin, tenaga akhli dari Colombo Plan, yang diberi tugas untuk memberikan assistensi dibidang Arsitektur. Sudah barang tentu untuk keperluan penyusunan Master Plan tadi, tenaga-tenaga Indonesia perlu disiapkan dan ditingkatkan pengetahuan dan kemampuannya untuk mengambil bagian secara aktip dalam usaha pembangunan pada umumnya, dan khususnya dalam bidang menyelesaikan persiapan penyusunan Master Plan. Untuk keperluan tersebut berturut dikirim ke Luar Negeri beberapa tenaga muda untuk menambah pengetahuan dan pengalamannya. Mereka ini, semuanya pegawai-pegawai D.P.U., adalah Saudara-saudara: Ir. Obrien, Z. Kapitan, Darundono B.A., Ir. Soewarto, Ir. Anas Madjit, dan lain-lain.

Presiden Sukarno bersama Walikota Sudiro meninjau Taman Wijaya Kusuma yang akan diperuntukkan sebagai tempat dibangunnya Mesjid Istiqlal pada tanggal 26 Nopember 1954.

e. Setibanya di Indonesia, Mr. Watts melanjutkan pekerjaan survey yang meliputi masalah penduduk, masalah kesempatan kerja, masalah perumahan dan masalah lalu-lintas.

Berdasarkan hasil-hasil survey tadi, dalam tahun 1957 selesai dirumuskan dan disusun Rencana Pendahuluan (Outline Plan) Jakarta-Raya.
Masalah lalu-lintas sebelumnya secara tersendiri telah memperoleh penelitian, yang akhirnya menghasilkan Rencana Susunan Jalan Raya, yang disyahkan oleh D.P.K.S. dalam tahun 1954.

Dalam rangka mengadakan survey tadi dipelajari pula sejarah Perkembangan Kota Jakarta, masalah tata-guna tanah, bangunan istimewa seperti: bangunan-bangunan Pusat Pemerintahan, sekolah, tempat-tempat ibadah, gedung sejarah dan sebagainya. Rencana Pendahuluan ini merupakan bahan pertama dalam rangka perumusan Laporan Rencana Induk. Maksudnya yalah untuk menyerahkan laporan berupa Rencana Pendahuluan ini kepada instansi Pemerintah yang berwenang menentukan kebijaksanaan, dan pula kepada kelompok-kelompok fungsionil yang ada hubungannya dengan kegiatan penyusunan Master Plan, yang diharapkan dapat memberikan evaluasi dan rekomendasi. Bilamana Rencana Pendahuluan itu telah memperoleh penelitian secara intensip oleh fihak-fihak tersebut dimuka, barulah disiapkan Rencana Induk dalam bentuk yang terakhir. Ternyata Rencana Pendahuluan tadi, berkat kerja-sama yang baik antara tenaga akhli P.B.B. bersama tenaga-tenaga Indonesia, dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat, dari awal 1956 sampai akhir 1957.

Sebenarnya pada taraf perkembangan Negara pada waktu itu, tugas untuk menyiapkan suatu Rencana Induk merupakan hal yang sukar. Indonesia sedang dalam taraf perubahan dari suatu bentuk masyarakat kebentuk lainnya. Keinginan dan kebutuhan wargakota - khususnya penduduk ibu-kota yang untuk sebagian diantara mereka baru masuk dari daerah pedalaman - sukar dapat diperkirakan. Kejadian ini mempengaruhi masyarakat kota, sehingga penduduk yang sejak semula bertempat tinggal dikotapun mengalami perubahan kependudukan. Sifat kampung-kampung dan tempat-tempat daerah kediaman lainnya mengalami perubahan. Sangat sukarlah kiranya untuk membayangkan perubahan sosial ini akan menjurus kearah mana dalam masa 20 tahun mendatang, jangka waktu mana biasanya diperuntukkan bagi penyusunan Rencana Induk. Oleh karena itu, kalaupun akhirnya dapat

Pemandangan benteng "Prins Hendrik" di taman Wijaya Kusuma sebelum dibongkar pada tahun 1957.

Walikota Sudiro sedang giat ikut kerja bakti pembangunan kota mahasiswa di Rawamangun pada tanggal 21 September 1954.

biasanya diperuntukkan bagi penyusunan Rencana Induk. Oleh karena itu, kalaupun akhirnya dapat dirumuskan dan disusun sebuah Rencana Induk, seyogyanya Rencana Induk tadi dianggap sebagai pedoman dan perlu ditinjau kembali tiap-tiap lima tahun sekali.

f. Dalam Rencana Pendahuluan antara lain dinyatakan, bahwa Jakarta adalah suatu kota yang cepat berkembang menjadi kota Metropolis, pertumbuhan kota dalam waktu cepat meluap melampaui batas-batas kota semula. Oleh karena itu, persiapan Rencana itu, persiapan Rencana Induk Jakarta-Raya tidak dapat diselesaikan tanpa memperhitungkan pengaruh timbal-balik antara daerah dalam wilayah kota dan daerah-daerah dalam wilayah-wilayah sekitarnya. Dalam hubungan ini Jakarta telah dilukiskan sebagai pusat Regional dari daerah sekitarnya, bahkan Rencana Induk Jakarta dianggap perlu ada pengkaitannya dengan pembangunan Nasional, yang konsep-konsepnya sedang disusun oleh Biro Perancang Negara yang pada waktu itu dipimpin oleh Ir. H. Djuanda (almarhum).

   Dalam rangka pendekatan regional inilah, maka perumusan dan penyusunan *Rencana Pendahuluan sudah dipertimbangkan dalam kaitannya dengan perkembangan kota-kota Bogor, Tanggerang dan Bekasi (yang kemudian lebih dikenal dengan* Rencana Pembangunan Regional JABOTABEK).

   Sungguhpun waktu untuk mempersiapkan Rencana Pendahuluan sangat pendek, sehingga data-data statistik hasil survey sangat terbatas, di tambah pula kenyataan bahwa masyarakat Jakarta-Raya mengalami transisi dengan kecepatan tinggi, namun oleh karena cara pendekatannya tepat, dalam Rencana Pendahuluan tadi telah dapat dikemukakan kesimpulan-kesimpulan yang cukup berarti. Disamping kesimpulan, bahwa Jakarta Raya berkembang sebagai Kota Metropolis, dalam pendekatan Regional Jabotabek masih terdapat beberapa kesimpulan lainnya, yang pantas dikemukakan disini:

   - Dalam penyusunan Rencana Pendahuluan diambil sebagai assumsi, bahwa pertambahan penduduk tiap tahun diperkirakan sebesar 4% (± 80.000 jiwa) per tahun, sehingga dalam jangka waktu 20 tahun penduduk Jakarta akan bertambah dari 2,2 juta jiwa dalam tahun 1957, menjadi ± 4,5 juta jiwa dalam tahun 1977;
   - Berdasarkan atas assumsi ini, maka diadakan analisa dan perkiraan mengenai kebutuhan kesempatan kerja, perumahan, fasilitas-fasilitas sosial seperti: sekolah-sekolah, rumah sakit-rumah sakit, serta fasilitas transportasi, industri dan perkantoran;
   - Walaupun pada waktu itu masih dipersoalkan, apakah Jakarta akan tetap menjadi Ibu-kota Republik Indonesia, namun dalam perkiraan Outline Plan, sementara diambil sebagai pangkal tolak bahwa Jakarta-Raya selama 20 tahun mendatang (Jangka waktu untuk penyusunan Master Plan), tetap menjalankan peranan Ibu Kota.
   - Oleh karena telah diperkirakan Jakarta dengan cepat mengalami pertumbuhan sebagai Kota Metropolis, maka beberapa konsepsi Perencanaan Kota telah memperoleh perhatian, misalnya wilayah perencanaan (Planning District), wilayah yang dapat berdiri sendiri (Self-supporting District) dan lingkungan-lingkungan kesatuan (Neighbourhood Units);
   - Berdasarkan struktur umur kependudukan, diadakan analisa tentang kebutuhan akan fasilitas-fasilitas pendidikan. Begitu pula diperkirakan tentang keperluan fasilitas kesehatan dan perdagangan besar maupun kecil;
   - Ruangan-ruangan terbuka dan jalur-jalur tidak lupa memperoleh pemikiran pula.
     Didaerah pusat kota dan didaerah bagian kota lainnya terdapat bangunan-bangunan dan prasarana lingkungan yang sangat buruk.
     Dalam Rencana Pendahuluan telah dicantumkan gagasan untuk mengadakan peremajaan dari daerah-daerah tersebut (urban-redevelopment);
   - Untuk melaksanakan pembangunan kota secara phisik dalam Rencana Pendahuluan antara lain disarankan, agar dibentuk suatu Lembaga atau Instansi

Sampah memang masalah yang sulit diatasi sehingga Presiden Sukarno dan Walikota Sudiro ikut melakukan kerja bakti memerangi sampah didaerah Senen dan Manggarai pada tanggal 18 Agustus 1957.

Pemerintahan (Badan Kota), yang dapat memegang peranan sebagai "Single Landlord", sesuai dengan konsepsi akhli perancang Sir William Holford.
Dengan demikian, maka dengan menempatkan kekuasaan atas tanah disatu tangan, maka dapat digerakkan akselerasi Pembangunan phisik;

- Lokasi Medan Merdeka dan Lapangan Banteng dalam Rencana Pendahuluan dicadangkan untuk kompleks Pemerintahan;
- Bidang tanah antara Pasar Ikan disebelah Barat dan Tanjung Priok disebelah Timur sepanjang pantai menurut Rencana Pendahuluan, dapat diperkembangkan menjadi daerah dengan bangunan-bangunan yang indah sebagai tempat rekreasi. Begitu pula bidang tanah sebelah Barat Pasar Ikan, sebelah Utara Polder Pluit dapat dijadikan promenade sepanjang pantai;
- Dalam Rencana Pendahuluan disinggung pula pemindahan Kebun Binatang dari daerah Cikini dalam kaitannya dengan pembentukan hutan rekreasi (Recreation forest). Pembangunan Museum Nasional dirasakan perlu pula. Dalam garis besar disarankan, agar supaya pengembangan kota dilakukan dengan pentahapan: Fase I, Fase II, Fase III dan Fase IV, yang tercermin dalam peta rencana kerja;
- Sebagai permasalahan pokok dalam pelaksanaan Pembangunan Kota dikemukakan masalah keuangan, masalah perundang-undangan dan masalah ketata-usahaan;
- Oleh Pemerintah Daerah pada waktu itu sedang dipelajari untuk menggali berbagai sumber keuangan dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan. Mengenai hal ini dalam Rencana Pendahuluan dikemukakan beberapa saran,
- Dalam masalah perundang-undangan terdapat dua hal yang penting, yalah:
  a. Law enforcement, (peraturan perundang-undangan untuk menegakkan hukum).
  b. Landasan Hukum untuk pembebasan tanah, termasuk ketentuan-ketentuan tentang penyelesaian pendudukan tanah secara tidak sah.

  Masalah pendudukan tanah secara tidak sah dan masalah kampung becek tidak merupakan persoalan teknis, akan tetapi merupakan masalah sosial politis;
- Dalam hubungan dengan ketata-usahaan dinyatakan, bahwa pelaksanaan Pembangunan Kota harus dilakukan berdasarkan atas prinsip-prinsip perencanaan yang mendapat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk organisasi-organisasi Pemerintahan yang memegang kekuasaan.

  Bilamana dukungan ini tidak ada, maka segala rencana itu betapa baik dan indah sekalipun, akan mengalami kegagalan. Oleh karena itu disarankan terbentuknya Lembaga (Regional Planning Board or Commission), yang mempunyai kekuasaan penuh baik formil maupun politis, mengambil keputusan mengenai pemakaian tanah diwilayah kekuasaannya.

  Tentang usaha untuk pembagian kembali tempat kediaman bagi anggota Angkatan Bersenjata, sebagaimana disebut dimuka telah pula diuraikan dalam Rencana Pendahuluan. Dimuka telah diuraikan pembangunan proyek instalasi pembersih air beserta proyek jaringan pipa-pipa induk, pipa pembagian saluran air minum sehingga kapasitas penyediaan air bertambah dengan 20.000 liter/detik. Dalam Rencana Pendahuluan diuraikan, bahwa walaupun tambahan kapasitas air saluran pada waktu itu sudah sangat besar, namun dalam Rencana Pendahuluan telah dinyatakan, bahwa tambahan kapasitas tadi tidak akan mencukupi lagi, berhubung dengan cepatnya pertumbuhan penduduk. Oleh karena itu diharapkan kelanjutan bantuan Kementerian P.U.T.L. untuk menambah kapasitas air saluran dengan 5.000 liter/detik lagi;
- Sebagai penutup dari Rencana Pendahuluan dinyatakan, bahwa pada waktu itu tidak ada seorangpun didunia yang dapat meramalkan masa depan dari kota Jakarta. Lebih-lebih karena pada waktu itu masih terdapat ketidak-pastian apakah Jakarta akan tetap menjadi Ibu-kota Negara. Akan tetapi Jakarta yang telah mempunyai bentuk kota Metropolis remaja, jelas mempunyai potensi

Pembangunan Kota Mahasiswa Rawamangun dimana Walikota dan Presiden beserta pejabat lainnya ikut kerja bakti dalam pembangunan tersebut pada tanggal 21 September 1954.

untuk berkembang pesat. Pada waktunya, bilamana telah dicapai kestabilan sosial, mudah-mudahan akan tidak terdapat kekurangan biaya dan tanah, yang memungkinkan kita semua untuk dengan kesabaran dan ketekunan bekerja kearah perbaikan perkembangan kota. Memang disadari bahwa banyak permasalahan besar perlu dihadapi, namun walaupun demikian maksud dan tujuan penyusunan Rencana Pendahuluan tadi telah dapat dianggap berhasil, bilamana Rencana Pendahuluan itu dapat memberikan perspektif terhadap permasalahan tadi. Oleh karenanya dapat memperoleh proporsi yang lebih besar dalam tekanan dan lebih besar pula dalam pembiayaannya.

Proses pembangunan kota satelit Kebayoranbaru memberikan keyakinan, bahwa dalam masyarakat Indonesia telah terdapat kemauan dan kemampuan untuk memperbaiki keadaan kota Jakarta-Raya.

SUNGGUHPUN dalam periode 1953 – 1959 menurut kondisi dan situasi belum lagi dapat dilaksanakan banyak proyek-proyek pembangunan berdimensi besar, namun dalam periode itu telah dapat digariskan kebijaksanaan mengenai pembangunan kota Jakarta-Raya yang bersifat konsepsionil.

Pembangunan Perumahan Rakyat/Pegawai Negeri.

SEBAGAI kelanjutan dari pembangunan perumahan rakyat/pegawai negeri dimana Walikota Sjamsurizal (almarhum), yang hanya bermodalkan uang pinjaman dari Pemerintah Pusat (Y.K.P.), usaha ini saya teruskan dengan:

1. Menambah modal dengan penjualan rumah-rumah Kotapraja yang tua dengan harga sosial dan mempergunakan hasil penjualan untuk pembangunan rumah-rumah baru;
2. Penjualan rumah-rumah tua dilakukan menurut prioritas:
   a. Pegawai-penghuni rumah dengan catatan termasuk katagori: Pegawai, wartawan dan mahasiswa,
   b Pegawai bukan penghuni dengan catatan, bahwa penghuni ditampung di rumah-rumah yang baru dibangun dengan hak sewa atau hak beli.
   c. Umum dengan catatan, bahwa penghuni yang tak bersedia membeli, ditampung dirumah yang dibangun dengan hak sewa atau hak beli;
3. Pembeli rumah dari hasil penjualan rumah lama, diharuskan membayar 95% tunai, sedangkan sisanya diangsur dalam tempo 5 tahun;
4. Pembeli rumah yang dibangun dari modal pinjaman dari Pemerintah Pusat (Y.K.P.) diberikan hak sewa-beli dalam tempo 10 tahun;
5. Rumah-rumah penampungan bagi penghuni yang dipindahkan,, sekurang-kurangnya sama luasnya dengan rumah yang dihuninya. Bahkan penghuni sebagian rumah diberi penampungan dalam sebuah rumah tersendiri, yang tidak kurang dari luas tempat tinggal yang pernah dihuninya (disewanya). Perimbangan luas bangunan ini harus diperiksa dan diakui oleh U.P.D. dalam peninjauan sebelumnya;
6. Dalam rangka untuk mempermudah Pegawai Negeri, pada tahun-tahun terakhir dilakukan pembangunan sistim "rumah tumbuh", yaitu:
   a. Membangun (memasang) fondasi yang cukup kuat untuk sebuah rumah batu,
   b. Memasang dinding setengah batu ± 1 meter dan diatasnya dinding bambu,
   c. Membangun dapur dari batu lengkap (untuk keamanan dari kebakaran),
   d. Memasang dinding kamar-kamar dalam dari anyaman bambu.

   Dengan cara demikian, maka modal dapat diperkecil, sehingga lebih mudah bagi Pegawai Negeri untuk membeli/mengangsurnya. Dan manakala mereka memperoleh kemampuan, mereka dapat melanjutkan pembangunan batunya secara berangsur-angsur sampai merupakan rumah batu yang sempurna.

   Pembangunan ini mulai dilakukan didaerah perkampungan-perkampungan baru Tomang, dan kemudian pada umumnya dilanjutkan di daerah-daerah: Grogol Utara dan Selatan, Setiabudi, Jln. Tanggerang/Balikpapan I.

Acara peresmian pembangunan jembatan besi di Pintu Besi dengan pengguntingan pita oleh ibu Sudiro pada tanggal 14 Januari 1959.

Tentang soal Bangunan.

TATKALA Pemerintah dengan dukungan kuat dari fihak masyarakat, sudah mufakat untuk mendirikan sebuah mesjid di kota Jakarta, yang pantas bagi sebuah Negara yang menurut perhitungan jumlah penganutnya beragama Islam terbanyak di seluruh dunia, maka akhirnya Pemerintah Kotapraja-lah yang sesuai dengan haknya, akan menetapkan lokasinya. Dalam seksi-seksi D.P.R.D. ternyata soal itu masih perlu diperdebatkan. Karena tempat yang telah saya sarankan, yaitu "Wilhelmina Park" (tempat Mesjid Istiqlal yang sekarang ini) ada yang kurang dapat menerimanya. Keberatan mereka antara lain, karena dikhawatirkan kereta api yang lalu disamping Mesjid itu kelak, akan mengganggu ketenangan orang yang sedang bersembahyang. Tetapi akhirnya, atas desakan yang kuat dari Badan Pemerintah Harian, akhirnya tempat itu disetujui oleh Dewan. Bahwa pembangunan Mesjid Istiqlal ini sampai memakan waktu kurang lebih 20 tahun, disebabkan karena biayanya memang besar sekali.

Waktu itu sudah terasa kurangnya tanah guna mendirikan bangunan-bangunan

(antara lain untuk perumahan). Oleh sebab itu, saya sejak tahun lima-puluhan itu selalu menganjurkan, agar membangun tidak lagi "horizontal", melainkan "vertikal", tidak lagi ke "samping", melainkan ke "atas". Bahwa idee tersebut waktu itu rupanya belum dapat diterima dengan bulat, ternyata dari diskusi yang historis, tetapi penuh humor sebagai berikut: Didalam sidang D.P.K.S. pada kira-kira tahun 1955 sedang ramai dibicarakan mengenai pembangunan (kembali) tempat di Krekot Bunder, yang baru saja menjadi bekas kebakaran.

Tanahnya dinyatakan dikuasai oleh Pemerintah Kotapraja. Karena sangat banyaknya penghuni yang harus diusahakan tempat tinggal baru, maka Badan Pemerintah Harian telah memutuskan, untuk membangun perumahan bertingkat di tempat itu. Meskipun sudah diberi keterangan dengan panjang lebar, keuntungan apa saja yang dapat dipetik dari cara pembangunan ini, tetapi ternyata ada juga anggota Wakil Rakyat yang tidak menyetujuinya. Alasannya: "Kalau penghuni yang diatas kencing, penghuni yang dibawah bisa basah!" Oleh Walikota, yang waktu itu (masih) merangkap Ketua Dewan, segera dijawabnya (secara bergurau): "Kalau orang memang bermaksud mengencingi orang lain sehingga basah, tidak perlu itu dari atas! Dari samping atau dari belakang pasti juga basah!"

Kantor dan Perumahan.

SUDAH pada tahun 1954, kantor Pemerintahan Kotapraja Jakarta-Raya, yang berada di Medan Merdeka Selatan No. 9 terasa terlalu kecil. Setelah diadakan pembicaraan beberapa kali dengan Komisaris Tinggi Kerajaan Nederland untuk Indonesia (belum: Duta Besar!), yang menempati bangunan di Medan Merdeka Selatan No. 8 sebagai tempat tinggal dan kantornya, maka akhirnya dicapai persetujuan sebagai berikut:

Tempat tersebut diserahkan kepada Pemerintah Kotapraja Jakarta-Raya, dan sebagai gantinya Perwakilan Kerajaan Nederland itu menerima sebuah gedung di Jalan Merdeka Timur.

Sejak waktu itu, Walikota berkantor disalah satu ruangan dari Gedung tersebut. Demikian pula, D.P.R.D. kemudian bersidah disitu.

Mengingat kurangnya perumahan, terutama bagi para Pegawai Negeri, maka setelah melewati rapat-rapat Pengurus "N.V.V." (Naamloze Vennootschap "Volkshuisvesting"), yang diketuai ex-officio oleh Walikota, maka tentang rumah-rumah milik N.V.V. tersebut yang jumlahnya ratusan, diputuskan seperti yang telah saya terangkan dimuka. Meskipun ini tidak berarti tambahnya perumahan baru, tetapi sedikit banyaknya menambah adanya jumlah pegawai negeri yang memiliki rumah sendiri.

Perkembangan Industri.

SETELAH meninjau beberapa negara, khususnya di Eropa Timur dan Asia, saya berpendapat, bahwa kita di Indonesia umumnya harus menuju ke usaha-usaha industrialisasi. Usaha ini saya nilai jauh bermanfaat dan urgent dari pada misalnya transmigrasi. Kota Jakarta sendiri harus turut ambil bagian dengan perusahaan-perusahaan tertentu, yang pada suatu saat (akan) didirikan didalam wilayah Kotapraja. Tetapi oleh karena waktu itu saya harus menyesuaikan diri dengan policy Pemerintah Pusat, yang dalam asasnya menolak masuknya modal asing, maka saya hanya sampai pada usaha turut menggerakkan diadakannya pameran-pameran dan Pekan Raya (Internasional dan Nasional) oleh fihak Swasta saja. Antara lain yang pernah dilangsungkan didekat Jalan Jenderal Sudirman (dimana sekarang Rumah Sakit Jakarta dan Universitas Atma Jaya berdiri).

Ibu Datuk Tumenggung (almarhum) dengan beberapa orang tokoh wanita lainnya, hampir tiap tahun mengadakan "Gelanggang Dagang untuk Wanita", bertempat di Lapangan Merdeka sebelah Utara. Suatu handicap (rintangan) besar bagi perkembangan usaha-usaha semacam ini yalah, sikap Presiden waktu itu, yang tidak menghendaki berdirinya bangunan-bangunan, meski yang hanya untuk sementara waktupun, diatas lapangan tersebut. Beliau menginginkan lapangan-lapangan Merdeka dan Banteng kedua-duanya itu harus terdiri dari padang rumput melulu, dengan ditengah-tengahnya sebuah monumen yang megah.

Bank Pasar.

SEBUAH acara, yang pernah disidangkan dan kemudian disetujui oleh D.P.R.D. Kotapraja Jakarta-Raya, yalah mengenai usaha mendirikan Bank Pasar. Gagasan ini sebenarnya baik sekali, karena akan dapat menolong para pedagang kecil di pasar-pasar, yang umumnya dari Warga-negara Indonesia asli dan yang sangat lemah ekonominya. Bahkan menurut rencana, sesudah Bank Pasar ini berdiri, akan diusahakan pula berdirinya "Bank Kampung", yang akan memberi kredit kepada para pedagang kecil, yang "beroperasi" dikampung-kampung saja.

Sayang sekali, Bank Pasar ini tidak dapat dilaksanakan, karena adanya Peraturan Pemerintah Pusat yang tidak memungkinkan waktu itu, berdirinya suatu Bank di Daerah. Yang dapat diizinkan waktu itu, yalah usaha "simpan-pinjam", tetapi ini dasar hukumnya lemah sekali, karena hanya menyerupai koperasi saja.

(Catatan : Baru sesudah tahun enam-puluhan Pemerintah Pusat mengizinkan adanya: Bank Pembangunan Daerah).

KEUANGAN DAERAH DAN PENGGUNAANNYA.

1. Anggaran Belanja.

ASAS-ASASNYA:

a. Kotapraja Jakarta-Raya sebagai unit Pemerintahan yang otonom (sejak Gemeente Batavia dulu) dalam prinsipnya harus dapat membiayai rumah tangganya sendiri;

Peninjauan langsung Walikota Sudiro beserta rombongan ke pedagang-pedagang kecil dipasar-pasar.

b. Dari hasil sumber keuangan sendiri harus dapat membiayai pengeluaran-pengeluaran, baik yang bersifat terus-menerus (routine) maupun yang "eenmalig" (pembangunan);
c. Subsidi Pemerintah Pusat (Departemen Dalam Negeri) hanya diberikan untuk biaya pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah;
d. Subsidi ini bertambah besar setelah beberapa Jawatan/Dinas Pusat diserahkan ke Daerah, misalnya Dinas Pertanian, Perindustrian dan lain-lain.
Itupun hanya untuk dapat membayar gaji pegawai-pegawai Pusat yang turut di Daerahkan saja, sedangkan biaya eksploitasi harus ditanggung oleh Daerah sendiri;
e. Dengan keluarnya Undang-undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, Kotapraja Jakarta-Raya (begitu pula Daerah-daerah lain) mendapat subsidi lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, tetapi sayang sekali bahwa pada waktu itu justru mulai timbul inflasi yang tidak terkendalikan, sehingga penerimaan keuangan dari Pemerintah Pusat menjadi kurang manfaatnya.

Penyusunan Rencana Anggaran Belanja.

a. Pada permulaan tahun lima-puluhan suatu rencana A.B. disiapkan oleh Kepala Bagian Keuangan dengan mendapat sumbangan bahan-bahan dari Kepala-kepala Dinas/Jawatan. Prinsip dari penyusunan tersebut yalah, bahwa jumlah kenaikan tidak melebihi 10%. Dasar ini menurut pengetahuan saya memang universil, berlaku dimana-mana, juga diluar negeri. Setelah berjalan beberapa tahun, dasar ini tidak dipegang lagi. Yang dijadikan dasar yalah taksiran jumlah pemasukan keuangan dan pengeluaran-pengeluaran yang akan dilakukan;
b. Berbeda dengan R.A.P.B.N. sekarang, Rencana A.B. pada waktu itu dibagi dalam biaya pegawai (personil), belanja barang, biaya pemeliharaan (gewoon onderhoud), pemeliharaan berat (zwaar onderhoud) dan pekerjaan baru (nieuwe werken) untuk masing-masing jawatan/dinas dan bagian.
Imbangan biaya personil dan belanja barang waktu itu yalah 25% dan 75%;
c. Rencana yang disiapkan oleh Kepala Bagian Keuangan diserahkan kepada Dewan Pemerintah Daerah untuk diteliti dan dibahas. Kesulitan bagi Pemerintah Daerah yalah, bahwa ia tidak mungkin mengadakan perobahan-perobahan yang drastis, karena hal-hal seperti dibawah ini:
   1. Sumber-sumber keuangan Daerah telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat secara nominatip,
   2. Menaikkan tarip dari sumber-sumber tersebut pada waktu itu pasti akan ditentang oleh D.P.R.D.,
   3. Menggali sumber-sumber baru biasanya tidak direstui oleh Pemerintah Pusat,
   4. Satu-satunya jalan yalah hanya menggiatkan dari yang ada,
   5. Atau menuntut subsidi yang lebih besar dari Pemerintah Pusat, yang biasanya tidak ada hasilnya;
d. R.A.B. yang telah diteliti oleh D.P.D. kemudian diajukan untuk memperoleh penetapan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebelum diadakan sidang Pleno, maka pembahasan dilakukan di "komisi-komisi", antara lain Komisi Keuangan dan akhirnya dalam sebuah sidang komisi gabungan.
Sidang Pleno D.P.R.D. mengenai A.B. biasanya bersifat politis. Banyak perobahan-perobahan yang diinginkan oleh para anggota, tetapi terbentur pada Peraturan Pusat yang masih berlaku atau terbatasnya kemampuan keuangan. Karena itu sidang pleno semacam itu, yang dihadiri oleh umum, sering berada dalam suasana panas yang mengakibatkan mosi tidak percaya (mosi van wantrouwen) terhadap Pemerintah Daerah, kecuali Kepala Daerahnya yang tidak dapat dijatuhkan, karena ia adalah seorang Petugas Pemerintah Pusat. Meskipun demikian, mungkin karena sedang meluapnya dan belum mantapnya semangat

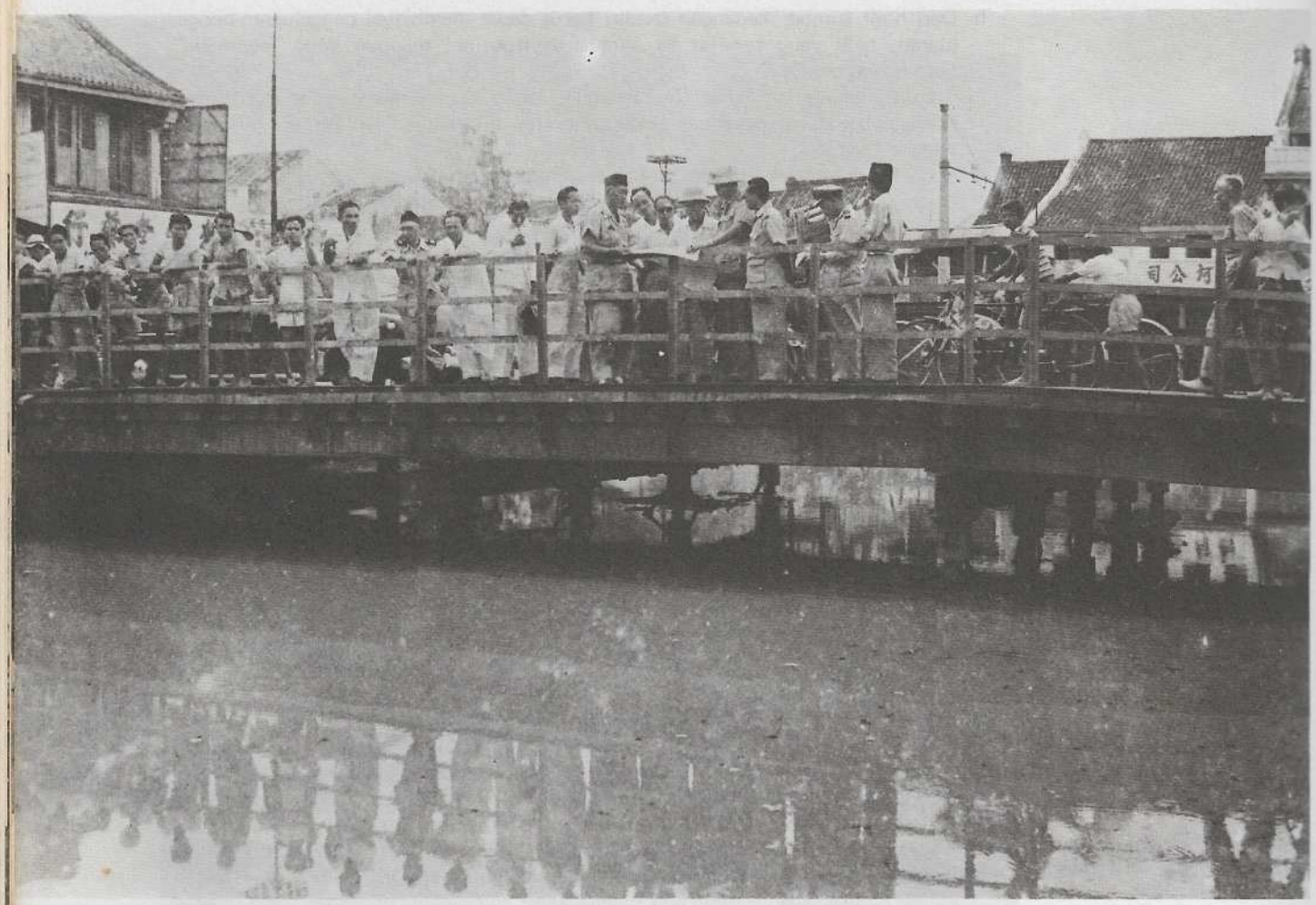

Peninjauan langsung Walikota Sudiro kepedagang-pedagang eceran di Jakarta, tampak Walikota Sudiro sedang berbincang-bincang dengan pedagang beras.

demokrasi, sebelum Pemilu pertama, suatu rencana mosi tidak percaya pernah juga dilancarkan pada saya sebagai Walikota Kepala Daerah (yang merangkap Ketua B.P.H. = D.P.D.), tetapi yang akhirnya menjadi suatu "mosi percaya penuh" (mosi van vertrouwen);

e. Perlu diketahui, bahwa sepanjang ingatan saya, pemasukan keuangan Daerah terdiri dari Pajak Daerah, seperti: pajak jalan, pajak reklame, pajak verponding, yang ketiganya sangat kecil jumlahnya.
Pajak-pajak lain yang agak besar hasilnya yalah: pajak tontonan dari bioskop dan pertandingan olah raga, pajak penjualan dari restoran. Kemudian masih ada retribusi-retribusi seperti: retribusi pasar, air minum dan lainnya seperti pengukuran tanah dan sebagainya, yang jumlah penghasilannya tidaklah banyak.
Pekerjaan baru (pembangunan) yang menelan biaya besar selalu dipegang langsung oleh Pemerintah Pusat, tanpa dilewatkan A.B. Daerah, seperti misalnya: pembangunan instalasi air minum, jalan-jalan baru, walaupun pengelolaannya kemudian diserahkan kepada Daerah.

2. Besarnya Anggaran Belanja.

Kalau dibandingkan dengan besarnya Anggaran Belanja setelah tahun 1970, maka tampaknya Anggaran Belanja diantara tahun 1953 dan tahun 1959 itu kecil sekali. Tetapi baiklah diingat, bawha rupiah pada waktu itu masih agak "keras". Inflasi belum begitu hebat seperti sejak tahun 1960. Karena sumber-sumber penghasilan Kotapraja sendiri belum dapat menutup anggaran pengeluaran, maka setiap tahun Kotapraja Jakarta-Raya menerima subsidi dari Pemerintah Pusat dengan sistim "Sluitpost", artinya: defisit pada tiap-tiap tahun ditutup oleh Pusat. Oleh sebab itu, maka dalam melaksanakan tugasnya, Kotapraja tidaklah bebas untuk membuat pengeluaran menurut kehendaknya sendiri.
Menurut catatan saya, maka Anggaran Belanja dan subsidi dari Pusat bagi:

Tahun 1953 yalah : Rp. 70.905.430,- subsidinya: Rp. 33.090.656,–
Tahun 1954 yalah : Rp. 89.731.030,- subsidinya: Rp. 46.628.794,–
Tahun 1955 yalah : Rp.114.544.140,- subsidinya: Rp. 39.898,265,–
Tahun 1956 yalah : Rp.106.059.240,- subsidinya: Rp. 46.336.540,–
Tahun 1957 yalah : Rp. 114.027.320,- subsidinya: Rp. 56.748.400,–
Tahun 1958 dan 1959 yalah: kira-kira Rp.150.000.000,– subsidi: ± Rp.50.000.000,–

Walikota Sudiro beserta rombongan sedang meninjau kali Jelangkeng pada tanggal 22 Juli 1954.

3. Usaha menggali sumber-sumber keuangan baru.

Pimpinan Kotapraja Jakarta-Raya waktu itu, sadar bahwa tanpa usaha penambahan penghasilan bagi kas Pemerintahan Daerah, maka pelayanan pada masyarakat pasti tidak akan dapat memuaskan.
Tetapi betapa sukarnya melaksanakan usaha itu, dapat diuraikan antara lain sebagai berikut:

Tatkala saya sudah mendapat dukungan dari D.P.K. Sementara, untuk menambah harga bensin yang terjual didalam wilayah Kotapraja dengan 1 sen per liter dan saya menemui Menteri Perekonomian, guna mengesahkannya, dengan terkejut saya mendengar tanggapan beliau sebagai berikut: "Kalau saya mengizinkan permohonan Pemerintah Kotapraja Jakarta-Raya ini, pasti akan terjadi suatu "salto mortale" dari perekonomian kita!".

Kalau diingat, bahwa harga bensin waktu itu hanyalah 50 sen seliter, maka dapat dibayangkan, berapa puluh kalilah harga itu kemudian, tanpa mengakibatkan suatu "salto mortale" dalam perekonomian kita.

Lain usaha penggalian sumber pendapatan baru, yalah usul kepada Pemerintah Pusat, yang akhirnya ditolaknya. Yaitu: mengadakan "airport tax" di Lapangan Terbang Kemayoran, khusus untuk orang asing saja. Tidak banyak, hanya @ seringgit saja! Juga untuk mengadakan "toll-road", diatas jembatan yang menghubungkan jalan Thamrin dengan Jalan Jenderal Sudirman. Bahkan usul tentang "toll-road" ini sudah ditolak, ketika disidangkan dalam D.P.K.S., karena – katanya – itu adalah sistim "kuno".

Bahwa baik "airport tax" (meskipun sekarang resminya disebut "airport charge") sebesar Rp. 800,– bagi Airport-airport kelas I, dan Rp. 600,– bagi Airport kelas II, dan bahkan Rp. 1.000,– bagi International Airport Halim Perdanakusuma, maupun "toll-road", kini oleh masyarakat dianggap sebagai "pajak yang wajar", dan bukanlah sebuah sistim "kuno", sungguh membesarkan hati saya! Sejak 20 tahun yang lampau, Pemerintah Kotapraja Jakarta-Raya sudan yakin, bahwa kendaraan-kendaraan bermotor, yang waktu itu jumlahnya sudah mendekati 100.000 buah, dapat menjadi sumber penghasilan yang besar bagi Pemerintah Daerah, meskipun kala itu — sayang sekali — belum terpikir diadakannya SWP3D atau B.B.N.!

PANCASILA, TERMASUK DEMOKRASI KITA.

Konperensi Asia-Afrika (A.A.).

MESKIPUN Konperensi Asia-Afrika dalam tahun 1955 itu, dilangsungkan di kota Bandung, tetapi ternyata Jakarta sebagai "pintu gerbang" Indonesia, tidak dapat terhindar dari kesibukan-kesibukan khusus. Karena nyatanya para utusan/wakil Negara Peserta Konperensi A.A. tersebut, untuk pertama kali harus menginjakkan kakinya dikota Jakarta lebih dahulu, sebelum memasuki wilayah Republik Indonesia.

Dan oleh karena waktu itu, masih ada tokoh-tokoh yang sedang memperjoangkan kemerdekaan bagi tanah airnya, sehingga secara formil negeri-negeri tersebut belum berbentuk Negara, maka menjadi salah satu tugas dari Walikota Jakarta-Rayalah, untuk "menampung" calon negarawan-negarawan ini. Sebagai contohnya misalnya: Uskup (belum: Uskup Agung) Makarios dari Siprus, yang secara formil belum dapat diterima sebagai Peserta penuh di Konperensi tersebut, sehingga untuk sehari penuh beliau menjadi tamu resmi dari Pemerintah Kotapraja Jakarta-Raya.

Keuntungan besar bagi saya pribadi, yalah dapat langsung berkenalan dengan tokoh-tokoh dunia waktu itu, misalnya: Jawaharlal Nehru (almarhum), Perdana Menteri India, Chou En Lai (almarhum), Perdana Menteri R.R.C., Raja Ibnu Saud (almarhum) dari Saudi Arabia, Gamal Abdul Nasser (almarhum) dari Mesir, Tran van Dong, Perdana Menteri dari Vietnam (Utara) dan lain-lain.

Dari antara mereka itu, tidak sedikit yang masih meluangkan waktu, untuk melihat-lihat kota Jakarta. Tentu saja sambil bercakap-cakap dengan saya, yang sebagai Walikota harus selalu mendampingi mereka, dalam peninjauan didalam kota ini.

Pemilihan Umum Yang Pertama.

BERHUBUNG pada tahun 1955 (akan) diadakannya Pemilihan Umum yang Pertama, maka oleh R.T. dan R.W. dalam masing-masing kelurahan diutamakan pendaftaran penduduk yang telah dewasa dan yang sudah pernah menikah, dan lain syarat untuk memenuhi hak pilih.

Dalam tahun 1953 pendaftaran sudah dimulai. Tahun 1954 diadakan rapat seluruh R.T. dan R.W. dengan tujuan menyempurnakan peraturannya, dan dalam tahun itu juga Jakarta dibagi dalam 3 Wilayah pemilihan, yaitu:

1. Jakarta Utara dengan Ketuanya Wedana Penjaringan,
2. Jakarta Tengah dengan Ketuanya Wedana Gambir, dan
3. Jakarta Selatan dengan Ketuanya Wedana Jatinegara.

Di tiga Wilayah tersebut penerangan mengenai Pemilihan Umum diberikan oleh R.T. dan R.W., pejabat Pamong Praja dan juga oleh para anggota D.P.R.D.. Tidak ketinggalan Jawatan Penerangan mengambil bagian yang tidak kurang pentingnya. Kemudian diadakan Tempat Pemungutan Suara (T.P.S.) diseluruh Jakarta. Di tempat-tempat yang dikunjungi banyak penduduk, ditempelkan gambar-gambar lambang partai, kalau tidak salah ada 53 buah gambar.

Pemilu ke I di Jakarta berjalan sangat lancar, baik dalam periode persiapannya, masa kampanye, maupun pada hari pemilihannya. Kesadaran masyarakat pada waktu itu rupanya sudah begitu besar, sehingga tidak terjadi bentrokan-bentrokan. Hasil

Pemilihan Umum juga tidak diributkan dan diterima dengan hati yang ikhlas oleh masing-masing partai.

Kalau Walikota Sjamsurizal duduk dalam Dewan Pimpinan Partai Masyumi, maka saya - seperti Walikota Suwirjo (almarhum) -, duduk dalam Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Indonesia (P.N.I.).

Bahkan dalam Pemilu yang pertama itu, yang (akan) menetapkan anggota-anggota Konstituante, D.P.R. dan D.P.R.D., saya bertindak sebagai pemimpin daftar (lijsten-aanvoerder) dari Partai saya untuk Wilayah Kotapraja Jakarta-Raya. Waktu itu, tanpa perlu dibebas-tugaskan untuk sementara waktu sebagai Walikota, saya boleh ikut berkampanye. Dan syukur alhamdulillah, dalam Pemilu yang pertama, yang berlangsung dalam 2 tahap itu, di Wilayah Kotapraja Jakarta-Raya tidak terjadi gontok-gontokan, meskipun tiap kontestan cukup tajam pidato-pidatonya. Mungkin pula disebabkan, karena tiap kontestan Pemilu waktu itu telah mendapat pendidikan politik, maka sekalipun suhu semangat rakyat naik, tetapi syukur tidak sampai jatuh korban-korban. Kritik-kritik yang dilontarkan, biasanya diucapkan dengan sindiran-sindiran, yang "dibungkus" dalam humor, sehingga tidak ada yang bisa marah karenanya.

Akibat adanya sistim multi-partai - lebih 40 buah! - maka waktu berkampanye dengan puluhan tanda gambar, membuat kota Jakarta menjadi sungguh ramai sekali.

Setelah saya dalam Pemilu tahap ke-2, terpilih sebagai anggota DP.R.D. Kotapraja Jakarta-Raya, maka kemudian saya mencalonkan diri untuk dipilih sebagai Kepala Daerah. Dan pada tanggal 25 Pebruari tahun 1958 dalam suatu Sidang terbuka D.P.R.D. pilihan rakyat, yang juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri waktu itu, dengan suara bulat, saya dinyatakan terpilih sebagai calon tunggal dari D.P.R.D.. Sesuai rencana, peresmiannya dilangsungkan pada hari itu juga, dengan mengucapkan sumpah di muka Sidang terbuka D.P.R.D. tersebut.

Berdasar Undang-undangnya, saya tidak lagi merangkap sebagai Ketua D.P.R.D.. Dan sifat kollegial dari Undang-undangnya demikian ketatnya, sehingga hampir semua soal harus diputuskan oleh Dewan Pemerintah Daerah (D.P.D.), yang dipilih dari dan oleh D.P.R.D.. Kepala Daerah adalah Ketua D.P.D. Kewajiban utamanya yang resmi yalah: menanda-tangani Peraturan-peraturan Daerah dan Pengumuman-pengumuman resmi.

Ternyata yang keluar sebagai "pemenang" dari Pemilu ini, yang kemudian disebut "4 Besar", yaitu: P.N.I., Masyumi, N.U. dan P.K.I., sedang partai-partai lain misalnya: Partai Katholik, Parkindo, P.S.I. , IPKI, Partai Murba dan lain-lain hanya mendapat sedikit jumlah kursi saja.

Saya sendiri beruntung terpilih sebagai anggota Konstituante, D.P.R. dan D.P.R.D. Kotapraja Jakarta-Raya. Menurut ketentuan perundang-undangannya waktu itu, kalau saya (kelak) terpilih sebagai Kepala Daerah, maka saya tidak (akan) boleh merangkap menjadi anggota D.P.R.. Yang masih diperkenankan yalah perangkapan dengan keanggotaan Konstituante.

Oleh karena saya (waktu itu) menganggap Konstituante itu suatu lembaga yang historis (akan) penting sekali, karena bertugas membuat Konstitusi (Undang-undang Dasar) yang "tidak sementara lagi", maka saya bertekad untuk aktip di dalam Konstituante tersebut, meskipun menurut rencananya, sidang-sidangnya akan dilangsungkan dikota Bandung.

DEMIKIANLAH, maka selama± 2 tahun, saya menjabat "Kepala Daerah Swatantra Tingkat I Kotapraja Jakarta-Raya". Tidak lagi di dalam Undang-undangnya itu ada sebutan "Walikota". Tidak pula ada istilah "Gubernur Kepala Daerah". Yang ada, dan resmi, yalah hanya istilah "Kepala Daerah" saja. Meskipun demikian, wargakota Jakarta masih tetap menyebut saya dengan istilah "Walikota Jakarta-Raya".

Akibat Undang-undang, yang secara "extreem" ingin membuat segala-galanya "collegiaal", maka-mungkin tanpa diperhitungkan lebih dahulu oleh fihak D.P.R., yang menyusun Undang-undangnya, justru dimana-mana timbul "dubbel-bestuur" -

Pemerintahan rangkap. Karena rupanya para pencipta Undang-undang tersebut "lupa" membuat pengaturan tentang Pamongprajanya! Instansi ini, yang biasanya disebut: Pemerintahan Umum - secara vertikal, - masih langsung dibawah Kementerian Dalam Negeri. Sehingga dihampir semua Daerah Tingkat I, pegawai Pamongpraja yang tertinggi pangkatnya, tidak mau tunduk pada "Kepala Daerah pilihan Rakyat".

Hanya didaerah Swatantra Tingkat I Kotapraja Jakarta-Raya sajalah, yang demikian itu tidak terjadi. Sebabnya yalah sebagai berikut:

1. "Kepala Daerah pilihan Rakyat" ini, kebetulan memang sebelumnya, sudah sejak beberapa tahun menjabat Kepala Daerah (yang diangkat oleh Pemerintah Pusat), dan sudah pula berpangkat: Gubernur Kepala Daerah (Pegawai Negeri Golongan F7 – P.G.P.N.);
2. Pejabat Pamongpraja tertinggi di Daerah Swatantra ini, yalah: Dr. P.M. Tangkilisan M.P.A. (almarhum), yang berpangkat Gubernur (tanpa istilah "Kepala Daerah"), dari golongan F6, secara kebetulan, jauh sebelum waktu itu, di Propinsi Sulawesi, lama sekali menjadi pembantu saya, berturut-turut sebagai Walikota Menado dan kemudian Kepala Daerah Minahasa. Tatkala itu saya menjabat Gubernur Propinsi Sulawesi.

Sebagai tokoh yang melihat gejala, yang pasti akan menimbulkan ketegangan dan kesulitan, disebabkan akan timbulnya "dubbel bestuur", maka Gubernur Dr. Tangkilisan M.P.A. (almarhum), segera mengeluarkan pengumuman, yang mungkin bertentangan dengan Undang-undangnya sendiri. Isi pengumumannya yalah: Pernyataan, bahwa beliau bersama segenap anggota Corps Pamongpraja tunduk dan berada dibawah perintah saya selaku "Kepala Daerah Swatantra Tingkat I, pilihan Rakyat".

Musyawarah Nasional 1957.

Pada sekitar tahun 1957, justru setelah Pemilu I berlangsung dengan baik, di Tanah Air kita timbul gejala perpecahan. Api kedaerahan dikobar-kobarkan dengan alasan yang bermacam-macam. Setahun sebelum itu (pada tahun 1956), Bung Hatta telah meletakkan jabatannya sebagai Wakil Presiden R.I.. Itulah adalah manifestasi pecahnya "Dwi-tunggal".

Untuk mengatasi kesulitan yang lebih lama lebih besar itu, atas anjuran berbagai fihak, pada bulan September 1957, di undanglah tokoh-tokoh masyarakat, baik dari kalangan resmi, maupun dari fihak swasta, ke Jakarta untuk mengadakan: Musyawarah Nasional.

Belum pernah sebelum itu, begitu banyak pemimpin-pemimpin dari berbagai golongan dan lapisan, berkumpul dalam satu ruangan, yang khusus dibangun di 2 tempat, yaitu: disamping Gedung Proklamasi dan di Lapangan Merdeka.

Presiden Sukarno, bekas Wakil Presiden Moh. Hatta, Perdana Menteri Djoeanda bersama-sama para Menteri R.I., para Kepala Staf A.D., A.L. dan A.U.R.I., Kepala Kepolisian Negara, segenap Gubernur-Kepala Daerah diseluruh Indonesia, yang masing-masing didampingi oleh Panglima (sebutannya waktu itu masih Komandan) Tentara dan Territorialnya, dan tokoh-tokoh lainnya hadir disitu.

Setelah beberapa hari kita mendengarkan pidato-pidato yang berapi-api, dan setelah diadakannya rapat seksi-seksi guna menyiapkan keputusan-keputusan dari berbagai bidang, maka sampailah kita pada puncak acara. Yalah penanda-tanganan sebuah piagam. Yang atas nama segenap peserta Munas ditanda tangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta. (Kemudian kedua orang pemimpin tersebut berangkat ke Jogyakarta, khusus untuk berziarah kemakam Jenderal Sudirman.(alm.).

Tetapi ternyata, semua itu, termasuk janji-janji yang telah diucapkan dalam Munas, tidak ada banyak gunanya!

Beberapa waktu kemudian meletuslah pembrontakan-pembrontakan, yang dalam sejarah nasional kita merupakan "halaman hitam", yaitu: Peristiwa P.R.R.I. - Permesta.

Gedung bekas Komisaris Tinggi Kerajaan Belanda di Jalan Merdeka Selatan - 8 ketika digabung ke kompleks Balai Kota.

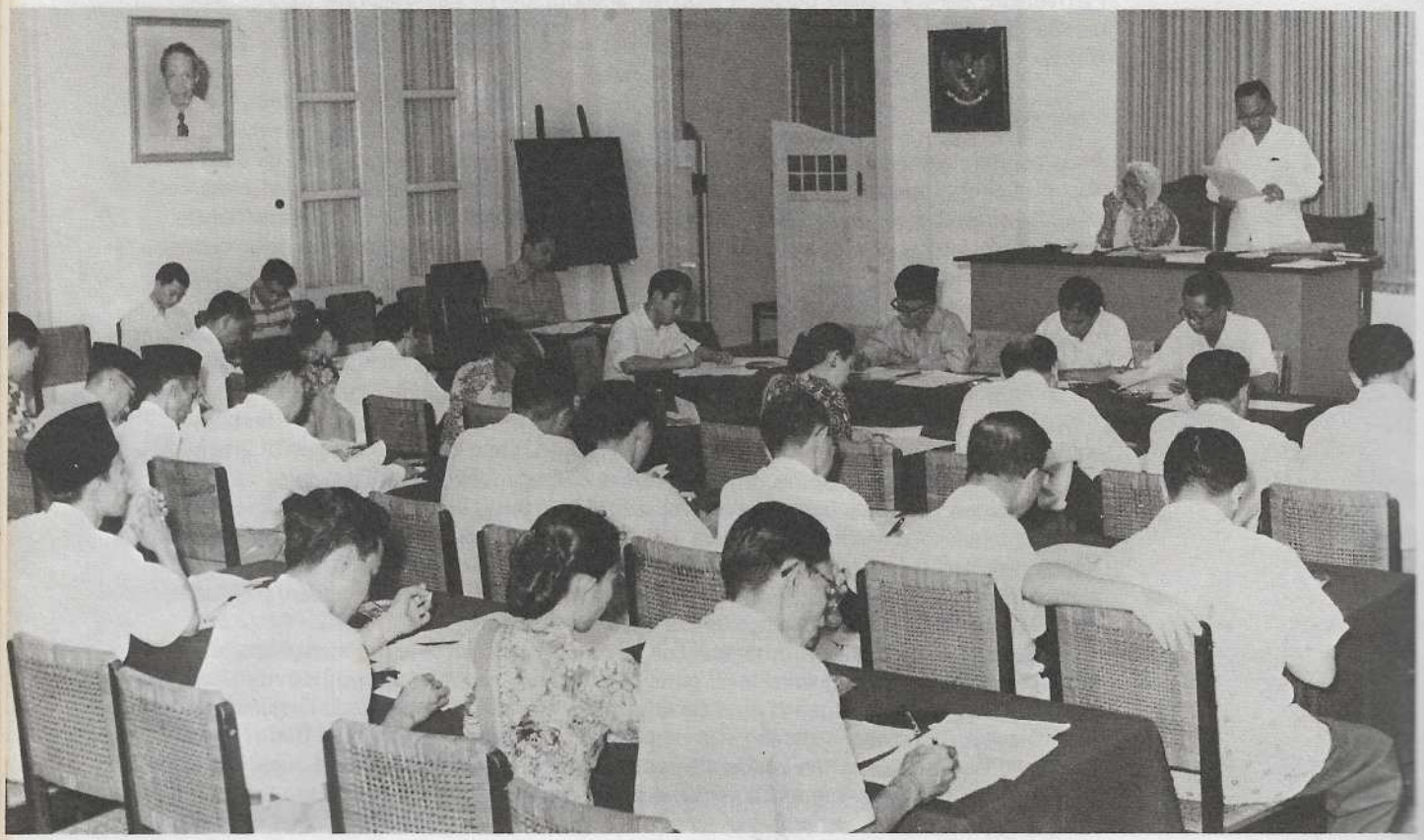

DAPIB (Dana Perjoangan Irian Barat).

PADA tanggal 28 Oktober 1957 bertempat di Lapangan Banteng dilangsungkan rapat besar yang menurut koran-koran waktu itu, dihadiri oleh lebih dari sejuta orang. Pokok acara yalah: "Perjoangan guna memasukkan Irian-Barat kedalam wilayah kekuasaan R.I.".

Pembicara-pembicara utamanya: Presiden Sukarno dan Bung Hatta. Setelah itu, saya yang kebetulan menjabat Ketua Panitya Penyelenggara Rapat, dalam pidato penutupan, mengadakan "dialog" sebentar dengan hadirin. Yaitu berisi pertanyaan, apakah rakyat bersedia membantu perjoangan kita itu, dengan harta benda, sesuai dengan kekuatan mereka masing-masing. Semuanya menyatakan setuju. Termasuk tawaran saya, untuk membentuk "Dana Perjoangan Irian Barat", yang disingkat: "Dapib". Dengan persetujuan Bung Karno/Bung Hatta dan rakyat waktu itu, saya ditunjuk untuk membentuk Pengurusnya dan sekaligus menjadi Ketua Umumnya.

Tugas tambahan baru ini, telah saya kerjakan dengan penuh semangat. Setelah Dapib di Jakarta tersusun, dimana Komandan Militer ikut duduk sebagai Wakil Ketuanya, menyusul pembentukan cabang-cabang Dapib di ibukota-ibukota Propinsi, sehingga waktu itu, saya berkesempatan kadang-kadang pergi ke Daerah, guna melantik Pengurus Dapib disana.

Pada waktu Pemerintah (Pusat) memutuskan, untuk "mengoper" Dapib ini, dengan menunjuk Menteri Sosial sebagai Ketua Umumnya yang baru, pada tanggal 18 Juli 1962 (waktu itu saya sudah bukan Kepala Daerah Jakarta lagi) saya telah menyerahkan inventaris Dapib, yang antara lain terdiri dari: 2 buah kapal coaster, yang dapat dipersenjatai (dibuat oleh P.T. Jantra, dibawah pimpinan Sdr. John Sibih). Juga beberapa ratus juta rupiah (uang lama), yang setelah diperiksa dan dinyatakan sepenuhnya beres oleh sebuah verifikasi-komisi dibawah pimpinan (waktu itu) Kolonel Piet Haryono, telah dapat saya serahkan kepada Pengurus yang baru.

S.S.K.D.N. (Sarekat Sekerja Kementerian Dalam Negeri).

SEBAGAI "seorang pergerakan", yang sejak tahun 1946 oleh Pemerintah Pusat diberi tugas dibidang kepamong-prajaan - terkecuali didalam Partai Politik - saya juga banyak mencurahkan tenaga dan fikiran dalam organisasi Sarekat Sekerja. Terutama setelah saya melihat meluasnya pengaruh S.O.B.S.I. (berhaluan komunisme), yang tidak saja dikalangan buruh Swasta, tetapi mulai juga menjalar dikalangan Pegawai Negeri.

Pada tahun 1947, dalam Kongresnya yang pertama di Surakarta, oleh S.S.K.D.N. saya dipilih sebagai Ketua Umumnya. Anggota-anggotanya terdiri dari segenap pegawai dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Tidak hanya para pegawai administratip saja, melainkan juga para Gubernur, Residen, Bupati, Wedana, Camat, dan sebagian para Lurah. Saya katakan "sebagian", karena sebagian dari para Lurah di Pulau Jawa, yang ribuan jumlahnya itu, sudah ada yang terlanjur masuk dalam sebuah organisasi yang dibina oleh P.K.I.

Dalam beberapa kali Kongres, antara lain di Bogor, Presiden dengan para Menteri R.I. telah berkenan hadir. Saya selalu menegaskan, bahwa S.S.K.D.N. tidak memakai asas: antithese antara "kapitaal" (modal) dan "arbeid" (pekerjaan). Karena didalam S.S.K.D.N. "tidak ada pertentangan antara majikan dan buruh". Bahkan anggota S.S.K.D.N. itu sebenarnya bukanlah: buruh!.

Karena "majikannya" yalah Pemerintah kita sendiri, Pemerintah Nasional yang juga menjadi miliknya Rakyat Indonesia sendiri. Tatkala sedang menghaibatnya S.O.B.S.I. yang berhaluan komunisme itu, sejarah waktu itu tidak dapat mengabaikan sebuah Vaksentral lain, yang telah dibentuk oleh S.S.K.D.N. bersama Sarekat-sarekat Sekerja lain, terutama dari kalangan pegawai Pemerintah, dimana saya selama beberapa tahun telah dipilih menjadi pimpinannya. Yaitu: G.S.B.I. (Gabungan Sarekat Buruh Indonesia), yang asas dan haluannya tidak jauh berbeda dari S.S.K.D.N.

Sarekat Sekerja ini telah saya pimpin selama 12 tahun, yaitu dari tahun 1947 hingga tahun 1959. Tiga kali Kongresnya telah memilih saya kembali sebagai Ketua Umumnya.

Suasana diruang sidng DPRD baru di gedung Merdeka Selatan - 8.

Walikota Sudiro sebagai Ketua Umum "Dana Perjuangan Irian Barat (DPIB) sedang mengucapkan pidato untuk mencari dana.

Mengingat pula :

1. Peraturan-peraturan yang hingga kini masih berlaku;
2. Anjuran/peringatan yang pernah diberikan oleh Pemerintah Kotapraja Jakarta Raya.

Menimbang, bahwa :

a. Perlu melindungi rakyat, jangan sampai terganggu kebanjiran/kebakaran, kesehatan, kebersihan dan keamanan;
b. Jangan sampai rakyat yang tidak mengetahui status bangunan menjadi korban karena membeli bangunan itu;
c. Perlu mendidik rakyat mentaati peraturan-peraturan Pemerintah sesuai dengan dasar Negara sebagai Negara Hukum.

Mengingat lagi pasal 57 dan 70 Stadsgemeente-ordonnantie (Stbl. 1926 No. 365) yang terakhir diubah dengan Stbl. 1940 No. 226, juncto "Ordonnantie tijdelijke voorzieningen bestuur Stadsgemeente Java" (Stbl. 1948 No. 195) dan keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat tanggal 11 Maret 1950 No. 114, jo. keputusan Presiden No. 69 tahun 1950, sebagaimana telah diubah, paling akhir dengan keputusan Presiden Republik Indonesia No. 124 tahun 1954 dan pasal 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

M E M U T U S K A N :

1. Menugaskan kepada B.P.H. untuk menghentikan pendirian bangunan tanpa izin mulai tanggal 1 Januari 1956.
2. Menyetujui rencana kerja dari B.P.H. seperti yang tercantum pada lampiran I keputusan ini beserta amandemennya yang diajukan oleh Fraksi Parkindo (Mr. Poeloengan), yang bunyinya sebagaimana tertera pada lampiran II, dengan catatan, bahwa dalam pelaksanaannya harus diperhatikan nota tambahan yang diajukan oleh Fraksi Buruh (Sdr. Achmad Natakusuma), yang bunyi lengkapnya seperti tercantum dalam lampiran III.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Agraria;
3. Menteri Sosial;
4. Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga;
5. Koordinasi Keamanan Daerah Jakarta Raya;
6. K.M.K.B.D.R.,
7. Jaksa Tinggi di Jakarta;
8. Kejaksaan Daerah Jakarta Raya;
9. Kepala Polisi Jakarta Raya dan Sekitarnya;
10. Semua Kepala Jawatan/Bagian Kotapraja Jakarta Raya (2x);
11. Biro Pemerintahan Umum Pusat Jakarta Raya.

DEWAN PERWAKILAN KOTA SEMENTARA tsb.,
WALIKOTA

ttd. SUDIRO

Salinan sesuai dengan aslinya:
Sekretaris Kota,

ttd.

(Mr. SOEPANGKAT).

LAMPIRAN I Keputusan D.P.K.S. Jakarta Raya tanggal 23 Pebruari 1956
No. B 5/D.K.

KOTAPRAJA JAKARTA RAYA.

Berhubung dengan meluasnya bangunan-bangunan tanpa izin pada waktu akhir-akhir ini dan kini telah tiba waktunya untuk mencari penyelesaiannya, maka B.P.H. telah menyusun rencana kerja seperti dibawah ini :

Upacara pelantikan Walikota Sudiro sebagai Kepala Daerah Swatantra Tingkat II Kotapraja Jakarta Raya yang disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri Mr. Isqak Tjokroadisurjo di Balai Kota pada tanggal 17 Januari 1958.

Bangunan tanpa izin yang digunakan untuk tempat tinggal.

1. Bangunan tanpa izin yang didirikan sebelum 1 Januari 1950 atas anjuran Pemerintah Nasional akan diusahakan untuk dilegalisir.
2. Bangunan tanpa izin yang didirikan antara 1 Januari 1950 sampai dengan 1 Januari 1955 (pada tanggal 1 Januari 1955 dikeluarkan peringatan oleh K.K.D.) akan dipindahkan ketempat lain yang ditunjuk oleh Kotapraja dengan diberikan sekedar bantuan berwujud pengangkutan bahan-bahan bangunan yang dipindahkan.
3. Bangunan tanpa izin sejak 1 Januari 1955 setelah dikeluarkan peringatan oleh K.K.D. (Koordinasi Keamanan Daerah) sampai dengan 1 Januari 1956 diperingatkan untuk pindah dengan ditunjukkan tempatnya oleh Kotapraja dengan tiada mendapat bantuan apa-apa.
4. Bangunan tanpa izin sesudah tanggal 1 Januari 1956 akan dibongkar dengan tiada memberikan waktu dan tempat lain serta bantuan.

Bangunan tanpa izin untuk berjualan dipinggir jalan bukan toko atau kiosk.

1. Dianjurkan agar mereka turut menjaga kebersihan dan memperbaiki keadaan tempat yang sekarang atas petunjuk-petunjuk dari B.P.H.
2. Apabila anjuran tsb. setelah melampaui beberapa waktu yang ditetapkan oleh B.P.H. tidak diindahkan, B.P.H. segera akan mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu, berdasarkan atas kebersihan dan kesehatan.
3. Selama Pemerintah Kotapraja belum dapat menyediakan tempat lain guna berjualan, untuk sementara waktu mereka diperbolehkna berjualan ditepi jalan dengan syarat antara lain bahwa mereka harus turut menjamin kebersihan dan kesehatan.
4. Dimana oleh B.P.H. telah dapat disediakan tempat seperti yang dimaksud diatas, maka tempat-tempat tersebut harus dipergunakan untuk berjualan oleh orang yang bersangkutan.
5. Bangunan tanpa izin untuk berjualan yang bersifat toko atau kiosk akan dibongkar dengan tiada bantuan atau penunjukkan tempat lain.

BADAN PEMERINTAH HARIAN KOTAPRAJA
JAKARTA RAYA
WALI KOTA

ttd. SUDIRO

Salinan sesuai dengan aslinya :
Sekretaris Kota,

ttd.

(Mr. SOEPANGKAT).

BEBERAPA KENANGAN YANG MENGESANKAN

Para Walikota Ibu-kota Negara-negara Asing.

PADA tahun 1955, oleh Kementerian Dalam Negeri, saya diberi izin untuk selama satu bulan mengunjungi beberapa Negara di benua Asia, khususnya untuk mempelajari tentang Pemerintahan Ibu-kota.

Dengan perantaraan Kementerian Luar Negeri kita, saya kemudian dapat diterima sebagai tamu resmi dari para Walikota dari: Rangoon (Birma),Bangkok (Thailand, yalah seorang Jenderal Angkatan Darat yang merangkap menjadi Menteri), Saigon (Vietnam Selatan), Manila (Filipina) dan Tokyo (Jepang).

Di Jepang, atas usaha Gubernur Azima dari Tokyo, saya telah dipersilahkan melihat beberapa kota lain, dan sekaligus berkenalan dengan para "Shichoo-nya", antara lain dari: Sapporo, Hakodate, Kyoto, Nagasaki dan Hiroshima.

Pada waktu pulang ke Jakarta, saya masih sempat singgah di Hongkong dan Singapore, dimana saya diterima secara resmi oleh Gubernur dari koloni-koloni Inggris tersebut.

Atas undangan negara-negara asing tertentu, saya sempat berkenalan secara pribadi dengan beberapa orang Walikota dari Ibu-kota negara-negara sahabat. Baik dengan Burgermeester Amsterdam: d'Allier, maupun dengan Peking Secang: Pen Chen, baik dengan Oberburgermeister Berlin Barat: Willy Brandt, maupun dengan Singapore City-mayor: Ong Eng Guan. Yang tersebut dibelakang ini, bahkan pernah bersama isterinya saya undang ke Jakarta. Dan pernah pula Pemerintah Kotapraja Jakarta-Raya mengirim sebuah missie kesenian, yang dengan bantuan dari pimpinan Angkatan Laut kita, telah mengangkut para anggota missie dengan alat-alat ke kota Singa itu.

Naik haji.

SALAH seorang Kepala Perwakilan Negara Asing di Jakarta, yang rapat hubungannya dengan Pemerintah Kotapraja Jakarta-Raya waktu itu, yalah: Y.M. Duta Besar Amroussi dari Republik Persatuan Arab (Mesir). Atas usaha beliau pada tahun 1959, kami suami-isteri di undang oleh Walikota Kairo, untuk mengunjungi Mesir dan Negara-negara Arab di Timur Tengah lainnya.

Oleh karena isteri saya tidak dapat ikut serta, maka atas keputusan D.P.R.D., dalam perjalanan ini saya ditemani oleh Ketua D.P.R.D. Abdullah Salim dan Anggota D.P.D. Sapi-ie.

Karena "kemacetan" pemungutan suara terakhir dari Sidang Konstituante mengenai dasar Negara, yang tidak/belum mencapai 2/3 dari jumlah suara, keberangkatan saya terpaksa ditunda beberapa hari, sehingga teman-teman seperjalanan saya tersebut diatas, terpaksa menunggu saya di Kairo, Setelah kami menjelajahi Negara-negara Mesir, Iraq, Iran, Libanon dan Yordania (dimana kami telah dapat berziarah kekota-kota suci Darussalam dan Bethlehem), dan dapat bersembahyang di Mesjidil Aqso, kemudian kami naik "pesawat terbang haji" terakhir ke Jeddah. Seterusnya kami menuju Arafah untuk menunaikan rukun ke-5 dari Agama Islam. Di Mina kami masih dapat diterima beraudiensi pada Raja Ibnu Saud dan di Mekkah pada Perdana Menteri Faisal (kedua-duanya kni telah wafat).

Suasana Hari Raya Idul Fitri pada tahun 1959 di kediaman resmi Walikota Jakarta dimana rakyat kecil pun datang untuk menyampaikan ucapan selamat kepada Bapak dan Ibu Sudiro.

Setelah bersembahyang di Medinah, kemudian dengan pesawat Saudi Arabian Airlines kami terbang ke Aden, dan selanjutnya pulang ke Tanah Air. Berkat bantuan-bantuan dari fihak Kedutaan Besar R.I. dan Pemerintahan Republik Persatuan Arab (Mesir), seluruh upacara Haji telah dapat kami lakukan didalam hanya 6 hari saja.

Oleh karena untuk perjalanan ke Tanah Suci tersebut, saya telah tidak mengeluarkan biaya sedikitpun dari kantong saya sendiri, maka hingga sekarang saya masih segan memakai gelar "Haji".

Dianugerahi Bintang Gerilya, beberapa Satya Lencana, dan Piagam dari D.P.R.D.

BEBERAPA hari sebelum saya meletakkan jabatan sebagai Walikota Jakarta-Raya, Pemerintah Pusat berkenan menganugerahi saya dengan Bintang Gerilya.

Bapak Letnan Jenderal Gatot Subroto (almarhum) - yang dalam perang kemerdekaan kita tahun 1948/1949 menjabat Gubernur Militer untuk Keresidenan-keresidenan Surakarta, Madiun, Pati dan Semarang, dan saya sebagai Kepala Staf beliau untuk urusan sipil, yaitu sebagai Residen Koordinator Pemerintahan Sipil untuk Surakarta, Madiun, Pati dan Semarang - atas nama Pemerintah menyematkan bintang tersebut didada saya. Bersama dengan Bapak Sumitro Kolopaking dan Dr. Sudomo, yang masing-masing dalam "zaman gerilya" menjabat Bupati Banjarnegara dan Bupati Klaten.

Beberapa satya-lencana, yang berhubungan dengan perjuangan bersenjata disusulkan kemudian, antara lain untuk: G.O.M. I, II dan lain-lain. Hampir bertepatan waktunya, juga dari D.P.R.D. Kotapraja Jakarta-Raya, saya menerima Piagam tanda-tanda jasa. Menurut keterangan Ketua D.P.R.D. waktu itu, kalimat-kalimat, yang tercantum dalam Piagam tersebut telah disyahkan dengan suara bulat oleh Sidang D.P.R.D. pada akhir bulan Januari 1960.

Perdebatan-perdebatan dalam Sidang-sidang D.P.K.S. dan D.P.R.D., bahkan sebuah "mosi tidak percaya", yang pernah dilontarkan pada diri saya - meskipun tidak oleh D.P.R.D. pilihan rakyat - dengan piagam ini, rupanya oleh para anggota Dewan itu telah dianggap selesai sama sekali. Pengabdian saya selama hampir 6½ tahun pada Wargakota Jakarta-Raya itu, rupanya tidaklah sia-sia.

Akhir tugas saya.

SEJAK bulan Desember 1959, saya sudah mengambil keputusan untuk tidak bersedia dicalonkan kembali sebagai Kepala Daerah bagi kota Jakarta.

Undang-undang No.1 tahun 1957 tentang Pemerintahan Daerah, yang terlalu liberal itu, ternyata hanya berusia 2 tahun saja.
Menurut Undang-undang tersebut, mestinya masa dinas saya selaku "Kepala Daerah pilihan Rakyat" akan berlangsung selama 4 tahun. Dan oleh karena saya terpilih, baru pada tahun 1958, mestinya saya masih harus bertugas sampai tahun 1962.

Undang-undang yang baru nanti, akan menampilkan seorang Kepala Daerah gelarnya: Gubernur Kepala Daerah D.C.I. = Daerah Chusus Ibu kota Jakarta — sebagai Penguasa Tunggal. D.P.R.D. yang selanjutnya disebut: D.P.R.D.-G.R. (G.R.= Gotong Royong) diberi hak, untuk mengusulkan calon (atau: calon-calon)-nya kepada Presiden, tetapi oleh karena menurut Undang-undangnya, beliau tidak terikat oleh pencalonan itu, akhirnya Presidenlah yang akan menetapkan, siapa yang akan menjadi Gubernur.

D.P.R.D. Kotapraja Jakarta-Raya waktu itu telah memberi jaminan kepada saya, bahwa mereka akan mengajukan calon tunggal. Yaitu diri saya! Dan kalau seandainya nanti ditolak oleh Presiden, D.P.R.D. akan tetap mengajukan saya lagi sebagai calon tunggalnya, hingga 3 kali berturut-turut! Meskipun pendirian dan janji D.P.R.D. itu sangat saya hargai, tetapi saya melihatnya dari segi lain! Ini bukanlah ramalan, melainkan hanyalah suatu perhitungan semata-mata. Kepada kawan-kawan terdekat, saya berkata waktu itu, bahwa didalam waktu ± 3 tahun akan terjadi suatu malapetaka. Dan saya tidak ingin terlibat didalamnya.
Ternyata perhitungan saya itu benar, meskipun jangka waktunya yang kurang tepat.

Malapetaka ternyata telah datang, tidak di tahun 1963, melainkan di tahun 1965. Yang menyebabkan saya memilih "melompat dalam kegelapan" dari pada masih tetap ikut didalam Pemerintahan (Daerah) yalah, gejala yang waktu itu sudah saya sinyalir sebagai suatu bahaya bagi Negara dan Bangsa.

Keluarnya sebuah Peraturan baru memperkuat tekad saya, untuk mengundurkan diri dari kalangan Pemerintah. Yaitu Peraturan yang melarang para pegawai negeri dari golongan F, untuk menjadi anggota Partai Politik.

Justru oleh karena saya waktu itu duduk didalam Dewan Pimpinan Partai, maka saya tidak ingin dipandang sebagai manusia yang lebih mementingkan kedudukan dari pada keanggotaan Partai.

Pernah saya langsung mintakan perhatian Presiden Sukarno atas caranya fihak tertentu memisahkan beliau dari kawan-kawan lama. Janganpun mempertimbangkan pendapat saya, malah sejak saat itu saya lebih lama lebih dijauhkan dari beliau. Hal ini sangat terasa dalam 3 kejadian, yang saya alami, yaitu:

1. Dalam susunan Panitya baru bagi pembangunan Monumen Nasional, yang selama beberapa tahun saya menjadi tenaga pendorongnya, nama saya tidak dimasukkan;
2. Juga tatkala Dana Perjoangan Irian Barat, yang telah saya dirikan dengan restu dan persetujuan Kepala Negara sendiri, dalam pembaharuan susunan Pengurusnya, saya tidak diberitahu sebelumnya;
3. Meskipun oleh D.P.R.D. Jakarta-Raya dengan suara bulat, saya telah terpilih sebagai calon No.1 bagi M.P.R.S., tetapi tanpa komentar, nama saya oleh Presiden diganti dengan seorang calon lain.

Oleh karena masa kerja saya sebagai pegawai R.I., hanya selama hampir 16 tahun saja, saya (waktu itu) tahu, bahwa saya tidak/belum berhak atas pensiun. Tetapi berkat terbitnya perundang-undangan baru, yang menghitung zaman "perjoangan Jogya" selama 4 tahun 4 bulan sebagai tambahan bagi masa kerja, dan waktu sebelum tahun 1945, yang dapat dinilai sebagai masa perjoangan paling tinggi 10 tahun, maka setelah selama beberapa bulan saya tidak menerima gaji atau tunjangan apapun — sekonyong-konyong saya berhak atas pensiun penuh. Dengan masa kerja 30 tahun 2 bulan. Dan dalam usia yang baru 48 tahun 8 bulan (Total — sesuai Undang-undangnya yang berlaku — lebih dari 75 tahun).

Alhamdulillah, saya merasa masih cukup kuat, lahir dan bathin, untuk mengurus keluarga selanjutnya.

HARAPAN DAN PENUTUP.

Sudiro bersama Soemarno yang menggantikannya pada tahun 1960, keduaduanya lahir pada tanggal, bulan dan tahun yang sama yaitu pada 24 April 1911.

PADA tanggal 6 Pebruari 1960, dengan disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri Ipik Gandamana, saya mengadakan serah-terima jabatan dengan pengganti saya; (waktu itu) Brig. Jenderal Dr. Sumarno Sosroatmodjo.

Suasana yang pada mulanya agak tegang waktu itu, terutama pada saat saya naik kemimbar, untuk mengucapkan pidato perpisahan, segera berubah ketika saya membuka sebuah "rahasia". Yaitu, karena Kepala Daerah Jakarta, yang selanjutnya akan disebut: Gubernur Kepala Daerah D.C.I. (Daerah Chusus Ibukota) Jakarta ini, mungkin akan segera dikenal dan terutama dimengerti oleh para pegawai sebagai pembantu-pembantu beliau, berkat telah hampir 6½ tahun mengenal diri pribadi saya.

Karena Dr. Sumarno telah dilahirkan pada hari, tanggal dan tahun yang sama dengan saya! Sehingga mungkin sekali wataknya, dengan segala kekurangan dan kesalahannya, tidak jauh berbeda dengan diri saya!

Harapan saya yalah, agar kota Jakarta dengan Wargakotanya, yang waktu itu ± 2,9 juta orang jumlahnya, dibinanya dengan baik, sehingga lekas menjadi Ibukota Negara yang patut kita banggakan. Dan para wargakotanya dapat hidup bahagia, karena akan lekas terpenuhilah apa yang selalu saya harapkan, yaitu:

" Wisma, Karya, Marga dan Suka "

Selanjutnya saya beserta keluarga bermaksud akan menetap di kota Jakarta, dan akan berusaha menjadi wargakota yang baik.

"Memoires" atau Naskah kenang-kenangan ini saya tutup dengan panjatan do'a, semoga Allah Subhana Wataala, berkenan senantiasa melindungi dan membimbing Pemerintah Daerah Kota Jakarta ini, beserta segenap Warganya.

Jakarta, 20 - Mei - 1977.

HENK NGANTUNG

HENK NGANTUNG

Lahir di Bogor, 1 Maret 1927
Wakil Kepala Daerah Chusus Ibukota Jakarta, 29 Januari 1960 – 26 Agustus 1964
Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 27 Agustus 1964 – 15 Juli 1965.

RIWAYAT HIDUP SINGKAT

NAMA lengkapnya ialah Hendrik Joel Hermanus Ngantung. Dilahirkan dari Ayah-Ibu berasal dari Minahasa, Ayah: Arnold Rori Ngantung, Ibu: Maria Magdalena Ngantung Kalsun pada tanggal 1 Maret 1927 di kota Bogor. Agama Kristen-Protestan. Pendidikan yang diperoleh menurut keterangannya ialah "belajar sendiri" Di Jaman Hindia Belanda ayahnya adalah anggauta KNIL (Tentara Kerajaan Hindia Belanda) berpangkal fourier (bintara yang khusus memelihara kuda).

Semasa kanak-kanak lingkungannya ialah religius, "tidak artistik dan tidak bersemangat nasional".

Walaupun di anjurkan untuk meneruskan pelajaran di sekolah namun telah memilih sebagai "tukang gambar". Dalam usia 15 tahun mengadakan pameran lukisan atas anjuran dan dorongan Bapak E. Katoppo, bekas guru dan kepala sekolahnya. Dari hasil pameran dan penjualan lukisan dari rumah ke rumah di kota Menado itu, ia membelanjai diri sendiri berkelana ke Pulau Jawa.

Antara tahun 1937 - 1940 menetap di Bandung dan menjadi satu-satunya murid dari Prof. Rudolf Wengkart, seorang akademikus dan portretist berasal dari Wina (Austria), dari siapa Henk Ngantung memperoleh pelajaran teori melukis, anatomi dan sejarah kesenian. Karena sering berada di rumah kelaurga Neumans, kolektor barang antik dan seni, yang merupakan pusat pertemuan para seniman, ia bertemu dengan Prof. Wolff Schoemaker, Luigi Nobili, Dake dan sebagainya.

Di rumah Neumans itulah Henk Ngantung menggunakan perpustakaan tuan rumah untuk belajar sendiri tentang sejarah dan ilmu pengetahuan.

Di kota Bandung, ia berkenalan dengan pelukis Indonesia terkemuka sekarang, Affandi. Perkenalan dengan pelukis besar itu ialah waktu Henk Ngantung sedang melukis pemandangan di suatu kampung. Dari sebuah rumah yang sedang ikut terlukis keluar seorang laki-laki yang mendekati dan secara diam-diam mengamati Henk Ngantung melukis sampai selesai. Barulah terjadi dialog dan perkenalan pertama dengan Affandi, hal ini disebabkan karena rumah kediaman Affandi di kampung itu menjadi obyek lukisannya. Di Bandung itulah lukisannya di pamerkan dan dijual melalui toko barang antik dan seni "Kunsthandel WILO", di Jalan Braga milik seorang Italia. Lukisan karya "pelukis pribumi" yang boleh masuk toko tersebut ialah dari Affandi, Basuki Abdullah, R.M. Pirngadi dan Henk Ngantung sendiri.

Pada tahun 1940 pindah ke Jakarta mengikuti pameran-pameran yang diselenggarakan oleh Bataviaasche Bond van Kunstkringen dan melukis pemandangan serta banyak melukis potret.

Pada jaman pendudukan Jepang tetap mengembangkan profesi sebagai pelukis, di samping itu menjadi ilustrator surat kabar Jepang Yomiuri Shinbun. Masa Revolusi Henk Ngantung tergabung dalam Laskar KRIS (Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi) dan banyak membuat sketsa/melukis tema laskar dan perjuangan menggabungkan diri dengan para wartawan Republik dan mengikuti jalannya perundingan di Linggarjati, Renville, Kaliurang, Negara Indonesia Timur dan sebagainya.

Tergabung dalam kelompok Gelanggang, yang dipimpin Chairil Anwar, Masyarakat Seniman Jakarta Raya (MSDR), Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional (BMKN) sering disebut sebagai anggauta/tokoh Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA) yang berorientasi komunis, tetapi sebenarnya hanya nama dan tidak aktif. Sejak tahun 1957 duduk dalam berbagai Panitia maupun Lembaga Negara. Men-

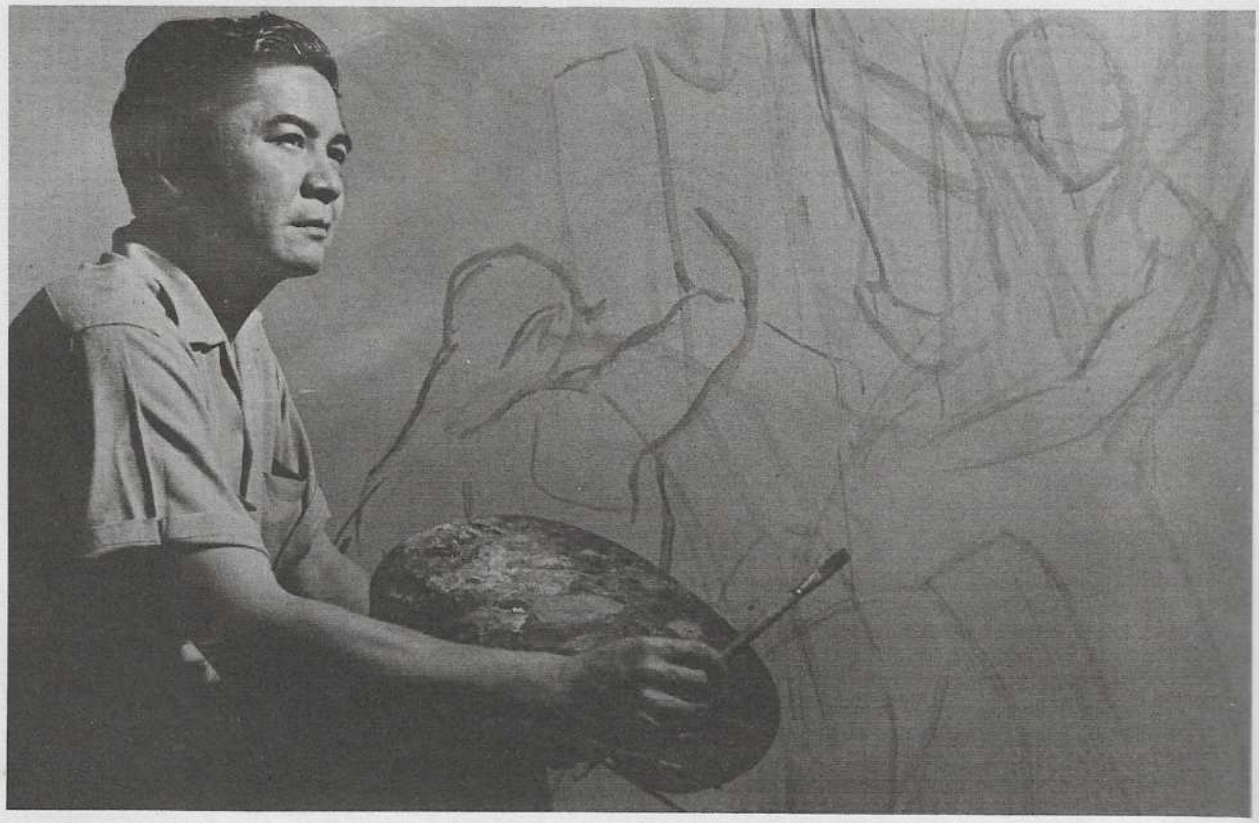

dapat kesempatan mengunjungi pelbagai negara Eropah Barat dan Timur, Asia dan Afrika, Amerika Serikat dan Amerika Selatan dan beberapa kepulauan Indonesia.

Setelah berhenti dari jabatan Gubernur maka menurut kata-katanya sendiri: "setelah perjalanan yang begitu panjang dan menempati pelbagai kedudukan tiba kembali di pangkal asal, yaitu: seorang pelukis biasa".

(ARS);

DIANTARA TEKANAN DAN KECURIGAAN

Oleh: Henk Ngantung.

TULISAN berikut ini, merupakan sekedar catatan-catatan mengenai keadaan dan pengalaman selama saya menjadi Wakil Gubernur dan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Tersusunnya catatan-catatan ini, adalah atas permintaan Bapak Haji Ali Sadikin, Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta sekarang, yang dalam rangka Peringatan HUT ke-450 Kota Jakarta, mengajak para bekas Gubernur KDH. Jakarta, untuk turut mengisi suatu penerbitan-khusus, dengan penulisan kenang-kenangan mengenai keadaan dan pengalaman selama masa jabatannya masing-masing.

Untuk berterus-terang, untuk menyusun catatan-catatan ini, saya mengalami kesulitan, bagaimana dan apa saja yang dapat saya kemukakan sebagai kenang-kenangan, apalagi yang penting dan mengandung nilai sejarah?

Karena masa jabatan saya sebagai Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah terlalu singkat, sehingga tidak banyak yang dapat saya ceritakan melainkan beberapa rencana dalam pemikiran.

Yang saya maksud adalah, saya tidak dapat menyusun kenang-kenangan saya, ibarat saya "mengumpul foto-foto atau negatif-negatif lama, menyetak dan memperbesarnya kembali, kemudian menyusun dan menempelkannya didalam sebuah album". Karena karya-karya yang ingin saya sumbangkan, banyak yang masih berstatus "dalam kandungan", sehingga jangankan dalam bentuk "foto", dalam bentuk "negatif"pun saya tidak punya.

Henk Ngantung sebagai seorang seniman.

Dalam hubungan ini, saya merasa amat berkekurangan dan menyesal, kalau saya tidak bisa menyampaikan hasrat dan keinginan hati saya, untuk menyampaikan tulisan yang lengkap dan baik. Untuk ini saya mohon maaf kepada Bapak Haji Ali Sadikin dan para pembaca pada umumnya.

Namun permintaan ini, saya sambut dan penuhi dengan rasa gembira dan terima kasih, diiringi perasaan haru dan bangga, bahwa pada tingkat kemajuan "Jakarta hari-kini" menuju "Jakarta hari-esok" dibawah pimpinan Bapak Haji Ali Sadikin, senantiasa tidak melupakan dan tidak memisahkan "Jakarta dihari-kemarin"!

Membangun Jakarta, Ibukota Republik Indonesia, berarti pula memelihara dan membangun Sejarah Bangsa dan Rakyat Indonesia dan sebagaimana Bangsa dan Rakyat Indonesia itu sendiri, maka sejarahnya adalah suatu kontinuitas kehidupan, yang pada tingkat-tingkat perobahan dan perkembangan bagaimanapun, di dalamnya senantiasa berkobar jiwa, semangat dan cita-cita Bangsa dan Rakyat Indonesia yang sama, yaitu: "Hari esok yang lebih baik dan cerah"!.

Banyak yang dihari kemarin, masih merupakan keinginan, pemikiran dan perencanaan; bahkan yang masih merupakan gagas-gugus secara khayali. Dihari kini kesemuanya itu sudah menjelma kenyataan yang mengesankan. Sehubungan dengan ini, saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih, bahwa saya sebagai salah satu insan "Jakarta di hari kemarin", diperkenankan ikut mengalami dan menikmati "Jakarta di hari kini" ..... Jakarta yang makin cerah!

Karenanya, pada kesempatan ini, saya dari hati ikhlas, mengucapkan Selamat dan Salut, kepada Bapak Haji Ali Sadikin, Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sehingga nama dan peranan Jakarta bertambahlah kebesarannya, yang pasti tidah terhapus dalam Sejarah Bangsa dan Rakyat Indonesia, khususnya di dalam Sejarah Jakarta Sepanjang Masa.

Ucapan Selamat dan penghargaan ini, saya tujukan pula kepada Staf dan seluruh karyawan-karyawan didalam lingkungan Pemerintah DKI dan tidak terlupakan pula, penghargaan pada Rakyat Ibukota, khususnya yang justru karena gerak pembangunan itu, secara langsung atau tidak, "menjadi korban", sehingga disadari atau tidak, pada setiap bangunan, jalan-jalan, jembatan-jembatan, taman-taman, dan sebagainya, yang megah dan indah itu, tertitipkan pula sesuatu "amanat", yang disuatu pihak membangkitkan keprihatinan, sedang dilain pihak membangkitkan perasaan dan semangat, bahwa berkat partisipasinya itu, mereka sesungguhnya merupakan "pahlawan-pahlawan pembangunan yang tidak dikenal".

Sehubungan dengan ini, DKI Jakarta sebagai kota-teladan apakah tidak dapat merintis pemikiran tentang, terselenggaranya sesuatu manifestasi (berupa monumen-kah? dan sebagainya), yang idee-nya merupakan suatu versi yang dikembangkan dari pengertian; kalau ada "monumen vid onbekende soldaat", apa tidak bisa di Jakarta, ada semacam "monumen pahlawan pembangunan yang tidak dikenal"?

Perang berkobar, bisa berakhir..... tetapi pembangunan berkobar, berjalan terus, dan pembangunan dalam arti menciptakan hal-hal yang baru, selalu minta korban.

Akhirnya, melalui kesempatan yang baik ini saya ikut menyampaikan Selamat kepada Bapak Haji Ali Sadikin dan segenap Warga Kota berkenaan dengan Hari Ulang Tahun Kota Jakarta yang ke-450, yang akan jatuh pada tanggal 22 Juni 1977 yang akan datang.

Hidup Jakarta! Jaya - Raya!

LAIN CITA-CITA, LAIN KENYATAAN.

SEBELUMNYA saya terjun didalam tugas-tugas kepemerintahan, maka saya adalah seorang pelukis. Profesi ini telah saya kembangkan dan hayati semenjak saya berumur 16 tahun. Karena menjadi seorang pelukis, atau dalam arti yang lebih luas lagi; menjadi seorang "seniman", itulah cita-cita saya semenjak saya meninggalkan bangku sekolah dan melepaskan diri dari tanggungan orangtua, hidup berkelana.

Sengaja saya awali tulisan ini, dengan beberapa catatan sekelumit riwayat hidup saya, yang sekalipun tidak ada hubungan dengan peruntukkannya ini, namun menurut anggapan saya, beberapa hal, merupakan faktor-faktor yang melatarbelakangi atau sedikit banyaknya mempengaruhi pengangkatan, kegiatan maupun kebijaksanaan saya, dimasa saya menjadi Wakil Gubernur dan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Melalui karya-karya saya, semenjak zaman Belanda, Jepang, Revolusi, dan sebagainya sekalipun saya tidak menganggap saya "seorang tokoh", namun secara relatip, nama saya, sebagai hasil usaha sendiri, tanpa melalui suatu badan atau organisasi, dikenal di beberapa kalangan masyarakat. (Vide beberapa guntingan dari Harian-harian, Majalah-majalah dan sebagainya dari zaman-zaman tersebut).

Bahwasanya pada suatu ketika nama saya dikenal dan dibesar-besakan seolah-olah saya seorang "tokoh-Lekra", bahkan sesuai dengan keadaan situasi politik dewasa itu, disuatu pihak saya tanpa persyaratan politik maupun ideologis sedikitpun, "diwadahkan", sedangkan dipihak lain, saya secara otomatis dan apriori, karenanya dianggap sudah atau diragukan sebagai orang PKI, yang sama sekali tidak ada dasar kebenarannya, apalagi sebagaimana saya sendiri menghayati didalam jiwa dan nurani saya.

Khusus mengenai hal ini, dalam tulisan dan kesempatan lain, saya akan membuat suatu pandangan yang lebih terperinci lagi, sedang untuk keperluan ini, saya membatasinya pada kesimpulan sebagai berikut:

Suasana Jalan M.H. Thamrin pada tahun 60-an.

Adalah tidak sulit untuk mengangkat dan menonjol-nonjolkan seseorang sebagai "tokoh" organisasi/pergerakan, oleh organisasi/pergerakan yang bersangkutan, kalau "tokoh" yang dimaksud, secara funksionil sudah mempunyai reputasi dan nama.

Lain daripada itu, sebagai seniman ketika itu, siapa merasa bahwa dibaliknya ada "bahaya", atau merasa dosa dan salah, atau tidak terangsang oleh semboyan; "seni dari rakyat, untuk rakyat"!?

"Menyelamatkan Republik Proklamasi" yang waktu itu dikenal sebagai "Konsepsi Bung Karno" yang diumumkan ke seluruh Tanah Air pada tanggal 21 Pebruari 1957, didalam mana a.l. disebut akan diselenggarakan suatu Dewan Nasional terdiri dari golongan-golongan funksionil, merupakan peluang yang baik untuk memperjuangkan secara langsung pendirian dan aspirasi-aspirasi tersebut diatas, seminimal-minimalnya, agar "kaum Seniman Indonesia" diakui sebagai golongan funksionil tersebut. Untuk keperluan ini, didampingi beberapa seniman-seniman lainnya, saya menghadap dan menyampaikan resolusi kami kepada Presiden.

Sementara itu Bung Karno telah memberi tanggapan-tanggapan baik, terhadap kegiatan-kegiatan dan usaha-usaha saya membangun pengertian akan makna positip segi keindahan dalam penyelenggaraan peristiwa-peristiwa yang bersifat commemo rative, massal dan sebagainya seperti Perayaan 17 Agustus, Penerimaan Tamu-tamu Agung, Rapat-rapat Umum dan lain sebagainya.

Semenjak tahun 57-an saya ditempatkan sebagai salah satu wakil pimpinan, atau anggota dalam pelbagai Panitia Negara (pusat) untuk memimpin bidang pengdekorasian tempat-tempat upacara, kota, dan sebagainya.

Pada masa itu pula saya berturut-turut diangkat menjadi anggota Dewan Nasional (kemudian Dewan Pertimbangan Agung Sementara), Panitia dan Anggota Juri Tugu Nasional, M.P.R.S., Front Nasional dan sebagainya.

Didalam Lembaga-lembaga Negara inilah saya antara lain mendapat kesempatan memperluas pengetahuan dan pengalaman saya mengenai pelbagai permasalahan kepemerintahan.

Saya tidak ingat lagi persis, harinya, bulannya, maupun tahunnya, tetapi kira-

Pembangunan Tugu Selamat datang di Bunderan Hotel Indonesia.

Air mancur di Jalan M.H. Thamrin dengan latar belakang pembangunan Tugu Monas, pada tahun 60-an.

kira diantara 1958-59, jauh sebelumnya pemilihan Kepala Daerah baru untuk Jakarta. Sementara saya memperlihatkan kepada Bung Karno beberapa rencana penghiasan untuk halaman Istana, sekonyong-konyong Bung Karno mengatakan demikian; "Henk, bapak ingin menempatkan Henk di Kotapraja Jakarta; Bapak ingin Henk mewakili Bapak. Bapak ingin kota ini jadi cantik. Cuma Bapak belum tahu sebagai apa dan bagaimana ..... Nanti Bapak pikir-pikir dulu ....."

Dalam Sidang ke-2 tahun 1959 Dewan Nasional pada tanggal-tanggal 11-12 dan 13 Februari 1959 yang mengambil acara "Amanat Presiden Kepada Dewan Perancang Nasional", sementara Bung Karno selaku Ketua Sidang mendengar pandangan-pandangan daripara anggota, Bung Karno menulis dua nota atau "kattebeletje" kepada saya, yang pertama ditulis dalam sidang tanggal 11, sedangkan yang kedua didalam sidang pada hari berikutnya. Isinya adalah sebagaimana termuat pada foto-copy foto-copy yang salinannya berbunyi sebagai berikut:

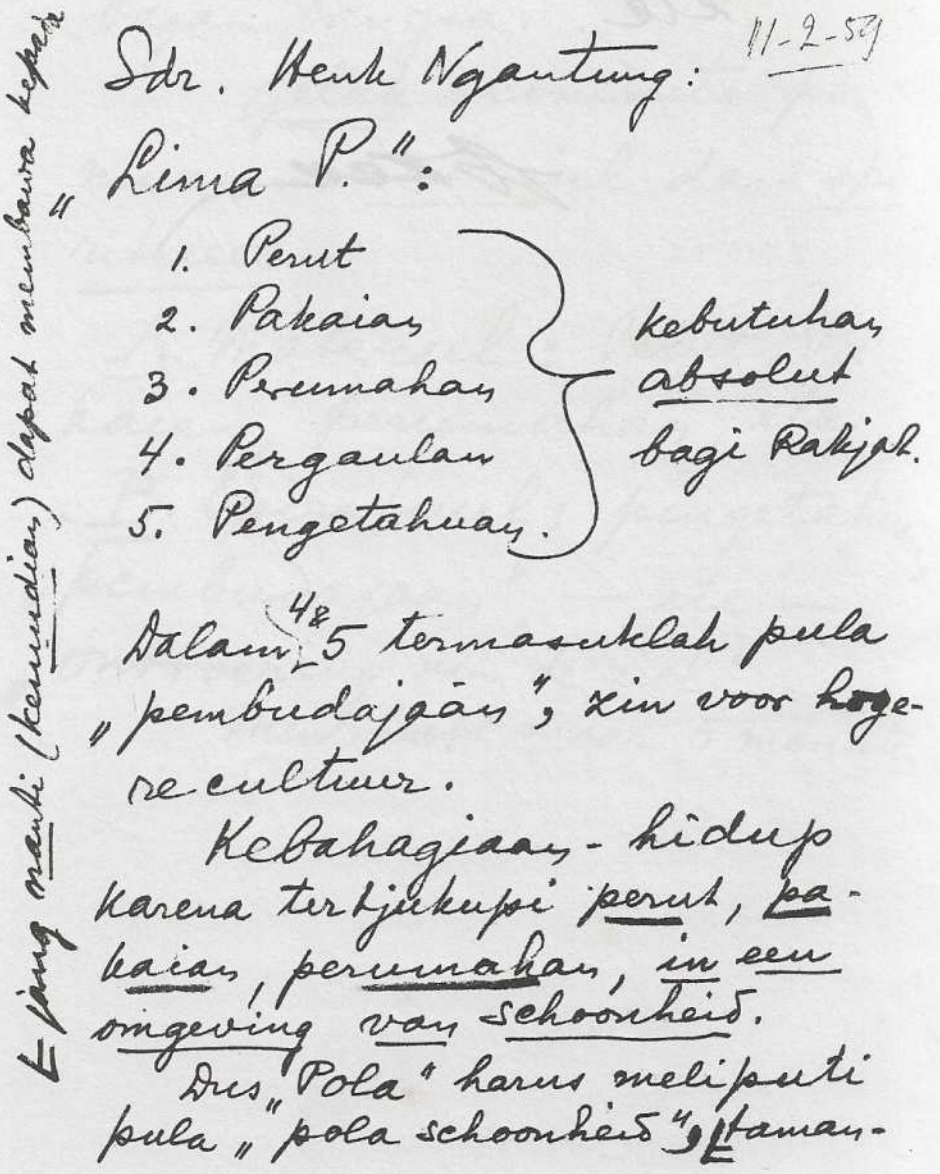

11-2-59

Sdr. Henk Ngantung:

„Lima P.":

1. Perut
2. Pakaian
3. Perumahan
4. Pergaulan
5. Pengetahuan.

} kebutuhan absolut bagi Rakjat.

Dalam 4 & 5 termasuklah pula „pembudajaan", zin voor hogere cultuur.

Kebahagiaan - hidup karena tertjukupi perut, pakaian, perumahan, in een omgeving van schoonheid.

Dus „Pola" harus meliputi pula „pola schoonheid", taman-

← jang nanti (kemudian) dapat membawa kepada

absolut - mutlak

zin voor hogere cultuur - minat untuk kebudayaan yang tinggi

in ccu oung eving van schoonheid - dalam sebuah lingkungan yang indah.

Dus - Jadi

Schoonheid - kecantikan keindahan

- taman jang indah, kota-kota
jang tjantik, desa-desa jang
menjegarkan djiwa:
Pentingnja city-plan-
ning, soal ibu-kota,
etc
etc.

City planning — perencanaan kota.

12-2-57

Tudjuan perdjoangan kita (Revolusi, Proklamasi, „perdjoangan nasional", etc) ialah kebahagiaan rakjat, — geluk sebagai individu, geluk sebagai bangsa.

Geluk - bahagia kebahagiaan

Individu — pribadi.

Geluk meminta pemuasan materieel dan spiritueel.

A. Materieel: Perut, Pakaian, perumahan, etc.

B. Spiritueel: pengetahuan, „pembudajaan", — etc —, „ontroering van de ziel".

Ontroering van de ziel - keharuan jiwa

Men heeft maar 5 minute - orang hanya perlu 5 menit.

Men heeft maar 5 minute

Wakil Gubernur Henk Ngantung bersama Gubernur Dr. Sumarno.

Upacara pelantikan Kepala Daerah Chusus Ibukota Jakarta Henk Ngantung pada tanggal 22 Oktober 1964 di Balai Kota.

Saya mengetahui tentang pengangkatan saya sebagai Wakil Kepala Daerah, langsung dari Presiden Sukarno. Dalam suatu Sidang Dewan Pertimbangan Agung, kalau tidak salah sidang-pertama Tahun 1960 yang langsung diketuai oleh Presiden, sementara sidang sedang berlangsung, saya menerima secarik kertas dari Presiden, yang berisi catatan sebagai berikut: "Saudara Henk, saya sudah mengambil keputusan, mengangkat Kol. Dr. Soemarno sebagai Kepala Daerah Jakarta dan Sdr. Henk sebagai Wakil Kepala Daerah. Harap bisa bekerjasama.

Demikianlah isi nota Presiden kepada saya dan diatas secarik kertas itu juga saya catat jawaban saya: "Bapak Presiden, Terima kasih, terserah kepada Bapak".

TANDA TANYA DAN KESIMPULAN

BERBICARA tentang pengangkatan saya sebagai Wakil, kemudian sebagai Gubernur Kdh. Khusus Ibukota Jakarta, maka secara berterus-terang, pengangkatan itu tidak disebabkan karena pencalonan atau hasil keunggulan partai/golongan yang mencalonkan saya. Bukan pula karena saya ada kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan calon-calon terdahulu dan bukan pula karena saya memenuhi syarat-syarat tehnis, dan sebagainya melainkan tidak lain, karena Bung Karno Presiden Republik Indonesia menghendakinya.

Sehubungan dengan ini, bagi saya sendiri menjadi pertanyaan ketika itu, alasan-alasan apakah yang menjadi sebab, sampai seorang seperti saya yang belum berpengalaman dan yang tidak memiliki ilmu tehnis dan kepegawaian, dan sebagainya dapat dipercayakan tugas dan tanggung jawab yang begitu berat?

Seandainya hanya untuk kepentingan soal-soal keindahan kota, apakah tidak cukup dengan kedudukan "diperbantukan" kepada Kepala Daerah saja; atau sebagai pimpinan suatu "jawatan/dinas keindahan kota" misalnya. Karena kedudukan-kedudukan semacam inilah, yang secara maksimal saya perkirakan, ketika beberapa waktu yang lalu Bung Karno menyampaikan keinginannya untuk menempatkan saya di Kotapraja Jakarta Raya.

Atau karena pertimbangan-pertimbangan politis, dengan anggapan karena saya dicalonkan oleh PKI maka secara otomatis dan organisatoris saya ada massa yang mendukung dan yang dapat saya kerahkan, sedangkan Bung Karno mengetahui betul bahwa saya bukan orang partai dan saya sendiri kendatipun pencalonan saya diprakarsai oleh PKI, saya tidak ada sesuatu commitment sedikit-pun dengannya.

Atau kemungkinan dari kegiatan-kegiatan saya sebagai anggota Dewan Nasional, Dewan Pertimbangan Agung Sementara, atau sebagai anggota panitia-panitia Negara Perayaan Peristiwa-peristiwa Nasional dan Panitia Penerimaan Kepala-kepala Negara Asing, dalam mana Bung Karno pernah dilaporkan, bahwa saya sering kedapatan bekerja di jalan sampai jauh malam menghias kota menjelang kedatangan tamu-tamu agung, atau 17 Agustus, dan sebagainya.

Atau Bung Karno menemukan hal-hal pada diri saya yang saya sendiri tidak menyadarinya? Karena sebelumnya saya dilantik, sekalipun saya sudah menyerah kepada kebijaksanaan Bung Karno, saya masih berkesempatan untuk secara terus terang menyatakan ketidak mampuan saya, tidak saja disebabkan soal-soal tehnis dan pengalaman, tetapi juga berkenaan kondisi pribadi saya sehubungan dengan soal-soal rumah tangga.

Saya berkesimpulan dan menyadari satu hal; karena pengangkatan saya merupakan suatu pengecualian, maka janganlah saya menjalankan tugas kewajiban saya sebagai orang karena tidak memenuhi syarat-syarat formil itu, lalu untuk memperoleh "konduite" yang baik, menawani pemikiran dan penindakan-penindakan saya, diatas pola-pola kebijaksanaan yang justru dengan pengecualian itu mengandung isyarat untuk tidak berbuat demikian!

Ini tentu tidak berarti bahwa pola-pola kebijaksanaan lama harus dimungkiri, sekalipun isyarat yang dimaksud, secara bathiniah sudah dibawahi pula oleh lahirnya Penetapan Presiden No.2 Tahun 1960, yang secara pokok dan sederhana dapat diterjemahkan, bahwa Jakarta sebagai Ibukota tidak mungkin dibangun dan dikem-

Tokoh-tokoh Pemerintahan Daerah Jakarta, Sudiro, Hadlir, Supangkat tampak hadir dalam acara pelantikan Gubernur Jakarta Henk Ngantung, pada tanggal 22 Oktober 1964 di Balai Kota.

Acara perkenalan Gubernur Jakarta Henk Ngantung, dimana tampak Sri Sultan Hamengku Buwono IX sedang memberikan ucapan selamat, pada tanggal 2 Nopember 1964.

bangkan menurut pola-pola pengertian, pemikiran, kebijaksanaan lama, melainkan harus ditempuh melalui pola-pola yang baru! Ini berarti perlu ditanamkan dan dipertumbuhan unsur-unsur kreativitas didalam kehidupan aparatur pemerintahan Jakarta Raya.

Mempertumbuhkan dan mengembangkan unsur-unsur kekreativitasan inilah, merupakan inti pokok sasaran saya, terutama dimana saya menjalankan dan bertugas penuh sebagai Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

PENGANGKATAN saya sebagai Wakil Kepala Daerah Kotapraja Jakarta Raya berdasarkan Keputusan Presiden No. 20 Tahun 1960, tanggal 29-1-1960, merupakan langkah pertama saya memasuki lingkungan dan tugas eksekutip Pemerintahan.

Saya memahami sepenuhnya alasan-alasan ke-harubiruan yang mengawali pencalonan dan pengangkatan saya, sehingga masuk akal kalau kehadiran saya dalam forum yang begitu penting itu, menimbulkan pelbagai tanggapan yang dilatarbelakangi penilaian-penilaian, tehnis maupun politis.

Dari semua tanggapan itu, maka tanggapan atau penilaian-penilaian politis, yang paling berkesan bagi pribadi saya, justru karena bertentangan dengan hakekat jiwa dan cita-cita saya. Karena kesediaan saya untuk menerima tugas yang mulai itu, adalah tidak lain untuk memenuhi "mission" seperti yang dibawahi uraian-uraian sebelumnya ini.

Memang masuk akal kalau ada pikiran, karena kedudukan Henk Ngantung adalah hasil pencalonan PKI, maka dengan sendirinya dan sekurang-kurangnya didalam hati kepalanya dibekali suatu panggilan, - untuk meminjam ungkapan-ungkapan ketika itu" merobah warna Jakarta menjadi merah".

Sebagai seorang Nasrani-Kristen-Protestan, waktu menghadiri Perayaan Natal di Gedung Olah Raga, Lapangan Merdeka, yang pertama semenjak saya menjadi Wakil Kepala Daerah, yang antara lain dihadiri oleh Wakil P.M. Dr. J. Leimena, Menteri Ds. Rumambi, dan lain-lain didalam sambutan resmi, saya cetuskan idee tentang pembangunan secara nasional, suatu tempat ibadah, yang sementara saya namakan, "Gereja Jaya" dalam rangka pembangunan Monumen Nasional dan sebagai salah satu ujud pembangunan wajah Ibukota Negara R.I. yang berfalsafah Pancasila.

Kemudian dengan tegas saya mendasari dan - kerangkai Lambang Daerah Khusus Ibukota Jakarta, waktu Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Dr. Soemarno, menugaskan saya mengetuai Panitia Perumus, yang terdiri dari anggota-anggota DPRD-GR DKI Jakarta dan yang pelukisnya setelah tidak berhasil melalui sayembara, saya merencanakan dan membuatnya sendiri, yang sebagian rumusannya berbunyi sebgai berikut: "Dan keseluruhan ini pula berada dalam kesatuan yang seimbang pada bentuk perisai segi-lima yang bergaris tebal emas, sebagai pernyataan pemuliaan terhadap dasar falsafah negara "Panca Sila".

MAKNA KEINDAHAN

KEGIATAN-kegiatan saya selama menjadi Wakil Kepala Daerah, berpokok pada ketentuan-ketentuan sebagai yang diatur didalam Penetapan Presiden No.2 tahun 1960, tentang Wakil Kepala Daerah.

Dengan demikian, segala kegiatan dan usaha saya adalah tindak lanjut atau dikembangkan atau dasar kebijaksanaan dan atas nama Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagai pemegang kekuasaan dan tanggung jawab di Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini.

Kedua, dalam batas kemungkinan dan kemampuan sebagai Wakil Kepala Daerah, berusaha melaksanakan harapan-harapan, baik yang diucapkan secara lisan maupun tertulis oleh Bung Karno, Presiden Republik Indonesia pada saya.

Ketiga, menghindari sedapat mungkin hal-hal yang dapat menimbulkan kesalah-fahaman dan pertentangan demi terselenggaranya kerjasama yang baik diantara Gubernur Kepala Daerah dengan Wakilnya.

Berdasarkan ketiga landasan diatas ini, saya titik beratkan kegiatan dan usaha saya, baik didalam lingkungan Pemerintahan - maupun masyarakat DKI

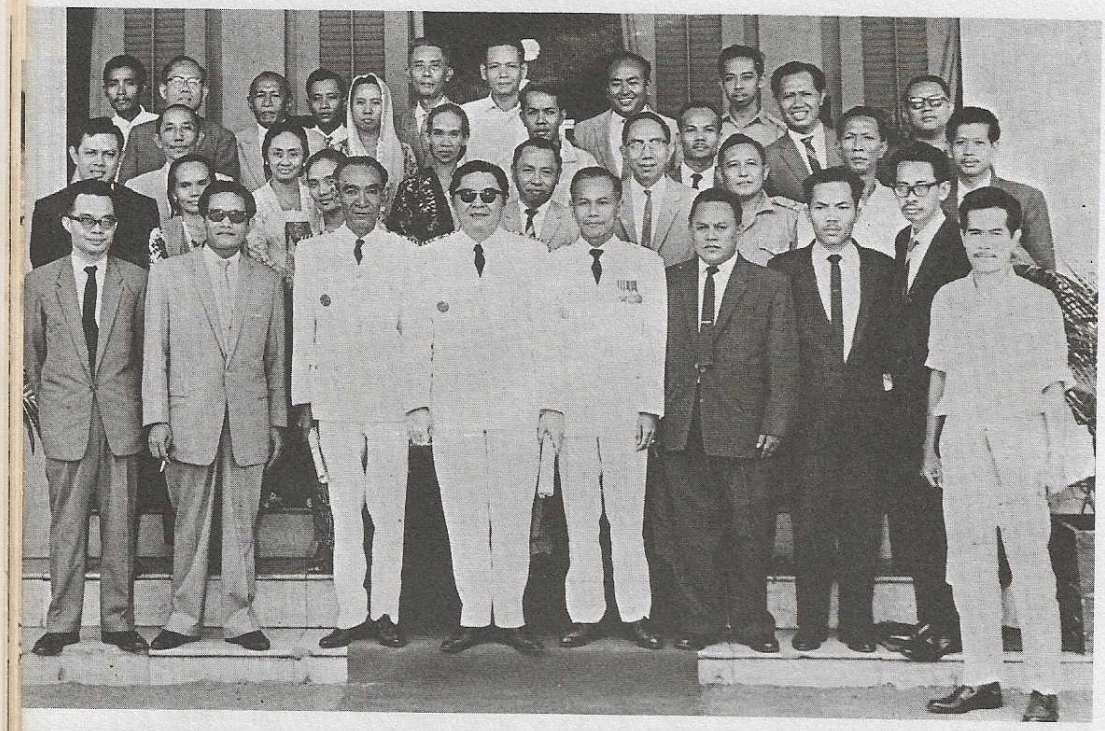

Gubernur Henk Ngantung diabadikan bersama-sama dengan Pejabat Teras Pemerintah DCI Jakarta.

pada umumnya, pengertian-pengertian dan sebagainya tentang kesamaan pentingnya pembangunan bidang mental-spirituil dengan pembangunan materiil, khususnya peranan dan makna segi-segi keindahan, monumen-monumen, taman-taman, air-mancur, dan sebagainya, didalam kehidupan perkotaan.

. Membangun dan mengembangkan, sampai tercapainya pengertian dan kebutuhan wajar akan aspek-aspek kehidupan perkotaan yang dimaksud itu, pada tingkat permulaan memang mengalami pelbagai rintangan dan tantangan, apalagi kalau diingat bahwa modal dan sarana-sarana untuk keperluan itu belum tersedia. Sedangkan keadaan Sospolek (Sosial Politik Ekonomi) masyarakat ketika itu tidak begitu menguntungkan, sehingga yang ada, adalah kritik-kritik.

Berkat pengertian dan kerjasama yang baik, diantara Lembaga Eksekutip dan Legislatip Pemerintah - serta masyarakat Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada umumnya, terselenggara secara aman dan tenteram kegiatan-kegiatan pembangunan yang sebelumnya dipandang sebagai penghamburan uang atau belum waktunya, seperti Tugu Nasional, Patung-patung Selamat Datang, — Pembebasan Irian Barat, Air Mancur, Taman-taman, dan sebagainya.

Usaha pertama dalam rangka keindahan kota, adalah "kuali-kuali" berisikan tanaman dan bunga di sebagian Jalan Husni Thamrin, Pot-pot kembang yang berukuran besar ketika itu, jangankan di Jakarta, diseluruh Indonesiapun belum ada yang membikin dan menjualnya. Maka harus dicari akal dan kuali-kuali yang biasanya digunakan untuk memasak sop, menjadi pilihan dan dipakai sebagai percobaan. Berkat sumbangan-sumbangan masyarakat, maka diboronglah kuali-kuali yang terdapat dipasar-pasar kembang yang besar oleh pabrik-pabrik teraso di Jakarta, dengan maksud mendapat pesanan dari Pemerintah D.K.I. Jakarta.

Dari daerah-daerah diluar Ibukota datang utusan-utusan yang minta perantaraan Pemerintah DKI untuk mendapatkan kuali atau bak-bak kembang yang besar itu, suatu pertanda bahwa, usaha DKI untuk mempercantik kota, bagaimana sederhana pun permulaannya, merangsang pula daerah-daerah lain di bidang ini.

Ketika itu Pemerintah DKI belum memiliki "dapur tanam-tanaman dan kembang-kembang" seperti yang dimiliki Dinas Pertamanan-, demikian pula ahli-ahli pertamanan, seperti ahli-ahli lulusan Akademi Pertamanan sekarang, karena kedua instansi itu baru dalam taraf persiapan pendiriannya. Tidak jarang dihari-hari pertama, saya dengan beberapa petugas DPU (Dinas Pekerjaan Umum) turun ke jalan, memilih dan membeli tanam-tanaman dari penjual-penjual kembang dan ikut menyusunnya dijalan-jalan.

DIHARI-HARI pertama belum tersedianya biaya dan sarana, usaha-usaha memperindah kota, dibarengi pula dengan kekhawatiran dan tandatanya; apakah rakyat biasa dapat menghargai dan tidak merusak-rusak usaha itu, mengingat keadaan sosial-ekonomi mereka yang lebih ingin melihat nasi yang dapat dimakan daripada pot-pot berisikan kembang-kembangan dijalan-jalan? Ternyata kekhawatiran yang berprasangka itu tidak beralasan sama sekali, bahkan suatu bukti lagi, bahwa rakyat biasapun pada dasarnya peka dan butuh hal-hal yang indah itu.

Melalui penerangan-penerangan dan usaha-usaha sederhana itu, lambat laun bangkitlah otoaktivitas masyarakat dalam bentuk "pilot-proyek - pilot-proyek". seolah-olah ada semacam perlombaan yang kontinu dan yang memuncak disaat-saat merayakan atau memperingati peristiwa-peristiwa tertentu di Ibukota. Norma-norma atau pengertian akan keindahan adakalanya sangat primitip, tergantung dari standing lingkungan yang terdiri dari daerah pertokoan sampai ke RW dan RT dan sebagainya. Yang terpenting adalah mulai bangkit kesadaran, pengertian dan kebutuhan akan hal-hal keindahan sebagai wargakota Jakarta.

Lain daripada itu, dikembangkan pula pengertian-pengertian yang lebih terarah dan bermakna, tentang kedudukan dan funksi penyelenggaraan peristiwa-peristiwa penting, bahwa "kemeriahan" sesungguhnya bukan sesuatu yang berkelebihan, diukur dari segi keuangan dan pengarahan tenaga, kalau kemeriahan itu didasarkan suatu rencana untuk mencapai sesuatu target suasana tertentu, yang menunjang

Presiden Sukarno didampingi Gubernur Henk Ngantung mengadakan peninjauan ke Proyek Ancol pada tahun 1964.

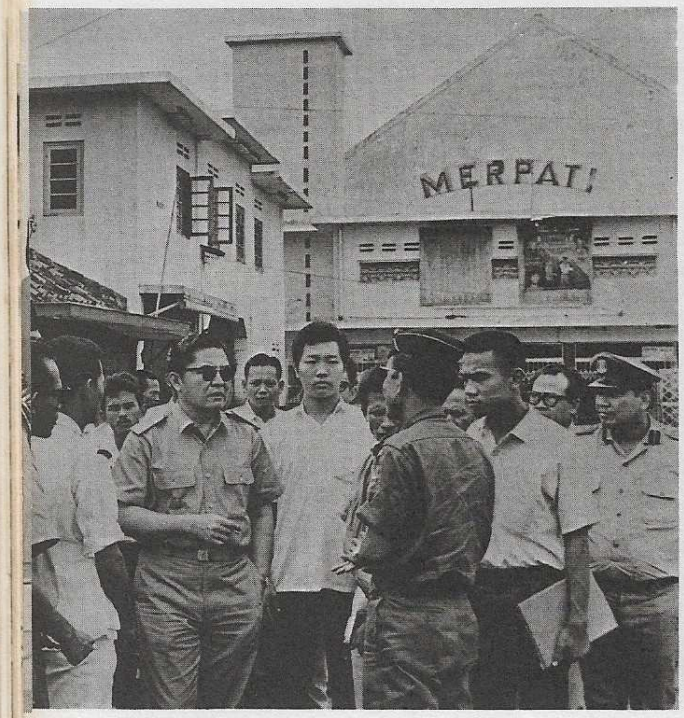

suatu kebijaksanaan atau pembangunan pemerintah, sekurang-kurangnya sebagai suatu bentuk mental investment.

Mungkin cerita tentang "kuali" di Jalan Thamrin ini tidak begitu mengesankan dan se-konkrit seperti misalnya suatu cerita tentang pembangunan pencakar langit pertama dikota Jakarta. Tetapi yang terkait dengan kuali-kuali di Jalan Thamrin dapat diartikan sebagai permulaan tumbuhnya kesadaran dan pengertian serta kebutuhan masyarakat akan keindahan. Pembawaan mental ini memang tidak serempak nampak dan dapat dipegang, seperti tiang panjang suatu bangunan, tetapi secara langsung dan tidak langsung, merupakan suatu titik tolak masyarakat Ibukota menuju dan mempersiapkan diri sebagai warga kota metropolitan Jakarta kelak.

Air Mancur pertama yang besar di Ibukota, yang terletak di permulaan Jalan Husni Thamrin, adalah hasil kerjasama terutama dengan Bank.

Selama saya menjadi Wakil-, dibawah pimpinan dan bimbingan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Dr. Soemarno Sosroatmodjo, saya memperoleh banyak pelajaran dan pengalaman, sekalipun ada saat-saat dimana saya merasa ada hal-hal yang tertutup bagi saya.

Ini dapat dimengerti, karena saya adalah seorang Wakil, dan disamping itu banyak faktor-faktor politis psikologis berperan sebagai penyebabnya. Maklumlah, kalau diluar, hidup dan dikembangkan suatu mythe, bahwa Gubernur-nya adalah seorang militer dan wakilnya seorang PKI ..... .

Namun didasarkan atas kesadaran dan nilai-nilai kemanusiaan, kedudukan dan kelebihan seorang bapak dan kepatuhan dan kekurangan seorang anak, maka terselenggara dan terpeliharalah suatu kerjasama dan pengertian yang baik dan harmonis, yang menurut Kepala Negara ketika itu, di tanggapinya sebagai yang terbaik di seluruh Indonesia. Tanggapan ini diucapkan oleh Presiden Sukarno, pada suatu jamuan siang bersama, diantara Anggota-anggota Dewan Pertimbangan Agung Sementara, (dimana saya adalah salah satu anggotanya) di Istana Merdeka, selesainya suatu Sidang, sehubungan dengan terjadinya "bentrokan-bentrokan" diantara Gubernur dan Wakilnya di beberapa daerah.

PERMULAAN YANG ANEH.

PROSES kepangkatan saya sebagai Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, adalah sesuai dengan keputusan rapat-paripurna DPRD—GR Jaya, tanggal 18 September 1964 yang telah menetapkan sebagai calon-calon Gubernur Kdh. DKI Jakarta, Sdr. Henk Ngantung, Sdr. Karna Radjasa dan Sdr. Satoto Hoepoedio. Daftar calon-calon ini diserahkan kepada Presiden (ketika itu sedang melawat keluar negeri) untuk menunjuk/mengangkat seorang Gubernur Kdh. Khusus Ibukota Jakarta, sesuai dengan wewenangnya.

Pada suatu hari, bulan September atau Oktober 1964 - kami berdua, Henk Ngantung dan Sdr. Dr. Soewondo di panggil, untuk menghadap Pejabat Presiden Dr. J. Leimena, yang berkantor dirumahnya, Jalan Cut Mutiah, (Presiden Soekarno ketika itu masih berada di Cairo, Luar Negeri). Kepada kami berdua diberitahukan, bahwa sesuai dengan kawat yang dikirim oleh Sekretaris Presiden (dari Cairo), maka Sdr. Henk Ngantung telah diangkat menjadi Gubernur Kepala Daerah - dan Sdr. Soewondo, menjadi Wakil Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu kota Jakarta. Sementara pertemuan dan pemberitahuan ini berlangsung, mendadak datang utusan dari kantor Wakil Perdana Menteri I (WAPERDAM-I) dengan berita, bahwa berita-berita tentang pengangkatan kami berdua masih perlu di confirmeer lagi ..... dan sementara menunggu berita selanjutnya, supaya jangan dahulu diadakan pengumuman-pengumuman.

Beberapa hari kemudian saya menerima panggilan lagi dari Pejabat Presiden dan kali ini bersama-sama dengan Sdr. Dr. Soewondo dan Sdr. Satoto Hoepoedio, yang berkelanjutan dengan dikeluarkannya Pengumuman, tertanggal 17 Oktober 1964, ditanda tangani oleh Pejabat Presiden Dr. J. Leimena, berisikan sebagai berikut:

Peninjauan kerja Gubernur Henk Ngantung ke daerah Mangga Besar dan Grogol pada tahun 1964.

Pd. Presiden Republik Indonesia mengumumkan bahwa oleh P.J.M. Presiden Republik Indonesia berhubung dengan pengangkatan Mayor Jenderal TNI Dr. Soemarno, Gubernur/Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta menjadi Menteri Dalam Negeri, telah diangkat:

1.	Sdr. HENK NGANTUNG,	Wakil Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, menjadi Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2.	Sdr. Dr. SOEWONDO,	Kepala Jawatan Kesehatan Kota Daerah Khusus Ibukota Jakarta, menjadi Wakil Gubernur I D.K.I. Jakarta;
3.	Sdr. SATOTO HOEPOEDIO,	Anggota DPRD-GR Daerah Khusus Ibukota Jakarta, menjadi Wakil Gubernur II D.K.I. Jakarta.

Surat Pengumuman ini kemudian dituangkan dalam suatu Surat Keputusan; Keputusan Presiden Republik Indonesia No.217 Tahun 1964. Tertanggal 17 Oktober 1964 yang ditanda-tangani oleh Pejabat Presiden Republik Indonesia: Dr. J. Leimena.

"MANY REVOLUTIONS IN ONE REVOLUTION"

KONDISI keadaan & tantangan-tantangan dimana saja menjabat sebagai Gubernur Kdh. Ibukota Jakarta, dalam garis besarnya dapat dilukiskan sebagai berikut: Akibat memuncaknya "politik konfrontasi" Keluarnya Republik Indonesia dari P.B.B. "Berdikari", "Gontok-gontokan antar golongan", dan sebagainya maka keadaan dan kondisi disegenap front kehidupan maupun penghidupan, mengalami pelbagai tantangan dan kegoncangan yang cukup merumitkan.

Setiap usaha untuk mengatasi suatu masalah, masalahnya tidak makin berkurang, melainkan disusuli dengan masalah-masalah lain, laksana sebuah balon yang mengempis dimana dipencet, tetapi melambung ditempat lain, Keadaan perkembangan itu disebut sebagai "so many revolution in one revolution" yang harus dihadapi dan diatasi secara "simultan".

Hari ini, demontrasi dan delegasi datang menghadap; menuntut harga beras diturunkan dan para penyelanggara ditindak. Besok, beras menghilang ..... Delegasi menghadap, "harga berapa saja, asal beras ada!"

Hari ini, pengangkutan umum lumpuh, spareparts tidak ada atau terlalu mahal .. Besok ada perintah; requireer truck-truck swasta untuk mengangkut sampah, atau

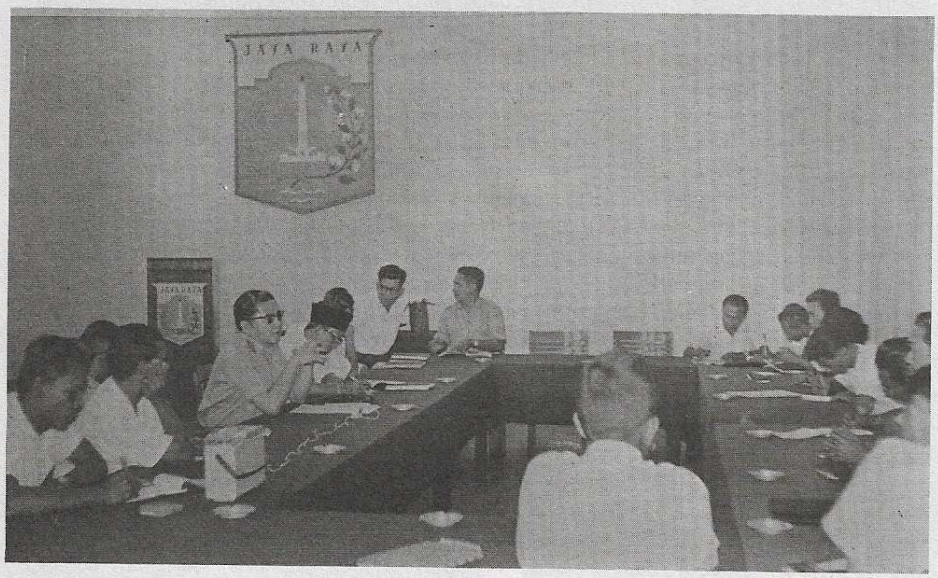

Suasana demonstrasi pengemudi bis ketika Konperensi Pers berlangsung yang dipimpin oleh Gubernur Henk Ngantung di Balai Kota pada bulan Desember 1964.

ada permintaan untuk menggunakan pengangkutan umum untuk mengangkut massa menghadiri rapat-umum di Senayan ..... .

Hari ini besi beton tidak ada, pembangunan terhenti. Besok besi beton ada, semen tidak ada. Delegasi lain lagi menghadap; menuntut bubar organisasi ini organisasi itu; retool orang ini, retool orang itu, karena kontra revolusioner.

Hari ini Jakarta kebanjiran, jalan-jalan rusak parah, sampah membumbung, para gelandangan tidak ketinggalan. Besok Ibukota Jakarta harus berdandan rapih, indah, cantik dan bersenyum..... karena menjadi tuan-rumah dan penyelenggara Dasawarsa A-A yang dihadiri oleh Kepala-Kepala Negara dan Pemerintahan pelbagai Negara, dan selanjutnya dan selanjutnya dan selanjutnya.

MASALAH-masalah yang sudah berat dan kompleks itu, yang seharusnya dengan Penpres No. 2/1961, sesuai dengan apa yang tersebut dan tersirat didalam considerasinya, banyak dapat meringankan dan melancarkan tugas-tugas Ibukota, justru adakalanya lebih merumitkan .....!.

Pokok penyebab adalah, belum adanya tindak lanjut yang lebih tegas dan terperinci, berupa peraturan-pelaksanaan daripada Penpres No.2/1961 itu, sehingga pelaksanaannya ketika itu lebih banyak bersifat "santai" atau "relasi" yang dimungkinkan karena domisili kedudukan yang bersangkutan berada "nextdoor". Untuk berterus terang, cara-cara ini memang banyak menguntungkan bagi Gubernur DKI, karena banyak masalah-masalah pembangunan, dan sebagainya tanpa melalui prosedure dan formalitet-formalitet yang belit, dapat diperlancar pelaksanaannya. Tetapi sebaliknya, sementara kehadiran Gubernur sangat diperlukan menghadapi suatu masalah akut daerahnya, sekonyong-konyong menerima tilpon, berisikan perintah untuk segera menghadap Presiden ..... karena suatu instansi menebang pohon yang terletak di jalan yang beliau baru saja lalui ..... (padahal instansi yang dimaksud sudah dilarang sebelumnya untuk jangan meneruskan niatnya). Kisah ini adalah sekedar sekelumit kecil penggambaran mengenai "sifat relasi" yang dimaksud.

Sebaliknya belum adanya peraturan pelaksanaan Penpres 2/1961 itu, pelaksanaan bagi instansi-instansi pusat, sebagai pembantu Presiden, merupakan peluang yang memungkinkan dikembangkan tafsiran-tafsiran, yang seharusnya dituangkan dalam ketentuan-ketentuan tertulis maupun tidak tertulis, yang bertendensi semacam "gontok-gontokan" dalam saling merebut pengaruh terhadap D.K.I.

Tegasnya Menteri Dalam Negeri dengan tidak mengurangi arti Penpres 2/1961, merasa masih berhak langsung memberi petunjuk, pimpinan maupun nasehat kepada Pemerintah D.K.I.

Sedangkan dilain pihak, Wakil Perdana Menteri I, menganggap sebaliknya, yaitu bahwa Pemerintah DKI berdasarkan Penpres 2/1961 tidak ada hubungannya apa-apa lagi dengan Menteri Dalam Negeri, bahkan mulai saat itu, agar kesibukan-kesibukan Presiden dapat diperingankan, maka untuk lebih diperlancar pembangunan, dan sebagainya Ibukota, Pemerintah DKI berhubungan langsung dengan Waperdam I. Tafsiran-tafsiran yang saling bertentangan itu, yang tidak makin memperlancar dan memperkokoh tugas/wewenang Gubernur DKI, tetapi secara langsung dan tidak langsung, berkelanjutan negatip didalam tubuh aparatur Pemerintahan DKI sendiri yang diukur dari kondisi-riecl toh sudah tidak mampu menghadapi tugas-tugas "simultan" yang dibebankan padanya. Maka dari Gubernur Kdh. DKI diperlukan pula kemahiran seorang akrobat untuk menjaga keseimbangan dan integritas atasan, yang dalam manifestasinya, memang tidak segera nampak, tetapi merupakan - atau menimbulkan masalah-masalah tambahan.

Akibat "permainan akrobatik" yang bertujuan menghindari konfrontasi didalam tubuh sendiri, lahirlah suatu keputusan baru, yaitu; Keputusan Presiden No. 32, tanggal 15 Pebruari 1965, tentang pembentukan suatu "badan pembantu Presidium Khusus Bidang Pemerintahan Umum dan Urusan Ibukota, yang dipimpin oleh Dr. P.M. Tangkilisan" (Gubernur dpb.).

Sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, ketika Sdr. Dr. P.M. Tangkilisan melaporkannya kepada saya, saya menyatakan secara lisan kepadanya, kalau begini caranya: saya selaku Gubernur Kdh. tegas menolak, saya tidak begitu bodoh ..... ini

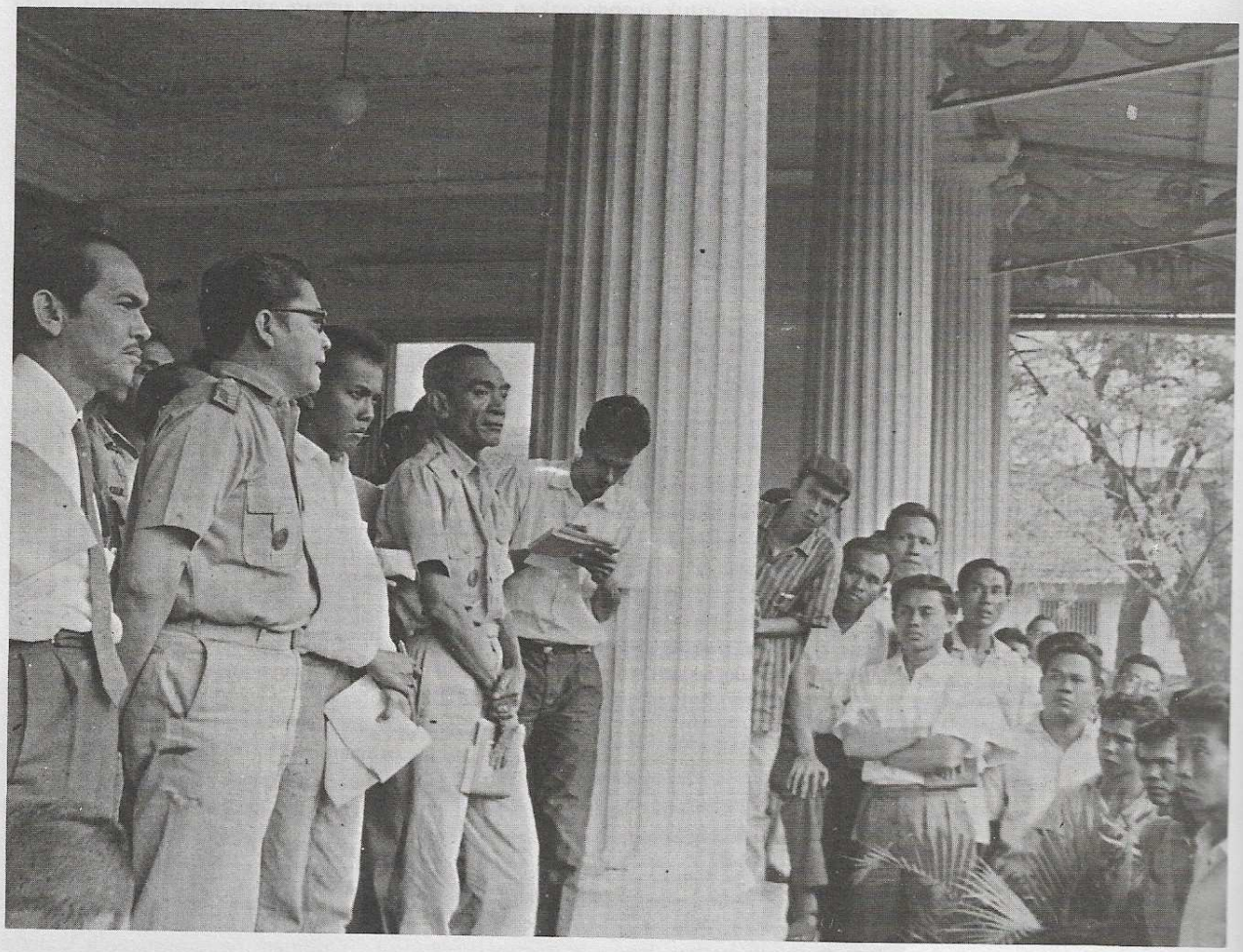

bertentangan dengan Penpress 2 dan ini berarti DKI sekarang bertambah satu pejabat lagi yaitu seorang "Super Gubernur".....?

Yang anehnya, keputusan ini baru disampaikan - atau diketahui saya cukup lama sesudahnya dan saya tidak ada kesempatan lagi untuk mencari kejernihan mengenai alasan, maksud dan kebenaran akan keputusan itu, sampai pemberhentian saya sebagai Gubernur Kdh. Jakarta.

Nah, beginilah kira-kira lukisan keadaan, suasana dan kondisi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang saya hadapi ketika itu.

Saya tidak saja berhadapan dengan "masalah-masalah visible", tetapi juga dengan "masalah-masalah unvisible" yang bagaimana pintar pun saya, terus terang tidak mungkin menghasilkan sesuatu yang berarti, terkecuali meminjam/menggunakan (manyalah gunakan) nama Presiden, Mandataris, Pimpinan Besar Revolusi dan sebagainya.

PEMBANGUNAN DISATU TANGAN.

DIDALAM suasana dan keadaan, dimana segala sesuatu diperpolitikan, maka praktis tidak ada gagasan-gagasan maupun pembangunan-pembangunan yang berarti, yang bisa terlaksana secara baik dan berhasil, tanpa yang dicetuskan, direstui, atau ditangani langsung oleh Presiden sendiri.

Pembangunan yang ditangani, atau untuk gampangnya saya sebut melalui "prosedure khusus" ini, memang menghasilkan prestasi-prestasi nyata, yang lepas daripada setuju - tidaknya keadaan maupun alasan-alasan politik, diukur dari tingkat keadaan ruang dan waktu ketika itu, secara jujur dan objectif, tidak bisa dimungkiri

oleh - dan didalam sejarah, peranan Bung Karno Presiden R.I. yang pertama,sebagai pendobrak perintang-perintang pembangunan dan terhadap kekerdilan akan pengertian dan konsep-konsep pembangunan ketika itu.

Sejenak merenungkan kembali makna dan peranan pembangunanmasa itu,,yang kini dinamakan "Proyek-proyek Mercusuar", memang benar, bahwa dilihat dari sudut utilitas praktis, seperti tempat tinggal, beras, sekolah dan sebagainya yang masih jauh dari tujuan. Tetapi sebagai dasar dan titik-tolak dimulainya pembangunan besar-besaran, khusus bagi kota Jakarta, yang di saat-saat ini, merayakan Hari Ulang Tahun-nya ke-450 sebagai pertanda pemuliaan akan sejarah, maka dari sudut kesadaran akan sejarah itu, permulaan pembangunan yang dirintis oleh Bung Karno almarhum di Ibukota ini, merupakan titik pisah dan titik datangnya zaman, yaitu titik berakhirnya zaman perjuangan politik dan titik datangnya zaman pembangunan bagi Bangsa dan Rakyat Indonesia.

Tetapi sebaliknya, dibalik pembangunan yang berwajah megah dan prabawa itu, karena sebagian besar dibangun melalui "prosedure khusus", suatu produk akibat keadaan dan kondisi masa itu, secara sadar atau tidak, lambat laun mengakibatkan pula makin terdesaknya daya-prakarsa dan kemampuan para penanggung jawab dan elemen-elemen kreatip lainnya dikalangan masyarakat.

Bahkan melalui prosedure-khusus itu disatu pihak, bagi elemen-elemen tertentu dijadikan peluang untuk memaksakan atau mengelegalisasikan gagasan-gagasan atau rencana-rencana yang bersemboyankan "pembangunan" dsb. tidak lain, untuk menutup-nutupi maksud-maksud yang sebenarnya bersumber pada ambisi-ambisi perorangan/golongan dan interesse tertentu lainnya. Sementara dipihak lain timbul semacam kemasabodohan atau semangat "pasrah", gejala-gejala mana tidak subur bagi pengembangan daya-kreativitas dan inventief, unsur-unsur kemampuan mana justru sangat diperlukan dalam menghadapi "pembantingan stir" dan "berdiri diatas kaki sendiri", ketika itu.

Lepas daripada setuju atau tidak - alasan dan latar-latar belakang politik,yang menyebabkan "banting stir" dan "berdiri diatas kaki sendiri", secara objektip ketentuan-ketentuan itu, sesungguhnya mengandung peluang-peluang baik untuk mempertumbuhkan dan mengembangkan daya-kreativitas dan inventief masyarakat Indonesia di segala bidang.

Gubernur Henk Ngantung sedang menyampaikan amanatnya yang disaksikan oleh para Wartawan didepan Balai Kota pada tahun 1964.

Hasil cipta dan penemuan-penemuan baru bangsa, yang dicetuskan secara individu, dipadukan secara harmonis dengan kemampuan-kemampuan fisik yang dimungkinkan oleh sistim "kegotong-royongan" ciri alamiah dan budaya kepribadian bangsa, sungguh mengandung kemungkinan-kemungkinan ..... sekitarnya hal-hal ini disadari bersama dan kondisi keadaan ketika itu tidak bertitik berat pada agitasi tetapi prestasi!

SEDIKIT PERATURAN BANYAK KEBIJAKSANAAN.

MASA jabatan atau kesempatan kerja, 22 Oktober 1964 - 15 Juli 1965 (belum dikurangi beberapa minggu/bulan saya dirawat dirumah sakit, mengikuti rombongan Presiden ke luar negeri, dll. dll.) sesungguhnya terlalu singkat.

Terlalu singkat, dalam arti untuk menghasilkan sesuatu, tetapi terlalu lama, sebagai "Gubernur atas kertas"! Karena bagaimana beratpun tugas dan sekaligus kesehatan mata saya agak terganggu, saya sungguh-sungguh bertekad untuk membuktikan, bahwa pengangkatan "seorang seniman" sebagai Gubernur Kepala Daerah, bukan suatu "dongengan 1001 malam", bukan pula semacam impian perlente Bung Karno, Presiden Republik Indonesia.

Kebijaksanaan: Kurang lebih sebulan setelah saya dilantik sebagai Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, kepada DPRD-GR DKI Jakarta telah saya sampaikan pokok-pokok kebijaksanaan dan program-kerja Pemerintah DKI, yang telah disetujui, disertai beberapa catatan tambahan, yang perincian pelaksanaannya diserahkan kembali kepada Gubernur Kepala Daerah.

Dalam rangka dan suasana usaha menyelesaikan pemerincian pelaksanaan yang dimaksud, dengan memperhitungkan situasi keadaan dalam tingkat-tingkat perkembangannya, yang mengakibatkan makin meningkatnya permasalahan, sebagaimana saya lukiskan, sebelumnya, maka secara bertahap saya usahakan menanganinya sebagai berikut :

Secara global, membandingkan keadaan dan kondisi aparatur Pemerintah DKI dengan permasalahan-permasalahan, baik sifat-maupun banyaknya, yang makin kompleks dan membumbung, secara nyata, menempatkan aparat pemerintah pada suatu po posisi yang "diatur" atau "dipimpin", yang seharusnya berada pada posisi "mengatur" dan "memimpin"!

Kedua; menyadari dan mengakui (kedalam) akan kelemahan dan posisi tersebut diatas, maka sesuai dengan posisi itu, sedapat mungkin dalam pengaturan dan penindakan, dihindari sikap dan sifat "menentang", kekerasan maupun paksaan", tetapi ditempuh kebijaksanaan atas prinsip "kerja-sama".

Dan didalam usaha penyusunan aparatus pemerintahan yang lebih sesuai demikian juga dalam penyusunan peraturan-peraturan maupun penindakan-penindakan selanjutnya adalah prinsip, ditangani secara kreatip dan realistis, sesuai dengan kesimpulan dan tekad disaat-saat sebelumnya saya diangkat menjadi Wakil Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Mengenai pemecahan pokok pertama, yaitu sehubungan dengan posisi aparatur pemerintahan DKI yang sudah tidak sesuai, saya berusaha mengatasinya melalui dua pemikiran dan jalan:

Pertama; sambil berusaha dan menunggu dikeluarkannya peraturan pelaksana-

an Penetapan Presiden No. 2 Th. 1961, saya bentuk suatu panitia-khusus dengan tugas, mengkonsepieer dan merumuskan suatu bentuk aparatur pemerintahan DKI Jakarta yang lebih sesuai dan effektip untuk menghadapi tingkat-tingkat perkembangan dewasa itu. Dan untuk dapat menarik manfaat dan memberi kesempatan berkembang dan tertampungnya bakat dan keahlian di bidang kepemerintahan, maka saya minta Saudara Dr. P.M. Tangkilisan, Gubernur diperbantukan kepada Pemerintah DKI Jakarta, didampingi Sdr. Satoto Hoepoedio, Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk memimpin panitia yang dimaksud.

Kedua; mengingat bahwa pelaksanaan tersusunnya aparatur baru atau disempurnakan masih memerlukan waktu, sedangkan kegiatan-kegiatan pembangunan di Daerah Ibukota dengan segala permasalahan-permasalahannya, yang masing-masing mempunyai status, policy dan authoritynya sendiri-sendiri berjalan terus, terutama dalam pengerahan funds & forces, khususnya pengerahan sumber-sumber keuangan sehingga adakalanya menjurus saling rebut-merebut, yang pada intinya berasal dari satu sumber dan diperuntukan satu tujuan, yaitu; dari - dan untuk (pembangunan) Daerah Khusus Ibukota Jakarta:

Maka untuk tercapainya suatu kesatuan gerak yang lebih effektip, terkoordinasi dan terarah, sekaligus sebagai suatu sandaran utama bagi Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang ketika itu saya sebutkan sebagai penyusun "strategi dan taktik" pembangunan daerah Ibukota dan yang untuk sementara saya namakan "Central Authority".

Badan ini dibentuk dan terdiri, selainnya unsur-unsur secara ex-officio, terutama terdiri dari ahli-ahli khusus dengan mengutamakan kemampuan kreatip dan prestasi.

Badan yang hampir serupa, "Bakopda" (Badan Koordinasi Pembangunan Daerah) baik dalam tugas-tugas maupun formasi dan personalia dilaksanakan secara "ex-officio" saya pandang untuk kepentingan dan permasalahan Ibukota kurang memadai dan "kreatip".

Sehubungan dengan ini saya menggaris bawahi (ekstra tebal) penilaian Pusat Penelitian Masalah Perkotaan terhadap kepemimpinan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, H. Ali Sadikin bahwa beliau sering berbuat "inkonvensionil".

Suasana Jalan Thamrin dengan kualitas tamannya dari arah Selatan ke Utara pada tahun 60-an.

Bukannya saya mau menyamakan diri dan-kemampuan saya dengan pribadi H. Ali Sadikin, tetapi adalah tepat dan benar, bahwa untuk menghadapi masalah-masalah dan berhasil mengembangkan Ibukota Jakarta, dalam banyak hal tidak mungkin ditempuh melalui pola-pola "konvensionil", tetapi harus secara "inkonvensionil". Hal ini adalah wajar sewajarnya, kalau kita mengerti bahwa untuk menciptakan hal-hal yang baru, harus pula menciptakan pengaturan dan sarana-sarana baru pula, kalau perlu dengan mengorbankan conduite seorang ambtenar yang baik.

Salah satu unsur yang perlu dimiliki untuk melahirkan suatu "konvensi baru" secara inkonvensionil, adalah kreativitas!

Dan syarat-syarat tercapainya itu, diperlukan waktu dan kecepatan untuk processing dan pemetaan, karena memerlukan penelitian, pengetahuan tentang sebab dan akibat dan sebagainya dan sementara dalam masa processing itu — yang saya samakan dengan : "selama kita dalam kamar mandi, atau sedang berdandan didalam kamar, janganlah ada yang mengintip-intip dan tegor, he, kamu kok belum pakai celana atau sisir rambutnya, dan sebagainya. Tentu saja kita belum siap! Tunggulah sampai kita keluar dari kamar! Baru boleh tegor!

Analoog ini saya artikan perlbagai bentuk pencampuran tangan atau pengaturan dan pemindahan yang kurang realistis, sehingga lebih banyak mengacaukan dan mengakibatkan pula kegiatan dan usaha untuk menemukan dan menghasilkan hal-hal yang baru, menjadi ejekan, dan tertawaan .....

Liku-liku Yang Menambah Persoalan. Hasil panitia pembaruan struktur atau penyempurnaan aparatuur pemerintahan DKI Jakarta, yang membawahi harapan saya akan berkenalan dengan suatu konsep pemikiran seorang akhli, ternyata hanya merupakan

rumusan pembagian bidang dan tugas pimpinan baru Pemerintah DKI Jakarta yang mengecewakan saya dan saya tangguhkan penyelesaiannya. Beberapa saat kemudian saya disodorkan ini keputusan Presiden No. 32/tanggal 15 Pebruari 1965 sebagaimana saya tlah uraikan sebelumnya.

Sehubungan dengan perkembangan baru ini, dan dikeluarkannya keputusan yang dimaksud, saya merasa ada permainan-permainan yang tidak saja sudah mendangkal pada kepentingan atau ambisi-ambisi perorangan, tetapi yang akan menjurus ke kacauan dan kehancuran aparatur dan kepemimpinan Pemerintah DKI Jakarta.

Sayang tidak ada yang menjadi saksi, — karena Saudara Dr. P.T. Tangkilisan sudah almarhum, ketika saya mengundang beliau ke tempat kediaman resmi Gubernur DKI Jakarta di Taman Suropati No. 7, sehari sebelumnya beliau berkantor di Presidium, maka pada kesempatan pamitan ini, setelah beliau menjelaskan bahwa keputusan ydm adalah untuk membantu Gubernur Kdh. DKI Jakarta. maka secara terus terang saya berkata : lepas daripada persoalan keputusan itu sendiri, saya tidak yakin dan percaya bahwa baru itu (Pembantu Presidium Khusus Bidang Pemerintahan Umum dan Urusan Ibukota) yang dipimpin oleh Saudara betul-betul akan membantu Pemerintah DKI Jakarta.

Saya akan percaya, kalau yang menjadi Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, bukan Henk Ngantung!
Atau yang memimpin badan itu bukan Saudara! Bagaimana saya bisa percaya bahwa Saudara betul-betul mau bantu aparat yang saya pimpin sekarang yang mana saya tahu bahwa dari permulaan Saudara menentang saya! Maaf, tidak mungkin!

Mengenai pembentukan Central Authority yang dimaksud, selainnya beliau tersusun struktuur organisasinya, penyusunan mana saya rencanakan diselenggarakan atau dihidupkan serentak bersama dengan ahli-ahli khusus yang sementara saya masih usahakan, ternyata untuk menemukan ahli-ahli inilah saya terbentur pada "faktor politik" yang ketika itu sulit teratasi, atau dengan mengorbankan "kemurnian keahlian dan kekreativitasan" badan yang dimaksud itu beliau sampai terbentuk didahului dengan pemberhentian saya sebagai Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Makin Sederhana, Makin Sulit. Mengenai kebijaksanaan kedua (kedalam) saya bertolak dari perumpamaan; (selama) mana kala saya dan tidak mampu, janganlah saya bersikap sok, menantang dan menambah musuh, yang saya artikan; selama aparatuur belum mampu dan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan, janganlah pemerintah membuat/menambah peraturan-peraturan dan adakan pemindahan-pemindahan yang secara rieel tidak dapat dilaksanakan sehingga mengakibatkan menambah atau melahirkan (anak-anak) persoalan baru.

Karenanya adalah bijaksana menjauhkan sikap "menentang dan memaksa", tetapi berprinsip "bekerjasama".

Saya akui, bahwa sikap demikian sebagai seorang Gubernur, memberi kesan "ragu dan kurang tegas"!

Sehubungan dengan pendapat dan kebijaksanaan diatas, antara lain dapat saya kemukakan, bahwa (kecuali ada perintah dari atasan) saya pada prinsipnya tidak begitu setuju dan yakin, mengatasi suatu masalah atau kekurangan, dengan jalan yang berbentuk; "komando" atau "crashprogram". Karena cara pengaturan dan penindakan serupa ini, (dalam pengertian dan peristilahan saya) saya anggap tidak kreatip.

Mungkin melalui cara ini, dapat "menyelamatkan" prestise penanggung jawab atau Pemerintah pada umumnya, tetapi ini hanya untuk sekejap saja. Karena biasanya sistim komando atau crashprogram bernada tantangan dan paksaan, tanpa didahului suatu penelitian yang mendalam dan tanpa koordinasi yang baik dan tanpa disesuaikan dengan kemampuan-kemampuan atau sarana-sarana yang dimiliki aparat-aparat maupun sasaran-sasaran yang bersangkutan, maka pengalaman penunjukkan bahwa cara-cara itu lebih banyak berakhir dengan kegagalan daripada keberhasilan. Tidak itu saja, karena adakalanya sistim itu tidak mungkin mengurangi tetapi me-

nelorkan "anak-anak persoalan" lainnya, dan yang telah fatal lagi karena tidak berhasil, maka kewibawaan Pemerintah makin merosot, bukan karena perongrongan dari luar, tetapi dirongrong oleh kebijaksanaannya sendiri.

BEBERAPA CATATAN.

SEHUBUNGAN dengan uraian-uraian diatas, perkenankanlah saya mengisahkan suatu dialog dengan Presiden Soekarno.

Kira-kira bulan Juni—Juli 1965 yang mengikuti rombongan Presiden menuju Aljazair dimana menurut rencana akan diselenggarakannya Konperensi Tingkat Tinggi Negara-negara Asia-Afrika.

Dalam persinggahannya dikota Cairo, rombongan terhenti 1-2 hari karena ternyata KTT tersebut tiba-tiba tidak jadi dilangsungkan. Sudah menjadi kebiasaan kalau Presiden bersarapan pagi, atau makan siang beliau ditemani oleh beberapa anggota rombongan, terutama para Menteri-menteri, dan sebagainya.

Suatu pagi, diluar kebiasaan, Presiden lebih pagi berada di meja sarapan dan belum ada orang yang menemani beliau. Melihat keadaan ini maka saya menghampiri dan dipersilahkan Presiden untuk mengambil tempat.

Pada kesempatan inilah, Presiden menanyakan kepada saya; "Henk, kenapa kamu tidak laksanakan perintah Bapak; Bapak pernah perintahkan supaya mengrequireer truck-truck swasta di Jakarta, untuk mengangkut sampah ...". Saya belum sempat memberi tanggapan, disusuli lagi dengan ucapan bernada agak marah; "Jij moet niet to veel musyawarah!"

Mendengar kata-kata terakhir ini, maka reaksi saya pertama, bertanya dalam hati dan pikiran; dari mana, atau dari siapa Presiden mengetahui semua ini? Karena memang benar, sehubungan dengan perintah itu, saya adakan pembicaraan-pembicaraan dengan dinas maupun badan-badan pemerintah dan swasta yang bersangkutan dengan masalah pengangkutan itu. Dan saya adakan pembicaraan atau konsultasi itu, karena saat-saat itu keadaan pengangkutan umum terutama truck-truck di Jakarta, mengalami kesulitan yang cukup parah, berhubung tidak ada ban, pelumas, pokoknya kesulitan spare-parts.

APAKAH saya seorang bapak-kota baik dan bijaksana, kalau pada saat-saat kritis dan krisis pengangkutan itu, mengeluarkan perintah, — dan agar segera diketahui oleh Kepala Negara, saya mengemukakannya dengan huruf-huruf besar di Harian-harian Ibukota, — bahwa untuk kepentingan pengangkutan sampah, truck-truck di Ibukota harus lapor, dan sebagainya, dan sebagainya.

Jadi kalau saya adakan konsultasi dan penelitian, yang bagi sipelapor dianggap "bermusyawarah-warahan", maka ini disebabkan karena saya ingin ada kepastian, bagaimana kondisi dan kemampuan "sasaran" yang akan kena perintah, supaya perintah itu secara rieel dan dengan pengertian yang baik dapat dilaksanakan.

Kecuali kalau saya menempuh jalan yang enak dan gampang; meng-(nyalah) gunakan nama dan kewibawaan "Presiden, Panglima Tertinggi, Pemimpin Besar Revolusi, dan sebagainya", menakut-nakuti dan memaksa masyarakat swasta pemilik-pemilik truck untuk menyerahkan truck-truck, dan sebagainya tanpa mau tahu akibat dan kondisi keadaan yang sebenarnya; : Pasti truck-truck akan "menghilang" dari jalan-jalan di Ibukota Jakarta, sebagaimana beras menghilang dari Ibukota Jakarta ketika para pedagang beras ditangkap karena tidak menurunkan harga beras, disaat-saat pemerintah sendiri tidak ada persediaan beras.

Kalau sampai menghilangnya truck-truck itu terjadi, maka saya bukan saja seorang Gubernur yang brengsek dan ala robot, tetapi lebih jahat dari itu; saya mengdiskreditkan, merongrong nama dan kewibawaan Presiden!

Sementara saya berusaha menguasai diri, sadar bahwa kesempatan ini paling baik untuk bicara terus terang, maka saya jawab agak terputus-putus :

Maaf Pak, boleh saya berterus terang. Saya memang betul mengadakan musyawarah, karena sebagai Gubernur pembantu Bapak saya bertanggung jawab untuk menyelamatkan perintah Bapak karena keadaan pengangkutan umum Jakarta dalam kesulitan.

Maaf Pak, saya tidak mau seperti pembantu-pembantu Bapak lainnya, begitu Bapak perintah; Siap, perintah akan dilaksanakan! Besok lapor; Perintah Bapak sudah dilaksanakan, tetapi hanya teruskan perintah – dan injak-injak kebawah.

Sementara beberapa Menteri satu demi satu mulai berdatangan – yang pertama, yang saya ingat, adalah Bapak Menteri Suprayogi – dan mengambil tempat di meja sarapan.

ALASAN saya mencatat dialog ini, bukan karena saya menyalahi dan tidak membenarkan sikap kecewa dan marah Presiden waktu itu, melainkan mencatatnya sebagai contoh, suatu bentuk pencampuran tangan dan penggambaran suatu sifat mental "pembantu" Presiden ketika itu, yang "mematuhi" perintah atau komando Presiden secara "transito" saja tanpa "menyetelnya" sesuai dengan kenyataan situasi dan keadaan, justru untuk menjalankan dan menyelamatkan perintah-perintah yang menyangkut nama dan kewibawaan Kepala Negara itu sendiri.

Saya sendiri masih ragu, apakah "perintah" yang diperintahkan kepada Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta itu, lahir dari pemikiran Presiden sendiri dan apakah bukan suatu usul atau pemikiran dari luar, yang tidak tahan mendengar keluhan dan kekecewaan Presiden terhadap persoalan sampah di Ibukota, kemudian memberi suatu "idee yang genial dan kreatip", bahwa sampah gampang diatasi; requireer truck-truck swasta saja, kalau Pemerintah DKI tidak ada alat pengangkutan atau cukup uang!

Beras: Masih segar dalam ingatan saya, tidak lama setelah saya dilantik sebagai Gubernur Kdh. menjelang Natal dan Tahun Baru, yang disusul dengan Hari Raya Idulfitri dan Tahun Baru Imlek (1964-1965), harga barang keperluan sehari-hari melonjak "gila-gilaan" (istilah waktu itu) dan tidak ketinggalan harga beras! Suasana Ibukota menjadi gawat karenanya. Selainnya demonstrasi-demonstrasi sehubungan dengan meningkatnya politik konfrontasi, demonstrasi dan delegasi-delegasi menuntut penurunan harga bahan-bahan pokok sehari-hari, ditambah lagi dengan delegasi-delegasi yang menuntut/memaksakan saya untuk membubarkan/membekukan organisasi massa ini atau itu; mengretool/memecat pejabat ini dan itu, dan sebagainya.

Maka secara "ambeg parama-arta" saya "kesampingkan" dahulu semua persoalan-persoalan lain dan memusatkan perhatian kepada soal "beras", dengan pengertian; beras adalah soal perut dan perut - yang lapar - tidak bisa tunggu! Dan perut yang lapar adalah bahaya, pasti akan mengganggu ketentraman dan keamanan Ibukota.

Tetapi apa terjadi; sementara Pemerintah DKI sedang menangani persoalan ini, maka tanpa sepengetahuan Gubernur DKI, oleh alat-alat negara telah diadakan "penertiban" dan penangkapan-penangkapan di pasar-pasar, berdasarkan perintah dari suatu instansi Pusat! Akibatnya, beras menghilang dari seluruh Jakarta ..... Tidak perlu saya lukiskan bagaimana suasana kota Jakarta ketika itu; Jangankan rakyat yang tidak mampu membeli, yang mampu beli-pun, sama nasibnya karena beras tidak ada.

Tidak perlu pula saya mengisahkan bagaimana kebijaksanaan Pemerintah DKI mengatasi situasi yang gawat itu, karena ia akan merupakan suatu buku tersendiri, apalagi kalau kita sadar dan mengerti, bahwa yang menjadi soal pokok bukanlah beras, tetapi manusianya! Dan Jakarta, sebagai daerah yang tidak menghasilkan, maka pengaturannya-lah, selainnya modal, adalah faktor-faktor yang paling menentukan. Dan dalam pengaturan inilah diperlukan kreativitas yang realistis, karena masyarakat tidak bisa kenyang dari beras yang sedang "zeilende", yang berada di gudang" dan yang "ada diatas kertas". Demikian pula, harga beras tidak dapat ditentukan atau dikendalikan, hanya dengan peraturan dan penindakan tegas, kecuali ketegasan; adanya beras itu sendiri!

Menjelang penyelenggaraan Dasawarsa A.A. di Jakarta, oleh Presiden diperintahkan, supaya semua "jalan-jalan/daerah-daerah protokol" harus bersih dari "gelandangan".

Menghadapi masalah gelandangan. Kita semua maklum, bahwa masalah gelandangan ini, bukanlah soal lokal semata-mata, tetapi suatu masalah nasional yang berlatar belakang ekonomi-sosial-budaya, yang pemecahannya perlu diatasi/ditangani secara nasional pula.

Namun, untuk mencegah makin bertambahnya gelandangan di Ibukota, khususnya di saat-saat Jakarta menyelenggarakan suatu perayaan atau peristiwa penting, maka selama itu diambil tindakan-tindakan "secara rutin" dengan jalan mengadakan razia-razia. Ini berarti biaya, pengerahan kendaraan dan tenaga! Para gelandangan (yang kelihatan) ditangkap, dimasukkan dalam truck, diangkat ketempat-tempat penampungan sementara, di mana mereka. memperoleh makanan secara jasmaniah maupun rohaniah, (selama biaya masih cukup tersedia)! Karena tempat-tempat penampungan tidak tertutup ketat, maka biasanya 1 - 2 hari kemudian berangsur-angsur mereka meloloskan diri, kembali ketempat dan "profesi" asalnya.

Dasawarsa A.A. memakan waktu dua minggu dan biasanya setelah perayaan resmi selesai, para tamu-tamu agung mengadakan peninjauan-peninjauan dan sebagainya dimana Jakarta sebagai Ibukota harus berada dalam keadaan "stand-by". Ini berarti kurang lebih satu bulan, jalan/daerah protokol itu harus bersih dari gelandangan. Bagi Pemerintah DKI berarti, biaya dan tenaga yang tidak sedikit, sedangkan tidak ada jaminan bahwa dengan cara rutin itu "bebas gelandangan" bisa terlaksana baik.

Sekalipun pemecahan ini bukan suatu masalah besar, tetapi sungguh cukup memusingkan seandainya kita kehabisan akal, kecuali kalau uang cukup. Maka kepada komandan-penertib saya instruksikan, supaya ia dan pembantu-pembantunya secara menyamar menyusup dikalangan gelandangan dan mencari tahu dimana sesungguhnya pusat-pusat konsentrasi mereka, kemudian cari tahu apakah mereka ada semacam organisasi dan pemimpinnya. Hasil penelitian pertama ternyata memang ada pusat-pusat konsentrasi, organisasi maupun pemimpinnya, bahkan diantara mereka sudah membagi-bagi daerah-daerah operasinya masing-masing. Instruksi kedua adalah, supaya cara kontak langsung dengan pemimpinnya, dan minta perantaraannya, apakah mereka sanggup dan bisa jamin supaya jalan-jalan/daerah protokol selama satu bulan, bersidah dari "anak-anak buahnya" dengan tidak menggunakan istilah "gelandangan" dan berapa besar "uang lelah" yang dimintanya. Ternyata cara pendekatan dan "kerjasama" ini sangat berhasil, bahkan para pemimpin gelandangan diberi pakaian seragam dan tanda pengenal oleh bagian penertiban, sehingga para tamu agung maupun masyarakat Ibukota yang liwat dan berkerumun di jalan-jalan maupun lingkungan-lingkungan protokol, tidak mengetahui bahwa di beberapa tempat, para petugas resmi pemerintah, didampingi oleh "pemimpin-pemimpin gelandangn" turut menjaga keamanan dan ketertiban.

Lain daripada itu, selain berhasil baik, - karena selama itu memang tidak seorang gelandangan-pun yang kelihatan di tempat-tempat yang telah ditentukan – Pemerintah DKI dengan cara "kerja-sama" itu dapat banyak menghemat biaya dan tenaga. Dan yang tidak kurang penting adalah, bahwa kesemuanya itu berlangsung tanpa paksaan dan kekerasan, yang selalu memberi tanggapan mental dan effek phisikologis yang kurang baik.

Persoalan sampah. Sampah merupakan masalah yang rumit dan belit, yang kedudukan persoalannya sama urgen dan kompleks seperti beras dan gelandangan. Kalau beras tidak dapat ditunda-tunda bagi orang yang lapar, maka begitu pula sampah tidak dapat ditunda-tunda untuk diangkut dan dimusnahkan sedangkan persoalannya berlatar belakang ekonomi-sosial-budaya, sama rumit persoalannya dengan gelandangan.

Suatu persoalan yang diperkirakan "kecil" tetapi mempunyai pengaruh yang sangat negatip dalam kehidupan perkotaan, merupakan suatu masalah yang secara

riil, baik dilihat dari perlengkapan atau sarana-sarana yang dimiliki Pemerintah DKI, maupun sarana-sarana dan tingkat kondisi mental yang dimiliki oleh masyarakat, tidak dapat diatasi.

Keadaan dan kondisi pemerintah disatu pihak, keadaan dan kondisi masyarakat dilain pihak, menyebabkan - berdasarkan pengertian, bahwa sampah tidak bisa tunggu-Pemerintah menanggulanginya secara mencegah jangan sampai membusuk, insidentil, tambal sulam, atau pada waktu-waktu tertentu dengan cara-cara "komando" atau "crashprogram", cara-cara mana sering dibarengi atau disusuli dengan "anak-anak" - persoalan yang adakalanya mengakibatkan persoalan-persoalan baru yang lebih besar lagi daripada masalah sampahnya sendiri.

Untuk menanggulangi masalah sampah ini, saya serahkan pelaksanaannya kepada Wakil Gubernur, Saudara Hoepoedio, sementara saya mengembangkan pemikiran, bagaimana didalam keadaan kondisi-kondisi dan kekurangan perlengkapan dan biaya, dapat mengatasinya dengan cara-cara baru yang lebih effektip lagi. Saya belum sampai pada penemuan cara (baru), melainkan dari hasil observasi permasalahan sampah ini, saya baru pada kesimpulan, bahwa satu cara untuk meringankan Pemerintah dari persoalan sampah ini, - sementara sarana-sarana yang diperlukan bagi Pemerintah dan masyarakat belum terpenuhi dan sementara penyelesaian Pabrik Kompos masih berjalan, sekalipun dengan selesainya Pabrik Kompos masalahnya masih tetap ada, maka perlu diadakan semacam "swiching" daripada

arti dan nilai sampah, yang selama itu berarti dan bernilai "negatip", yang berakibat lanjut, masyarakat bersikap masa bodoh dan tidak bertanggung jawab, karena tidak mengandung nilai-nilai "kegunaan". Sebaliknya, akibat sampah yang makin bertambah karena kemasabodohan dan tidak rasa tanggung jawab masyarakat, makin menambahnya pengeluaran biaya dan tenaga, belum tergantung kepusingan kepala bagi Pemerintah. Maka perlu diberi arti dan nilai-nilai "positip" atau "kegunaan positip" pada sampah itu.

Idee yang membawa saya kepada kesimpulan diatas, adalah pemandangan yang diperagakan oleh para gelandangan setiap pagi menjelang fajar, mereka menyusuri rumah-rumah penduduk dan dengan tekun mencari ditempat-tempat pembuangan sampah, benda-benda seperti kaleng-kalengan, kertas, dan sebagainya yang bagi mereka mengandung "nilai-nilai" untuk kemudian diuangkan. Maka terpikir pada saya, seandainya Pemerintah mengambil oper "peranan tukang-tadah", tetapi bukan hanya "sampah pilihan" terbatas dari kaum gelandangan, tetapi sampah dari seluruh penduduk kota, apakah cara ini tidak lebih effektip bagi kedua pihak, (pemerintah dan masyarakat).

Memang pelaksanaannya tidak semudah sebagai yang dipikirkan, karena perlu didahului suatu research, pengkalkulasian dan pengorganisasian yang memerlukan waktu untuk processingnya. Dan terpikir yang "aneh-aneh" ini, adalah akibat kondisi-kondisi yang serba kurang pada saat itu, dan untuk sebanyak mungkin menghindari sistim-sistim pemecahan yang mengandung unsur-unsur paksaan. Sebagai penanggung jawab saya berusaha menjadi pelayanan baik bagi masyarakat, saya berkewajiban untuk memikirkan dan menemukan cara-cara pengaturan yang sebanyak mungkin malah diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat, dan tidak sebaliknya.

Uraian diatas ini, adalah sekedar contoh sederhana tentang apa yang saya maksudkan dengan memecahkan suatu masalah secara kreatip.

Taman Bhineka Tunggal Ika. Di tahun 60-an, dimasa saya masih menjabat Wakil Kepala Daerah, dengan persetujuan Gubernur Kdh. Dr. Soemarno, saya telah memulai suatu perencanaan pembangunan kompleks rekreasi dan budaya, yang saya namakan "Taman Bhinneka Tunggal Ika". Lokasinya adalah di Ragunan, Pasar Minggu, yang sekarang menjadi Taman Margasatwa.

penanda tanganan kerja sama antara Pemerintah DCI dengan Ikatan Insinyur Indonesia.

Persiapan-persiapan ketika itu baru sampai pada penyediaan dan survey tanah seluas 100 HA sebagai landasan kegiatan pertama, dengan maksud secara bertahap diperluas menurut keperluan didalam gerak perkembangannya. Pada prinsipnya idee dari pada Taman Bhineka Tunggal Ika ini, tidak beda dengan Taman Mini Indonesia, yang sekarang dengan megah telah berhasil dibangun. Bedanya adalah antara lain, didalam susunan dan pemeragaannya, kedayagunaan, eksploitasi, cara dan waktu pembangunannya, yang didasarkan atas prinsip "selfsustaining/selfpropelling growth", karenanya tidak terbatas waktu, bahkan sebagaimana dialami proyek-proyek besar dalam sejarah, kalau perlu dibangun/disempurnakan secara turun temurun.

Sebab-sebab yang menghambar atau sampai batal pengembangan pelaksanaannya, baik dimasa saya menjabat Wakil dan Gubernur Kdh, karena belum diberi "lampu hijau" dari Presiden, dengan alasan supaya diselesaikan dahulu Proyek-proyek Presiden. Persetujuan atau restu Presiden ketika itu adalah perlu, pertama untuk melancarkan fasilitas-fasilitas yang diperlukan; kedua, mengingat luas dan besarnya volume proyek ini, sehingga perlu mendapat penegasan dan penyesuaian didalam Rencana Induk Pembangunan DKI Jakarta.

Taman Marga Satwa Ragunan. Karena belum ada kepastian, kapan dan bisakah proyek Taman Bhineka Tunggak Ika itu dilaksanakan, sedangkan pembangunan proyek "Planetarium" yang akan didirikan diatas tanah Kebon Binatang Cikini (sekarang Taman Ismail Marzuki), segera dimulai dan untuk menampung Kebon Binatang yang baru belum tersedia tanahnya, maka dipindahkan Kebon Binatang Cikini itu ke Ragunan, yang sekarang dinamakan "Taman Marga Satwa Ragunan".

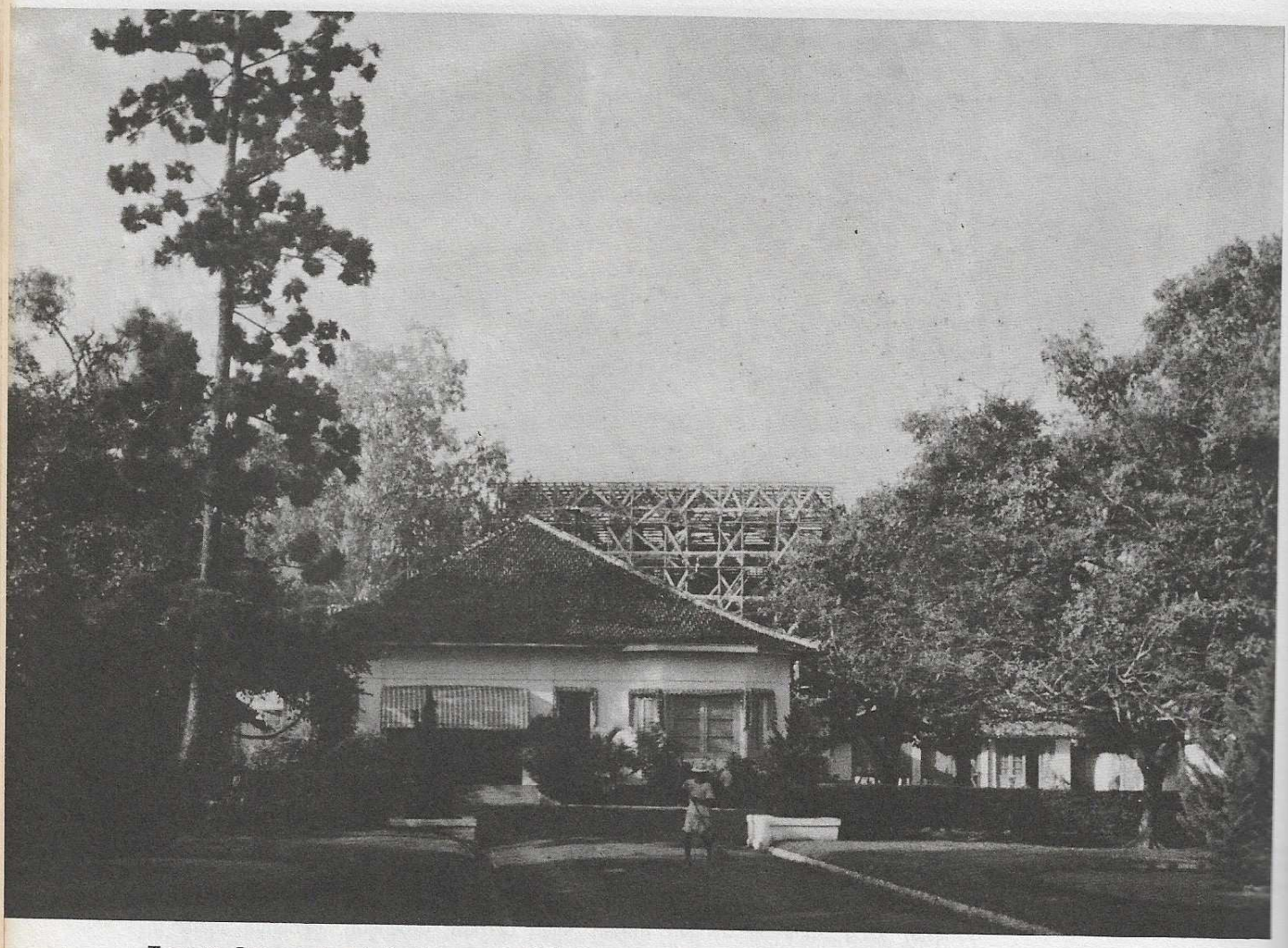

Tentang Rencana Induk Pembangunan DKI. Suatu pemikiran yang belum dapat saya kembangkan sebelumnya saya diberhentikan sebagai Gubernur Kdh DKI Jakarta, adalah mengenai Rencana Induk Pembangunan DKI Jakarta, sekurang-kurangnya mengenai prosedure atau tahap-tahap persiapan mengenai penyusunannya sebelumnya dituangkan dalam suatu Rencana Induk Planologis Tekhnis.

Beberapa pikiran yang masih tercatat dalam ingatan saya adalah kira-kira sebagai berikut; saya menyamakan daerah Ibukota dan penghuninya, sebagai suatu mini atau perasan Tanah Air, Negara dan Bangsa Indonesia. Secara Idiil Negara dan Bangsa Indonesia dilandasi falsafah Panca Sila dan strukturil oleh Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan pelambang Negara Republik Indonesia dinyatakan dalam Lambang Negara Republik Indonesia yang bersemboyankan "Bhineka Tunggal Ika" yang mengandung arti; "Berbeda-beda tetapi tetap bersatu jua" yang maksudnya menggabungkan daerah-daerah dan suku-suku bangsa di seluruh Nusantara Indonesia hingga menjadi Kesatuan Raya.

Sejalan dengan pemikiran diatas, maka Rencana Induk Pembangunan Ibukota, perlu dilandasi suatu pedoman pemikiran dasar, yang akan memimpin isi, wajah dan arah pembangunan dan pengembangannya Ibukota, yang kemudian dituangkan dalam suatu rencana planologis tehnis, di dalam mana diperhitungkan semua rencana-rencana yang telah didahului sebelumnya, dan seterusnya.

Pedoman pemikiran dasar atau landasan idiil ini saya anggap penting, karena sesungguhnya pembangunan Ibukota adalah penjelmaan dari pada ujud dan pewujud dari pada "Nation and Character" Bangsa Indonesia.

Sehubungan dengan ini, pada saya ketika itu terkandung niat sebagai salah satu tahap persiapan, menyelenggarakan suatu musyawarah secara nasional, karena musyawarah ini berstatus nasional dan masa itu adalah bijaksana untuk direstui atau langsung dipimpin oleh Presiden, maka kalau perlu dipimpin Presiden yang dihadiri oleh eksponen-eksponen bangsa (politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, semua golongan karya, termasuk angkatan bersenjata, daerah dan sebagainya) untuk mendengar dan menghimpun pandangan dan pendapat, bagaimana kira-kira bangsa kita mendasari dan mengimajinasikan Ibukota-nya.
Hasil-hasil daripada musyawarah ini, oleh Presiden disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota, yang selanjutnya diserahkan kepada DPRD-GR DKI Jaya, untuk diolah, dan sebagainya dan dijadikan pedoman dasar, bagi penyusunan Rencana Induk Pembangunan Ibukota dan sebagainya.

Mendahului tahap persiapan yang dimaksud diatas, saya atas nama Pemerintah DKI telah menandatangani suatu Piagam Kerjasama dengan Persatuan Insinyur Daerah Ibukota, pada awal tahun 1965.

Saya akui bahwa pemikiran-pemikiran diatas masih mentah, dan kekurangan saya tidak merekamkan pikiran-pikiran itu dalam bentuk tulisan, dan sebagainya yang dapat saya tinggalkan kepada pengganti saya, sekalipun dalam "pengertian dan peristilahan masa itu yang semua berpusat pada Presiden, Pimpinan Besar Revolusi", telah saya singgung dalam pidato-pidato menyambut HUT ke-438, kota Jakarta yang diselenggarakan di Istana Negara untuk mendengar amanat Presiden dan dalam sidang istimewa DPRD–GR DKI Jakarta.

Dewasa ini Pemerintah DKI Jakarta, telah memiliki suatu Rencana Induk Pembangunan 1965–1985 yang telah disahkan oleh DPRD–GR dan Repelita secara bertahap.

Rencana Induk DKI ini bersifat tehnis planologis, belum didasari suatu idee atau yang saya sebutkan, pedoman pemikiran dasar, dimana tercantumkan falsafah dasar jehidupan dan penghidupan Bangsa Indonesia yang memimpin dan mengawal isi, wajah dan arah pengembangan pembangunan Ibukota sebagai milik dan wajah "nation and character" Bangsa Indonesia.

Suasana Gedung Proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur 56 sebelum dibongkar.

Pedoman dasar ini saya anggap penting untuk menghindari – sekalipun Jakarta diberi judul, masih merupakan perkampungan besar dibandingkan dengan Ibukota-ibukota didunia – jangan sampai karena (misalnya) tidak mau kalah dengan Ibukota-ibukota luar negeri yang kebanyakan pembangunannya didasarkan atas kemampuan-kemampuan materi, tehnologi, dan sebagainya saja, yang mau tak mau mencerminkan dan mempengaruhi "way of life" dan "way of thingking", masyarakat bangsa bersangkutan, yang tidak sesuai dengan bangsa dan masyarakat Indonesia.

Menghadapi Berdikari. Kemudian, menarik makna secara kreatif dari suatu situasi keadaan yang dibatasi tetapi juga yang dimungkinkan dengan berlakunya prinsip "Berdiri diatas kaki sendiri" (Berdikari), maka pemikiran saya bersarang dua sasaran pokok;
Pertama: "meng-kota-kan" idee atau sistim "kegotong-royongan".
Kedua; menemukan umpan yang tepat dan aman, untuk mengapungkan potensi materiil, khususnya "hot money", yang sebahagian terbesar menenggelam dan bersembunyi dibawah permukaan Ibukota.

Kedua sasaran tersebut diatas, sesungguhnya tidak terpisah satu dan lain, karena yang kedua adalah suatu ciri utama atau pewujud dari yang pertama, sehingga sehubungannya dapat disamakan misalnya, yang pertama adalah "undang-undangnya", sedangkan yang kedua, adalah "peraturan pelaksanaannya undang-undang".

"Kegotong-royongan", merupakan suatu pembawaan alamiah, sosial budaya, singkatnya; pembawaan sejarah rakyat Indonesia. Selama itu, (saya tidak menilainya

Suasana ruangan dalam gedung Proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta.

dimasa sekarang), kegotong-royongan hanya hidup dan terlaksana secara praktek di desa-desa, kampung-kampung, dan sebagainya. Sedangkan dikota-kota, khususnya di Ibukota, pembawaan sejarah itu hidup sebagai tanda-pengenal diri dan didalam praktek pembawaan itu tetap menetap sebagai itikad semata-mata. Bahkan dimasa pergolakan politik, pembawaan sejarah yang begitu berharga itu, dijadikan semboyan dan tema agitasi, atau semacam pelepasan dan pelarian untuk menghindari diri dari kesulitan-kesulitan. yang sulit diatasi.

Jadi tegasnya, kegotong-royongan di Ibukota tidak bisa dipraktekkan dan kalau ada, dilaksanakan dengan sedikit paksaan atau dengan alasan yang dibikin-bikin.

Tidak berhasilnya kegotong-royongan di kota, karena kita tidak pernah secara serius dan ilmiah memikirkan bagaimana menghidupkan, bagaimana mentransfer pembawaan sejarah itu bagi "pewaris-pewaris pembawaan sejarah" pada tingkat-tingkat pembawaan masa, yang bermanifestasi dikota/Ibukota khususnya, kendati pun kita sekalian, masyarakat kota pada umumnya, tanpa perkecualiannya berasal dari desa, berasal dari sejarah yang sama!

Saya memahami sepenuhnya, bahwa "meng-kota-kan" ke-gotong-royongan itu, bukan pekerjaan satu dua hari saja, bukan pula pekerjaan Gubernur dan stafnya atau pekerjaan beberapa ahli-ahli khusus saja, dan sebagainya, tetapi suatu pekerjaan yang seharusnya, bahkan mutlak mulai dikerjakan di saat kita menentukan dan berte-kad hidup "berdiri diatas kaki sendiri" sebagai bangsa. Dan didalam keadaan dan suasana "keterbatasan dan kekurangan" akibat "berdikari" yang berkelanjutan makin hapus atau berkurangnya bantuan-bantuan dari luar, maka selaku Gubernur KDH Ibukota saya terpaksa harus memikirkan dan menyandarkan pembinaan dan pengem-bangan Ibukota, terutama dari sumber-sumber (materiil dan mental) "dari dalam", yaitu menggali sumber-sumber yang dimiliki dan diwarisi oleh sejarah bangsa dan rakyat sendiri, yang selama itu "hidup" di Jakarta, sebagai kartu identitas, itikad atau semboyan dan agitasi belaka. Terlaksananya kegotong-royongan di Ibukota ini, sekalipun baru dalam bentuk dasar-dasar peraturan maupun pengaturannya, merupa-kan salah satu target yang saya tetapkan didalam hati dan pikiran seandainya saya berkenan menjalankan masa jabatan saya sepenuhnya.

Kelanjutan daripada (seandainya) kegotong-royongan di Ibukota bisa diper-tumbuh dan dikembangkan, dengan sendirinya didalam tindak geraknya akan mem-beri suatu corak tertentu pada perencanaan dan penjelmaan pembangunan atau phy-sical appearance Ibukota dan keseluruhannya didasarkan dan diarahkan pedoman pemikiran dasar maupun planologi tehnis Rencana Induk Pembangunan Ibukota.

Menceritakan atau mengenangkan pemikiran-pemikiran seperti diatas ini, se-sungguhnya tidak ada arti lagi, karena masanya sudah berlalu dan maknanya pun sudah berlainan. Adalah suatu kekurangan dan kesalahan yang tidak terampuni dalam diri sendiri, bahwa sekalipun pikiran dan niatnya itu masih embrional dan mentah, saya tidak/belum sempat merekamkannya.

Sejarah. Dimasa sebelumnya saya menjabat sebagai Gubernur KDH, saya menaruh cukup minat terhadap masalah sejarah, terutama dari segi penyelamatan dan pemeliharaannya. Dalam hubungan ini saya menunjuk pada beberapa kegiatan saya sebagai anggota Dewan Nasional, berupa prakarsa, prasarana dan usul-usul di-dalam Sidang-sidang Dewan Nasional yang diketuai Presiden Soekarno yang kemudian dijadikan usul kepada Pemerintah, antara lain tentang "Penguasaan Peninggalan-peninggalan Bersejarah" dan tentang "Perkembangan Kebudayaan".

Pendirian dan pikiran yang membawahi usul yang dimaksud diatas, melatar bela-kangi suatu rencana untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang disinggung-singgung di dalam pidato Gubernur Kdh, didalam Sidang Paripurna DPRD—GR DKI Jakarta, menyambut HUT Kota Jakarta yang ke-438, antara lain sebagai berikut : "Didalam rangka pemeliharaan dan pengembangan rasa cinta dan penghargaan terhadap kota dan sejarahnya, dikandung maksud untuk membentuk suatu badan-khusus, atau

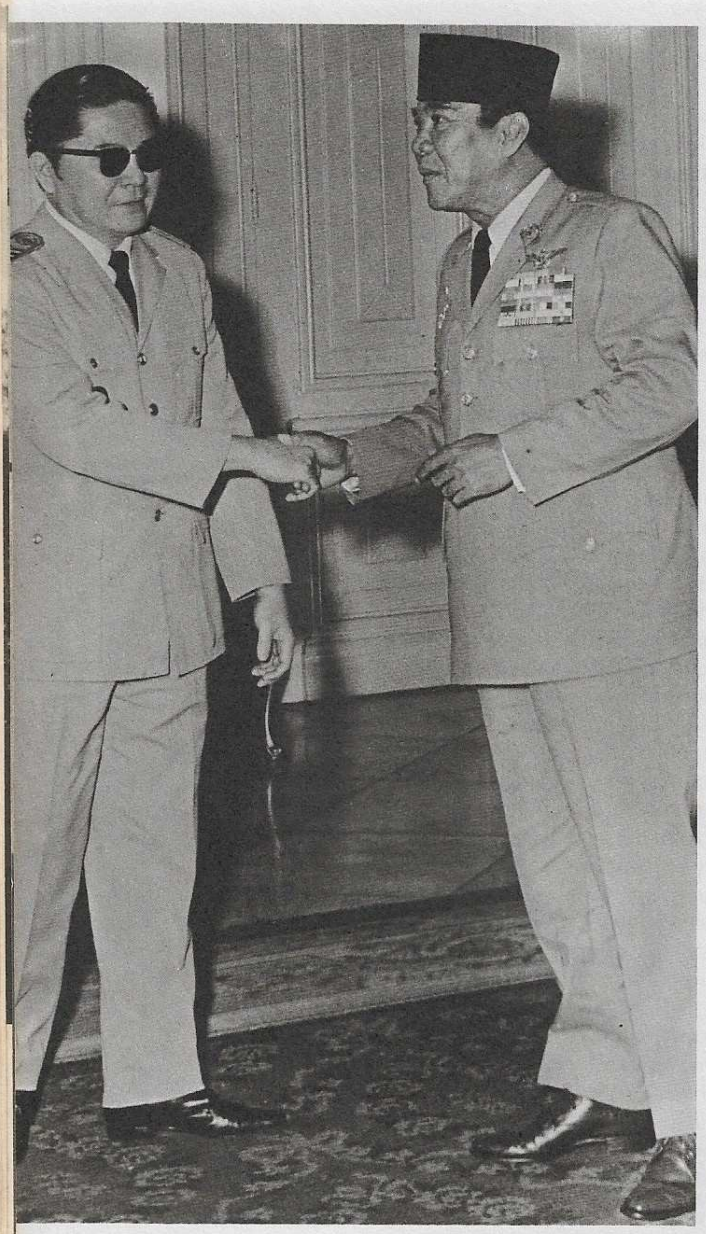

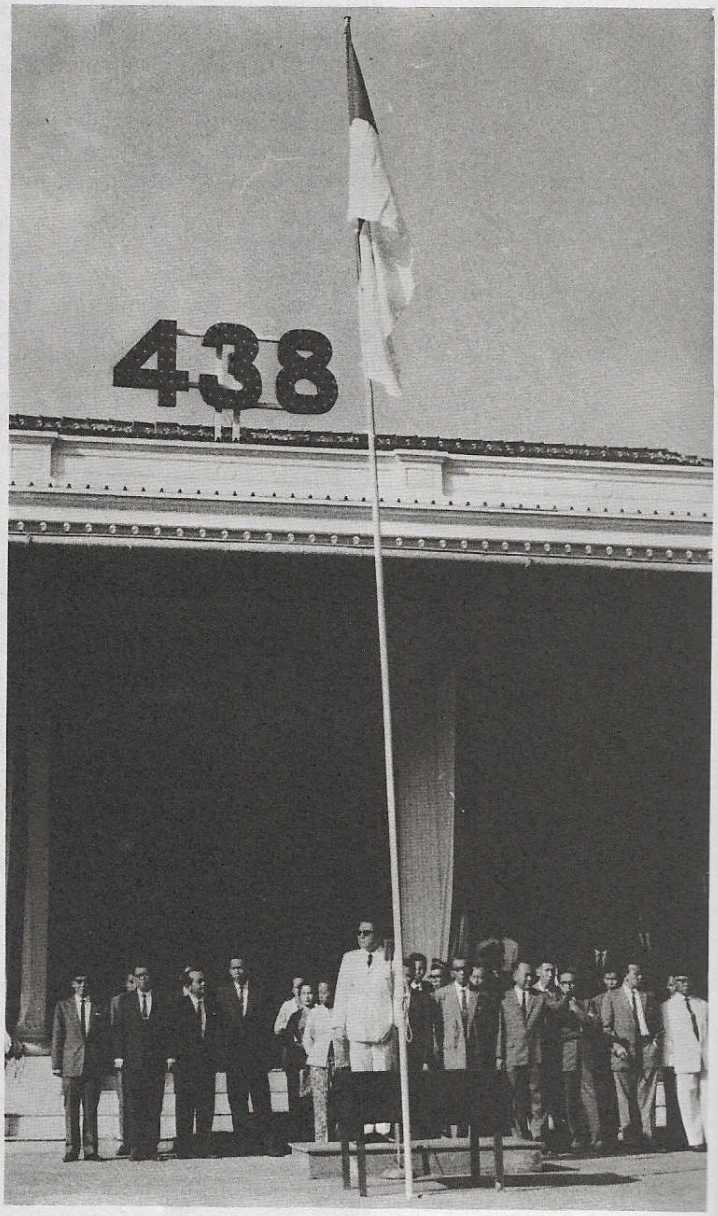

Gubernur Henk Ngantung bersama Presiden Soekarno dalam suatu jamuan di Istana Merdeka tahun 1965.

menggiatkan secara kontinu penelitian maupun pemeliharaan peninggalan-peninggalan bersejarah atau yang mengandung sejarah, khususnya yang ada hubungan dengan Ibukota Jakarta".

Museum Nasional. Pada suatu kesempatan saya pernah kemukakan pikiran-pikiran khayali, kepada Presiden Soekarno, supaya Istana Merdeka dan Istana Negara dijadikan saja "Museum (Sejarah) Nasional". Dan karena waktu itu, untuk kepentingan keamanan kompleks Istana, ada pikiran untuk mengosongkan semua bangunan-bangunan yang terletak diantara dan disepanjang jalan Mojopahit—Istana Merdeka dan Negara, maka seluruh kompleks yang akan dikosongkan itu saya usulkan dijadikan taman khusus didalam mana dibangun/ditempatkan patung-patung para Pahlawan Nasional Indonesia, semacam "Garden of National Heroes"

Sedangkan tempat kediaman resmi/Istana Presiden Republik Indonesia, secara bertahap dibangun yang baru, dengan suatu gaya arsitektur yang khas. Letaknya Istana yang baru itu tetap di Jalan Medan Merdeka Utara, tetapi berhadapan dan letaknya tepat di as dari Tugu Nasional, darimana dibuat/dihubungkan suatu terowongan, cukup lebar dan indah, yang tembus sampai ke Tugu Nasional. Karena halaman dan jalan di depan Istana, baik Istana yang sekarang, maupun yang masih diangan-angan itu, makin lama makin sempit untuk upacara-upacara defile, atau pawai, misalnya pada upacara-upacara 17 Agustus dan sebagainya, maka tempat upacara dipindahkan ke lapangan Monas. Melalui terowongan tadi, Kepala Negara R.I. beserta tamu-tamu agung lainnya, secara aman tanpa diganggu dan mengganggu, berada tepat pada jam yang ditentukan diatas podium upacara, yang letaknya di salah satu pelataran Tugu Nasional.

Sementara itu, kedua istana yang berperan sebagai Museum Nasional, kalau perlu secara darurat atau untuk seterusnya, masih bisa digunakan untuk upacara-upacara kenegaraan secara khusus atau terbatas. Hal serupa adalah lazim di negara-negara lain, bahkan memberi suatu suasana yang khas dan berkesan. Presiden tertarik atas idee ini, tetapi keberatan kalau dibangun istana baru.

Tentang Gedung Proklamasi, Pegangsaan Timur 56. Idee pembangunan "Gedung Pola" menurut hemat saya adalah baik, karena mengandung makna dan peranan yang positif sebagau suatu bentuk mental-investment bangsa.

Tetapi untuk membangun Gedung Pola itu dengan mengorbankan Gedung Proklamasi, Pegangsaan Timur 56, saya rasa sayang dan aneh, alias termasuk orang yang tidak setuju.

Sehubungan dengan ini, bukan karena suruhan orang atau golongan. bukan juga karena dipengaruhi pendapat dan pandangan yang menentang, maka pada suatu pagi, beberapa hari sebelumnya pembongkaran gedung itu dilaksanakan, atau inisiatif pribadi, saya datang menghadap Bung Karno di Istana Merdeka.

Saya tidak ingat lagi apakah Bung Karno sendirian atau didampingi orang lain, yang jelas Bung Karno waktu itu baru saja dikunjungi tamu/delegasi yang maksudnya ada hubungan juga dengan nasib Gedung Proklamasi tersebut.

Sambil ngomong-ngomong dengan sangat hati-hati saya menanyakan, apakah keputusan/perintah Bung Karno untuk membongkar Pegangsaan Timur 56 tidak bisa ditinjau lagi dan apakah tidak sebaiknya bangunan itu dipertahankan keasliannya, dijadikan gedung sejarah untuk kepentingan "hetnageslacht"

Rupanya — ini perkiraan saya — tamu-tamu yang sebelumnya saya bertemu Bung Karno, mengusulkan agar Pegangsaan Timur 56 itu, dijadikan semacam museum Bung Karno, sehingga setelah mendengar uraian saya, dengan nada kecewa dan agak marah (karena tidak mengharapkan dari saya), Bung Karno secara singkat saja, melontarkan kata-kata sebagai berikut :

"Apakah kamu juga termasuk mereka yang ingin memamer celana kolorku!" (maksudnya didalam gedung Pegangsaan Timur 56). Melihat sikap dan mendengar kata-kata Bung Karno yang sedikitpun tidak nampak ragu dan sesal, maka agar pembicaraan tidak terputus begitu saja, saya alihkan pembicaraan dengan menanyakan; apakah saya boleh membuat suatu duplikat dari Gedung Pegangsaan Timur 56 itu, sebelumnya dibongkar?

Suasana acara peringatan HUT DCI yang ke 438, tampak Gubernur Henk Ngantung sedang menyampaikan amanatnya kepada para karyawan Pemerintah DKI pada tanggal 22 Juni 1965.

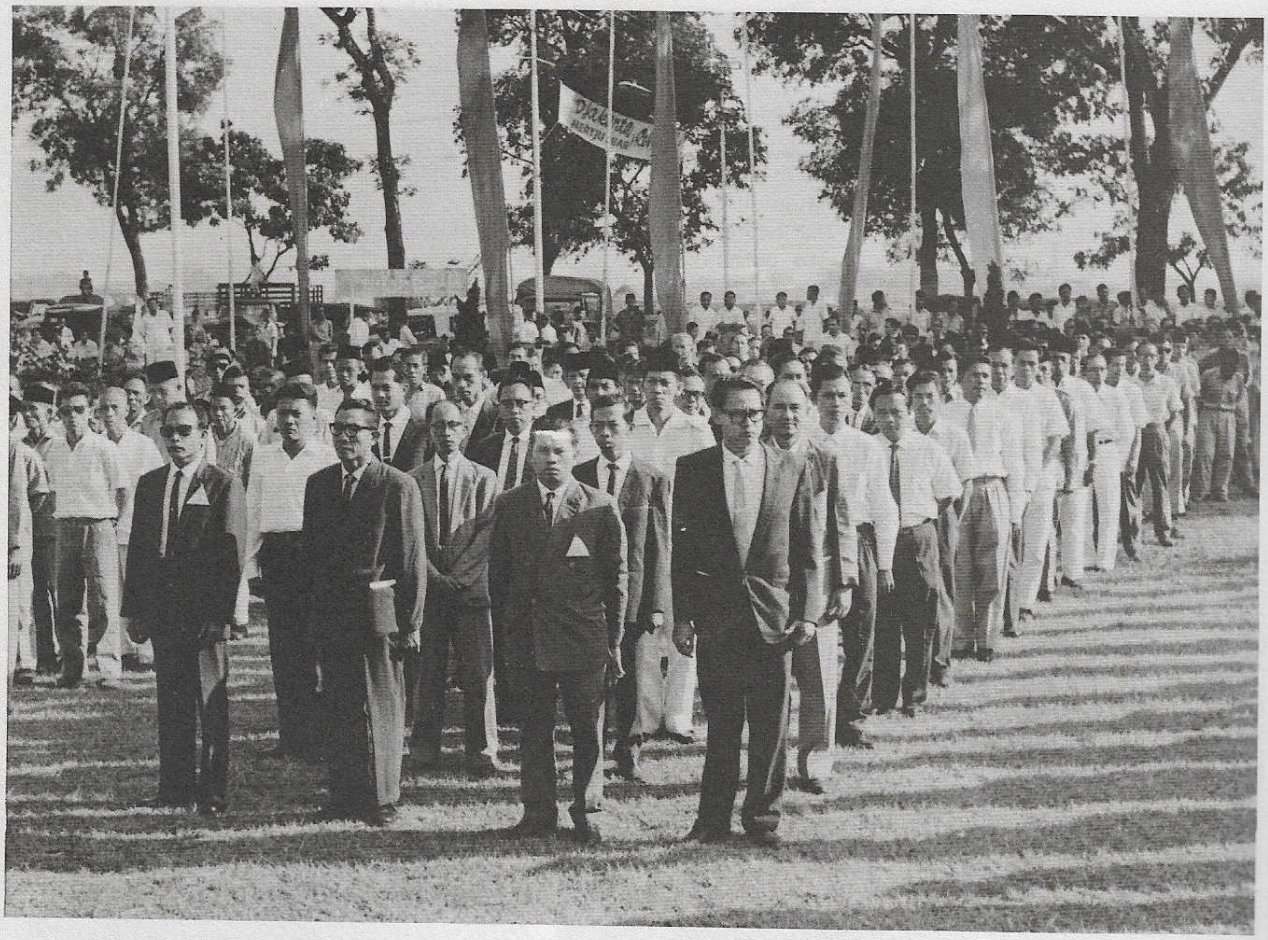

Pertemuan dan dialog ini berlangsung dalam tempo dan suasana yang sempit dan peka.

Ketika itu saya tidak ada konsep alternatif lain dan pertanyaan saya ini secara spontan saya ajukan dengan dua maksud : pertama; agar ada sesuatu "peninggalan" atau "pegangan" yang dapat dimiliki oleh Pemerintah DKI seandainya dikemudian kelak, generasi yang akan datang menanya-nanyakan nasib daripada Gedung Proklamasi yang makin lama makin keramat bagi Bangsa Indonesia, yang masih memperoleh "restu" dari Bung Karno, sekaligus untuk mengetahui apakah Bung Karno memang sama-sekali tidak menghendaki dan mempunyai "geestelijke binding" lagi dengan gedung tersebut?

Alangkah gembira dan lega rasanya, waktu Bung Karno tanpa ragu memberi persetujuannya, sungguhpun ini suatu "schrale troost" belaka. Karena suasana Kota Jakarta — khususnya aparat Pemerintah DKI ketika itu, berada dalam suatu keadaan yang serba sibuk dan pertemuan dengan Bung Karno bersifat pribadi, sedangkan perintah kepada Pemerintah DKI untuk membongkar Gedung Pegangsaan Timur 56 sudah dikeluarkan dan tidak bisa diubah lagi, maka dalam keadaan itu tidak terpikir pada saya untuk menjadikan, persetujuan atau "restu" Bung Karno tentang duplikat Gedung Pegangsaan Timur 56 itu suatu "acara" khusus forum pemerintah.

Baru sekarang, sementara saya mengenangkan kembali pertemuan dengan Bung Karno dalam tulisan ini, maka baru saya menyadari, bahwa persetujuan Bung Karno tentang pembuatan duplikat itu bisa juga diartikan, membangunkan kembali "Ge-

dung Pegangsaan Timur 56" itu dalam keadaan maupun dalam ukuran, dan sebagainya yang sama, kecuali diatas tanah dan tempat yang sama, karena akan dibangun Gedung Pola.

Karena tidak tersedianya biaya dan untuk tidak melibatkan aparat Pemerintah DKI yang terlalu sibuk ketika itu, maka secara maksimal yang dapat saya usahakan adalah pembuatan suatu miniatur dari Gedung Pegangsaan Timur 56 dalam bentuk maquet berukuran mini, secara teliti, termasuk pembuatan atau perincian konstruksi, jenis bahan-bahan dan warna-warna bangunan dan sebagainya.

Pembuatan maupun pembiayaannya (sementara) saya serahkan kepada "Pembangunan Perumahan" (P.P.) di Jalan M.H. Thamrin. Maket ini yang berukuran kira-kira 2 M2, pernah ditempatkan di Balaikota, tetapi kemudian karena tidak ada tempat yang cukup, untuk sementara disimpan di Gedung P.P. Jalan MH. Thamrin.

Selanjutnya mengenai halaman, perabot rumah tangga dan segala yang tidak dapat dibuat dalam maket, saya minta melalui Jawatan Penerangan, dibuat suatu foto dokumentasi selengkap-lengkapnya. Foto-foto ini tidak pernah saya lihat, dan mengenai nasib maket yang dimaksud pun saya tidak tahu lagi.

Menghadapi tuntutan-tuntutan Politik. Berbicara tentang politik, tidak berkelebihan kiranya kalau saya simpulkan, bahwa masa-jabatan saya pada keseluruhannya merupakan masalah dan pergumulan politik.

Sehubungan dengan masalah politik ini, khususnya yang peka dan menyangkut ketertiban dan keamanan Ibukota, saya selalu berkonsultasi dengan Panca-tunggal, dalam hal ini, dengan Panglima Kodam V Jaya dan Komdak Metro Jaya, sehingga terpeliharalah suatu pengertian dan kerjasama yang baik.

Saya belum sempat "duduk dikursi" Gubernur KDH saya sudah dibanjiri dengan surat-surat, surat kawat, surat-surat kaleng dan sebagainya, untuk memecat, menggganti lurah ini, lurah itu; camat ini camat itu; dan sebagainya yang kesemuanya datang dari pihak golongan komunis.

Tidak satupun saya penuhi, atau yang saya tindak berdasarkan kekuasaan dan wewenang seorang Gubernur KDH, melainkan semua surat-surat, kawat-kawat, mau pun tuntutan-tuntutan secara lisan, saya teruskan kebagian U.P.U. (Urusan Pemerintahan Umum) untuk diminta pandangan dan pendapatnya, sebelum saya mengambil keputusan.

Apel Karyawan Pemerintah DCI, dalam rangka HUT DCI yang ke 438 didepan Balai Kota pada tanggal 22 Juni 1965.

Instruksi No. 9 tahun 1964, Departemen Dalam Negeri, yang merupakan tindak lanjut dan sesuai dengan haluan politik Pemerintah ketika itu, bagi golongan komunis dengan sendirinya secara ekstrim dipakainya dalam forum atau kesatuan-kesatuan berporos nasakom, menuntut pengretoolan aparatuur negara, yang didalam lingkungan DKI, antara lain diajukan kepada beberapa pejabat eksekutip dan anggota-anggota legislatip, yang kesemuanya — terkecuali atas permintaannya sendiri — saya tidak kabulkan.

Demikian pula, menjelang diselenggarakannya perayaan "Dasawarsa A.A." bulan April 1965, tidak berkelebihan kalau saya katakan, secara bertubi-tubi saya didatangi Front Pemuda yang memaksakan saya untuk membekukan dan melarang kegiatan-kegiatan H.M.I. (Himpunan Mahasiswa Islam), seketika itu juga, karena ada info mereka akan mengacaukan Dasawarsa A.A., malahan menyodorkan saya naskah pembekuan itu untuk ditanda tangani.

Dan untuk menambah kegairahan dan ketidak ragu-raguan saya, berkatalah delegasi ini; "di daerah-daerah lain penguasa-penguasa setempat sudah bertindak, kenapa di Jakarta, yang Gubernur Kepala Daerah-nya dikenal sebagai seorang "progresip-revolusioner berporos Nasakom dan sebagainya" justru tidak berbuat apa-apa? Tidak itu saja, karena tidak ada berita kepastian dari saya, maka dibarengi dengan isyarat-isyarat akan bertindak sendiri dan sebagainya.

Sementara delegasi H.M.I. menghadap — tanpa diketahui Front Pemuda dan kepada pimpinannya saya jamin tidak akan bertindak karena saya sebagai "Bapak (warga kota), maka saudara-saudara pun termasuk anak-anak saya", tetapi saya minta

Gubernur Henk Ngantung sedang menghadiri perayaan hari kanak-kanak Nasional pada tahun 1965 di Taman Surapati.

kesediaannya, khususnya kalau mengarahkan massanya untuk ikut menyambut dan memeriahkan Dasawarsa A.A., tidak menonjol-nonjolkan lambang-lambang atau hal-hal yang bisa menimbulkan kekacauan, dan sebagainya.

Ternyata prinsip kerja-sama ini berhasil baik dan program Dasawarsa A.A. baik didalam rapat samudra di Stadion Utama Senayan, yang dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia dan Kepala-kepala Negara dan Pemerintah Negara-negara Asia-Afrika, maupun sepanjang jalan, bahkan diseluruh Ibukota berjalan dan berakhir dengan sukses!

Dalam rangka peng-nasakom-an kepemimpinan dalam segala bidang, maka saya didatangi delegasi-delegasi, yang menuntut; menasakomkan pimpinan Perusahaan-perusahaan Daerah. Menghadapi masalah ini saya tempuh kebijaksanaan agar Perusahaan-perusahaan Daerah betul-betul menguntungkan bagi daerah Ibukota. Saya bukan ahli, yang saya tahu adalah, bahwa ekonomi memerlukan keahlian! Sekarang pimpinan perusahaan harus di nasakomkan — saya setuju, tetapi dengan terpenuhinya tuntutan politik itu apa jaminannya akan keberhasilan perusahaan-perusahaan itu.

Dan saya umpamakan ke-tiga unsur yang mewakili nasakom yang saya percayakan untuk memimpin Perusahaan Daerah, sebagai pembalap-pembalap sepeda yang ditugaskan memenangkan dan menjunjung tinggi nama baik DKI. dalam suatu perlombaan "balap sepeda". Dipunggung maupun di dada dengan huruf besar bertulis Nas-A-Kom. Waktu diberi isyarat start, ternyata salah satu, bahkan ketiga-tiganya belum bisa naik sepeda, apakah dengan demikian saya pertahankan, sekalipun secara politik sudah terpenuhinya tuntutan?

Masih banyak lagi kejadian dan pengalaman yang cukup gawat yang bisa saya kemukakan disini, tetapi bukan maksud saya untuk membuka luka-luka lama, melainkan dengan mengetengahkan beberapa pengalaman adalah sekedar illustrasi pelengkap dari situasi keadaan ketika itu.

MUNGKIN para pembaca akan bertanya, kenapa saya mengambil sikap yang adakalanya mengesankan seolah-olah saya bertentangan dengan haluan politik pemerintah ketika itu, padahal dalam pidato-pidato atau rapat-rapat resmi maupun dalam peragaan diri saya, adakalnya mengesankan sebaliknya.

Adalah bohong, munafik dan omong kosong, kalau saya sekarang di masa orde-baru ini — menyatakan; saya memang tidak setuju dengan kebijaksanaan politik, atau orde-lama itu!

Tetapi sebaliknya saya sangat bodoh, manakala kedudukan saya sebagai Kepala Daerah Khusus Ibukota asal mulanya diperoleh dari pencalonan dan dukungan partai dan golongan-golongan massa yang dimasa itu berada dipuncak-puncak kejayaannya, saya tidak menjalankan dan memenuhi konsep-konsep dan tuntutan-tuntutan politik massa itu, atau bersandar pada massa itu untuk lebih memperkokoh kedudukan, maupun memperingan kesulitan dan problema-problema saya sebagai Gubernur Kepala Daerah.

Tidak sulit bagi saya untuk menjadi semacam "favorit-masa-itu", untuk membuat massa dan massa itu bertepuk tangan serta mengelus-elus saya kalau saya lewat. Kenyataannya; disuatu pihak saya mengecewakan, sedangkan dipihak lain saya dicurigai.

Tentu para pembaca akan bertanya lagi, kenapa saya begitu bodoh? Jawab saya; karena semenjak saya dikenal dan digolongkan sebagai "orang Lekra atau — PKI", sekalipun waktu itu tidak ada larangan terhadapnya, saya tidak pernah secara serius ditanya atau diwawancarai mengenai hal ini, kecuali — yang masih segar dalam ingatan saya — oleh dua orang, yaitu : Bung Karno, Presiden Republik Indonesia dan Bapak Haji Sjafiudin Zuchri, Menteri Agama Republik Indonesia, bertempat di Istana Merdeka, tetapi pada kesempatan yang berlainan.

Dan didalam buku kenang-kenangan ini, kepada Sejarah Kota Jakarta, didaerah dan kota mana saya pernah mendapat kehormatan dan kepercayaan memimpin Pemerintahannya, saya merasa wajib dan terpanggil untuk menyatakan hakekat jiwa dan hati saya, bahwa saya bukan orang komunis dan tidak pernah mencita-citakan komunisme.

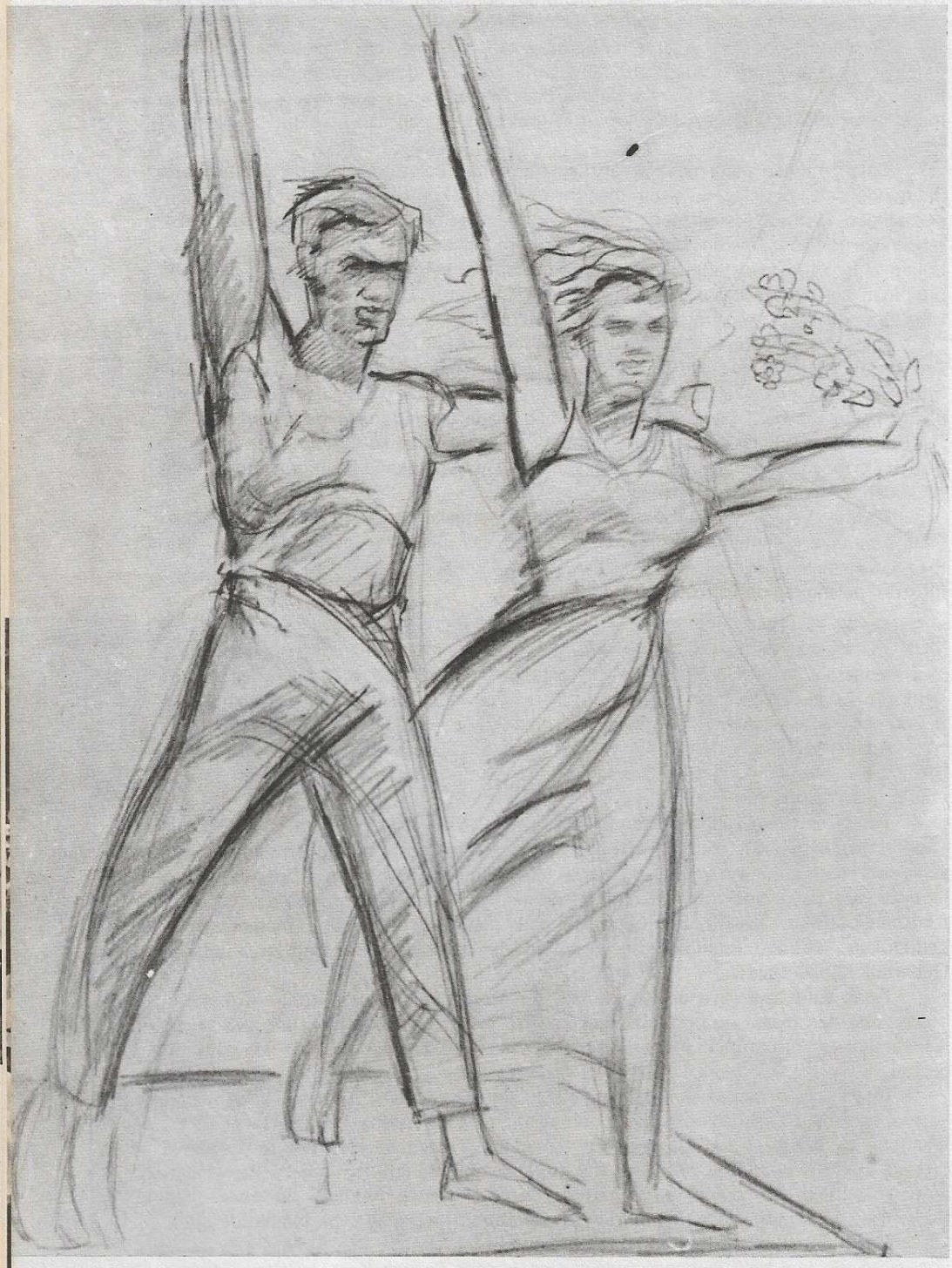

Sketsa rancangan Patung "Bangsa Indonesia menyambut hari depannya", tetapi yang sekarang dikenal sebagai Tugu "Selamat Datang" di Bundaran Hotel Indonesia.

Bahwa berkat keyakinan dan kepercayaan saya sebagai seorang nasrani-kristen, dan keyakinan akan kebenaran dan kebesaran serta kemungkinan-kemungkinan tetapi juga batas-batas yang dibawah falsafah negara Pancasila, saya tidak pernah goncang dan gemetar menghayati hidup sebagai — dan didalam ketotalitasannya, termasuk perlbagai pandangan maupun ideologi yang dikandunginya.

Sebagaimana manusia saya tidak ingin memusuhi dan dimusuhi, karenanya saya segan memecat orang dari kedudukan atau jabatannya, apalagi kalau hanya didasarkan agitasi-agitasi yang bersifat insidentil.

Lagipula sebagai "seorang bapak" saya harus bijaksana, dan mengerti bahwa pada umumnya, mereka yang diincer-incer atau yang dituntut pengretoolan atau pemecatan berdasarkan ukuran politik, bukan orang-orang kriminil dan bodoh, tetapi ada kalanya eksponen-eksponen didalam lingkungan profesi atau massanya.

Menggeser atau mengrumahkan orang-orang yang memiliki keahlian dan potensi-potensi tertentu, berarti menyerahkan ia kepada nasibnya sendiri, apakah cara ini menjamin keamanan dan ketertiban?

Dalam hal ini saya teringat suatu pepatah asing yang berbunyi demikian; "Idleness is the root of all evil" jadi janganlah saya begitu saja "memperistirahatorang yang memiliki suatu vitalitas tersendiri, karena dengan memperistirahatkan orang itu, vitalitas pribadinya tidak teristirahatkan karenanya, melainkan berjalan dan berkembang terus!

Dan karena tidak ada saluran legal yang menampungnya, maka tidak mustahil vitalitas itu berkembang lebih negatip, bahkan lebih membahayakan daripada sebelumnya.

Jadi dalam batas-batas kemampuan saya, saya berusaha untuk menjadi seorang Gubernur Kdh. yang correct dan tidak sembrono, demi keutuhan dan ketentraman masyarakat Ibukota yang dipertanggung jawabkan kepada saya.

Beberapa kesimpulan. Mendekati akhir tulisan saya ini, maka pengalaman-pengalaman selama masa jabatan saya sebagai Wakil, terutama sebagai Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Kalau sebelumnya saya diangkat menjadi Wakil Gubernur Kepala Daerah saya mengatakan, ketidak mampuan saya karena sadar akan kekurangan pengalaman dan pengetahuan, maka setelah saya menjalankan tugas dan diberhentikan dengan hormat, saya masih tetap berpendapat demikian, tetapi bukan karena kurang pengalaman dan pengetahuan, tetapi justru karena pengalaman dan pengetahuan, yang saya peroleh selama dan dimasa jabatan itu.

Dan kalau dalam uraian sebelumnya saya menganggap bahwa masa jabatan dan kesempatan kerja bagi saya, terlalu singkat untuk memungkinkan saya menghasilkan hal-hal yang lebih berarti, maka didalam keadaan dan kondisi selama masa jabatan saya itu, tidak dapat diartikan bahwa seandainya masa jabatan dan kesempatan kerja saya lebih lama, saya bisa menghasilkan lebih banyak.

Didalam masa tugas saya, lambat laun saya mengerti dan insyaf, tentang apa yang menjadi tanda tanya, sebelumnya saya diangkat oleh Bung Karno, Presiden Republik Indonesia, untuk memimpin Pemerintah DKI Jakarta; bukan hanya untuk mempercantik Ibukota, tetapi lebih dari itu!

Jakarta harus dipimpin seorang yang mengerti pemikiran dan cita-cita Bung Karno tentang Ibukota. Kedua, orang itu bukan hanya memiliki jiwa seni, tetapi harus memiliki jiwa dan kemampuan kreatip dan inventief dalam arti yang luas dan sanggup mendobrak konvensi-konvensi lama yang ada demi pertumbuhan dan pengembangan hal-hal yang baru!

Kebenaran akan faham-faham tersebut diatas, saya simpulkan ketika Bung Karno, incognito — mengajak saya keliling-keliling kota, pada kesempatan mana saya menelan pil paling pahit dalam hidup saya, mendengar kekecewaan Bung Karno terhadap saya; "Karena apa, — Henk kurang kreatif" sungguhpun saya berkeyakinan akan beberapa kemampuan saya, tetapi sangat sulit bagi saya, untuk menjelaskan sebab-sebabnya!

Sangat sulit, karena menjelaskan sebab-sebabnya akan menjadi suatu cerita

Sketsa rancangan Tugu "Pembebasan Irian Barat" karya Henk Ngantung yang menghias Lapangan Banteng.

yang amat panjang, tetapi yang lebih sulit lagi untuk menjelaskan bahwa salah satu sebab dari sekian banyak sebab, adalah antara lain karena "overkreativitas" Bung Karno sendiri — yang saya sebut sebelumnya sebagai "prosedure khusus", yang sebaliknya adalah juga akibat kesalahan saya sendiri sebagai "anggota masa dan massa" itu sebagai pewujud kepemimpinan nasional yang melahirkan keadaan dan kondisi, penyebab lahirnya "overkreativitas" dan "prosedure khusus" itu sendiri!

Memang ada beberapa pemikiran atau gagasan, yang ingin saya kembangkan ketika itu untuk keperluan mana pada batas-batas tertentu, diperlukan kebebasan dan kesempatan serta tidak terlalu banyak pencampuran tangan. Tetapi persyaratan inilah tidak dimungkinkan oleh dan didalam keadaan dan kondisi politik ketika itu.

Syarat-syarat tersebut diatas adalah perlu, karena pengertian, bahwa suatu idee adalah anak kandung jiwa (geest) seseorang, sebagai ibu kandung idee itu. Ibarat hubungan seorang Ibu dan bayinya, maka adalah tanggung jawab dan kebebasan ibu kandung itu untuk membimbing dan membesarkan bayi itu sampai ia cukup dewasa untuk dilepas dan berkembang sendiri.

Syarat-syarat untuk mampu mendewasakan dan menjelmakan idee sampai ia berbentuk sesuatu yang nyata, apakah dalam bentuk peraturan, pembangunan atau hal-hal yang baru lainnya, sekalipun didalam keadaan dan kondisi seperti terurai diatas, tentu saja ada pengecualiannya.

Dan pengecualian inilah yang saya secara terus terang tidak memiliki, yaitu; kewibawaan;

Kewibawaan yang saya miliki, hanya baru kewibawaan diatas kertas; hanya kewibawaan formil karena "pengangkatan" saja, sedangkan sebagai seorang "praktek", atau bekas seniman, saya berpengalaman dan menarik pelajaran, bahwa untuk memperoleh nama, - sebagai salah satu syarat atau unsur penyebab dan penunjang kewibawaan, adalah melalui dan karena prestasi! Dan untuk berprestasi inilah, saya merasa tidak berkesempatan cukup, tetapi juga tidak dimungkinkan didalam keadaan dan kondisi dimasa jabatan saya itu.

Terkecuali kalau saya memperuntukkan "kewibawaan formil" itu, untuk jasa dan prestasi "secara sepihak", atau memperoleh dan mendasarkan kewibawaan yang diperlukan itu, dari suatu angkatan atau massa tertentu yang terorganisasi, dalam hal ini misalnya dari kekuatan-kekuatan massa atau partai yang ketika itu berada pada puncak-puncak kejayaannya. Tetapi justru inilah yang saya hindari dan tidak hendaki. Saya tidak dapat bayangkan bagaimana nasib dan rupa Jakarta, seandainya itu terjadi.

Karenanya, saya tidak bisa memeriahkan tulisan kenang-kenangan saya ini dengan suatu expo karya-karya, atau mengisahkan upacara-upacara pemancangan tiang atau peresmian proyek ini atau proyek itu, melainkan sebagaimana yang ada saja dan hal-hal yang belum hapus dari ingatan saya.

Namun saya tidak berkecil hati karenanya, melainkan didalam keadaan sulit dan terjepit itu, saya masih merasa bangga dan terutama bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Bijaksana, yang senantiasa membimbing dan memberi akal dan intuisi, yang tepat bagi saya, selama masa jabatan yang penuh tekanan, ujian dan godaan.

Secara menyeluruh, segala suka dan duka yang dialami Jakarta dimasa itu, merupakan iuran berharga dalam memperkokoh dan proses pengdewasaan Jakarta sebagai Ibukota Bangsa dan Rakyat Indonesia yang berjuang menghadap dan menyambut Hari-Depannya. Semangat dan optimisme inilah sesungguhnya sudah terpancang di jantung kota Jakarta yang dilambangkan pada tugu, - yang selama ini dikenal oleh umum, sebagai "Tugu Selamat Datang" yang seharusnya, dan yang sebenarnya, adalah Tugu; "Bangsa Indonesia Menyambut Hari-Depannya", sebagaimana saya menjelaskannya sebelumnya Tugu itu - dalam rangka Asian Games - dibangun, dihadapan Sidang Paripurna DPRD-GR DKI Jakarta, pada tanggal 21 Nopember 1961, jam 22.15 di malam hari.

Mungkin didalam tulisan ini saya memberi kesan, terlalu sering menyebut atau

Malam perpisahan Bapak Henk Ngantung dari Pejabat Pejabat Pemerintah DCI dikediaman resmi Gubernur Taman Surapati 7.

melibatkan nama Bung Karno, Presiden Republik Indonesia.

Memang, demikianlah keadaan dan kenyataannya. Saya tidak akan berkesempatan dan mendapat kehormatan untuk turut mengisi buku kenang-kenangan ini, seandainya saya tidak pernah menjadi Gubernur Kdh. Khusus Ibukota Jakarta dan kedudukan ini saya peroleh dari Bung Karno. Dan saya tidak dapat memungkiri pula kenyataan, bahwa selama masa jabatan saya, praktis tidak ada pembangunan maupun peristiwa-peristiwa penting, yang mengandung nilai-nilai sejarah bagi Jakarta, tanpa direstui atau ditangani langsung, atau tidak langsung oleh Bung Karno.

Dan saya tidak segan-segan mengakui, bahwa saya adalah alat, yang diperalat bahkan! Tetapi saya tidak merasa berkekurangan karenanya, karena Bung Karno adalah Kepala Negara saya; adalah Kepala Negara Bangsa dan Rakyat Indonesia, yang syah ketika itu. Dan menjadi alat atau diperalat oleh seorang Kepala Negara, didalam kesadaran dan pemikiran sederhana seorang warga negara Indonesia seperti saya, menjadi alat atau diperalat itu, merupakan suatu bentuk perwujudan kesetiaan dan pengabdian kepada Nusa dan Bangsa.

EXODUS.

PEMBERHENTIAN saya sebagai Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 208 Tahun 1965, tertanggal 14 Juli 1965, dimana dinyatakan bahwa saya diberhentikan dengan hormat dan sambil menunggu penugasan lebih lanjut, memperbantukan saya kepada Menteri/Sekretaris Negara, terjadi pada waktu saya masih berada di Kota Wina (Austria) dalam rangka melanjutkan pengobatan penyakit mata saya.

Penghentian yang mendadak ini, manakala pada hari dan tanggal pemberhentian saya sebagai Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta masih berada di Wina dan pada hari itu juga masih mengadakan kunjungan kehormatan kepada Walikota Kota Wina, yang menerima saya secara baik, ramah dan penuh rasa persaudaraan, sekembalinya saya di Tanah Air tentu saja menimbulkan rasa sedih dan sesal dalam hati dan pemikiran saya, disamping diliputi pelbagai tanda tanya.

Sedih dan sesal, bukan karena saya kehilangan kedudukan, tetapi sedih dan sesal, karena saya harus meninggalkan Jakarta, tanpa bisa memberikan sesuatu kepadanya.

Tetapi sebaliknya, saya menerima pemberhentian itu dengan perasaan lega dan rupanya perasaan serupa dialami juga, teristimewa oleh golongan komunis, tetapi dengan lain alasan, sebagaimana yang dinyatakan oleh salah satu Wakil Ketua DPRD-GR DKI Jakarta, Drs. Susilo, yang mewakili suara golongan komunis, termuat dalam harian "Warta Bakti", tanggal 16 Juli 1965, yang bunyinya sebagai berikut:

Pimpinan DPRD-GR DCI Djaya :
Pengangkatan kembali Pak Marno diterima dengan hati lega

Djakarta, 16-7 (W. Bhakti).

Wk. Pimpinan DPRD-GR DCI Djaya Chandra Nainggolan dan Drs. Suselo Triharso dalam keterangannya kepada pers di Balai Kota Djum'at pagi berkenaan diangkatnja kembali Majdjen Dr. Sumarno Sosroatmodjo selaku Menteri/KDH DCI Djaya mengatakan, bahwa keputusan Presiden itu diterima dengan perasaan lega hati karena tentunya keputusan tsb. telah dipertimbangkan se-masak2nja oleh Presiden sesuai dengan situasi sekarang.

Sehubungan dengan itu oleh Pimpinan2 DPRD-GR tsb. dinjatakan harapan dan kejakinannja, bahwa dengan adanja situasi jang baru itu semua usaha2 Pemerintah Daerah bisa berdjalan lebih lantjar, dan djuga lebih baiknja hubungan antara anggota2 DPRD-GR dengan badaneksekutif lainnja.

Tetap Daerah Otonom.

Oleh Chandra Nainggolan

Upacara serah terima jabatan Gubernur Kepala Daerah dari Henk Ngantung kepada Menteri Dalam Negeri Dr. Soemarno Sosroatmodjo yang dengan demikian menjadi Menteri Kepala Daerah DCI.

jang sependapat dengan Drs. Suselo Triharso didjelaskan lebih landjut, bahwa dengan adanja Pen Pres No. 15 tentang peningkatan wewenang Pemerintah DCI dan peningkatan sebutan KDH DCI Djaya selaku Menteri, hal itu telah memenuhi apa jang diidam2kan oleh DPRD-DCI Djaya, dimana hal itu dapat memperlantjar tugas se-hari2 Pemerintah Daerah, dan dapat menjampaikan setjara langsung semua hasrat dan masalah jang dihadapi oleh Pemerintah Daerah didalam sidang2 kabinet. Selain dari itu Presiden dapat memberikan perhatian langsung terhadap pembangunan Ibukota Revolusi jang bergerak dgn. tjepat.

Dengan adanja peningkatan tsb. Ibukota Djakarta Raya tetap sebagai Daerah Otonom, tetapi mempunjai sifat chusus sebagai Ibukota, dimana Presiden memberikan bimbingan dan pengawasan langsung.

Sifat chusus lainnja adalah bahwa dlm waktu jad. akan diangkat 3 orang Wakil2 Kepala Daerah jang bertugas sebagai Pembantu Utama Menteri, dan 7 orang Pembantu Chusus.

Sementara itu Drs. Suselo Triharso jang mewakili suara golongan Komunis menjatakan pendapatnja, bahwa kuntji untuk mengatasi segala masalah nasional maupun regional, betapa pentingnja masalah itu akan dapat diatasi dengan melaksanakan 5 Adjimat Pemimpin Besar Revolusi. Dalam hubungan itu oleh Drs. Suselo Triharso di-sebut2 masalah jang menjangkut anggota BPH Gozali Sjablan bekas pentolan Masjumi jang meskipun telah dischors selama setahun, tapi sampai sekarang masih belum ada penjelesaiannja. Begitu djuga mengenai beberapa orang anggota DPRD-GR jang statusnja tidak lagi sesuai dengan Instruksi Mendagri No. 9 tentang penjegaran anggota2 DPRD-GR.

PENUTUP.

SEBAGAI penutup tidak terlambat kiranya, kalau pada kesempatan mengakhiri tulisan ini, saya memohon maaf kepada masyarakat Ibukota pertama; karena tidak banyak yang dapat saya sumbangkan dimasa saya membina dan mengembangkan Ibukota. Kedua; saya mohon maaf pula seandainya saya secara sengaja atau tidak sengaja, berbuat kesalahan dan kekurangan.

Dan kepada Bapak Haji Ali Sadikin, Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan, untuk turut mengisi buku kenang-kenangan ini.

Semoga Tuhan senantiasa melindungi dan melimpahkan rahmat dan Hidayah-Nya kepada Jakarta Ibukota Republik Indonesia dan Warganya, dan kebijaksanaan dan kekuatan kepada para pembina-pembinanya, baik yang sekarang maupun para penerus-penerusnya.

Amin

jang sependapat dengan Drs. Suselo Triharso didjelaskan lebih landjut, bahwa dengan adanja Pen Pres No. 15 tentang peningkatan wewenang Pemerintah DCI dan peningkatan sebutan KDH DCI Djaya selaku Menteri, hal itu telah memenuhi apa jang diidam2kan oleh DPRD-DCI Djaya, dimana hal itu dapat memperlantjar tugas se-hari2 Pemerintah Daerah, dan dapat menjampaikan setjara langsung semua hasrat dan masalah jang dihadapi oleh Pemerintah Daerah didalam sidang2 kabinet. Selain dari itu Presiden dapat memberikan perhatian langsung terhadap pembangunan Ibukota Revolusi jang bergerak dgn. tjepat.

Dengan adanja peningkatan tsb. Ibukota Djakarta Raya tetap sebagai Daerah Otonom, tetapi mempunjai sifat chusus sebagai Ibukota, dimana Presiden memberikan bimbingan dan pengawasan langsung.

Sifat chusus lainnja adalah bahwa dlm waktu jad. akan diangkat 3 orang Wakil2 Kepala Daerah jang bertugas sebagai Pembantu Utama Menteri, dan 7 orang Pembantu Chusus.

Sementara itu Drs. Suselo Triharso jang mewakili suara golongan Komunis menjatakan pendapatnja, bahwa kuntji untuk mengatasi segala masalah nasional maupun regional, betapa pentingnja masalah itu akan dapat diatasi dengan melaksanakan 5 Adjimat Pemimpin Besar Revolusi. Dalam hubungan itu oleh Drs. Suselo Triharso di-sebut2 masalah jang menjangkut anggota BPH Gozali Sjablan bekas pentolan Masjumi jang meskipun telah dischors selama setahun, tapi sampai sekarang masih belum ada penjelesaiannja. Begitu djuga mengenai beberapa orang anggota DPRD-GR jang statusnja tidak lagi sesuai dengan Instruksi Mendagri No. 9 tentang penjegaran anggota2 DPRD-GR.

PENUTUP.

SEBAGAI penutup tidak terlambat kiranya, kalau pada kesempatan mengakhiri tulisan ini, saya memohon maaf kepada masyarakat Ibukota pertama; karena tidak banyak yang dapat saya sumbangkan dimasa saya membina dan mengembangkan Ibukota. Kedua; saya mohon maaf pula seandainya saya secara sengaja atau tidak sengaja, berbuat kesalahan dan kekurangan.

Dan kepada Bapak Haji Ali Sadikin, Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan, untuk turut mengisi buku kenang-kenangan ini.

Semoga Tuhan senantiasa melindungi dan melimpahkan rahmat dan Hidayah-Nya kepada Jakarta Ibukota Republik Indonesia dan Warganya, dan kebijaksanaan dan kekuatan kepada para pembina-pembinanya, baik yang sekarang maupun para penerus-penerusnya.

Amin

dr. H. SOEMARNO

Brig. Jend. (dr). H. SOEMARNO SOSROATMODJO

Lahir di Rambipuji, 24 April 1911
Gubernur Kepala Daerah Chusus Ibukota Jakarta, 4 Pebruari 1960 – 26 Agustus 1964
Menteri Dalam Negeri merangkap Menteri Kepala Daerah Chusus Ibukota Djakarta Raya, 15 Juli 1965 – 23 Maret 1966.

RIWAYAT HIDUP SINGKAT.

DR. SOEMARNO lahir di Rambipuji (Jember) pada tanggal 24 April 1911. Lulus dari Nederlansch Indische Artsen School (NIAS) – Sekolah Dokter Hindia Belanda di Surabaya pada tanggal 2 April 1938.

Pada jaman Hindia Belanda bekerja di bidang kesehatan. Mula-mula aktif dalam pemberantasan penyakit malaria di Surabaya, kemudian berturut-turut ditempatkan sebagai dokter pemerintah di Bulungan (Kalimantan Timur), Kuala Kapuas, Kandangan dan Amuntai (Kalimantan Selatan) sampai tahun 1942.

Dalam jaman pendudukan tentara Jepang, kecuali sebagai dokter di "Onderafdeling" Hulu Sungai (Kalimantan Selatan) mulai berpengalaman dalam pemerintahan dan pernah menjadi Komandan "Bo Ei Tai Shin Tai (Pasukan Pemuda).

Pada awal Revolusi menjadi dokter TKR, kemudian menduduki berbagai jabatan sebagai dokter tentara dalam TNI, mula-mula di Malang, kemudian di Sala.

Dari tahun 1949 – 1958 menjadi kepala Biro B, Dinas Kesehatan Angkatan Darat berpangkat kolonel, dilantik oleh Presiden Sukarno di Istana Yogyakarta. Dalam masa itu pula aktif di dalam berbagai kesempatan dinas kesehatan.
Pernah ditempatkan di Makasar. Ketua delegasi PMI ke konferensi internasional Palang Merah di Toronto (1952) New Delhi (1957), dan Jenewa (1963), menjabat Asisten III KASAD (1958 – 1960) dan Gubernur Kepala Daerah Jakarta Raya (1960 – 1964), kemudian sampai tahun 1966 menjadi Menteri Dalam Negeri dan pada tahun 1965 disamping jabatan Menteri merangkap sebagai Menteri Kepala Daerah Ibu Kota Jakarta Raya. Pada bulan Nopember 1966 di pensiun dengan pangkat terakhir May. Jend. TNI-AD.

Berlatar belakang pendidikan dan pengalaman sebagai dokter dan anggota Palang Merah itulah, maka selama menjadi Gubernur Kepala Daerah Ibu Kota Jakarta Raya perhatian utamanya ialah pembinaan lingkungan dan fasilitas kehidupan bagi rakyat Jakarta. Dasar-dasar perbaikan kota pada jaman beliaulah di tuangkan dalam rencana pembangunan kota. Dari pokok-pokok kebijaksanaannya yang di kenang dalam buku ini, pokok uraian banyak menyangkut bidang kemasyarakatan dan kesejahteraan sosial umumnya di samping mulai dengan peletakan dasar pembangunan kota modern bagi Jakarta.

Beliau beristrikan Bu Armistiani Ronoatmodjo, yang seperti dr. Soemarno berasal dari kalangan pamong praja, berputra 7; 4 laki-laki dan 3 perempuan. Dua diantaranya mengikuti jejak ayah sebagai dokter (satu laki-laki dan satu perempuan), yang lainnya mewakili minat dan bakat yang bervariasi, sebagai karyawan pada perusahaan perkapalan dan perhotelan, sebagai ahli pertanian, ekonomi dan arsitektur.

Bersama istri, beliau aktif pula dalam kegiatan berbagai organisasi dewasa ini.

(ARS).

TANDJUNG PRIOK
SUNTER
TJEMPAKA PUTIH
PULO MAS
(DLM. PERENTJANAAN)
ASIAN GAMES

MENGABDI DALAM KEADAAN YANG SUKAR

Pengalaman menjadi Kepala Pemerintahan di Jakarta pada Masa Perjuangan Mengembalikan Irian Barat dan Konfrontasi

Oleh: Dr. Soemarno Sostroatmodjo.

JAKARTA berbeda dari kota dan daerah-daerah lainnya, terutama karena kota ini adalah Ibukota Negara. Dimana-pun, yang namanya Ibukota Negara mempunyai persyaratan yang berbeda dari kota dan daerah lain yang bukan Ibukota. Mereka yang menyadari hal ini tidak merasa aneh mendengar wargakota Jakarta mengukur pertumbuhan kotanya dengan Ibukota-Ibukota Negara tetangga, tetapi tidak dengan kota-kota lain di Indonesia sendiri.

Pada masa jabatan kami hal ini sudah disadari oleh Pemerintah Pusat. Hal ini antara lain ternyata dari beberapa tindakan-tindakannya. Yang pertama adalah penetapannya bahwa Jakarta adalah Ibukota Negara, seperti yang tertera dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1964. Kemudian harus dicatat perobahan sebutan bagi Kepala Pemerintahan di Jakarta. Pada masa jabatan Bapak Suwirjo, Bapak Syamsuridjal dan Bapak Sudiro Kepala Pemerintahan di Jakarta disebut Walikota, tetapi pada masa jabatan kami predikat itu berganti menjadi Gubernur Kepala Daerah dan kemudian Kepala Pemerintahan Jakarta malahan diberi kedudukan sebagai Menteri.

Sementara itu ada hal yang menguntungkan bagi Jakarta, meskipun mungkin kurang dipahami oleh banyak pihak. Yang dimaksud adalah pengakuan dari Pemerintah Pusat bahwa pembangunan di Jakarta sebagai Ibukota Negara terutama menjadi tanggungan Pemerintah Pusat. Hal ini paling jelas dinyatakan dengan pembangunan-pembangunan yang dilakukan pada tahun 60-an berkenaan dengan akan dilaksanakannya Asian Games ke IV.

PADA waktu itu fasilitas perkotaan modern mulai dibangun, seperti Hotel Indonesia, Wisma Warta, jalan yang berkwalitas baik, yakni Jakarta By-Pass, Tugu Nasional, sejumlah patung dibeberapa tempat, dan tentunya fasilitas olahraga di Senayan sendiri.

Diwaktu itu kita biasa memandangnya sebagai hal-hal yang monumental, meskipun sebenarnya yang dibangun adalah hal-hal yang biasa saja, yang memang merupakan persyaratan yang normal bagi sesuatu Ibukota Negara.

Terhadap pembangunan gaya ini dizaman itu tentu banyak orang yang tidak setuju, yang menganggapnya sebagai barang mubazir. Tetapi sekarang ini, setelah Jakarta benar-benar dibangun menjadi kota Metropolitan, kami melihat bahwa makin banyak pihak yang mulai sadar, bahwa hal-hal yang dulu dianggap mubazir itu sebenarnya adalah hal-hal yang wajar saja dan pada intinya merupakan awal dari "stedebouw" modern di Indonesia.

Pada tahun 60-an itu kami mencoba untuk menenangkan suasana dengan menjelaskan bahwa pembangunan monumental yang diadakan di Jakarta hendaknya dapat pula dianggap penting bagi pendidikan praktek para calon insinyur dan ahli pembangunan dalam penggunaan alat-alat modern.

Dalam hubungannya dengan kedudukan Jakarta sebagai Ibukota Negara, Pemerintahan Kota mempunyai peranan yang penting. Dia harus berusaha supaya Jakarta sebagai Ibukota bisa berperan dengan baik, dengan memelihara dan menciptakan iklim yang menguntungkan untuk itu, dan ini akan tercapai terutama kalau Pemerintah Daerah mampu mengurusi rumah tangganya dengan betul.

Secara lebih konkritnya, kami berpendapat bahwa yang termasuk dalam urusan rumah tangga itu adalah perlindungan terhadap rakyat, yang memang menjadi kewajiban dari setiap Pemerintahan. Dan dalam kaitannya dengan situasi dan kondisi diwaktu itu, dimana kita hidup dalam suasana perjoangan mengembalikan Irian Barat

Upacara pengambilan sumpah Gubernur Soemarno di Balai Kota pada tanggal 6 Pebruari 1960.

dan konfrontasi, perlindungan tersebut harus terutama diartikan memberi kemampuan kepada masyarakat untuk melindungi dirinya sendiri dalam keadaan darurat dan waspada terhadap bahaya subversi.

Masih termasuk dalam urusan rumah tangga ini adalah keharusan bagi Kepala Pemerintahan Daerah untuk ikut berkecimpung dalam kegiatan politik praktis, dalam hal ini melalui forum Front Nasional, yang tujuannya tidak lain supaya kegiatan politik bisa disalurkan kearah yang benar, sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Sementara itu masalah tempat tinggal, pangan dan kesempatan memperoleh penghasilan bagi rakyat merupakan hal-hal yang harus diprioritaskan, tanpa melupakan keharusan untuk merintis jalan kearah perkembangan ekonomi sejauh yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Sekarang ini dengan berlalunya situasi dan kondisi yang berlaku pada tahun enam-puluhan, banyak hal-hal yang telah menjadi tidak relevant lagi untuk masa sekarang, tetapi banyak juga hal-hal yang masih cocok dengan keadaan, telah bertumbuh terus dibawah pimpinan Bapak Ali Sadikin.

Sebagai contoh, patut kami sebutkan bahwa Bank Pembangunan Daerah, Proyek Ancol, P.T. Pembangunan Jaya, Proyek Senen, Proyek Cempaka Putih dan lain-lain masih terus berkembang dengan baiknya. Dan yang lebih membesarkan hati lagi adalah bahwa pembangunan kota secara modern, yang dicetuskan pada tahun enam-puluhan itu sekarang-pun masih terus berlangsung.

Akhirnya, melalui kesempatan ini kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ali Sadikin, yang berkat keluasan pandangannya telah memungkinkan diterbitkannya catatan-catatan ini, sedang kepada sesama wargakota Jakarta kami sampaikan ucapan selamat berkenaan dengan Hari Ulang Tahun Kota kita yang ke 450.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita sekalian.-

JAKARTA IBUKOTA NEGARA.

PADA hari-hari sesudah pelantikan Gubernur/Kepala Daerah serta wakil Kepala Daerah yang baru pada tanggal 9 Pebruari 1960, Jakarta mengalami musim hujan yang sangat hebat sehingga rakyat pada 7 kelurahan menderita kebanjiran. Tidak kurang dari 40.704 orang korban memerlukan bantuan. Ada kalanya curah hujan tercatat 75 mm dalam 12 jam, yang benar-benar merupakan tantangan bagi Pemerintah Daerah baru. Daerah Grogol, daerah perumahan baru, kebanggaan bagi Jakarta pada waktu itu, dimana terdapat perumahan dari para anggota parlemen, banjir di dalam rumah mencapai setinggi lutut dan pinggang. Lebih parah lagi keadaan kampung disekelilingnya. Banjir melanda sampai setinggi atap rumah. Seluruh minat dicurahkan untuk upaya bagaimana membantu penduduk yang terkena musibah. Memasakpun mereka tak dapat, hingga bantuan tak dapat ditunda-tunda.

Banjir, kebakaran, sampah.

GUBERNUR/Kepala Daerah yang baru dilantik adalah anggota Pengurus Besar Palang Merah Indonesia. Pengalamannya dan fasilitas Palang Merah dikerahkan untuk dapat meringankan nasib para korban. Fungsi RT/RK penting sekali dalam melaksanakan bantuan. Dengan mereka tidak lama kemudian dibentuk Team Asistensi Bencana Alam yang tidak saja dapat dikerahkan untuk membantu rakyat karena kebanjiran, tetapi juga karena kebakaran. Para Anggota Team Asistensi ini kemudian merupakan kader di tiap kelurahan dan kampung untuk membantu Lurah dan RT/RK dalam melaksanakan tugasnya.

Pegawai Pamong Praja yang sudah terlatih lebih dahulu membimbing "Team Asistensi", sedangkan inti pelatihnya adalah seluruh Barisan Pemadam Kebakaran, dibantu oleh Palang Merah Indonesia, Bagian Kebersihan dari DPU, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kota.

Pada tahun sebelumnya, yakni tahun 1959, Jakarta mengalami masa kemarau yang sangat panjang. Tidak kurang dari 67 kali kebakaran besar telah terjadi dengan korban 16.114 orang kehilangan rumah tempat berteduhnya dan barang-barang miliknya. Kerugian ditaksir tidak kurang dari 64 juta rupiah, yang merupakan jumlah yang sangat besar untuk tahun 1959. Kebakaran yang paling hebat dan dahsyat terjadi pada kampung-kampung yang padat, liar, dengan tumpukan sampah yang belum sempat diangkut. Kebakaran di kampung demikian cepat menjalar dan meluas. Dan kampung-kampung demikianlah yang justru tidak mempunyai got. Kalaulah ada got, got itu tersumbat oleh sampah atau kurang dipelihara.

Pemerintah Daerah pada waktu itu menganggap banjir, kebakaran, tumpukan sampah dan kesehatan rakyat yang parah merupakan satu kesatuan persoalan yang harus ditanggulangi secara bersama, jika kita ingin mengurangi penderitaan rakyat. Prevensi daripada seluruh kesatuan-persoalan-malapetaka yang sesungguhnya adalah akibat kepadatan penduduk tadi, merupakan satu tindakan perlindungan bagi rakyat jelata yang paling perlu mendapat perlindungan dari Pemerintahnya.

Peranan RT/RK.

PREVENSI, pencegahan dan penanggulangan baru effektif jika dikerjakan oleh rakyat sendiri. Dan rakyat baru mau mengerjakannya bila ia mengerti apa sebab dan tujuannya, sedang pengertian ini harus didapat dari Pemerintah yang dipercayainya. Karena itu, RT/RK sebagai alat gotong-royong masyarakat perlu diikut sertakan.

RT/RK akan membantu sepenuhnya, jika Kepala RT/RK dilindungi hak-haknya, antara lain dengan pengakuan bahwa mereka adalah Bapak dari RT/RK-nya. Mereka sudah merasa dihargai apabila Lurah dan Kepala Kampung tidak akan melayani rakyatnya yang memerlukan bantuan jika tidak disetujui atau diketahui oleh Kepala RT/RK yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, jika Pemerintah menginginkan agar RT/RK menjadi partner yang baik, perlu ada larangan keras dari Pemerintah Daerah bagi Lurah untuk melayani penduduk yang memerlukan bantuan tanpa sepengetahuan Kepala RT/RK. Dengan sanksi, bilamana ada Lurah yang tidak mengindahkan larangan ini, konduite baiknya akan mengalami perubahan. Dalam hubungan

Suasana pembongkaran Jalan Thamrin di Bunderan Merdeka Selatan pada tahun 1961.

ini fungsi pers adalah penting dalam ikut melakukan pengawasan.

Team Asistensi Bencana tumbuh dengan baik dan tambah lama tambah sempurna. Kedudukan RT/RK bertambah kuat, Team Asistensi Bencana bertambah subur dan keduanya saling mempengaruhi dalam membantu pelaksanaan salah satu program Pemerintah pada waktu itu, ialah "menyelenggarakan Keamanan Rakyat dan Negara".

Dua Program lainnya dari Kabinet Kerja adalah "memperlengkapi sandang pangan rakyat dalam waktu sesingkat-singkatnya" dan "melanjutkan perjuangan menentang Imperialisme Ekonomi dan Imperialisme Politik (Irian Barat)". Oleh karena itu Pemerintah Daerah menganggap usaha-usaha kebersihan, penanggulangan banjir dan kebakaran dan pencegahan tumbuhnya rumah-rumah liar merupakan salah satu usaha keamanan dari rakyat untuk rakyat melalui RT/RK. Dan dalam hubungan ini Team Asistensi yang tumbuh dengan sukarela secara gotong-royong, mempunyai peranan penting dalam mengusahakan perasaan aman dari rakyat.

Memanfaatkan "Keadaan Perang".

DALAM rangka program keamanan ini, masih perlu dikembangkan kewaspadaan rakyat menghadapi subversi dan menghadapi musuh bersama rakyat dan Pemerintah. Kerjasama dengan alat-alat bersenjata adalah conditio sine qua non. Karena itu bagi Jakarta, masih tetap berlakunya "Keadaan Perang" sejak Desember 1959 atas Keputusan Presiden No. 315 tahun 1959 yang didasarkan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 23 tahun 1959 adalah sesuatu yang menguntungkan.

Menurut Keterangan Pemerintah, biarpun pemberontakan DI/TII, PRRI/Permesta dan sisa-sisa RMS sudah dipatahkan pemanfaatan Keadaan Perang masih diperlukan untuk mengkonsolidasi dan menstabilisasi teritorial secara merata untuk keamanan rakyat, untuk memperbaiki perkembangan politik-ekonomi-sosial secara keseluruhan, untuk mematahkan gangguan-gangguan ekonomi, antara lain dalam hal pembagian beras dan gula yang tak kunjung beres, untuk menekan inflasi yang melaju, untuk menanggulangi subversi asing dan untuk membebaskan Irian Barat, karena sebelum Irian Barat kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi keamanan Negara dan kedaulatannya akan terus terancam.

Jika pemanfaatan Keadaan Perang dikerjakan dengan bijaksana diharapkan dapat diterobos keseretan dan kemacetan usaha Pemerintah dalam melaksanakan programnya serta dapat ditingkatkan Hak-hak Azasi Manusia untuk mencegah sebanyak mungkin gangguan terhadap perkembangan demokrasi.

Ini semua lambat laun meresap ke dalam pikiran Pimpinan Pemerintah Daerah Jakarta Raya, yang pada mulanya masih meraba-raba tentang tugas utama Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan.

Kepala Daerah dan Wakilnya adalah dokter dan pelukis, hingga tidak dapat diharapkan dari mereka untuk dalam waktu sesingkat itu mengetahui apa yang harus dikerjakan. Sebelumnya mereka belum pernah langsung terlibat dalam kepemimpinan Daerah, apalagi Daerah Ibukota Negara yang merupakan pusat perhatian politik Nasional maupun Internasional.

Jakarta menjadi Daerah Khusus Ibukota.

SESUNGGUHNYA dari semula Jakarta sudah menganggap dirinya Ibukota Negara, meskipun tanpa dasar, sebab baru pada tahun 1964 dengan Undang-Undang No. 10 Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dinyatakan tetap sebagai IBUKOTA Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta.

Undang-undang No. 10 tadi tidak akan secepat itu keluar, jika Presiden tidak menyatakan bahwa Undang-undang demikian diperlukan. Pernyataan tersebut diadakan pada waktu Presiden menyambut perayaan HUT Jakarta ke 434 pada tahun 1961 di Gedung Ikada.

Tidak lama sesudah itu Gedung Ikada dan stadionnya mulai dibongkar, bersama-sama dengan gedung-gedung Kantor Telepon Pusat, Kantor Polisi Jakarta, Kantor

Suasana Jalan Thamrin sebagai jalan protokol ditengah-tengah kesibukan Kota Jakarta menjelang Asian Games tahun 1962.

Gubernur Soemarno mengadakan peninjauan ke toko-toko sandang pangan di Kelurahan Senen pada tanggal 22 Pebruari 1960.

Perbekalan Angkatan Darat, Press-Club, Gedung Pertemuan Jakarta dan kandang kuda dengan manege cavalerie serta beribu-ribu gubug liar yang memenuhi Lapangan Merdeka.

Baru sesudah Undang-Undang No. 10 diumumkan, Corps Diplomatik dengan mantap mulai merencanakan kantor-kantor perwakilannya dan Pemerintah Jakarta Raya mulai dengan mantap pula menyelesaikan RENCANA INDUK DCI Jakarta.

Dalam hubungan ini perlu dicatat bahwa Rencana Induk tidak akan dapat dimulai jika DPU tidak menerima insinyur-insinyur baru yang dipelopori oleh Ir. Piek Mulyadi. Sejak Pebruari 1960 jumlah insinyur yang bekerja di DKI Jakarta meningkat dari 7 orang menjadi 22 orang pada tahun 1964. Sebagai dasar Master-Plan Jakarta antara lain dipergunakan OUTLINE PLAN 1957, yang disahkan oleh DPRD pada tahun 1959, pada waktu Jakarta berada dibawah pimpinan Walikota Sudiro.

Disamping Undang-Undang No. 10 tahun 1964, ada lagi Undang-Undang yang menetapkan kedudukan Pemerintah Daerah Jakarta Raya, ialah Undang-Undang No. 2 Pnps tahun 1961, tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya. Nama atau sebutan DKI adalah karena Undang-undang No. 2 tadi.

Kami terlibat di dalam penyusunan Undang-Undang tersebut karena dasar pemikiran yang dilontarkan pada tiap pertemuan dan rapat tentang Pembangunan Jakarta dalam rangka Pembangunan Semesta Berencana, yang dicanangkan permulaannya oleh Presiden dengan Pencangkulan Pertama Pembangunan Gedung Pola pada tanggal 1 Januari 1961 di Jalan Proklamasi.

Dasar pemikiran yang dimaksud adalah bahwa Jakarta Raya sebagai Ibukota mempunyai kedudukan khusus, terutama dalam penentuan Anggaran Belanja Negara. Sebagai Ibukota, Jakarta perlu membandingkan dirinya dengan Ibukota-ibukota Negara lain.

Alat pusat dan daerah.

DISAMPING sifat-sifat pribadi yang harus dimiliki oleh Ibukota Negara Indonesia, Jakarta harus dapat diperbandingkan dengan Ibukota-ibukota Negara lain. Sarana-sarana perhubungan antara lain mendapat perhatian penuh di dalam memupuk Ibukota Negara, tidak saja sebagai kota Pemerintahan yang harus dapat menampung kantor-kantor perwakilan negara asing, tetapi juga kantor-kantor perwakilan-perwakilan perdagangan dan industri serta budaya dari negara-negara tersebut. Dalam rangka pemikiran demikian itu dianggap perlu untuk memulai dengan pembangunan gedung-gedung pokok yang mengindentifikasikan Jakarta sebagai Ibukota Negara.

Gedung-gedung pokok demikian adalah gedung-gedung Negara, seperti halnya Pusat Kantor Telepon dan Telegram dan semua pembangunan yang diperlukan untuk Asian Games ke-IV, yang sudah mulai dibangun. Dengan pembangunan Asian Games harus pula dibangun jalan-jalan besar yangbaru, sarana angkutan umum baru dan sebagainya.

Biaya untuk semua ini tidak mungkin diadakan oleh Pemerintah Daerah saja. Terutama Pemerintah Pusat harus membantunya, meskipun anggaran belanja yang besar dapat menimbulkan iri-hati dari Daerah-daerah Tingkat I lainnya, jika tidak diinsyafi kedudukan Jakarta sebagai Daerah Khusus.

Karena adanya biaya yang besar dari Pusat, Jakarta seakan-akan mengalami kesukaran-kesukaran dalam mengetrapkan kedudukan dan hak-hak Gubernur/Kepala Daerah-nya. Akan tetapi sesungguhnya hal ini tidak perlu dirisaukan, sebab selain dua Undang-Undang, ialah Undang-Undang No. 10 tahun 1964 dan Undang-Undang No. 2 Pnps tahun 1961 yang dikeluarkan untuk Ibukota Jakarta Raya dan yang memudahkan jalannya pemerintahan Daerah Ibukota, masih ada lagi ketentuan-ketentuan lain.

Sebagai Daerah Tingkat I Jakarta tunduk pada Penetapan Presiden No. 6 tentang Pemerintah Daerah (disempurnakan). Karena Pen.Pres. No. 6 tahun 1959 itu kedudukan Kepala Daerah pada umumnya lebih kuat daripada sebelumnya. Sekarang Kepala Daerah adalah alat Pemerintah Pusat dan alam Pemerintah Daerah serta tidak dapat

Gubernur Soemarno sedang berdialog langsung dengan rakyat kecil.

Pawai Pembebasan Irian Barat di Bunderan Air Mancur Jalan Thamrin.

diberhentikan karena sesuatu keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebagai alat pemerintah pusat Kepala Daerah mengurus ketertiban dan keamanan umum di daerah, menyelenggarakan koordinasi antara Jawatan-jawatan Pemerintah Pusat dan antara Jawatan-jawatan tersebut dengan Pemerintah Daerah, melakukan pengawasan atas jalannya Pemerintahan Daerah dan menjalankan lain-lain kewenangan umum yang terletak dalam bidang urusan Pemerintah Pusat. Karena itu kerap kali dalam rapat Pemerintahan Presiden menamakan Kepala Daerah itu sebagai Presiden-Kecil di Daerahnya.

Akan tetapi sayangnya, peraturan-peraturan pelaksanannya belum keluar. Dan karena banyak pembangunan di Jakarta di biayai dengan biaya dari Anggaran Belanja Pemerintah Pusat, maka tiap menteri dalam bidangnya masing-masing merasa harus langsung menangani pembangunan tadi dan kerapkali tidak mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku di daerah Jakarta. Banyak Kepala Dinas atau Jawatan Pusat yang masih belum dapat dikoordinasikan menurut Pen.Pres. No. 6 tadi.

Satu contoh bagaimana bersimpang-siurnya perintah-perintah Pemerintah Pusat untuk Jakarta adalah waktu Wakil Menteri Pertama yang merangkap Menteri Distribusi mengeluarkan perintah langsung kepada Wakil Kepala Polisi Jakarta agar bertindak tegas terhadap kenaikan harga beras. Perintah tadi ditanggapi langsung pula dan kesatuan-kesatuan polisi mengadakan razzia di beberapa pasar di Jakarta.

Razzia itu bertentangan dengan sikap Pemerintah Daerah, karena tiap kali terbukti bahwa tindakan demikian berakibat sebaliknya dari pada apa yang dituju. Beras menghilang dari pasar dan karena itu harganya menjadi lebih membubung.

Menteri/Kepala Daerah Khusus Ibukota.

BIARPUN demikian, ditinjau dari segi hukum kedudukan Kepala Daerah sesudah tahun 1959 jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Sejak tahun 1960 Gubernur Kepala Daerah adalah Ketua DPRD; sebelumnya ada Ketua DPRD disamping Kepala Daerah. Sejak tahun 1960 ada Badan Pemerintah Harian yang membantu Gubernur Kepala Daerah dalam melaksanakan pimpinan eksekutif dan para anggota Badan Pemerintahan Harian ini hanya bertanggung-jawab kepada Gubernur Kepala Daerah. Sebelum ada Dewan Pemerintah Daerah yang diketuai oleh Kepala Daerah, yang melaksanakan pimpinan eksekutif secara kollegial yang bertanggung-jawab kepada DPRD.

Sejak tahun 1960 Gubernur Kepala Daerah tetap memberi pertanggungan-jawab kepada DPRD, akan tetapi Kepala Daerah tidak dapat diberhentikan karena sesuatu keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Apabila anggota Badan Pemerintah Harian memberi keterangan di muka rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka ia bertindak atas nama Gubernur Kepala Daerah. Dengan demikian maka Gubernur Kepala Daerah sesudah tahun 1960 dapat bergerak lebih lincah daripada Kepala Daerah sebelumnya. Lebih-lebih lagi sejak dikeluarkannya Penetapan Presiden tanggal 14 Juli 1965 No. 15 tahun 1965 yang menyatakan bahwa kedudukan Kepala Daerah Chusus Ibukota Djakarta disamakan dengan Menteri.

Menurut Keputusan Presiden tanggal 14 Juli 1965 No. 289 tahun 1965, Mayor Jenderal TNI Dr. Soemarno Sosroatmodjo diangkat sebagai Menteri/Kepala Daerah Chusus Ibukota Djakarta, disamping tugasnya sebagai Menteri Dalam Negeri. Ini berlaku sejak 16 Juli 1965.

Tercapailah dengan demikian cita-cita rakyat Jakarta, yang menginginkan agar Kepala Daerahnya menjadi Anggauta Kabinet, sehingga jalannya pemerintahan Ibukota diharapkan dapat diperlancar.

Luas Daerah.

DEMIKIANLAH secara selayang pandang bentuk Pemerintahan Daerah Jakarta Raya serta kedudukan dari Kepala Pemerintah Daerahnya. Sekarang beberapa catatan tentang daerah administrasinya yang disebut Daerah Tingkat I Jakarta Raya.

Semula Daerah Tingkat I disebut Daerah Swatantra Tingkat I yang menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1957 berhak mengurus rumah tangganya sendiri yang terdiri dari sebanyak-banyaknya tiga tingkat, ialah tingkat II dan Tingkat III. Undang-

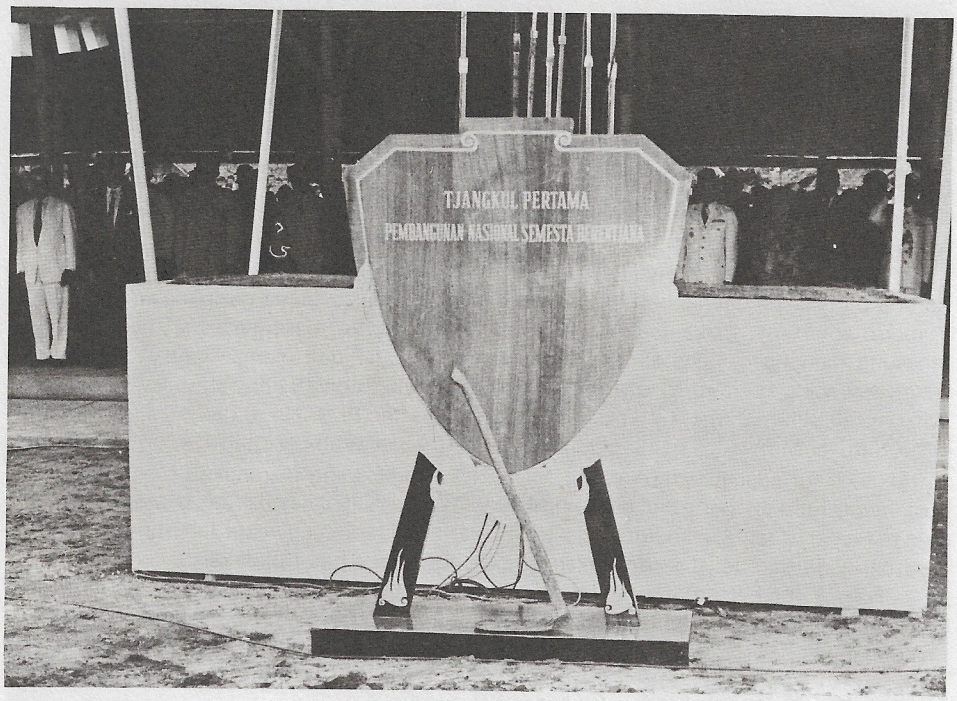

Upacara penyangkulan pertama dalam rangka Pembangunan Nasional Semesta Berencana pada tanggal 1 Januari 1961.

Undang tersebut menyatakan pula bahwa dalam Kotapraja, kecuali Kotapraja Jakarta Raya, tidak dibentuk Daerah Swatantra tingkat lebih rendah.

Biarpun dibuka kemungkinan, bahwa Kotapraja Jakarta Raya boleh membentuk tingkat Pemerintahan yang lebih rendah, ada pendapat yang mengemukakan tidak perlunya di Jakarta Raya Swatantra Tingkat II atas dasar alasan-alasan teknis organisatoris, ekonomis, politis dan sosial. Cukuplah dengan adanya perwakilan Pemerintah Jakarta Utara, Jakarta Tengah dan sebagainya.

Biarpun demikian, pada rapat DPRD–GR tahun 1962 sementara anggauta DPRD–GR menganjurkan toh diadakannya Daerah Tingkat II lengkap, bukan hanya Perwakilan.

Alasan yang diajukan adalah karena sejarah perkembangan dari Pemerintah Jakarta Raya, yang pernah mengalami menjadi Ibukota Pemerintah Federal, dimana daerah Batavia diperlebar sehingga terdiri dari Regentscgap Batavia, Meester Cornelis dan Regentschap Bogor. Daerah yang terdiri dari tiga regentschap itu dikenal sebagai Batavia en Ommelanden.

Kemudian dengan Staatsblad No. 64 tahun 1949 daerah administrasi Batavia en Ommelanden meliputi Stadsgemeente (Kotapraja) Batavia, Residentie Ommelanden van Batavia dan Onderdistrict Pulau Seribu.

Wilayah Stadsgemeente pada waktu itu hanya terdiri dari Distrik-distrik Matraman, Gambir, Penjaringan dan Tanjungpriok.

Presiden Republik Indonesia Serikat tahun 1950 tanggal 24 Maret memperluas Kotapraja Jakarta dengan Onderdistrict Pulau Seribu, Onderdistrict Cengkareng, dan Onderdistrict-onderdistrict Kebonjeruk, Kebayoran Ilir, Kebayoran Udik, Mampang Prapatan, Pasar Minggu, Pasar Rebo serta sebagian District Bekasi, ialah Onderdistrict Pulaugadung dan Cilincing.

Daerah Administrasi Batavia en Ommelanden inilah yang pernah dikepalai oleh seorang Gubernur.

Sejarah Batavia kemudian sejarah Jakarta ini menimbulkan adanya pemikiran apakah tidak sebaiknya jika Metropolis Jakarta Raya yang kita inginkan bersama ini diperluas seperti "Batavia en Ommelanden". Lebih-lebih lagi waktu Jakarta secara sistematis menangani pembuatan Rencana Induk; luas calon Metropolis Jakarta Raya kerap kali menjadi bahan persoalan dan bahan perundingan yang sangat penting.

Rencana Induk.

PADA Outline Plan Jakarta tahun 1957, yang merupakan rencana pendahuluan daripada Rencana Induk yang disusun, menyajikan satu pengertian penting, yakni bahwa Rencana Induk sesuatu kota seharusnya memasukkan didalamnya suatu perencanaan induk dari daerah sekitarnya, Town planning dan Regional planning hendaknya selalu berjalan bergandengan. Dan karena itu tidak salah jika kita berpendapat bahwa Rencana Metropolis adalah Rencana Regional, Rencana Daerah, bukan hanya rencana kota saja. Atau, rencana Metropolis adalah Rencana Ibukota dan daerah pinggirannya seperti Bekasi, Cibinong, Cisalak daerah Tanggerang.

Dalam hal demikian, penyusunan perencanaan daerah khusus, jikalau juga dikehendaki oleh Daerah-daerah pinggiran itu, mengikut sertakan Daerah-daerah itu dalam satu kerjasama. Juga dapat diambil kemungkinan lain, dimana Daerah Kota Jakarta diperluas.

Disamping itu, dalam rangka ini pernah diperbincangkan agar didalam menyusun Rencana Induk Metropolitan tidak boleh dilupakan bahwa Jakarta pasti akan dicontoh oleh Kota-kota lain dalam memperkembang dan membangun kotanya masing-masing.

Terutama bagi Pulau Jawa sikap demikian penting berhubung dengan kenyataan bahwa setiap tahun jumlah penduduk kota bertambah banyak. Pada waktu itu penduduk seluruh Indonesia hampir 100 juta, dimana 12% merupakan penduduk kota, yang tiap tahunnya bertambah dengan 3% karena kelahiran dan urbanisasi.

Dengan demikian tiap tahun Indonesia akan bertambah 360.000 orang penduduk perkotaan, yang memerlukan sarana kehidupan kota yang serba kompleks. Dan jumlah ini setiap tahun akan bertambah. Dengan perkataan lain di Indonesia seolah-olah tiap tahun akan dilahirkan satu kota dengan jumlah sedikitnya 360.000 penduduk. Tidak aneh jika pada suatu ketika Pulau Jawa dinamakan Metropolitan Indonesia, sedangkan pulau-pulau lainnya merupakan pulau-pulau rural. Metropolitan Indonesia dan Rural Indonesia saling membutuhkan didalam kehidupan dan perkembangan selanjutnya.

Juga tidak aneh, jika dalam waktu singkat ini Indonesia memerlukan "National Urban Development Planning" yang merupakan supplement daripada putusan-putusan MPR tentang Pembangunan Nasional keseluruhannya.

Kembali tentang luas Metropolitan, kami lebih berkeyakinan untuk menanggapi perluasan Jakarta Raya secara lebih bersungguh-sungguh, sesudah pada Juni 1964 kami bersama-sama dengan Ir. Piek Mulyadi dan Ir. Tjong kembali dari mengunjungi Seminar on Metropolitan Planning in Asia di Jepang.

Pada rapat yang kami adakan kemudian di Jakarta, kami mendesak dengan sangat untuk memperhatikan kemungkinan perluasan itu kepada Presiden kami menyampaikan permohonan agar mendapat perhatian Pemerintah Pusat.

Sekali Rencana Induk itu mendapat pengesahan, maka Rencana tersebut menjadi kebijaksanaan yang sah dalam pembangunan; "Planning is Policy". Dengan kalimat pendek itu kami bermaksud menekankan pentingnya persoalan.

Memang, sama sekali tidak aneh jika Metropolitan Jakarta akan berkembang dari Pulau Seribu sampai ke Ciawi dan dari batas Tangerang ke batas Bekasi. Dan persoalan Daerah adalah persoalan Pemerintah Pusat, bukan persoalan Daerah saja. Oleh karena itu, kami merasa betapa perlunya Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota menjadi anggauta Kabinet.

Suasana Ganyang Mengganyang.

SEMENTARA tahun 1962, jauh sebelum tahun 1965 suasana politik umum tidak menguntungkan stabilitas Pemerintah Daerah. Malahan sejak tahun 1960 tidak dapat dikatakan bahwa suhu politik adalah tenang dan segar. Tentunya ini adalah sisa-sisa akibat daripada tindakan tegas Pemerintah menghadapi PRRI/PERMESTA, DI/TII, pembubaran partai-partai tertentu dan karena kegiatan subversi dari luar, yang dirasakan sangat aktif di Ibukota ini. Ini terbukti dengan adanya usaha-usaha pembunuhan terhadap Kepala Negara. Proses penyederhanaan partai pasti berpengaruh juga. Sesu-

Presiden Sukarno mengayunkan cangkul sebagai tanda dimulainya Pembangunan Nasional Semesta Berencana di Jalan Proklamasi pada tanggal 1 Januari 1961.

Suasana upacara Pembangunan Nasional Semesta Berencana di Jalan Proklamasi yang diikuti oleh massa dari beberapa organisasi, antara lain Wanita Demokrasi Indonesia pada tanggal 1 Januari 1961.

dah dua partai dibubarkan, dari sisa enambelas partai hanya duabelas yang diakui. Tiga partai besar dengan sembilan partai lainnya berikut anak-anak organisasinya masing-masing sangat aktif di dalam melaksanakan tugasnya. Pada waktu itu tugas yang sangat penting adalah mengabdi kepada tugas-tugas revolusi dalam arti-kata, keluar mengganyang imperialisme, kolonialisme dan neo-kolonialisme fan ke dalam mengganyang feodalisme secara revolusioner, dimana revolusioner disini berarti konsekwen, tidak ada henti-hentinya.

Sebelum 1963 sasaran pengganyangan adalah Belanda dengan konco-konconya. Irian Barat masih diperjuangkan. Tidak jarang terjadi pegawai-pegawai Jakarta dikonsinyir dengan alasan keamanan. Pidato-pidato politik bergema; setiap kesempatan dipergunakan untuk membakar semangat dan keberanian rakyat untuk mengganyang, diiringi dengan ulasan mengenai bukti-bukti bahwa di dunia masih ada perlakuan tidak adil karena masih adanya imperialisme dan kolonialisme.

Sebaliknya berlaku larangan untuk pemogokan dan pengambil-alihan perusahaan dan miliknya secara liar. Dua kenyataan yang bertentangan. Di satu fihak terjadinya pembakaran semangat secara revolusioner, di lain fihak ada larangan-larangan untuk bertindak tidak tertib. Dan antara dua kenyataan ini batasnya bagi partai-partai yang merasa mewakili rakyat sehari-hari tidak jelas. Malahan kerapkali dilupakan oleh partai, bahwa Pemerintah adalah juga wakil rakyat yang sah, yang sepatutnya mereka minta pendapatnya atau izinnya terlebih dahulu, sebelum mengadakan tindakan-tindakan pengganyangan. Dengan demikian kerapkali ada "korsluiting" antara partai dan Pemerintah didalam pelaksanaan taktik pengganyangan ini.

Sondhy alat Imperialis dan kontra revolusioner?

SEBELUM tahun 1963 pengganyangan politik yang ditujukan kepada Belanda karena Irian Barat, seolah-olah masih mengandung tekanan terhadap partai-partai untuk tidak bergerak sendiri-sendiri. Hal ini disebabkan karena Pemerintah mengambil oper seluruh kegiatan-kegiatan pengembalian Irian Barat dengan persiapan-persiapan bersenjatanya, dibarengi dengan kegiatan-kegiatan diplomasi. Dengan melalui PBB akhirnya soal Irian Barat berhasil dipecahkan,. Bendera tiga warna diturunkan dan Merah Putih dikibarkan sebelum ayam berkokok di waktu fajar menyingsing tahun 1963.

Tapi bagi partai-partai yang selalu atau sedang berlomba-lomba, jor-joran, untuk meyakinkan, partai mana yang paling memikirkan kepentingan rakyat. Ada macam-macam alasan untuk mengadakan pengganyangan-pengganyangan terus-menerus ke dalam, baik terhadap Pemerintah sendiri atau terhadap golongan-golongan yang dianggapnya sebagai golongan yang kontra revolusioner.

Sandang pangan dikehendaki harus tetap murah; jangan gampang menaikkan harga, kenaikan harga bensin setengah rupiah-pun sudah cukup untuk memulai dengan gelombang-gelombang demonstrasi. Kemacetan lalu-lintas karena kurangnya kendaraan umum umpamanya sudah memberikan alasan yang cukup untuk mendemonstrasi pemerintah.

Semua ini merupakan benih-benih pertentangan antara eksekutif dan partai-partai, yang masing-masing mempunyai massanya sendiri-sendiri. Juga terjadi jor-joran, dalam artian bahwa partai lalu berlomba-lomba berdemonstrasi dan mengganyang bila ada diantaranya yang memulai dengan aksi revolusionernya. Dengan demikian kerapkali timbul kesan seolah-olah ada partai yang hanya ikut-ikutan karena takut "ketinggalan sepur" dalam menampakkan sifat revolusionernya.

Pada suatu ketika, yakni pada tahun 1963, terjadilah pengganyangan Budaya. Film-film Barat diboikot, karena film ini dinyatakan sebagai kebudayaan imperialis yang membahayakan bagi Indonesia. Film-film tertentu disanggah oleh golongan lain, sebagai tindakan kontra revolusioner.

Tidak henti-hentinya kegiatan-kegiatan demikian ini yang membuat udara politik tidak hanya hangat, tetapi kian hari kian panas. Tamu-tamu dari negara bersahabat disambut secara besar-besaran, dan tamu-tamu negara yang menurut pendapat masing-masing partai dianggap antek-anteknya imperialis di-demonstrasi, juga secara besar-besaran.

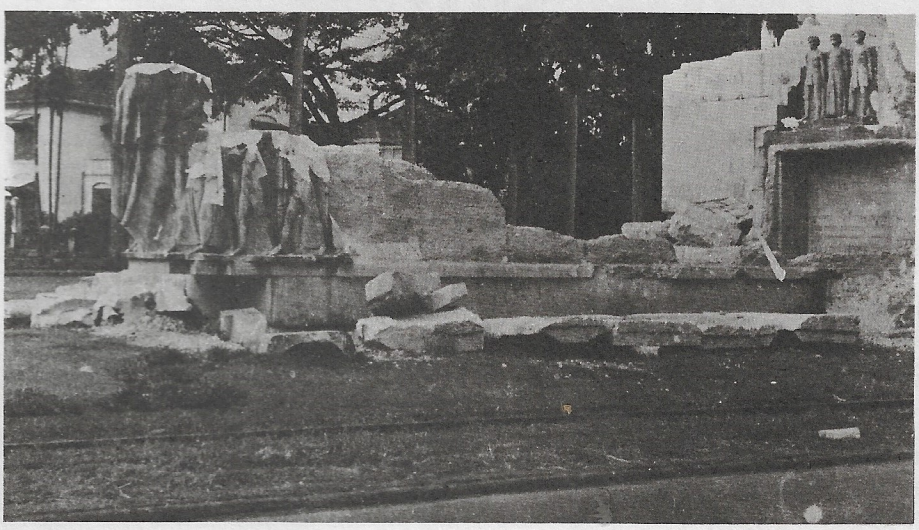

Pembongkaran Tugu Van Heutz di Taman Cut Mutiah pada tahun 60-an.

Semua ini memerlukan pengarahan massa, yang lebih jauh memerlukan angkutan berupa truk dan bis dalam jumlah berpuluh-puluh. Ini adalah tekanan yang berat bagi kehidupan ekonomi Jakarta, karena kendaraan yang diperlukan untuk memutar roda ekonomi, dipinjam untuk kepentingan-kepentingan politik terus-menerus. Sementara itu jangan mencoba-coba menolak, biarpun bus-bus dan truk-truk dikumpulkan tiga hari sebelumnya di Lapangan Banteng, untuk keperluan yang hanya 5 jam. Menolak besar resikonya dicap sebagai golongan kontra-revolusioner.

Udara politik kemudian menjadi tambah panas. Sikap congkak Sondhy pada Asian Games ke-IV menimbulkan gelombang ketidak-puasan terhadap negeri asalnya: India. Timbul alasan untuk mendemonstrasi India, suatu situasi yang cukup menegangkan, karena India dan RRT yang merupakan sesama anggauta Konferensi Bandung, sedang saling bertengkar.

Demonstrasi anti Sondhy memang mudah sekali berobah menjadi demonstrasi anti India. Dan ini semua jelas tidak membantu mengurangi tinggi suhu politik di Jakarta pada waktu itu.

Memperjoangkan kemerdekaan ekonomi mengundang meningkatnya subversi.

JIKA semula ada harapan bahwa suhu politik akan menurun dengan kembalinya Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi pada tahun 1963, harapan tersebut ternyata tidak benar. Rupa-rupanya ada golongan yang sudah mencium bau bahwa ulahnya Inggeris membentuk Negara Malaysia pada tahun 1963 juga dapat dipergunakan untuk meneruskan dan meningkatkan pelaksanaan program No. 3 Pemerintah/Kabinet Kerja ke II, ialah melanjutkan perjuangan menentang Imperialisme Ekonomi dan Imperialisme Politik.

Kabinet Kerja ke II berkuasa dari Pebruari 1960 sampai Maret 1962, yang diikuti Kabinet Kerja ke III mulai Maret 1962 sampai Nopember 1963 dengan Tri Programnya, ialah Sandang-Pangan, Pengganyangan Malaysia dan melanjutkan perjuangan menentang Imperialisme Politik dan Imperialisme Ekonomi.

Memperjuangkan kemerdekaan dalam bidang ekonomi merupakan perjuangan yang terberat. Karena musuh-musuh terselubung, tidak lekas tampak. Kemerdekaan politik membuat kita berkuasa, tetapi secara terselubung kita masih tetap dibelenggu dalam bidang ekonomi. Karena itu program sandang-pangan perlu ditingkatkan.

Pada bidang distribusi masih saja kita dikekang oleh kekuatan lama akibat penjajahan Belanda yang memberikan fasilitas lebih banyak kepada "Vreemde Oosterlingen en Chinezen" tadi tidak dapat dibangun secepat yang kita kehendaki.

Pemerintah Daerah yakin bahwa semua tindakan Pemerintah dengan mengganyang Malaysia dan dengan mengeluarkan P.P. No. 10 mengundang reaksi yang terang-terangan maupun yang terselubung. Semua ini tidak menjadikan keadaan Pemerintahan bertambah stabil, tetapi sebaliknya. Apalagi waktu pada tanggal 19 Desember 1962 diumumkan Dekrit Presiden yang menyatakan, bahwa selambat-lambatnya pada tanggal 1 Mei 1963 akan dihapus Keadaan Bahaya di seluruh Indonesia untuk kemudian dikembalikan kepada keadaan Tertib-Sipil dalam rangka penyelesaian mencapai tujuan Revolusi Indonesia.

Biarpun dibuka kemungkinan dimana Presiden dapat mengadakan peraturan khusus dan darurat, bila penghapusan keadaan bahaya belum dapat dilaksanakan, dekrit ini menimbulkan rentetan kegiatan-kegiatan dari partai-partai untuk mempersiapkan diri, yang tidak menambah stabilitas Pemerintah.

Jika dalam Keadaan Perang, seperti halnya di Jakarta, Penguasa Perang Daerah adalah penguasa tertinggi di Daerah, maka didalam keadaan Tertib Sipil nanti, Gubernur Kepala Daerah-lah, bukan pejabat militer lagi, yang akan menjadi penguasa tertinggi di Daerah, demikian menurut Penpres No. 4 tahun 1962, tanggal 28 Desember 1962. Menurut Penpres yang sama pada tanggal 1 Mei 1963 seluruh wilayah Indonesia akan berada dalam keadaan Tertib-Sipil.

Dalam hubungan ini timbul kesan seolah-olah telah timbul harapan baru pada

Saat pembongkaran patung Dewi Perdamaian di Taman Wijaya Kusuma pada tanggal 10 Juni 1961.

golongan-golongan tertentu bahwa keadaan Tertib-Sipil akan memudahkan mereka mempengaruhi jalannya Pemerintahan sehari-hari, karena militer tidak berkuasa lagi.

Di Jakarta kemudian terbukti bahwa harapan demikian tidak menjadi kenyataan. Pertama, karena Pemerintah Daerah sejak tahun 1960 berhubung dengan adanya bencana-bencana banjir dan kebakaran, dengan aktif memulai dengan memperkembang organisasi RT/RK dan Pertahanan Rakyatnya dalam bentuk Team-Team Asistensi ini meningkat sedemikian rupa, sehingga disamping ketrampilan didalam melaksanakan bantuan-bantuan pertama pada kebakaran dan banjir, team-team ini dilengkapi dengan dasar-dasar idiil dan semangat, dengan menambahkan dalam latihan-latihannya ceramah-ceramah mengenai ketahanan revolusi, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Malahan sesudah Nopember 1963 team pertahanan rakyat disempurnakan dengan latihan-latihan penggunaan senjata dan dimana perlu dapat dimanfaatkan untuk pertahanan pribadi menghadapi gerombolan-gerombolan perampok dan sebagainya.

Team-team ini pada umumnya merupakan kesatuan-kesatuan pertahanan rakyat yang selalu siap sedia membantu Lurah jika diperlukan. Sedikitnya kesatuan-kesatuan ini tidak akan mudah dapat dipengaruhi oleh golongan-golongan lain kecuali oleh Pemerintah Daerah. Demikian pula halnya dengan kesatuan-kesatuan Sukarelawan dan Sukarelawati yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, sesudah dilontarkan Komando Presiden bahwa dimana perlu Sukarelawan akan dipergunakan dalam mencegah tindakan-tindakan yang membahayakan keamanan Negara dan Bangsa.

Tertib Sipil Tidak mampu, perlu Bantuan Militer.

HARAPAN yang dimaksud juga tidak tercapai karena adanya rentetan kejadian-kejadian dalam tahun 1963 sesudah bulan Mei, yang memaksa kami meminta bantuan militer menurut P.P. No. 16 tahun 1960.

Dalam rangka pengganyangan terhadap Malaysia, sudah dapat diperhitungkan bahwa Inggeris akan terbawa-bawa. Sasaran pertama adalah perusahaan minyak Inggeris. Selama yang jadi sasaran adalah perusahaan besar, maskapai minyak Inggeris, kami tidak mencampurinya, karena tidak jelas apakah soal demikian harus ditangani oleh Pemerintah Pusat ataukah oleh Pemerintah Daerah. Apalagi kejadian-kejadian ini berlangsung di Ibukota Negara, tempat dimana Pemerintah Pusat juga berada.

Akan tetapi waktu warga negara Inggeris dalam bahaya, waktu perorangan dalam bahaya, rumah-rumah orang Inggris di Jalan Teuku Umar diobrak-abrik oleh massa, dan massa ini mulai bergerak kearah Kebayoran, maka dengan persetujuan Kepala Polisi Jakarta, kami mengajukan permintaan Bantuan Militer. Bantuan ini kemudian masih sempat mencegah meluasnya penghancuran di Kebayoran Baru, biarpun British Council tidak sempat diselamatkan. Bantuan Militer terus dipertahankan sampai beberapa waktu.

Pembakaran Kedutaan Besar Inggris yang tidak dapat dicegah pula, sesungguhnya terjadi sehari sesudah Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia dibakar. Pada hari yang naas bagi Kedutaan Inggris itu, semua kekuatan dipusatkan untuk mencegah massa mengobrak-abrik Kedutaan Besar Malaysia di Jalan Budi Kemuliaan, Tidak terduga bahwa massa lalu bergerak ke Kedutaan Besar Inggris, yang letaknya berhadapan dengan Hotel Indonesia.

Pada akhir tahun 1963 modal Inggris diambil-alih oleh Pemerintah Indonesia, sesudah kita mengambil alih modal Belanda pada tahun 1957. Apapun alasan Indonesia, pengambil alihan modal Inggeris dan Belanda, pengambil alihan modal imperialis, seharusnya diartikan tambah aktifnya subversi. Divide et impera-pun masih saja merupakan senjata yang ampuh. Sementara itu, karena Ibukota merupakan ajangnya aktivitas politik, maka Ibukotalah yang menjadi sasaran utama kegiatan subversi ini. Hanya tidak diketahui dalam bentuk apa subversi itu akan tampak nantinya.

Land Reform Dekon dan Kebudayaan Asing. Pertentangan Antar Kita.

LAIN daripada itu antara partai-partai sendiri serta antara golongan-golongan pada akhir 1963 dan permulaan tahun 1964, mulai tampak aktivitas-aktivitasnya dalam bidang kebudayaan dan ekonomi. Aksi-aksi sepihak dalam bidang land reform tambah lama tambah gencar. Deklarasi Ekonomi atau DEKON yang dinamakan manipolnya bidang ekonomi menjadi alasan untuk pertentangan-pertentangan, sebagaimana halnya dengan Pancawardhana dari PDK; polemik tentang BPS (Badan Pendukung Sukarnoisme) menjadi-jadi, begitu juga halnya dengan Manikebu, Manifesto Kebudayaan. Semua ini tidak mengurangi derajat suhu politik, malahan sebaliknya.

Front Nasional yang dibentuk pada akhir tahun 1959 dengan tugas menyelenggarakan kerjasama yang seerat-eratnya dengan pemerintah serta lembaga-lembaga negara lainnya tampak mulai kewalahan membendung pertentangan-pertentangan tadi, yang sesungguhnya merupakan landasan yang subur bagi subversi.

Sementara itu pengumpulan-pengumpulan massa pada hari-hari Nasional, pada rapat-rapat politik, pada penerimaan tamu-tamu agung berjalan terus, tidak ada hen-

Khalayak ramai bersorak setelah patung Dewi Perdamaian Perang Aceh selesai dirobohkan.

ti-hentinya, yang menjadikan Ibukota yang maha sibuk. Dalam suasana demikian tugas pokok pemerintah harus berjalan terus. Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama harus berjalan terus, disamping usaha mengatasi kesukaran-kesukaran dalam hidup rakyat yang sangat memerlukan perlindungan.

Uraian diatas menggambarkan keadaan dan suasana Ibukota dari tahun 1960 sampai tahun 1964, suasana kesibukan yang merupakan pendorong, tapi yang sekaligus juga merupakan hambatan-hambatan bagi kegiatan Pemerintah Ibukota.

Mengatasi kerisauan.

MENGATASI kerisauan serta kesukaran rakyat adalah tugas Pemerintah dalam rangka melindungi rakyat. Bagaimana mengerjakannya dengan dana minimum yang ada, merupakan suatu persoalan pokok yang harus dipecahkan. Pemerintah Daerah Ibukota berpendapat bahwa pembangunan kota untuk menjadi Kota Metropolitan, untuk menjadi Ibukota Negara hendaknya sebanyak mungkin dibiayai oleh Pemerintah Pusat, sedangkan dana yang tersedia di daerah dipergunakan untuk mengatasi kerisauan dan kesukaran rakyat. Dan hal ini sesungguhnya telah dikerjakan.

Sarana Asian Games yang merupakan pembangunan kompleks olahraga yang besar dengan segala kebutuhan lain sebagai akibatnya, seperti pembangunan jalan baru ke dan dari kompleks olahraga, ring-road pertama yang merupakan jalan Jakarta By-Pass dan jalan Slipi - Gatot Subroto, Hotel Indonesia, Wisma Warta dan sebagainya dibiayai dengan dana dari Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah dalam segi ini membantu segi kemasyarakatannya. Bagaimana menenangkan masyarakat yang harus pindah akibat pembangunan dengan penerangan-penerangan yang tepat, dan dengan membantu mereka di dalam pemindahannya. Hal-hal ini adalah sangat perlu, karena meninggalkan tanah dan kampung halaman yang bertahun-tahun mereka miliki untuk pindah ke tempat yang baru, adalah perkara yang sangat menekan perasaan rakyat yang terkena.

Untuk dapat membayangkan betapa luas kegiatan pemindahan ini dan betapa besar biayanya, dapat dilihat dari angka-angka berikut ini:

Rumah-rumah yang dibongkar dan dibangun kembali berjumlah 8.652 buah, yang menyangkut 46.829 jiwa penduduk di Tebet, Pejompongan, Slipi, Tjikoko dan Tjileduk.

Bagi Pemerintah Daerah untuk mendapatkan sumber-sumber dana baru tidak mudah, karena kondisi memang belum memungkinkan. Ini berarti bahwa Pemerintah Daerah harus melaksanakan tugas-tugas beratnya dengan banyak memanfaatkan partisipasi rakyat.

Hal ini sangat nampak, khususnya di tahun 1960 ketika pada awal tahun tersebut terjadi banjir yang besar sesudah terjadinya musim kemarau yang panjang dengan bencana kebakaran yang bertubi-tubi. Bantuan RT/RK pada setiap bencana alam sangat banyak dan sangat berharga.

Pemerintah Daerah mencoba meringankan penderitaan mereka, tidak saja dengan memberi makanan pada waktunya, tetapi dengan mengusahakan agar bahan bangunan yang sangat mereka perlukan dapat dibeli dengan harga yang patut. Hal ini perlu, karena biasanya, pedagang yang kurang baik, justru menaikkan harga dagangannya, pada waktu rakyat memerlukan bahan bangunan untuk mengganti rumahnya yang telah terbakar.

Dalam soal kebakaran ini sebenarnya yang terpenting adalah untuk mencegahnya, karena terlalu banyak kesukaran yang harus diderita korbannya. Latihan-latihan Team Asistensi bertujuan, disamping agar dapat memberi bantuan kepada para korban secara langsung, terutama untuk mencegah kebakaran dan mencegah meluasnya kebakaran. Latihan yang dipimpin oleh Barisan Pemadam Kebakaran adalah mendetail sekali dan intensif.

Pemadaman Kebakaran tepat pada waktu permulaannya, mencegah banyak penderitaan, Dengan pers Ibukota serta RT/RK bersama-sama diadakan penerangan umum bahwa penyebab kebakaran adalah bukan kompor yang meledak, bukan pula lampu teplok yang dilanggar kucing, melainkan orang yang kurang berhati-hati. Dengan penerangan demikian itu dimaksud untuk melawan pendapat yang telah melekat pada rakyat, bahwa alat yang kurang sempurnalah penyebab utama kebakaran. Penerangan ini menandaskan bahwa kompor yang terbaikpun, jika manusianya lengah, jika tidak dijaga, jika dibiarkan berjam-jam menyala terus dan ditinggalkan kepasar, pasti akan meledak. Di dalam RT/RK peranan yang sangat penting didalam memberi penerangan ini adalah para anggota Team Asistensi sendiri.

Semula hanya pemuda dan pria yang menjadi Team Asistensi pencegah kebakaran ini. Tetapi kebakaran besar di Karanganyar di tahun 1961 terjadi pada jam dua tengah hari, pada waktu semua penduduk laki-laki sedang bekerja, jauh dari rumah. Sejak itu pemudi-pemudi dilatih untuk menjadi anggota Team Asistensi, yang juga harus tangkas dan berani mencegah meluasnya kebakaran.

Sejak kesadaran mayarakat bertambah bahwa penyebab utama kebakaran adalah kelengahan manusia, jumlah kebakaran pada tahun berikutnya menjadi berkurang. Dengan demikian kesadaran tersebut harus tetap terpelihara. Ini hanya mungkin selama Team Asistenti tetap berlatih secara teratur dan pers secara konsekwen menyatakan bahwa pada tiap peristiwa kebakaran bahwa bukan kompor, atau lampu teplok yang meledak atau terjatuh yang menjadi penyebabnya, melainkan kelengahan orang, yang membiarkan kompor sampai meledak dan lampu teplok dapat terjatuh.

Mempercepat Izin Bangunan.

APA tindakan Pemerintah pada setiap kebakaran, selain membantu langsung para korban dengan menyediakan makan dan tempat berlindung? Tindakan Pemerintah yang terpenting adalah memaksa penduduk untuk membangun kembali kampungnya yang pada menurut rencana pemerintah. Pemerintah membuat kaveling-kaveling baru, yang luasnya seimbang dengan luas tanah yang dipergunakan sebelum terjadinya musibah kebakaran, dengan memperhatikan lorong-lorong baru serta got-got baru yang harus diadakan.

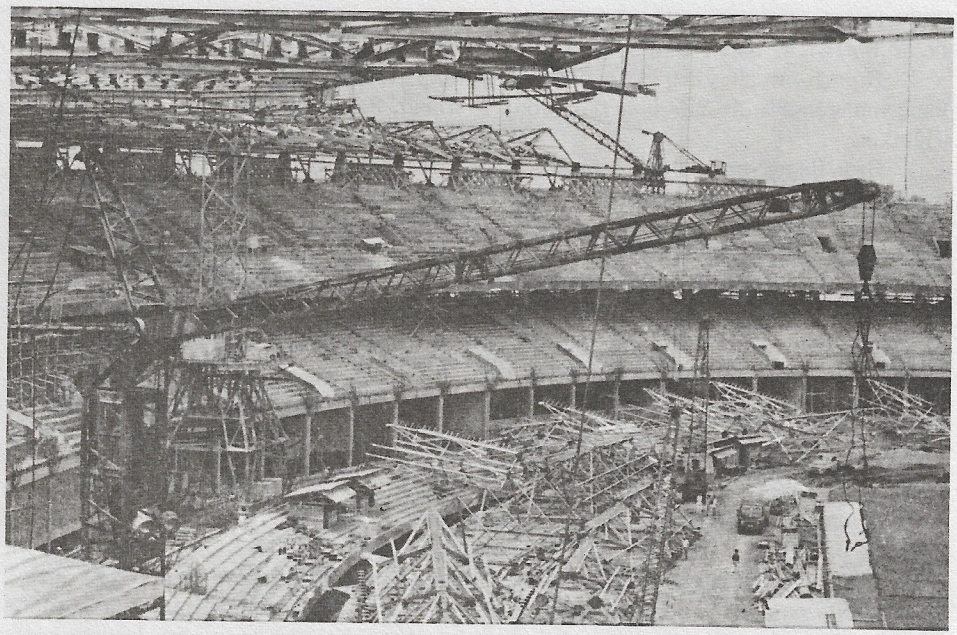

Pembangunan Stadion Utama Senayan pada tahun 1961.

Industri atau pertukangan yang terdapat di kampung kemudian diatur penempatannya agar secepat mungkin dapat berfungsi kembali, karena sangat diperlukan untuk kepentingan umum maupun bagi nafkah orang yang bersangkutan, tetapi pembangunannya sebanyak mungkin diatur untuk mencegah terulangnya bahaya kebakaran. Jika tanah yang dilokasikan menurut pendapat penduduk yang berkepentingan kurang besar bagi keluarganya, mereka diperbolehkan membangun bertingkat, asal caranya membangun mengikuti nasehat DPU. Dengan kebijaksanaan ini mulailah timbul idee Rumah Minimum.

DPU dilatih untuk bekerja cepat, terutama dalam menyelesaikan surat izin sementaranya. Dan dalam hal ini Kelurahan maupun RT/RK boleh menyatakan keberatannya langsung kepada Bupati Kepala Wilayah yang bersangkutan, jika merasa izinnya diperlambat. Di niveau Kotapraja tiap hari Senin diadakan rapat teknik, yang terutama dimaksud untuk memecahkan segi sosialnya dari kesukaran-kesukaran yang

diderita oleh penduduk. Satu-satunya cara untuk mengurangi kesukaran dan kerisauan penduduk didalam kekurangan "papan", kekurangan perumahan, adalah dengan mengawasi secara sangat ketat ketertiban di DPU sendiri. Terlambatnya keluar surat izin berarti tertundanya orang dapat memiliki tempat berteduhnya yang sangat diperlukan. Bukan saja korban kebakaran akan terlambat mendapat tempat berteduh, malahan korban itu kemungkinan tidak lagi sempat mendapat tempat berteduh karena lajunya inflasi pada waktu itu. Terlambatnya keluar surat izin berarti tertundanya membangun dan karena tiap minggu harga bahan bangunan dan upah kerja naik, maka uang yang tersedia tidak akan cukup lagi untuk meneruskan pembangunan tempat berteduhnya yang sederhana.

Pada waktu itu ditekankan pada DPU bahwa pembangunan rumah sederhana, pembangunan kembali rumah yang terbakar adalah kebutuhan mutlak. Dalam bidang "papan", tempat berteduh, pembangunan kembali adalah terutama untuk kepentingan rakyat harus memperoleh perlindungan dari semua unsur pemerintah daerah, dalam bentuk pemberian fasilitas-fasilitas secara cepat, dalam hal ini izin untuk dapat membangun kembali.

Pengertian Pemerintah Daerah akan kerisauan penduduk dengan pemberian jaminan-jaminan dan fasilitas kepada mereka yang berada dalam kesukaran, mengurangi jumlah protes-protes karena soal alokasi tanah. Golongan-golongan yang sok-pro-rakyat dengan demonstrasi-demonstrasinya juga menjadi segan.

Menertibkan Dropping beras melalui Kartu Keluarga.

KEADAAN beras di Jakarta di waktu itu sangat pelik. Dalam hal ini berlaku peraturan Belanda dari tahun 1948 yang mengatur tentang Stamvergunning. Bagi Jakarta menurut Rijst Ordonantie tahun 1948, dapat ditunjuk orang-orang yang boleh membeli dan menyimpan padi, menggiling padi atau memutihkan beras serta menjualnya sampai jumlah 50 ton. Ini berarti bahwa orang-orang pemegang stamvergunning tersebut tidak boleh mempunyai beras lebih dari 50 ton untuk diolah sampai menjadi beras yang putih. Jika yang disimpannya itu padi, jumlahnya tidak boleh melebihi equivalent beras 50 ton. Karena Jakarta bukan produsen beras, pemegang stamvergunning ini yang dapat membeli, menyimpan, mengolah padi dan beras sampai bisa diterima oleh konsumen, menjadi sangat penting.

Stamvergunning inilah yang harus diteliti dan diawasi serta dihidupkan untuk menjamin agar Jakarta mendapat beras dalam negeri. Kalau beras dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan Jakarta, harga beras naik, dengan akibat bahwa Pemerintah harus mengadakan dropping untuk menekan harganya. Dropping beras inilah yang dibagikan dikantor-kantor, di koperasi-koperasi, di pasar-pasar dan di RT/RK dimana antrinya bisa mencapai sangat panjang.

Dengan demikian Pemerintah mencampuri perdagangan beras, bahan pokok utama bagi rakyat. Ini lebih jauh berarti bahwa di Jakarta tidak mungkin ada perdagangan beras bebas, selama produksi dan import beras belum mencukupi. Disinyalir, bahwa di waktu itu banyak beras yang lari dari Jakarta. Penjagaan ketat memang diadakan di Pasar Ikan dan jalan-jalan masuk dan keluar ke dan dari Jakarta. Tetapi penjagaan ini tidak mungkin sempurna, karena rakyat mempergunakan bermacam-macam jalan, bukan hanya jalan besar saja. Dengan diangkut sepeda, dipikul dan dengan cara-cara lain beras bisa lari dan datang ke Jakarta menurut keperluan.

Pembangunan jalan By Pass dengan dua jalur sepanjang jalan Gatot Subroto.

Menurut perhitungan, jumlah beras dropping yang ditentukan, kalau beras itu tetap berada di Jakarta, seharusnya dapat menekan harganya. Ternyata perhitungan ini selalu meleset. Bila harga beras di Jakarta tinggi, aliran beras seharusnya menuju ke Jakarta, mengapa disinyalir beras justru lari dari Jakarta? Pemerintah mengkonstatir, bahwa yang antri beras tidak dapat diawasi, jika cara pembagian beras dropping tidak disempurnakan. Berdasarkan pertimbangan tersebut Pemerintah mengadakan Kartu Keluarga, khusus untuk pembagian beras, gula dan bahan pokok lainnya, jika ada. Dengan ini tidak ada lagi orang yang memperoleh pembagian rangkap, pembagian dobel. Yang telah mendapat pembagian beras melalui kantor, tidak dapat lagi mengambil beras melalui koperasi atau RT/RK dan sebaliknya.

Kebijaksanaan ini ternyata dapat mengakhiri dan mencegah adanya manipulasi.

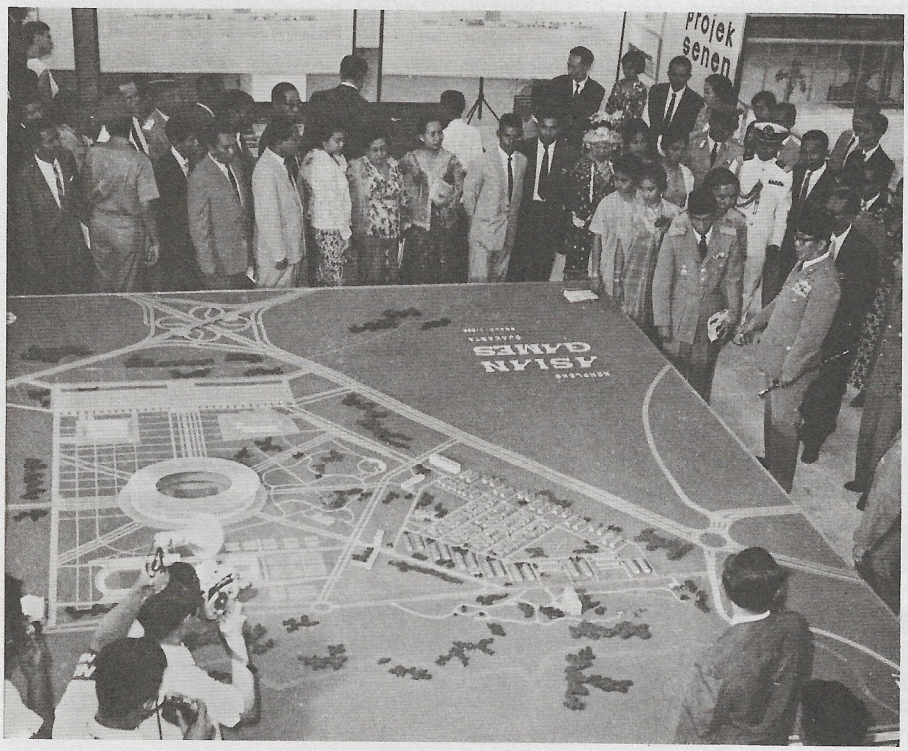

Gubernur DCI Soemarno mendampingi Presiden beserta rombongan mengadakan peninjauan pameran di Gedung Pola pada tahun 1962.

Tapi tidak berarti bahwa dengan demikian saja beras di Jakarta menjadi cukup harga beras menjadi stabil. Pemerintah Daerah bercita-cita untuk usahanya sendiri mengatur soal beras ini, tentu saja dengan bantuan Pemerintah Pusat. Malahan Pemerintah Daerah ingin berusaha agar bukan hanya beras saja yang diatur, tetapi juga bahan pokok lainnya. Soalnya karena pada setiap hari besar seperti Hari Raya Idul Fitri, atau hari besar lainnya, Jakarta selalu ribut dengan harga daging, gula, minyak goreng dan sebagainya, yang melonjak tanpa dapat dikendalikan.

Karena suksesnya Asian Games dalam bidang pengadaan pangan, Pemerintah Pusat akhirnya memberi izin kepada Jakarta untuk membentuk Perusahaan Daerah Kebutuhan Pokok Jakarta. Bukan memberi izin saja, tetapi bahkan telah mendorongnya dengan menyerahkan beras di Jakarta kepada Pemerintah Daerah. Pada bagian yang lain akan diuraikan lebih jauh mengenai Perusahaan Daerah Kebutuhan Pokok Jakarta tersebut.

Melalui gerakan kebersihan bersatu demi Peningkatan Kewaspadaan dan ketertiban.

SEPERTI dikatakan terdahulu diyakini bahwa kebakaran, banjir, sampah dan kesehatan rakyat merupakan satu kesatuan yang dapat ditanggulangi secara bersama-sama oleh rakyat melalui gerakan kebersihan yang terus-menerus. Berdasarkan pendapat bahwa keyakinanlah yang merupakan syarat utama untuk menjamin berlanjutnya sesuatu usaha, Team Asistensi Bencana Alam yang melatih dirinya secara berkala dan teratur turut memberi penerangan-penerangan di kampungnya, untuk menanamkan keyakinan tersebut. Bilamana rakyat tertib dalam kebersihan mereka, mudah untuk ditertibkan didalam pencegahan kebakaran dan banjir; mereka tidak sukar mengerti bahwa jika kampung terlalu padat mudah timbul bermacam-macam bahaya, bermacam-macam penyakit dan karena itu bersedia mengadakan pencegahan bahaya itu.

Pada waktu itu di kampung-kampung tiap tahun sekali atau dua kali diadakan perlombaan kebersihan antara RT/RK didalam satu kampung. RT/RK yang terbaik pada tingkat kampung bertanding dengan RT/RK terbaik dari kampung sekelurahan. Demikian terus keatas, sehingga dapat ditentukan siapa yang juara kebersihan sekota di Jakarta Raya. Lomba demikian dari tingkat bawah sampai ke atas mengambil waktu berminggu-minggu.

Lomba yang dimaksud diadakan oleh Panitya Kebersihan Nasional, dimana Gubernur Kepala Daerah DCI adalah Sekretaris Umum yang menjadi penggeraknya sehari-hari, sejak semula didirikannya Panitya Kebersihan Nasional pada tahun 1957.

Tiap tanggal 17 Agustus sesudah aubade murid sekolah pada sore hari, juga kebersihan Daerah Tingkat II dan juara "Kota Besar Paling Tidak Kotor" se Indonesia mendapat sambutan dari Presiden pribadi.

Jakarta, yang sekalipun belum pernah memegang "Juara Kota Yang Paling Tidak Kotor", telah mendapat manfaat dari gerakan ini. Ditambah lagi dengan adanya latihan-latihan berkala Team Asistensi Bencana Alam, maka gerak PREVENSI bencana di Jakarta menjadi terjamin. Kantor-kantor Pemerintahan termasuk Departemen-departemen ikut serta memberi contoh kepada rakyat. Disamping itu, ada loma kebersihan antar stasiun kereta api, antar stasion bus kota, antar pabrik, antar industri, antar restoran, antar toko-toko. Ibu-ibu kita pun membantu dalam gerak prevensi ini dengan turun ke jalan-jalan untuk menjadi juri pertandingan kebersihan ini.

Pemerintah Daerah Ibukota memberi contoh dalam gerakan kebersihan ini, dengan menyerahkan kotanya tiap-tiap pagi dalam keadaan yang bersih. Tahun 1960 untuk pertama kali karyawan pembersih jalan-jalan mulai bekerja pagi-pagi, jauh sebelum waktu subuh, supaya jalan yang menjadi tanggung-jawabnya sudah bersih sebelum karyawan lain dan anak-anak sekolah keluar rumah pergi ke kantor dan sekolah. Perlu dicatat bahwa acara ini membawa keuntungan tambahan bagi karyawan kebersihan, karena pada waktu siang tersisa waktu luang untuk menyambi pekerjaan lain.

Disamping itu, dengan bekerja pagi-pagi itu para karyawan kebersihan menjadi

Gubernur Soemarno memberikan amanatnya dalam upacara peresmian perumahan Slipi pada tahun 1963.

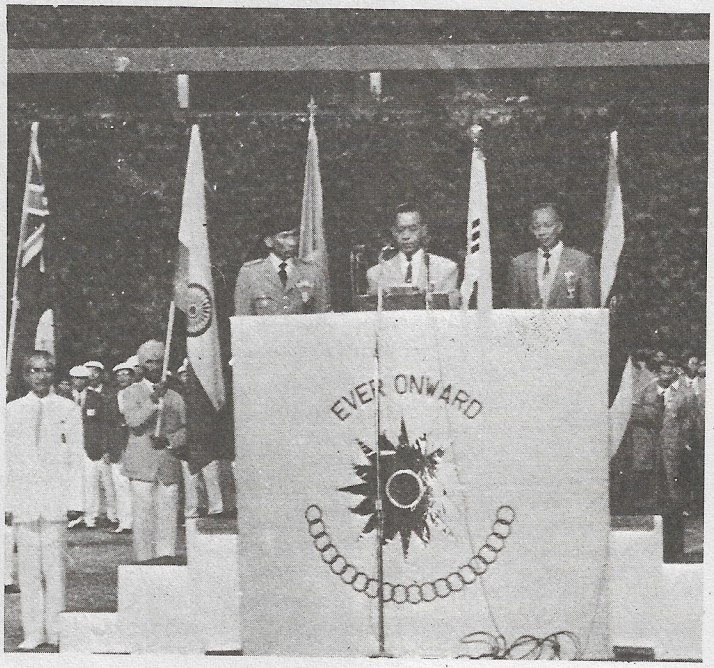

Presiden Sukarno didampingi Gubernur DCI Soemarno menyaksikan jalannya upacara pembukaan Pesta Olah Raga se-Asia di Istora Senayan pada tanggal 24 Agustus 1962.

lebih aman terhadap kesibukan lalu-lintas yang setiap hari bertambah ramainya. Tetapi keuntungan yang terbesar dengan cara kerja tersebut didapat oleh Pemerintah DCI sendiri, karena dengan penampilan Jakarta dalam keadaan yang bersih pada setiap pagi hari rakyat telah diberi contoh yang baik dalam hal kebersihan.

Sikap berlebihan merugikan Gerakan Kebersihan.

DALAM usaha kebersihan ini kita mudah berlaku berlebih-lebihan, yang malahan membawa akibat yang tidak diharapkan. Sebagai contoh, sebelum Pebruari 1960 pada setiap pagi hari, kira-kira jam delapan, pada waktu sibuk-sibuknya mobil membawa karyawan-karyawan ke kantor, dibunyikan sirene kebersihan. Pada saat demikian mobil-mobil harus berhenti, pengemudi dan semua yang ada di mobil harus turun, membersihkan bagian jalan disekeliling mobil. Seluruh lalu lintas tentunya terhenti, tidak hanya untuk 2 atau 3 menit, tetapi sampai belasan menit.

Satu, dua kali, sepuluh orang masih dapat menerimanya, tapi kalau hal ini berlangsung berminggu berturut-turut, orang menjadi bosan, disamping dapat dipastikan tentang besarnya kerugian dibidang ekonomi.

Tidak mengherankan kalau Pemerintah Daerah kemudian menghentikan cara kerja yang tidak masuk di akal ini dan sebagai gantinya ditetapkan keikut sertaan kantor-kantor dan industri dalam gerakan kebersihan.

Praktek lain yang berlebihan adalah kegotong royongan oleh karyawan dan karyawati kantor untuk membersihkan sampah di pasar-pasar. Ini jelas tidak adil, karena karyawan dan karyawati kantor bukanlah pembuat sampah di pasar. Oleh karena itu gotong royong membersihkan sampah di pasar setelah bulan Pebruari 1960 dihentikan, untuk kemudian diganti dengan gotong royong yang serupa oleh para pemilik toko dan penjual di pasar.

Yang juga dianggap berlebihan adalah gotong royong antar RT yang meliputi jumlah RT yang besar, karena cara ini mudah terasa sebagai suatu bentuk kerja rodi dan oleh karena itu kerjasama yang dimaksud kemudian dibatasi, hanya sampai pada 3 buah RT yang berbatasan saja.

Sementara itu soal sampah adalah soal yang pelik, yang banyak seginya dan tidak mudah dipecahkan. Dalam menertibkan sampah sehari-hari kami telah berhasil, tetapi dalam soal pembuangannya dialami kesukaran-kesukaran. Antara lain dapat disebut kegagalan untuk menyelesaikan pabrik kompos yang telah dibeli dari London, yang maksudnya akan mengolah sampah yang terkumpul menjadi pupuk.

Secara tiba-tiba Pemerintah Pusat mencabut kesediaannya untuk meneruskan pembiayaan pabrik kompos tersebut, sedang Pemerintah Daerah sendiri sedang dalam proses membenahi keuangannya yang telah lama berada dalam keadaan yang tidak semestinya. Juga perimbangan keuangan yang diperjuangkan bersama Pemerintah Daerah lainnya tidak membawa hasil, karena Pemerintah Pusat sendiri sedang kekurangan biaya. Selain dari itu, CTC yang semula mendorong DCI untuk membangun pabrik kompos tersebut dan menyanggupi penanganan management dan pemasaran hasilnya, ternyata tidak mampu meyakinkan bank akan manfaat ekonominya pada jangka panjang.

Pilot Proyek Pertokoan dan Neonisasi.

PANITYA Kebersihan Nasional Daerah Jakarta kemudian memperluas tugasnya dan menamakan dirinya "Panitya Kebersihan dan Keindahan Kota". Keberanian membentuk - panitya demikian terutama terdorong oleh inspirasi dari potensi kegotong royongan yang diperlihatkan oleh RT/RK. RT/RK ternyata mampu untuk membenahi kampungnya sendiri, untuk turut mengatur kebersihannya, untuk turut dalam prevensi bahaya kebakaran dan banjir dan untuk memasang lampu di jalan (neonisasi) dengan dana dan kegiatan yang dipupuk sendiri.

Kemudian dapat juga diciptakan kegotong royongan yang serupa dengan perusahaan-perusahaan. Air Mancur di Jalan Thamrin adalah hasil gotong royong antara perusahaan-perusahaan dengan Pemerintah. Air mancur pertama yang cantik ini di-

Acara penaikan bendera Asian Games menandakan akan dimulainya Pesta Olah Raga Se-Asia di Istora Senayan pada tanggal 24 Agustus 1962.

Gubernur DCI Soemarno mendampingi Sultan Hamengku Buwono IX pada saat memberikan sambutan dalam upacara pembukaan pesta Olah Raga se-Asia di Istora Senayan pada tanggal 24 Agustus 1962.

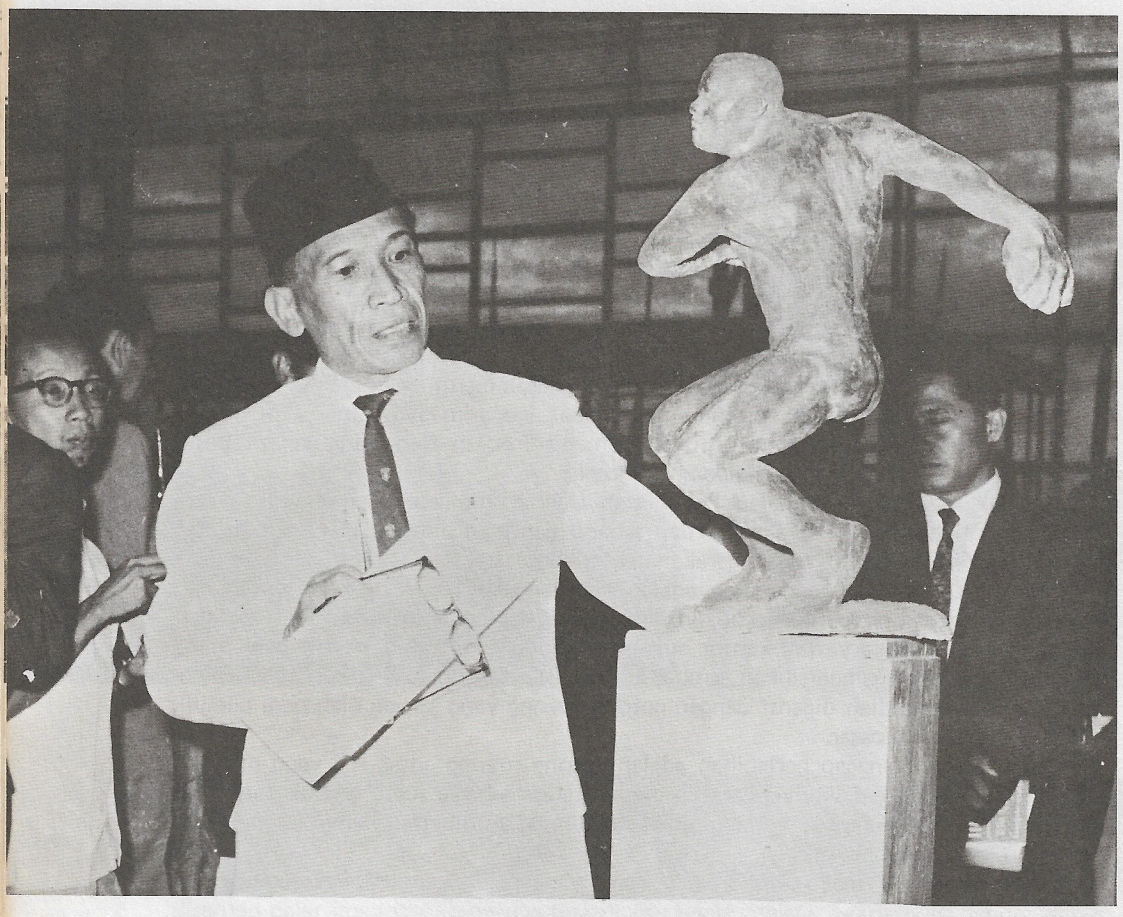

Gubernur Soemarno sedang menyaksikan sebuah patung yang dipamerkan di Jalan Jenderal Sudirman dalam rangka Pesta Olah Raga se-Asia pada tahun 1962.

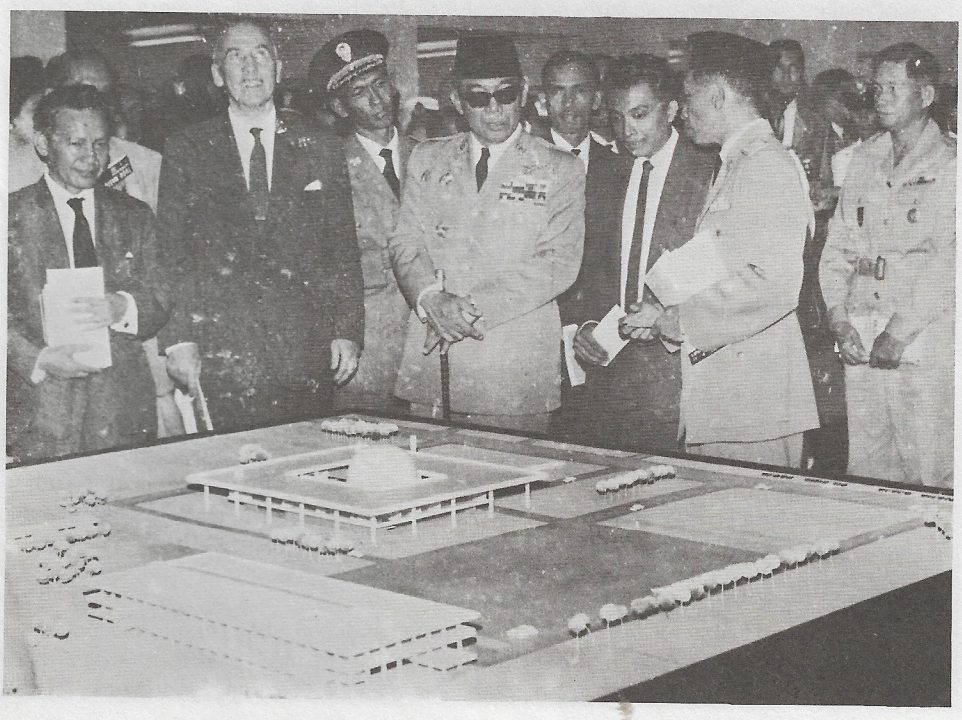

Gubernur DCI Soemarno mendampingi Presiden dan para undangan lainnya sedang menyaksikan maket Rencana Planetarium di bekas Taman Raden Saleh yang dipamerkan di Gedung Pola pada tanggal 16 Agustus 1963.

biayai oleh Bank Negara Indonesia.

Jika gerakan gotong royong di kampung dan perumahan dinamakan gotong-royong RT/RK seperti dalam hal neonisasi jalan-jalan, merawat dan membuat taman-taman untuk kecantikan kampung dan tempat bermain anak-anak, gerakan gotong royong dengan industri dan pertokoan dinamakan Pilot Proyek. Jadi Pilot Proyek adalah proyek gotong royong antar pemerintah dan pengusaha-pengusaha diwilayah pertokoan dan industri untuk kesejahteraan penghuni dan wilayah yang bersangkutan. Fasilitas, seperti pemberian izin membangun dan izin penggunaan tanah, serta planning disediakan oleh Pemerintah; pembiayaan dan pelaksanaan serta perawatan selanjutnya dikerjakan oleh penghuni sendiri, melalui Pilot Proyek lingkungan.

Semua politik kegotong-royongan ini tentu ada alasannya, sedang alasan ini berakar pada kenyataan yang ada pada administrasi Pemerintah Daerah DCI sendiri yang masih perlu disempurnakan. Karena itu Pemerintah DCI belum dapat memberanikan diri untuk mengumpulkan dana, mengelolanya, dan kemudian mengembalikannya lagi kepada rakyat dalam bentuk proyek dan jasa. Pemerintah DCI takut kalau-kalau uang dana akan berceceran waktu dikumpulkan dan berceceran pada waktu dikeluarkan untuk merealisasikan proyek dan jasa yang dimaksud.

Keragu-raguan ini antara lain timbul karena pengalaman DPU. Pembongkaran jalan oleh PLN atau Postel lekas selesai izinnya, jika uang jaminan dan uang "perbaikan jalan kembali karena pembongkaran", telah disetor pada DPU. Ternyata reparasi jalan yang diselenggarakan oleh DPU tidak seimbang dengan jumlah uang yang telah diterima dari PLN atau Postel. Perbaikan jalan karena pembongkaran yang tidak baik itu kemudian tidak dapat lagi dipertanggung-jawabkan kepada perusahaan yang bersangkutan.

Uang yang telah diterima DPU seolah-olah berceceran karena lemahnya administrasi, karena kurang kontrol atau entah karena apa lagi. Mungkin juga karena kurangnya tenaga-tenaga ahli di DPU.

Untuk mencegah merosotnya nama baik DPU, kemudian dikeluarkan perintah agar uang untuk perbaikan kembali jalan-jalan yang dibongkar tidak diterima oleh DPU. Sebagai gantinya adalah kontrak dengan syarat-syarat yang harus ditanda tangani oleh perusahaan yang bersangkutan tentang perbaikan kembali jalan-jalan sesudahnya dibongkar. Dalam hubungan ini tugas DPU hanya meneliti dan mengawasi apakah perbaikan itu dilaksanakan menurut kontrak atau tidak.

Cara demikian dipergunakan juga untuk Pilot Proyek dalam rangka memupuk tanggung jawab langsung dari mereka terhadap penggunaan dan perawatan selanjutnya.

Jalan Sabang, Jalan Mojopahit dan Pasar Baru merupakan Pilot-pilot Proyek Pertama. Lampu-lampu diperbaiki dan ditambah, trotoir direparasi/disempurnakan, tong-tong sampah yang cantik dipasang secara teratur, pot-pot kembang ditempatkan di muka toko, yang kesemuanya menjadikan toko-toko dalam lingkungan Pilot Proyek menjadi tambah menarik.

Lebih jauh, karena masing-masing toko bertanggung jawab atas kebersihannya, tidak saja didalam tokonya tapi sampai di trottoir dan di jalan dihadapannya, maka wilayah Pilot Proyek menjadi bersih dan tetap dalam keadaan bersih.

Cara memerintah dan membimbing rakyat demikian itu dapat saja dinamai cara memerintah yang terlalu sederhana, tetapi yang jelas cara tersebut cocok dengan kondisi pada waktu itu.

Gubuk Liar, Kampung Liar dan Kaki Lima.

KETIGA-TIGANYA sangat menekan dan merisaukan rakyat. Bukan rakyat yang yang berkepentingan saja yang gelisah, tak bisa tidur karena takut dibongkar, tetapi Pemerintah DCI sendiri juga tertekan karenanya. Khusus anggauta pemerintah yang harus melaksanakan pembongkaran, yang langsung berhadapan dengan rakyat yang berada dalam kesukaran, merasakan betapa beratnya tekanan bathin yang dialaminya.

Pernah soal liar ini menjadi perbincangan waktu kami berkunjung ke Eropa

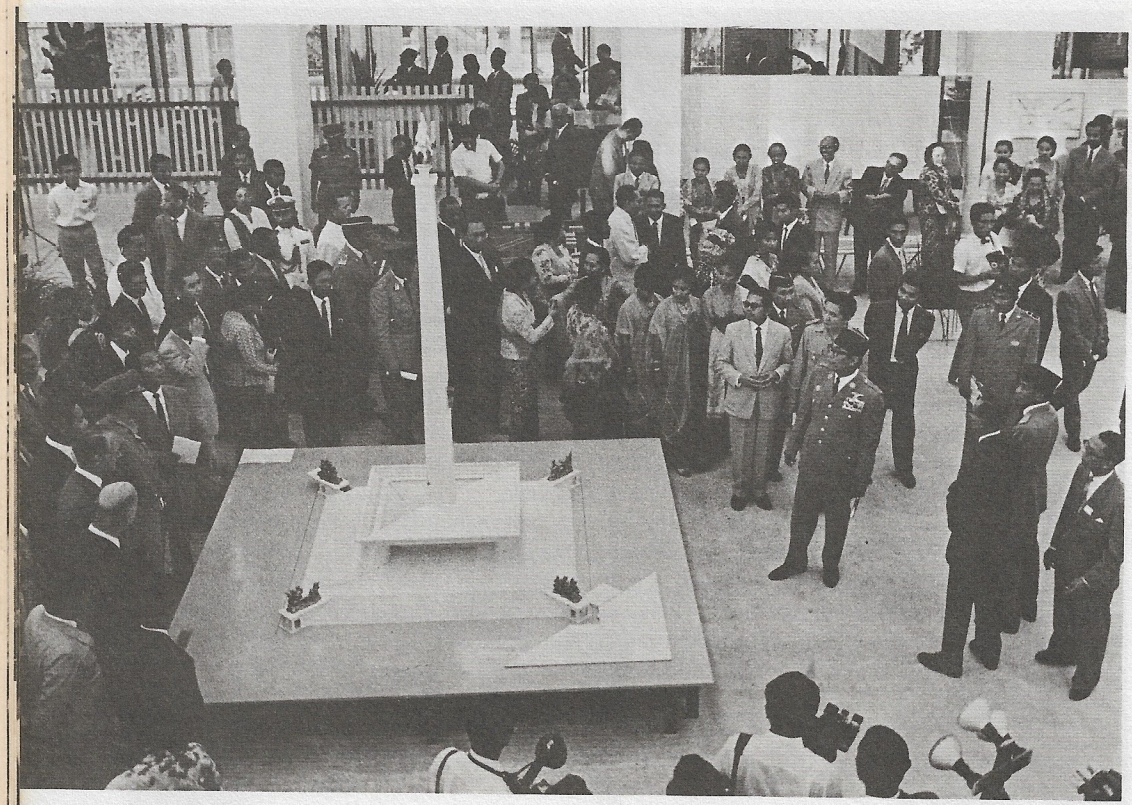

Presiden Sukarno beserta undangan mengamati maket Tugu Monumen Nasional yang dipamerkan di Gedung Pola pada tanggal 15 Agustus 1962.

Timur pada tahun 1961. Salah satu Negara yang sudah mapan, kelihatan tertib, ternyata juga mengeluh. Waktu kami mengatakan bahwa di Eropa tidak mungkin ada bangunan liar karena pemasukan penduduk ke sesuatu kota mudah dapat diawasi, sehingga kota-kota benar-benar dapat ditutup, karena adanya musim dingin.

Gubernur yang bersangkutan tidak membenarkan pendapat ini. Memang benar dalam musim dingin di Eropa tidak mungkin orang tidur hanya disebuah pohon atau dibawah jembatan, sambil secara santai mendengarkan transistornya seperti di Jakarta.

"O, itu tidak benar" sambutnya, "tidak benar kalau kita di Eropa tidak pernah dikacaukan oleh bangunan liar". Memang benar, bahwa adanya musim dingin mengurangi kemungkinan ini, tetapi bangunan liar itu ada. Dan bangunan liar ini selalu didirikan pada musim semi atau musim panas. Dan pembangunannya selalu dikerjakan pada malam hari. Biasanya mereka memulai pada Jum'at malam. Di Eropa Sabtu dan Minggu adalah hari istirahat bagi orang-orang Pemerintah, tetapi merupakan hari-hari yang sibuk bagi orang-orang yang tidak tertib, yang ingin punya tempat berteduh yang sangat mendesak bagi keluarganya.

Rumah liar demikian cepat-cepat dibangun sampai atap. Kalau bangunan sudah ada atapnya, bagi Pemerintah sukar sekali untuk membongkarnya. Pemerintah Daerah pun tidak mudah untuk membongkar bangunan yang sudah beratap, biarpun belum selesai, dengan tidak se-izin pemiliknya atau izin khusus instansi yang berwenang. Sebab didalam hal perselisihan tentang bangunan, kedudukan Pemerintah dan Rakyat sama tingginya.

Jadi rupa-rupanya diseluruh dunia ada persoalan rumah liar, seperti di Jakarta ini, menjadi persoalan yang lazim dari kehidupan modern di kota-kota. Apa boleh buat, kucing-kucingan terus saja terjadi antara Pemerintah dan Rakyat Pembangun Rumah Liar.

Jika gubuk liar dan kampung liar merupakan persoalan tempat berteduh untuk keluarga sehari-hari, kaki lima adalah soal usaha untuk mendapatkan nafkah hidup. Kaki-lima adalah soal ekonomi. Kalau gaji tidak cukup, kalau gaji tidak didapat karena menganggur, orang terpaksa mencari usaha lain untuk dapat hidup. Berdagang dagangan murah di kaki-lima adalah berdagang dengan tidak usaha membayar sewa yang tinggi untuk dapat berdagang. Dengan demikian berdagang di kaki-lima adalah cara yang paling mungkin, kalau perlu beberapa jam saja sehari, waktu malam, waktu sore, hanya secukupnya asal anak isteri bisa makan.

Kelihatannya soal kaki-lima soal yang mudah, setidaknya lebih mudah dari pada soal gubug liar dan kampung liar. Tapi nyatanya dia menyangkut soal ekonomi yang pokok. Soal makan atau tidak makan, soal mati atau hidup, soal kerja atau mencuri, merampok dan berkelahi. Dengan demikian lantas nampak kaitannya dengan soal keamanan politik dan kepentingan masyarakat luas. Soal kaki-lima memang bukan masalah pedagangnya yang bersangkutan saja!

Sehubungan dengan pemikiran tersebut, kebijaksanaan kami pada tahun enampuluhan adalah : "sediakan tempat, atau tunjukkan tempat kemana mereka harus pindah kalau diusir atau dibongkar".

Kebijaksanaan tersebut juga berkaitan dengan kenyataan bahwa kalau penyediaan/penunjukkan ini tidak dilakukan, yang bersangkutan hanya akan pindah ke tempat liar yang lain, yang menjadi persolan baru bari Perintah Daerah.

Pihak DPU mengatakan, kalau begitu ditempat yang baru perlu dipersiapkan planning yang baik. Ini memang perlu, tapi soalnya planning itu bisa cepat selesai atau tidak. Bagaimana kalau dua minggu lagi Tamu Agung akan datang lewat melalui tempat liar, hingga tempat tersebut harus cepat dibongkar. Bisakah planning selesai dalam dua minggu? "Tidak bisa", kata DPU.

Planning memerlukan penyelidikan yang cermat. Sudah adakah penyelidikan yang cermat? "Belum", jawab DPU. Adakah orang yang dapat mengerjakan planning? Juga belum ada. Apa yang harus kita perbuat? Ganti rugi diberi atau tidak? Ini soal lain, yang tidak kurang sukarnya. Ada anggaran belanja atau tidak dari Pusat?
Ada, tapi anggaran untuk penerimaan Tamu Agung. Ganti rugi bisa ditumpangkan pada anggaran tersebut.

Gubernur DCI Soemarno memberikan penjelasan kepada Presiden Sukarno beserta undangan tentang maket pembangunan jalan M.H. Thamrin pada tanggal 15 Agustus 1962.

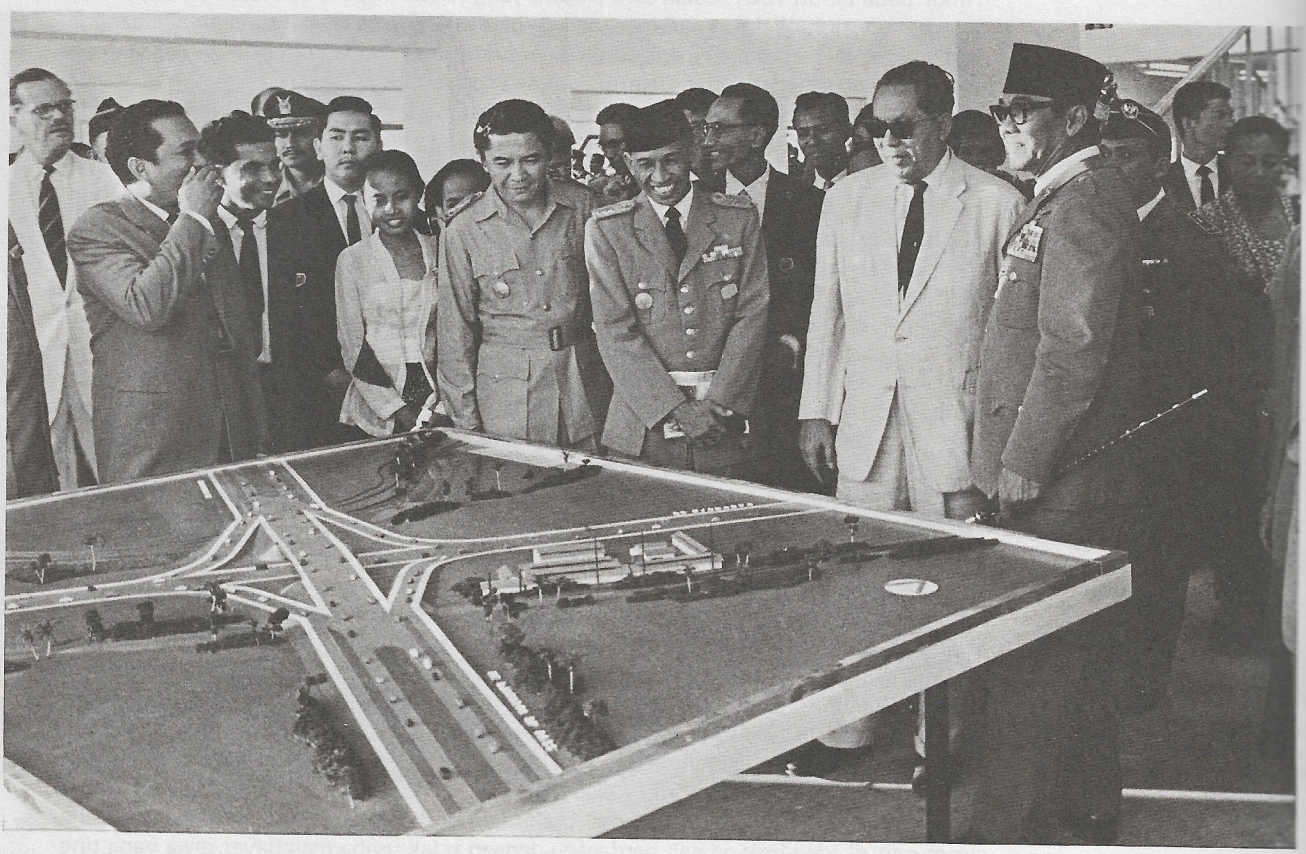

Gambar Rencana Wisma Nusantara yang dibubuhi tanda tangan persetujuan Presiden Sukarno.

Ini semua menyibukkan dan berat, tetapi penting untuk mereka yang harus dipindahkan. Kalau mereka mendapat ganti rugi, mereka tidak saja akan lebih cepat pindah, tetapi gubugnyapun dapat dibawanya pindah.

Sementara itu gubug itu, yang reot sekalipun mempunyai fungsi yang penting, tidak kalah pentingnya dari rumah batu yang paling bagus.

Inilah perdebatan yang timbul diantara para penguasa dan didalam hati masing-masing penguasa setiap kali harus mulai dengan gerak penertiban gubug-gubug liar, kampung-kampung liar dan kaki lima.

Kebijaksanaan kami yang mengkaitkan penerbertiban dengan penyediaan/penunjukkan tanah dan ganti rugi sesungguhnya bertentangan dengan apa yang sudah ditentukan oleh DPRD pada tahun 1957. Pada tahun yang dimaksud, DPRD menentukan bahwa pembongkaran gubug dan kampung liar sesudah tahun 1957 tidak perlu diberi ganti-rugi lagi.

Ketentuan yang dimaksud memang baik, tetapi sekarang fungsinya terutama adalah untuk menghadapi warga yang menuntut ganti rugi yang tidak masuk diakal.

Rumah Minimum.

KITA mengetahui bahwa persoalan perumahan yang sangat mendesak adalah perumahan di perkotaan. Di pedusunan semua orang dapat membuat tempat berteduh yang disebut rumah. Rumah ini bisa sederhana sekali dan tidak memerlukan izin yang berbelit-belit. Paling-paling diperlukan nasehat-nasehat bagi mereka yang membuat tempat berteduh; umpama cara bagaimana mengusahakan agar rumahnya sehat dengan menambah jendela-jendela, bagaimana membuat kakus yang dapat mencegah macam-macam penyakit percernaan.

Presiden Sukarno didampingi Gubernur DKI Soemarno dan Wakil Gubernur Henk Ngantung beserta undangan sedang mengamati maket Jembatan Semanggi yang sedang dipamerkan di Gedung Pola tanggal 15 Agustus 1962.

Di kota lain halnya. Pertama, tempat membangun rumah tidak dapat ditentukan seenak kita sendiri, bahan yang dipergunakan harus tidak mudah menimbulkan kebakaran dan macam-macam syarat lagi yang harus dipenuhi. Karena itu bagi Pemerintah adalah penting untuk menyatakan sikap, bagaimana memberikan nasehat kepada mereka yang berekonomi lemah dalam membuat rumah yang murah, tapi yang memenuhi syarat-syarat perkotaan.

Di kota Jakarta yang paling mahal adalah harga tanah. Oleh karena harga tanah yang paling mahal, Pemerintah Daerah menasehatkan, supaya dibuat rumah yang bertingkat, sehingga tanah yang sempit dapat memberikan tempat berteduh yang lebih luas.

Tentu yang bersangkutan akan menyatakan keberatannya, karena tidak biasa berumah dirumah bertingkat. Tetapi itu soal kebiasaan dan kebiasaan baru dapat diajarkan asal dengan cara yang bijaksana. Apalagi kalau tidak ada pilihan lain. Mana yang penting, punya tempat berteduh atau tidak, punya rumah bertingkat atau tidak punya rumah sama sekali, karena tanah sangat mahal.

Kalau tidak suka rumah bertingkat orang masih dapat pindah ke tempat yang jauh dari tempat kerja, dimana tanah murah harganya. Tetapi sukar bagi rakyat untuk berumah jauh dari tempat kerjanya. Apalagi jika harus meninggalkan kampung halaman yang telah berpuluh-puluh tahun dihuninya.

Berumah jauh dari tempat kerja bukan hanya rakyat saja tidak menguntungkan Bagi Pemerintahpun hal ini menjadi soal. Bagaimana memecahkan soal angkutan dari rumah ke kantor dan sebaliknya?

Karena itu pada Pemerintah Daerah lalu timbul idee Rumah Minimum. Rumah Minimum adalah rumah yang mempunyai tanah $100M^2$. Diatasnya dibangun rumah yang besarnya 90 meter persegi, tapi terdiri dari dua lantai, lantai pertama dan lantai kedua diatasnya, sehingga ada 75 meter persegi sisa untuk taman dan halaman dan yang kemudian, kalau sudah ada kesempatan, dapat dipakai untuk menambah luas rumahnya.

Rumah Minimum adalah rumah sementara bertingkat yang dibangun menurut syarat-syarat dari Pemerintah dan yang kemudian dapat tumbuh menjadi besar. Rumah ini sederhana saja, dari kayupun boleh, tapi dengan tujuan agar lambat-laun kayu

Presiden Sukarno sedang membuka kain selubung Prasasti dalam upacara Peresmian Hotel Indonesia pada tanggal 5 Agustus 1962.

itu diganti dengan batu, menurut kemampuan kantong masing-masing pemilik. Yang penting dalam hal ini adalah menentukan lokasi kampungnya yang tidak boleh berjauhan dari wilayah kerja. Untuk ini pada tiap wilayah pertokoan, perkantoran dan perusahaan hendaknya disediakan tanah buat perkampungan tenaga yang bekerja di wilayah itu.

Dengan dilandasi oleh idee demikian ini, Pemerintah Daerah mulai dengan menertibkan kampung-kampung yang baru ditimpa bencana kebakaran. Disanalah dibuat rumah-rumah minimum yang pertama, umpamanya di Raden Saleh, di Karang Anyar, di Tanah Sereal, di Tanjung Priok, di Bandengan Selatan dan sebagainya.

Pemerintah bersama-sama dengan perusahaan membangun rumah untuk buruh yang dianggap penting oleh perusahaannya. Pemerintah menyediakan tanah yang harganya diperhitungkan sepatut mungkin dan dengan uang yang diperoleh dari perusahaan yang bersangkutan dibangun rumah minimum. Dengan cara kolektif demikian, Pemerintah sempat membangun beberapa ratus rumah minimum dan membeli tanah di Cempaka Putih untuk kepentingan pembangunan perumahan dikemudian hari.

Kemudian untuk Cempaka Putih dikembangkan Proyek Otorita yang bertindak atas nama Pemerintah Daerah dan melaksanakan kebijaksanaan pembangunan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Surat Izin Penghuni/S.I.P.

PADA tahun enam puluhan kegiatan membangun rumah memang lesu sekali. Ini disebabkan terutama karena pada waktu itu berlaku peraturan, bahwa semua rumah yang dibangun harus dilaporkan kepada kantor Perumahan dan penghuninya kemudian diwajibkan mempunyai SIP (Surat Izin Penghuni).

Ketentuan ini juga berlaku bagi pemilik kalau dia ingin menghuni rumahnya sendiri. Siapa yang mau membangun rumah, jika dia belum tentu dapat izin untuk menghuninya? Oleh karena itu orang lebih baik membeli SIP saja, sehingga jual beli SIP pada waktu itu merajalela dan Pemerintah tidak dapat menertibkannya.

Kantor Urusan Perumahan pada waktu itu sepenuhnya berada di bawah Penguasa Perang Daerah.

Karena kelesuan pembangunan perumahan ada hubungannya dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Kantor Perumahan, sesudah diadakan perundingan-perundingan, Panglima menyerahkan Urusan Kantor Perumahan kepada Gubernur Kepala Daerah, dimana untuk sementara Gubernur Kepala Daerah bertindak atas nama Panglima.

Sejak itu membangun rumah dibebaskan dari keharusan meminta SIP untuk menghuninya. Dengan ditertibkannya DPU dalam hal pemberian izin pembangunan rumah, izin-izin pun lekas diselesaikan dan mulailah nampak peningkatan pembangunan perumahan di Jakarta.

Lain daripada itu ditentukan, bahwa Kantor Perumahan tidak lagi dibenarkan mengeluarkan SIP baru, sehingga jumlah rumah yang berada dibawah tanggung jawabnya tidak bertambah. Kantor Urusan Pembangunan sejak itu mendapat tugas untuk membebaskan semua rumah dari SIP jika yang menghuni adalah pemiliknya. Dengan lain perkataan, rumah yang karena keadaan perang sejak 1941 dipinjam dari rakyat atau dari pihak swasta, dimaksud oleh Pemerintah untuk dikembalikan secara berangsur-angsur kepada pemiliknya, dimulai dengan rumah yang dihuni oleh pemiliknya sendiri. Sekarang rumah macam ini tidak memerlukan SIP lagi.

Kelurahan dari rakyat tentang administrasi perumahan begitu banyak, sehingga Pemerintah Daerah bercita-cita untuk mengakhiri praktek meminjam rumah rakyat ini. Rumah-rumah rakyat yang dipinjam karena keadaan perang tahun 1941, ditambah lagi dengan yang dipinjam pada waktu Jepang berkuasa di Indonesia, kemudian ditambah dengan rumah-rumah yang dipinjam pada periode berkuasanya kembali Belanda di Indonesia cq Jakarta dan akhirnya ditambah dengan yang dipinjam oleh Pemerintah Indonesia sudah waktunya untuk dikembalikan.

Pada tahun enam puluhan, ternyata sudah banyak rumah yang dipergunakan oleh orang-orang yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan Pemerintah. Mereka

[illegible] Bhinneka Tunggal Ika [illegible] pembukaan Hotel In[illegible] tanggal 5 Agustus 1962.

Tugu Selamat Datang yang menjulang di bunderan Hotel Indonesia pada waktu peresmiannya.

bukan pegawai. Malahan banyak rumah yang disewakan lagi oleh pemegang SIP-nya kepada orang lain dengan sewa berlipat ganda daripada yang dibayar menurut administrasi perumahan kepada pemilik yang berhak. Ini tidak adil dan Pemerintah berkewajiban untuk menertibkannya.

Akibat lain yang mengandung bahaya adalah anggapan si pemegang SIP, bahwa SIP itu seolah-olah abadi, turun-temurun, dapat diwariskan, sehingga tidak ada gairah pada kepala keluarga pemilik SIP yang bersangkutan untuk mencoba berusaha memiliki rumah sendiri.

Penertiban SIP.

PEMERINTAH Daerah sadar bahwa usaha untuk penertiban ini berat, malahan akan mengambil waktu yang sangat lama. Tapi yang penting dalam hal ini adalah pengakuan Pemerintah bahwa Pemerintahlah yang bertanggung jawab kepada pemilik rumah, sehingga seharusnya tidak perlu ada konflik antara pemilik dengan pemegang SIP. Sejalan dengan itu Pemerintah-pun mengerti, bahwa pada suatu ketika Pemerintah seharusnya mengakhiri peminjaman rumah ini dan Pemerintah lagi yang harus memecahkan persoalan yang timbul tentang rumah SIP yang ditempati oleh Pegawai Pemerintah. Pegawai Pemerintah yang menempati rumah dengan SIP dan orang-orang yang tidak mampu adalah yang pertama-tama perlu mendapat perhatian.

Di dalam rapat-rapat tentang perumahan dibicarakan tentang kesukaran-kesukaran tersebut. Pemerintah mengetahui bahwa banyak rumah SIP yang tidak lagi dipergunakan sebagai rumah-tinggal, tapi telah berobah fungsi menjadi tempat berusaha. Hal ini terutama terjadi pada rumah-rumah yang berada di tempat perdagangan seperti di Jalan Mojopahit, Jalan Gajah Mada dan Jalan Mangga Besar di wilayah Kota. Rumah-rumah ini telah berubah fungsi melalui tindakan pemegang SIP-nya yang menyewakannya sebagai tempat usaha atau Kantor Dagang dengan sewa yang beribu kali lebih besar dari jumlah yang diterima pemilik rumah.

Rumah-rumah pinjaman inilah yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Pemerintah dalam hal ini dapat meminta jasa dari pemegang SIP dan dari pemilik, untuk kepentingan pengembalian rumah kepada pemiliknya serta mengakhiri sengketa-sengketa yang ada. Pemegang SIP pada umumnya sudah belasan tahun, malahan puluhan tahun menikmati hasil sewa yang tinggi itu, sedangkan pemilik rugi dan terus merasa dirugikan entah oleh Pemerintah, entah oleh pemegang SIP. Tetapi nampaknya lebih banyak orang yang menyalahkan sikap Pemerintah.

Dengan kebijaksanaan yang didasari pengakuan bahwa mengenai persoalan SIP Pemerintahlah yang bertanggung jawab, maka Pemerintah Daerah berharap untuk mengurangi penderitaan masyarakat yang disebabkan oleh soal SIP. Kebijaksanaan tersebut juga dimaksud untuk menyadarkan penduduk yang berkepentingan bahwa SIP itu tidak abadi dan tidak dapat diwariskan, bahwa Pemerintah menganggap penting untuk pada suatu ketika mengembalikan semua rumah yang dipinjam berdasarkan alasan perang dan keamanan.

Dalam hubungan ini kebijaksanaan tentang SIP bagi rumah yang baru dibangun seperti yang telah dikemukakan diatas diharapkan dapat menambah gairah penduduk yang mampu untuk membangun rumahnya sendiri. Perumahan adalah tujuan penting bagi setiap keluarga, disamping sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan. Perlu disadari pula bahwa persoalan rumah di Jakarta adalah persoalan tanah dan harga tanah.

Karena itu Pemerintah Daerah pada tahun 60-an lalu menginstruksikan untuk membentuk Perusahaan Tanah dan Bangunan untuk membantu memecahkan persoalan VIP atau BV itu. Dengan menyediakan tanah Perusahaan yang didirikan itu diharapkan dapat membangun perumahan sederhana bagi para bekas pemegang SIP yang tidak mampu dan para pegawai Pemerintah.

Disamping itu Perusahaan baru tadi berkewajiban melanjutkan pengelolaan rumah milik Pemerintah Daerah.

Modal pertama diharapkan selainnya dari Pemerintah, dapat dikumpulkan dari hasil jasa Pemerintah dalam penertiban SIP sebagai diuraikan diatas dan dari hasil pengelolaan rumah-rumah milik Pemerintah.

Gubernur Soemarno beserta seniman [illegible] Soemarno sedang mengagumi Tugu "Selamat Datang".

Melalui Perusahaan baru ini Pemerintah mengharapkan juga dapat mengendalikan membubungnya harga tanah di Jakarta.

Alokasi Kaveling.

SOAL perumahan di kota adalah terutama soal tanah dan soal bentuk dan dari bahan apa rumah dibangun. Disamping itu, lokasi kampung tempat rumah akan dibangun juga sangat penting, apalagi jika Pemerintah ingin menempatkan kampung-kampung ini tidak terlalu jauh dari tempat kerja penghuninya. Bukan kantor-kantor, perusahaan-perusahaan, pusat-pusat perdagangan dan tempat-tempat rekreasi saja yang memerlukan karyawan, juga daerah-daerah villa memerlukannya. Tiap villa memerlukan sedikitnya dua orang: seorang koki, seorang pembantu rumah tangga dan banyak pula yang malahan memerlukan pengemudi, disamping dua orang tersebut. Bayangkan jika semua tenaga ini harus berumah jauh dari tempat kerjanya. Angkutan akan menyesakkan jalan-jalan kota dan mungkin malah memacetkannya. Ini adalah salah satu akibatnya yang tidak baik.

Kalau saja Pemerintah Daerah menjadi pemilik tanah terbesar didaerahnya, dia akan mampu menentukan harga tanah di kota. Spekulasi harga tanah dengan demikian tidak akan mudah terjadi. Tetapi yang lebih penting lagi adalah, bahwa penguasaan tanah oleh Pemerintah akan sangat melancarkan kegiatan-kegiatan pembangunan.

Dalam hal ini Pemerintah Daerah pada tahun enam puluhan berada dalam posisi yang baik. Berhubung dengan pembangunan Asian Games, diperlukan jalan-jalan baru, Jakarta By Pass, Jalan Gatot Subroto, Jalan Slipi. Lain daripada itu Jalan Thamrin dan Jalan Sudirman perlu dilebarkan. Semua ini berakibat pembebasan tanah atau penguasaan tanah beberapa puluh meter pada kiri dan kanan jalan, agar jalur jalan-jalan tadi jangan ditempati oleh bangunan liar. Hal ini berlaku terutama bagi jalur-jalur kiri dan kanan sepanjang Jalan Slipi, Jalan Gatot Subroto dan Jalan Jakarta By Pass.

Karena biaya pembebasan dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Departemen-departemen yang bersangkutan merasa berhak memilikinya.

Alokasi-alokasi disiapkan, yang menentukan kepada siapa kaveling-kaveling tali akan dipertanggung jawabkan atau diberikan. Pemerintah Daerah mempunyai pengalaman yang kurang baik tentang alokasi demikian itu.

Kaveling di alokasikan kepada beberapa perusahaan milik golongan dengan ketentuan bahwa kaveling tersebut harus dibangun dalam waktu 3 sampai enam bulan. Alokasi demikian diberikan dengan pembayaran yang murah sekali, dengan maksud agar pembangunan gedung-gedung dijalur Jalan Thamrin lekas terlaksana. Demikian kebijaksanaan Pemerintah Daerah pada tahun lima puluhan.

Sudah beberapa kali batas waktu membangun diperpanjang, tetapi yang bersangkutan belum juga mampu mengusahakan pembangunannya. Apalagi setelah jalur kiri kanan Jalan Thamrin kemudian ditentukan pembangunannya sedikitnya harus lima tingkat. Pada Jalan Thamrin tadi Pemerintah Pusat hanya mampu membangun beberapa villa dua tingkat, yang kerapkali merupakan duri dimata Presiden. "Seharusnya tingkat lima. mengapa hanya tingkat dua", demikian tegurnya kerapkali.

Berhubung dengan pengalaman-pengalaman tadi lekas-lekas DPU menentukan gedung apa dan berapa besarnya bangunan yang boleh didirikan pada Jalan Jakarta By Pass, Jalan Slipi dan Jalan Gatot Subroto. Biarpun penggunaan tanah telah ditentukan masih ada kebimbangan pada Pemerintah Daerah, mengenai sikap yang akan diambil apabila tanah yang tidak lekas dibangun lalu ditempati oleh bangunan liar. Sedemikian luas areal yang harus dijaga, sehingga Pemerintah Daerah praktis tidak mampu melaksanakan pengamanannya.

Waktu pertimbangan tadi diajukan, Pemerintah Pusat tidak berkeberatan kalau tanah disepanjang Jalan Slipi diatur langsung oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah berdasarkan kebijaksanaan ini kemudian membangun rumah-rumah villa yang dipesan oleh beberapa bank bersama-sama.

Berpuluh-puluh villa dibangun oleh P.T. Pembangunan Ibukota Jakarta Raya (P.T. Jaya) yang 60% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Dengan demikian di Jakarta ada tambahan 145 villa lagi, disamping rumah-rumah minimum di Cempaka

Putih, Tanjung Priok dan di banyak tempat bekas kebakaran sejumlah 254 buah dengan luas 13.166 m^2.

MENGUASAI TANAH MENCEGAH SPEKULASI.

Pembebasan dan Penguasaan Tanah di Pluit dan Ancol.

DISAMPING jalur-jalur tanah dikiri dan kanan jalan baru, Jakarta dapat tugas dari Pemerintah Pusat untuk memulai dengan proyek banjir Pluit. Disekeliling danau buatan Pluit yang luasnya kira-kira 100 hektar, ditertibkan 450 hektar lagi. Penertiban disini berarti pembebasan tanah dari penduduk dan memindahkan penduduk yang bersangkutan ke tempat-tempat lain yang ditentukan sebelumnya. Di tempat-tempat yang baru dibebaskan, secepatnya disusun rencana penggunaan tanah agar pembangunannya bisa lebih teratur dari sebelumnya.

Jika Pluit dibangun karena banjir, maka Ancol dibebaskan dari rakyat karena sebab lain. Pemerintah Daerah dapat meyakinkan Presiden, bahwa Ancol adalah satu-satunya tempat yang baik dimana rakyat Jakarta dapat menikmati laut dan teluk Jakarta yang indah. Cilincing yang pada waktu itu dipakai oleh rakyat sebagai tempat rekreasi letaknya terlalu jauh. Akan sangat baik kiranya kalau Pemerintah Daerah memiliki Ancol untuk diperkembangkan menjadi tempat rekreasi rakyat dan kemudian perumahan dan pembangunan industri-industri. Karena lokasinya dekat pelabuhan, perumahan-perumahan buruh pelabuhan-lah yang menjadi sasaran utama.

Gambar yang sangat menarik dari boulevard, hotel-hotel serta tempat rekreasi yang dicita-citakan ditepi pantai Ancol, yang dibuat oleh Ir. Santoso dari Departemen P.U.T.L. turut mempunyai peranan dalam penentuan Presiden. Tidak lama sesudah Presiden melihatnya, Pemerintah Daerah dapat menyerahkan Ancol kepada Otorita Proyek Ancol untuk melaksanakan pengisian daerah tersebut dengan pasir dari laut untuk pembangunannya. Dana yang diperlukan dari Bank Dagang Negara sebagai pinjaman yang akan dibayar dari hasil pengelolaan tanah di Ancol.

Pembebasan tanah di Ancol dan Pluit, seperti halnya pembebasan tanah untuk Asian Games dapat mudah dilaksanakan karena keadaan perang, sehingga peraturan-peraturan yang dikeluarkan dapat di dasarkan pada Peraturan Keadaan Perang. Inilah antara lain pemanfaatan keadaan perang untuk pembangunan yang pada akhirnya akan menguntungkan seluruh rakyat. Harapan agar Ancol dapat diciptakan sebagai Taman Impian memang telah menjadi kenyataan dibawah pimpinan Pemerintah sesudah tahun 1966. Tidak diduga bahwa secepat itu Taman Impian Ancol dapat direalisasikan. Kebanggaan lain bagi Jakarta Raya dalam hal ini adalah peranan penting P.T. Jaya yang bekerja dibawah bimbingan Pemerintah Daerah.

Memang demikianlah gambaran yang ada pada Pemerintah Daerah pada waktu pembentukan P.T. Pembangunan Jaya mengenai fungsi dari PT. tersebut. Pada waktu itu keadaan DPU dengan hanya beberapa belas Insinyur lemah sekali, sehingga pembangunan fisik sebagai Kota Internasional, Ibukota, maupun Kota Metropolitan, Pemerintah Daerah menyerahkannya pada P.T. Jaya, sedangkan pengarahan pembangunan fisik itu sendiri menjadi tanggung jawab DPU. Karena itu pembangunan besar pertama yang dicita-citakan oleh Pemerintah Daerah pada tahun enam puluhan, Proyek Senen, diserahkan kepada P.T. Jaya, hingga DPU dengan demikian dapat bebas menyelesaikan Master Plan untuk Jakarta serta melaksanakan tugas pengawasan dan tugas pembangunan fisik yang langsung berhubungan dengan pembangunan spirituil dan sosial.

Cempaka Putih.

PEMERINTAH pada tahun enam puluhan ingin mengurangi tekanan dan kerisauan penduduk dalam bidang perumahan dengan cara mendorong penduduk membangun rumahnya sendiri, bersama-sama dengan Pemerintah. Dalam hal ini Pemerintah menyediakan dan memberi fasilitas-fasilitas dalam bentuk cepatnya keluar izin bangunan dari DPU dan dengan penertiban Kantor Urusan Perumahan dengan memberikan kebijaksanaan baru ialah: pertama, mendengar pemilik rumah sebelum mengeluarkan SIP untuk rumah-rumah yang masih dikuasai; kedua. tidak menambah rumah lagi

Gubernur Soemarno sedang mencoba sebuah kendaraan angkutan umum baru pada tahun 1962.

untuk dikuasai atau di-SIP-kan; ketiga, berangsur-angsur membebaskan penguasaan (atau tidak men-SIP-kan lagi) rumah-rumah yang kini sudah ditempati sendiri oleh pemiliknya; keempat, berdasarkan pertimbangan memberi dorongan kepada swasta, terutama golongan yang berpotensi membangun perumahan, tidak mengeluarkan SIP-SIP lagi kepada pihak swasta, apalagi jika ada kesediaan pada yang bersangkutan untuk memberikan dana pembangunan perumahan D.C.I.; kelima, mengadakan penelitian dan penertiban dalam penggunaan rumah-rumah yang ber-SIP, yang dikeluarkan sebelum 1 Mei 1963, dengan memperbaharui SIP-SIP itu; keenam, menentukan jalan-jalan Diponegoro, Imam Bonjol dan Teuku Umar sebagai komplkes perumahan pejabat-pejabat penting; dan ketujuh, tindakan pengosongan hanya dapat dilaksanakan apabila telah dapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah pribadi.

Selain mendorong penduduk untuk membangun rumahnya masing-masing, Pemerintah bercita-cita dalam jangka panjang untuk membangun kompleks-kompleks perumahan rakyat bertingkat. Biarpun dengan rumah bertingkat tanah yang diperlukan tidak begitu luas, kompleks ini terdiri dari semacam flat yang berhalaman luas untuk tempat rekreasi dan bermain anak-anak dalam bentuk yang indah. Untuk memungkinkan terlaksanakannya cita-cita ini Pemerintah harus menguasai sebanyak mungkin tanah untuk dapat mencegah adanya spekulasi harga. Karena pertimbangan inilah antara lain Pemerintah mempersiapkan Pulo Mas. Lain daripada itu diperlukan bahan bangunan yang cocok untuk kondisi tanah di Jakarta. Untuk itu Pemerintah antara lain bekerja sama dengan Pemerintah Polandia, dalam membangun pabrik Light Weight Concrete, bahan bangunan untuk perumahan yang sangat ringan. Kegiatan-kegiatan preliminer telah dimulai bersama-sama dengan Pemerintah Jawa Barat, yang memiliki bahan bakunya, berupa tanah yang cocok untuk Light Weight Concrete tersebut.

Sementara semua sarana ini dipersiapkan, Pemerintah memersilahkan penduduk memulai dengan membangun rumahnya masing-masing di tanah yang ditunjuk oleh Pemerintah. Cempaka Putih dan sebagian tanah tanah bekas kebakaran disediakan untuk itu.

Dalam hal ini Pemerintah memberi contoh dengan membangun rumah minimum-nya. Rencana telah dipersiapkan oleh Otorita Cempaka Putih, yang mengatur penggunaan tanah proyek menurut perumusan yang telah disusun dalam rangka land-form bagi tanah perkotaan, dengan pengertian bahwa di tiap perkotaan ada tanah un-

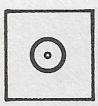
KETAHANAN NASIONAL / KEWASPADAAN

PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN

PENGANGKUTAN ORANG LUKA/SAKIT DENGAN TANDU.

AMBULANS

ADMINISTRASI

DAPUR UMUM/PERGUDANGAN/PERLENGKAPAN

RUMAH SAKIT DARURAT

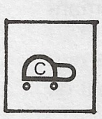
KONVOI UNTUK EVAKUASI PENDUDUK

PERKEMAHAN DARURAT UNTUK EVAKUASI

TUGAS2 ZENI / CARI AIR dsb.

PEMADAM KEBAKARAN DAN PREVENSI

KEBERSIHAN DAN PREVENSI KESEHATAN

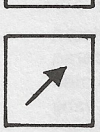
PENGAMANAN/PENGETAHUAN SENJATA RINGAN

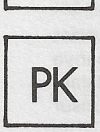

PERAWATAN KELUARGA/DARURAT

Buku ini yang diterbitkan dalam rangka 450 tahun kota Jakarta, hanya dapat terlaksana berkat bantuan serta kerjasama warga Jakarta serta lembaga-lembaga swasta dan pemerintah yang di sini tak dapat kami sebutkan satu persatu.

Kepada mereka semualah kami ucapkan terima kasih sebesar besarnya, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi Jakarta Ibukota kita.

Panitya Penyusun

KEPUSTAKAAN

R. Mohammad ALI dan F. Bodmer — DJAKARTA DJAJA SEPANJANG MASA
Pemerintah DCI DJAKARTA, Juni 1969, 158 hal.

DJAKARTA RAJA. Keadaan dan pertumbuhannya.
Pendahuluan oleh Walikota Sjamsuridjal.
Jakarta 1 Januari 1953, 144 hal.

DJAKARTA RAJA. Pedoman Kota.
Pengantar oleh Soetedjo Dirdjosoebroto
Djawatan Penerangan Kotapradja Djakarta Raja, Pebruari 1954, 94 hal.

DJAKARTA RAJA 429 Tahun.
Pengantar oleh Prof. Dr. R. Hendarmin
Yayasan Tourisme Indonesia, Jakarta 1956, 32 hal.

DJAKARTA DEWASA INI
Pengantar oleg Soejono
Djawatan Penerangan Kotapradja Djakarta Raja, 1957, 294 hal.

DJAJA, Mingguan.
P.T. Pembangunan Ibukota Djakarta Raja (seksi Publikasi), Jakarta, 1962–1965

HARJATI dan Gajus Siagian — DJAKARTA GUIDE.
Pengantar oleh Sri Budojo.
P.T. Gunung Agung, Jakarta 1962, 105 hal.

H.J. HEEREN — URBANISASI DJAKARTA.
dalam EKONOMI DAN KEUANGAN INDONESIA VIII 1955, hal 698–736.

INDONESIA — PEMBANGUNAN KOTA BARU KEBAYORAN.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga Republik Indonesia, Jakarta 1953.

ISMAEL Hassan dan Soedjono, Penyusun — DJAKARTA DEWASA INI. Bertamasya ke Ibukota.
Pengantar oleh Soetedjo Dirdjosoebroto,
Djawatan Penerangan Kotapradja Djakarta Raja, 1955, 424 hal.

ISMAIL Hassan, Ketua Dewan Redaksi Penyusun — REPUBLIK INDONESIA. KOTAPRADJA DJAKARTA RAJA.
Kementerian Penerangan Republik Indonesia.
Jakarta 1953, 568 hal.

KOTAPRADJA MADJALAH
Terbit tiap-tiap tanggal 15 dan 30
Djawatan Penerangan Kotapradja Djakarta Raja, Tahun 1950-1953

Mimien SALEH, Penghimpun — PERINGATAN 429 TAHUN KOTA DJAKARTA.
Djawatan Penerangan Kotapradja Djakarta Raja, Jakarta 1956, 123 hal.

SAPTAKALA dalam Pemerintahan Djakarta Raja
Kementerian Penerangan Republik Indonesia, Jakarta 1958, 31 hal.

Dr. SOEKANTO — DARI DJAKARTA KE DJAJAKARTA. Sejarah Ibukota kita.
C.V. Soeroengan, Jakarta 1954, 144 hal.

dr. SOEMARNO — PERENTJANAAN KOTA DAN PEMBANGUNAN DJAKARTA RAJA
Masalah Bangunan 8 (1) 1962, hal. 10-14.

SEJARAH PERJUANGAN RAKYAT Jakarta, Tangerang dan Bekasi dalam Menegakkan Kemerdekaan Republik Indonesia.
Pengantar oleh Soekotjo R.S.
Dinas Sejarah Militer Kodam V/Jaya dan
P.T. Virgosari, Jakarta 27 Maret 1975, 192 hal.

Abdurrachman SURJOMIHARDJO, Penyusun — BEBERAPA SEGI SEJARAH MASYARAKAT BUDAYA JAKARTA
Dinas Museum dan Sejarah DKI Jakarta, 1973, 144 hal.

Abdurrachman SURJOMIHARDJO — PEMEKARAN KOTA JAKARTA
Djambatan, Jakarta, Juni 1977, 82 hal.